



Katalog: 1202059

Laporan Kinerja

BADAN PUSAT STATISTIK

2025

Volume 16, 2026



BADAN PUSAT STATISTIK



Laporan Kinerja

BADAN PUSAT STATISTIK

2025

Volume 16, 2026

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik 2025

Volume 16, 2026

Katalog: 1202059

Nomor Publikasi: 02100.26001

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xxx+266 halaman

Penyusun Naskah:

Biro Perencanaan

Penyunting:

Biro Perencanaan

Pembuat Kover:

Direktorat Diseminasi Statistik

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

Canva

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja BPS sebagai salah satu penyelenggara negara dalam mendukung pembangunan nasional. Penyusunan LKIP BPS Tahun 2025, sejalan dengan masa pemerintahan periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, dan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini mencakup evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama periode 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja BPS mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

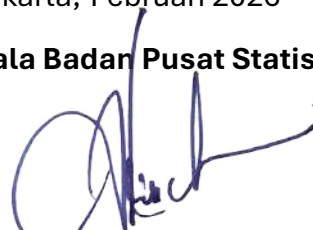
Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja tahun 2025, perkembangan capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir, peran BPS dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas Presiden, serta realisasi anggaran dalam pencapaian tugas dan fungsi BPS selama tahun 2025. BPS memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan berorientasi pada visi besar menuju Indonesia Emas 2045.

Laporan Kinerja BPS Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengoptimalkan peran BPS serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh jajaran di lingkungan BPS dalam mewujudkan *Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju*.



Jakarta, Februari 2026

Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Pernyataan Telah Direviu	ix
Ringkasan Eksekutif	x
<i>Highlight</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS	4
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran.....	7
1.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
1.3.2. Dukungan Anggaran.....	11
1.4. Potensi dan Permasalahan.....	12
1.5. Sistematika Penyajian Laporan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Tahun 2025-2029.....	17
2.2. Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2025	19
2.3. Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Prioritas Nasional Tahun 2025	21
2.4. Konsep dan Definisi Indikator Kinerja BPS	22
2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1. Capaian Kinerja BPS.....	31
3.2. Capaian Rencana Strategis 2025.....	44
3.3. Peran BPS dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas Presiden Tahun 2025 serta Penanganan Isu Strategis Lainnya	47
3.4. Prestasi BPS	67
3.5. Inovasi BPS.....	72
3.6. Realisasi dan Efisiensi Anggaran	75
 BAB IV PENUTUP	 85
 LAMPIRAN	 87

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Program/Sumber Dana, Anggaran yang Tersedia, Anggaran yang Dapat Digunakan *) (dalam miliar rupiah).....	11
Tabel 2 Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Renstra BPS 2025-2029.....	18
Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Inikator, dan Target Kinerja BPS Tahun 2025.....	19
Tabel 4 Perubahan Anggaran BPS Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2025 (dalam ribu rupiah)	26
Tabel 5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 6 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja BPS Terhadap Renstra	44
Tabel 7 Capaian RO Prioritas Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi Tahun 2025	48
Tabel 8 Capaian RO Prioritas Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral ...	49
Tabel 9 Capaian RO Prioritas Publikasi/Laporan Statistik Harga.....	50
Tabel 10 Pagu Anggaran BPS Menurut Bulan TA 2025 (miliar rupiah)	75
Tabel 11 Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program TA 2025 (miliar rupiah)	77
Tabel 12 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BPS Tahun 2025 Menurut Kegiatan	78
Tabel 13 Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program TA 2025 (miliar rupiah)	79

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik	5
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik	6
Gambar 3 Komposisi Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir pada Akhir Tahun 2025.....	7
Gambar 4 Perbandingan Komposisi Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Pada Awal dan Akhir Tahun 2025	7
Gambar 5 Komposisi Pegawai BPS Menurut Golongan Kepangkatan pada Akhir Tahun 2025	8
Gambar 6 Proporsi Pegawai BPS Menurut Jabatan Fungsional Pada Akhir Tahun 2025.....	9
Gambar 7 Proporsi Pegawai BPS Menurut Jenjang Keahlian Pada Jabatan Fungsional Akhir Tahun 2025.....	9
Gambar 8 Proporsi Pegawai BPS Menurut Jenis Jabatan Fungsional Pada Akhir Tahun 2025 .	9
Gambar 9 Perbandingan Komposisi Pegawai BPS Menurut Generasi Pada Awal dan Akhir Tahun 2025.....	10
Gambar 10 Komposisi Alokasi Anggaran BPS Menurut Jenis Belanja Tahun 2025.....	12
Gambar 11 Capaian Kinerja BPS 2021- 2025	31
Gambar 12 Perbandingan Indeks RB BPS dengan Rata-rata K/L dan Nasional Tahun 2024..	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2025.....	889
Jumlah Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 (Kondisi 31 Desember 2025).....	93
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025 (Kondisi 31 Desember 2025).....	95
Jumlah Pejabat Fungsional BPS Tahun 2025 (Kondisi 31 Desember 2025)	97
Surat Nilai Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) 2025	99
Jenis Dokumen Pemerintah yang Digunakan sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS)	101
Hasil Pengolahan Survei Kebutuhan Data (SKD) 2025 yang Digunakan sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik User (TPDS-u)	106
Responden Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2025	107
Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral BPS Tahun 2024	108
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 sebagai Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Terkait Urusan Statistik ..	124
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah.....	126
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Instansi Pusat.....	128
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025	130
Kementerian/Lembaga Lokus Pembinaan Statistik Sektoral 2024-2025	132
Lembar Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025	137
Angka Sementara Indeks Reformasi Birokrasi Berdasarkan Portal KemenpanRB	139
Surat Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Tahap I b Tahun Akademik 2025/2026	140
Surat Penyampaian Nilai Batas Pendapatan Desil 8 Hasil Susenas dan Data Agregat Keluarga	145
Daftar Prestasi/Penghargaan BPS Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025	149
Daftar Inovasi BPS Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025.....	2355
Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja BPS TA 2025	2444



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3041195, 3042505, 3010291-4,
Fax. (021) 3557046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Badan Pusat Statistik untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pusat Statistik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.




Jakarta, 20 Februari 2026

Inspektur Utama,

Reza Hardiwan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPS Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian program dan penggunaan anggaran sepanjang tahun. Laporan ini mengevaluasi target yang telah ditetapkan, perkembangan capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya, serta realisasi anggaran BPS. Secara umum, pada tahun 2025 BPS memiliki capaian kinerja sebesar 106,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target yang ditetapkan telah tercapai dengan baik. Dari tiga Indikator Kinerja, terdapat dua indikator yang memiliki capaian lebih dari 100 persen dan satu indikator memiliki capaian sebesar 100 persen. Dari sisi anggaran, BPS mampu mencapai realisasi anggaran sebesar 95,89 persen dari total pagu Rp5.818,98 miliar, dengan rincian realisasi Program Dukman sebesar 95,62 persen dan program PPIS sebesar 96,14 persen.

	Target	Realisasi	Capaian
 Indikator Kinerja-1: Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	65 Persen	71,92 Persen	110,65
 Indikator Kinerja-2: Indeks Pembangunan Statistik	2,35 Poin	2,35 Poin*	100
 Indikator Kinerja-3: Indeks Reformasi Birokrasi BPS	85,01 Poin	91,31 Poin	107,41

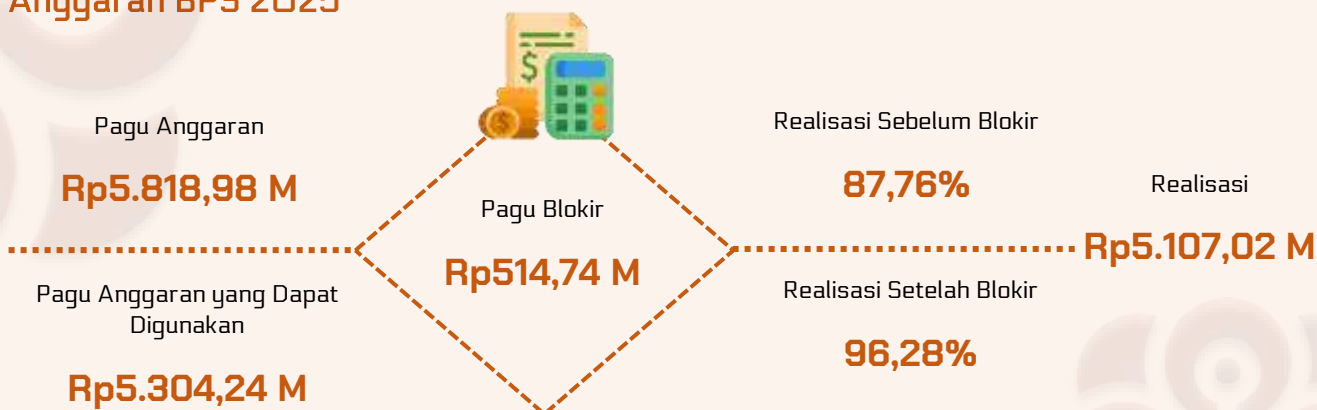
*Nilai Tahun 2024



Rerata Capaian Indikator Kinerja

106,02%

Anggaran BPS 2025





Highlight

Januari

07.01.2025

Rilis Video Klip *Theme Song* SE2026



Badan Pusat Statistik memulai tahun 2025 dengan melakukan *launching* video klip theme song Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari strategi awal sosialisasi nasional. Peluncuran ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness* publik serta memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penyediaan data ekonomi yang komprehensif, berkualitas, dan berdampak.

20.01.2025

Penyampaian Hasil Diskusi Publikasi Perkembangan Pencatatan Sipil di Indonesia Menuju Inklusivitas



Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan kegiatan *Penyampaian Hasil dan Diskusi Publikasi Perkembangan Pencatatan Sipil di Indonesia Menuju Inklusivitas* di Jakarta pada 20 Januari 2025 sebagai wujud penguatan sistem *Civil Registration and Vital Statistics* (CRVS) sebagai fondasi data kependudukan yang akurat dan inklusif. Kegiatan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam kerja sama regional Asia-Pasifik untuk memperkuat CRVS, menjamin setiap penduduk tercatat secara resmi, serta mendukung prinsip “*Get everyone in the picture*”, sejalan dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2024.

Februari

19.02.2025

Pelantikan Kepala BPS RI dan Wakil Kepala BPS RI oleh Presiden Republik Indonesia



Pelantikan Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala BPS dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 19 Februari menegaskan legitimasi dan peran strategis BPS dalam pemerintahan. Presiden menugaskan BPS untuk mengawal finalisasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Kepemimpinan definitif ini memperkuat posisi BPS sebagai pilar utama data nasional serta mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis data.

20.02.2025

Penyerahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)



BPS turut cetak sejarah dalam pembangunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pada 20 Februari 2025, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menyerahkan hasil pembangunan DTSEN kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, dan Menteri Sosial, sekaligus menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas kementerian dalam penyelesaian amanat Inpres tersebut. DTSEN dibangun melalui integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan mendapat sambutan positif dari para menteri sebagai fondasi data yang andal

untuk pensasaran program pembangunan yang lebih tepat dan terintegrasi.

24.02.2025

Statistik untuk Pembangunan Daerah yang Berdampak



Pada Senin 24 Februari 2025, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan materi “Memaknai Statistik untuk Pembangunan Daerah yang Berdampak” pada kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Magelang. Amalia menyampaikan tentang peran data statistik untuk kebijakan pembangunan berbasis data, penjelasan mengenai indikator-indikator strategis yang dihasilkan BPS (PDB dan pertumbuhan ekonomi, inflasi, statistik ketenagakerjaan, statistik kependudukan), pembangunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Pada kesempatan tersebut, Amalia juga

meminta dukungan dan kolaborasi kepada seluruh kepala daerah dalam pelaksanaan SE2026 dan penyediaan data statistik yang berkualitas, sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan berbagai program dengan berlandaskan data statistik berkualitas yang dihasilkan BPS.

26.02.2025

Pencanangan *Ground Check* Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)



Setelah penyerahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Kemensos dan BPS melakukan Pencanangan *Ground Check* secara *hybrid* di *National Statistics Command Centre* BPS. Pencanangan diikuti oleh Kepala BPS dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Setelah dicanangkan, pelatihan *ground check* DTSEN dilakukan pada 33.603 pendamping PKH di 1.120 kelas daring oleh Instruktur dari BPS pusat/provinsi/kabupaten/kota. Sesuai Inpres No 4/2025, tugas BPS dalam

HIGHLIGHT 2025

pembangunan DTSEN di antaranya mengelola DTSEN untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk pemutakhiran dan pengamanan data. Pemutakhiran dilakukan Kemensos dengan melakukan verifikasi data melalui pengecekan lapangan (*ground check*) oleh pendamping PKH. BPS mendukung pemutakhiran tersebut dengan memberikan pelatihan kepada pendamping PKH.

Maret

13.03.2025

Penandatanganan Nota Kesepahaman BPS dan Kementerian Ekonomi Kreatif



Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti bersama Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik di bidang ekonomi kreatif pada 13 Maret 2025. Penandatanganan berlangsung di BPS dan disaksikan Wakil Kepala BPS Sonny Harry B. Harmadi serta

jajaran pimpinan kedua lembaga. Penandatanganan ini juga menunjukkan komitmen kedua lembaga untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026 dan penyempurnaan KBLI 2025.

27.03.2025

Sinergi BPS, Kementerian PPN/Bappenas, dan BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis

BPS terus berkomitmen dalam membangun sistem data yang lebih kuat dan berdaya guna. Hal tersebut salah satunya untuk mendukung program-program pembangunan, seperti program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang ditugaskan ke Badan Gizi Nasional yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui kerja sama dengan BGN, BPS mendukung upaya pengoptimalan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis melalui data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya. Bertempat di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara BPS dan BGN pada Kamis 27 Maret 2025.



Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta disaksikan oleh Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy. BPS akan memotret dampak MBG melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang akan dilaksanakan pada bulan September 2025. Selain itu, BPS juga akan melakukan pendataan khusus untuk memotret dampak MBG secara komprehensif.

April

16.04.2025

Rapat Evaluasi Kinerja Badan Pusat Statistik Seluruh Indonesia



Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS bertemu langsung dengan seluruh pegawai BPS pusat dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Triwulan I/2025 di Auditorium Politeknik Statistika pada 16 April 2025, sekaligus menyapa satuan kerja BPS di seluruh Indonesia secara daring. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana pasca

Lebaran ini menjadi ajang silaturahmi serta penyampaian arahan kebijakan untuk menghasilkan statistik yang bermakna dan berdampak menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan ini, Kepala BPS menegaskan lima budaya kerja BPS yang ingin setiap pegawai BPS tanam bersama, yaitu 1) Menjadi *leader*; 2) Inovasi tiada henti di setiap lini, tanpa terkecuali; 3) Komunikasi, Koordinasi, dan Diplomasi; 4) Kualitas data; 5) Kerja keras dan kerja cerdas.

21.04.2025

Sinergi BPS-KemenPPPA untuk Ekosistem Ramah bagi Perempuan dan Anak



Dalam rangka Hari Kartini (21 April 2025), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bersama Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menandatangani MoU tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik gender dan anak di KemenPPPA. Kerja sama ini memperkuat sinergi data antarkementerian untuk mendukung

HIGHLIGHT 2025

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. MoU ini menjadi komitmen BPS untuk terus mengembangkan data terpilah berdasarkan gender dan umur guna mendukung penajaman kebijakan terkait perempuan dan anak.

Mei

15.05.2025

BPS Hadiri Rapat Koordinasi tingkat Menteri Dalam Akselerasi Program Sekolah Rakyat



BPS menghadiri rapat koordinasi tingkat kementerian yang berlangsung di Kementerian Sosial pada 15 Mei 2025. Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis lintas kementerian dan lembaga untuk menyinergikan kebijakan, perencanaan, serta langkah-langkah teknis dalam mempercepat penyediaan layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. BPS berperan strategis sebagai penyedia dan pengawal data statistik yang menjadi dasar perencanaan dan penajaman kebijakan

sekolah rakyat. Data BPS digunakan untuk mendukung penentuan sasaran peserta didik, pemetaan kebutuhan pendidikan di daerah, serta penyusunan target program yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kehadiran BPS memastikan bahwa perumusan kebijakan sekolah rakyat dilakukan secara tepat sasaran dan terukur. Selain aspek pemenuhan sumber daya manusia guru, rapat juga membahas secara mendalam teknis operasional penyelenggaraan sekolah rakyat, termasuk penetapan target peserta didik, kurikulum, serta program pendidikan yang akan dijalankan. Pembahasan ini diharapkan mampu memastikan bahwa implementasi sekolah rakyat berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

26.05.2025

Delegasi Shanghai Municipal Bureau of Statistics (SMBS) Tiongkok kunjungi BPS



Badan Pusat Statistik menerima kunjungan delegasi *Shanghai Municipal Bureau of Statistics* (SMBS), Tiongkok,

sebagai bagian dari penguatan kerja sama dan dialog internasional di bidang statistik. Kunjungan ini menjadi momentum strategis bagi kedua lembaga untuk saling bertukar wawasan, pengalaman, dan praktik baik dalam pengembangan statistik modern. Dalam pertemuan tersebut, BPS dan SMBS mendiskusikan berbagai isu strategis, khususnya terkait pengembangan metode statistik untuk mengukur dinamika ekonomi digital yang terus berkembang pesat. Topik pembahasan mencakup pemanfaatan Big Data, kecerdasan buatan, serta pendekatan statistik inovatif lainnya yang semakin relevan dalam menjawab tantangan pengukuran ekonomi dan sosial di era transformasi digital. Kunjungan delegasi SMBS ini juga membuka peluang eksplorasi kerjasama ke depan, termasuk dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, metodologi statistik berbasis teknologi mutakhir, serta penguatan peran statistik resmi dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Melalui dialog dan kolaborasi internasional, BPS berharap dapat terus meningkatkan kualitas dan kredibilitas statistik nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Juni

11 Juni 2025

Pelaksanaan Survei Penduduk Antar Sensus 2025 di Berbagai Daerah

BPS melaksanakan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) selama 11 Juni - 31 Juli 2025 di seluruh Indonesia. Survei ini bertujuan untuk mengetahui indikator demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi, sebagai komponen utama dalam penghitungan proyeksi penduduk.



SUPAS 2025 akan menghasilkan berbagai indikator diantaranya fertilitas, mortalitas, migrasi, ketenagakerjaan, lansia, disabilitas, pendidikan dan bahasa, serta perumahan. Data hasil SUPAS 2025 nantinya juga akan digunakan untuk keperluan pemantauan indikator SDGs dan RPJMN 2025-2029.

HIGHLIGHT 2025

16 Juni 2025

BPS Hadir dalam Sidang Komisi Statistik OECD



BPS memenuhi undangan sidang Komisi Statistik OECD sebagai Delegasi Republik Indonesia. Rangkaian pertemuan dengan lembaga Internasional dan pertemuan bilateral dengan ABS dan KOSTAT serta sidang Komisi Statistik OECD yang dilaksanakan oleh Kepala BPS RI bersama delegasi pendamping di Jenewa, Swiss, pada 16 s.d. 19 Juni 2025 membahas implementasi sistem neraca nasional dan manual neraca pembayaran yang baru, kecerdasan buatan (AI) sebagai game changer dari proses pengumpulan data, kesiapan penerapan AI untuk menghasilkan official statistics. Serta juga pertemuan dengan ILO, UNCTAD, dan peningkatan kerja sama statistik dengan negara lain.

Juli

6 Juli 2025

Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Car Free Day Jakarta

BPS menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Jakarta melalui kegiatan publik di *Car Free Day* Sudirman-Thamrin pada Minggu 6 Juli 2025, beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya senam bersama, flashmob, cek kesehatan gratis, hingga kuis berhadiah. Acara dibuka oleh Deputy Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, dan turut dihadiri Plt. Sekretaris Utama BPS, Moh. Edy Mahmud serta Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini.



Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara BPS RI dan BPS Provinsi DKI Jakarta. Melalui pendekatan kreatif dan langsung ke masyarakat, BPS berharap partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku usaha dalam SE2026 bisa meningkat. Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh pelaku usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia, mulai dari usaha skala besar hingga UMKM.

14 Juli 2025

BPS hadiri *Workshop* Pimpinan Lembaga Statistik se-Asia Pasifik

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menghadiri *Capacity Building Workshop for Countries of the Asia-Pacific Region Data Ethics, Governance, and Quality in a Changing Data Ecosystem Greater* di Noida, India, 14-16 Juli 2025. *Workshop* tersebut diselenggarakan oleh *United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific* dan *United Nations Statistics Division* bekerja sama dengan *Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI)* India. Sebanyak 17 perwakilan negara Asia Pasifik dan UNFPA, UNICEF, ILO dan FAO hadir dalam kegiatan ini, termasuk Indonesia.



Workshop ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pimpinan lembaga statistik di kawasan Asia Pasifik dalam menjalankan peran kepemimpinan strategis, sebagai platform untuk bertukar informasi mengenai ekosistem statistik dan mempelajari *best practices* dari negara-negara peserta. Beberapa agenda yang

disampaikan dalam *workshop* ini adalah *Modernizing Legislation for Official Statistics to Remain Relevant, Quality Assurance and Novel Data Sources*, serta *Modern Statistical Production Architecture in the Context of the Asia Region*.

Agustus

01.08.2025

Gladi Bersih Sensus Ekonomi 2026



Gladi Bersih Sensus Ekonomi 2026 (GB SE2026) merupakan miniatur kegiatan SE2026 yang menggunakan kuesioner, organisasi lapangan, metodologi, dan pengolahan yang telah disempurnakan dari uji coba SE2026 tahun sebelumnya. GB SE2026 dilakukan di 10 kabupaten/kota sampel terpilih yakni Kota Binjai, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Tangerang Selatan, Kota Balikpapan, Kota Bone, dan Kabupaten Halmahera Tengah dan berlangsung dari 1 Agustus hingga 31 September 2025. Melalui kegiatan ini, BPS memastikan kesiapan seluruh aspek

HIGHLIGHT 2025

pelaksanaan sensus, di antaranya melakukan uji coba kuesioner yang telah disusun untuk SE2026, melakukan uji coba moda pendataan SE2026, dan menguji efektivitas pelaksanaan lapangan, baik dari sisi beban petugas maupun manajemen lapangannya. GB SE2026 bermanfaat untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kendala teknis maupun operasional, sehingga pelaksanaan SE2026 dapat berjalan lancar, akurat, dan efisien. Selain itu, gladi ini juga menjadi ajang penguatan sinergi antarunit kerja BPS serta memastikan kualitas data ekonomi yang dihasilkan nantinya benar-benar mencerminkan kondisi riil pelaku usaha di Indonesia.

September

10.09.2025

BPS Merilis Hasil Survei Haji

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) dalam acara Publikasi Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia Tahun 1446 H/2025 M bersama Kementerian Agama di Jakarta pada tanggal 10 September 2025. Survei dilakukan dengan menyebar kuesioner terhadap 14.400 jemaah haji yang dipilih secara acak, terdiri dari 6.400 orang di gelombang pertama dan 8.000 orang di gelombang kedua.

Responden di tujuh titik pengamatan termasuk Bandara, Madinah, Makkah, dan Armuzna kemudian melakukan pengisian kuesioner secara mandiri. Selain itu, untuk memperkaya informasi, petugas juga melakukan wawancara langsung mengamati proses layanan yang diterima oleh jemaah.



IKJHI merupakan hasil dari SKJHI yang dilakukan BPS sejak 2010 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia pada kualitas setiap jenis layanan yang diberikan oleh pemerintah seperti layanan ibadah, petugas haji, transportasi bus, akomodasi, konsumsi, dan layanan lainnya. Selain itu, survei ini juga ditujukan untuk mendapatkan masukan dari jemaah terkait jenis-jenis layanan yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan ibadah haji ke depan.

26.09.2025

BPS Resmi Miliki Lembaga Sertifikasi Profesi



Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP BPS) setelah menerima lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) secara resmi pada acara "Anugerah Hari Statistik Nasional 2025" di Jakarta pada tanggal 26 September 2025. LSP BPS memiliki tujuh skema sertifikasi. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa keberadaan LSP BPS menjadi langkah penting dalam peningkatan kualitas SDM statistik. Dengan adanya LSP BPS, kompetensi petugas pendataan kini terstandar dan diakui secara nasional. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap data statistik serta meningkatkan daya saing SDM statistik Indonesia di tingkat global.

Oktober

01.10.2025

Partisipasi BPS Dalam Organisation of Islamic Cooperation (OIC)

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menghadiri 14th Session of the Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom) di Ankara, Turki, pada 1–3 Oktober 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh *Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries* (SESRIC) selaku Sekretariat OIC-StatCom.



Forum ini mempertemukan pimpinan lembaga statistik dari negara anggota *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) serta perwakilan dari berbagai organisasi internasional seperti *Islamic Development Bank* (IsDB) Group, UNSD, PARIS21, IEA, IRENA, UNECE, UNFPA, UNESCO-UIS, dan World Bank. Sidang tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kepemimpinan strategis lembaga statistik

HIGHLIGHT 2025

nasional dalam mendorong transformasi digital dan peningkatan kualitas data. Dalam kesempatan tersebut, Sonny menekankan perlunya kolaborasi antarnegara anggota OIC untuk menjawab berbagai tantangan statistik, termasuk pengembangan Statistik Halal dan pemanfaatan posisi strategis Turki sebagai anggota OECD guna memperkuat jejaring dan kapasitas statistik kawasan.

08.10.2025

PBB Berikan Pengakuan Terhadap BPS RI



Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti bersama dengan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dan delegasi BPS melakukan kunjungan ke Kantor UN di Indonesia pada 8 Oktober 2025, kunjungan ini menjadi momentum penting bagi BPS. PBB memberikan pengakuan atas peran strategis BPS dalam memperkuat pembangunan nasional berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*). Melalui kolaborasi ini, BPS tidak hanya menjadi penyedia data nasional, tetapi juga bagian

dari ekosistem global yang menggerakkan pembangunan berkelanjutan, mulai dari *big data*, migrasi, ketahanan pangan, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan. Indonesia kini dipercaya menjadi tuan rumah *UN Regional Big Data Hub for Asia and the Pacific*, hal ini mempertegas posisi BPS sebagai pusat inovasi data di kawasan.

23.10.2025

Kerja Sama BPS dengan IBGE



Badan Pusat Statistik (BPS) dan *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística* (IBGE) menandatangani Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang disaksikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Merdeka di Jakarta 23 Oktober 2025. Mengingat pentingnya kolaborasi internasional ini, kedua lembaga berkomitmen untuk menjajaki kerja sama di bidang statistik melalui berbagai bentuk, antara lain Pertukaran Keahlian dan *Best Practice*, Pendidikan Statistik, Peningkatan Kapasitas, serta Kolaborasi Teknologi.

MoU ini menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan bilateral dalam bidang statistik antara Indonesia dan Brasil yang sama-sama tergabung dalam forum ekonomi dunia BRICS. Melalui kerja sama ini, BPS dan IBGE diharapkan dapat saling mendukung dalam pengembangan inovasi statistik, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data di tingkat nasional maupun global.

November

03.11.2025

Partisipasi BPS Dalam The 15th Session of The Asean Community Statistical System Committee



Delegasi BPS RI menghadiri the 15th Session of the ASEAN Community Statistical System Committee (ACSS15) pada 3–5 November 2025 di Melaka, Malaysia. Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, hadir dalam

Networking Dinner ACSS15 dan berdiskusi mengenai potensi kerja sama bilateral dengan negara anggota ASEAN dan organisasi internasional serta menerima cinderamata khas Melaka. Sementara itu, dalam sesi pleno ACSS15, Indonesia diwakili oleh Windhiarso Ponco Adi Putranto, Direktur Statistik Harga BPS RI. ACSS15 menjadi wadah bagi negara-negara anggota ASEAN, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi statistik di kawasan serta mendorong pengambilan kebijakan berbasis bukti. Dalam kegiatan ini, BPS terlibat dalam pengambilan keputusan penting, di antaranya penyepakatan Rencana Aksi ACSS 2026–2030, ASEAN SDG Indicators Progress Report 2025, Rencana Kerja Tahunan 2026–2027, Kerangka Kerja *ASEAN-Help-ASEAN*, *ASEAN Statistics Virtual Academy*, progres *ACSS Working Groups* dan data harmonisasi antarnegara anggota ASEAN. BPS juga berkesempatan berbagi pengalaman tentang upaya BPS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan literasi statistik untuk membangun kepercayaan terhadap statistik.

HIGHLIGHT 2025

06.11.2025

BPS Hadiri Undangan Forum Statistik Internasional

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi mewakili Kepala BPS RI, menghadiri undangan sebagai pembicara dalam *International Forum on Digital Transformation of National Statistical Systems* di Astana, Kazakhstan, pada 6-7 November 2025. Dalam forum yang mempertemukan para pimpinan lembaga statistik dari berbagai negara anggota CIS (*Commonwealth of Independent States*) dan beberapa negara Eropa Timur, BPS RI mendapat kehormatan menjadi salah satu pembicara utama.



Melalui paparan berjudul “*Modern Statistics, Meaningful Impact: The BPS–Statistics Indonesia Transformation Story*”, Sonny membagikan langkah-langkah modernisasi statistik di Indonesia untuk menghadirkan data yang lebih adaptif dan berdampak. Untuk memperkuat kerja sama statistik Indonesia dan Kazakhstan, Wakil Kepala BPS RI dan Kepala *Bureau of National Statistics Agency for Strategic*

Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan (QAZSTAT) menandatangani *Letter of Intent* (LoI) sebagai wujud komitmen bersama dalam pengembangan metodologi statistik dan pertukaran pengetahuan. Atas permintaan pihak NSO Uzbekistan, Sonny juga melakukan pertemuan bilateral dengan kesepakatan dukungan BPS RI terhadap pengembangan IT Statistik di Uzbekistan. Pembicaraan bilateral juga dilakukan di antaranya dengan delegasi Azerbaijan, Georgia, OIC, OECD, dan UNESCAP.

13.11.2025

Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional



BPS RI berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DTSEN Kementerian Sosial-Badan Pusat Statistik dengan tema “Statistik untuk Keadilan Sosial” di Jakarta pada tanggal 13 November 2025. Rakornas ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar

Widyasanti, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi serta seluruh jajaran dari Kemensos dan BPS. Kegiatan ini dilakukan untuk menyatukan visi dan menjalin kerja sama terkait DTSEN, mulai dari tingkat pusat antara Kemensos dan BPS, hingga level provinsi dan kabupaten/kota dengan menghadirkan seluruh kepala BPS provinsi, kepala BPS kabupaten/kota, kepala dinas provinsi, dan kepala dinas kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Desember

02.12.2025

Kolaborasi BPS dengan Australian Bureau of Statistics (ABS)



Badan Pusat Statistik (BPS) dan *Australian Bureau of Statistics* (ABS) resmi menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali pada tanggal 2

Desember 2025. MoU ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi kedua lembaga dalam pengembangan statistik yang berkualitas, berstandar internasional, dan relevan untuk mendukung perencanaan pembangunan. Melalui kerja sama ini, BPS dan ABS berkomitmen untuk saling bertukar pengetahuan, memperkuat kapasitas, serta mendorong inovasi dalam proses penyediaan data statistik yang lebih akurat dan terpercaya.

16.12.2025

UNSD Mengakui Kepemimpinan BPS dalam Komunitas Statistik Global



Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melakukan pertemuan dengan Statistisi Senior dari *United Nations Statistics Division* (UNSD), Steven King dan Statistisi Senior dari *UN Statistical Institute for Asia and the Pacific* (UNSIAP), Sokol Vako di Kantor BPS pada 16 Desember 2025. Dalam pertemuan tersebut, UNSD menyampaikan apresiasi kepada BPS atas komitmen dan reputasi

HIGHLIGHT 2025

yang sangat baik dalam komunitas statistik global dan BPS diminta untuk mengoordinasikan *pilot project* dalam membangun *System of Environmental-Economic Accounting (SEEA)* yang kemudian akan menjadi basis dalam penyusunan indikator biodiversitas. Hasil dari *pilot project* ini sangat strategis karena akan menjadi metodologi penghitungan *Global Biodiversity Framework (GBF)* yang akan dipakai sebagai acuan secara global oleh seluruh kantor statistik nasional (*National Statistics Office/NSO*) dan juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajiban *Convention on Biological Diversity (CBD)*. Kepemimpinan BPS dalam upaya kolaboratif ini juga memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam komunitas kantor statistik dunia.

16.12.2025

Launching Hasil Pendataan Penduduk Ibu Kota Negara (PPIKN) Tahun 2025



Badan Pusat Statistik (BPS), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Kementerian

PPN/Bappenas resmi meluncurkan hasil Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025 pada tanggal 16 Desember 2025, yang merupakan hasil BPS melakukan sensus penduduk IKN pada bulan Juli 2025. Acara diseminasi dihadiri oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti; Menteri PPN/Bappenas RI, Rachmat Pambudy; Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono; serta Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Diseminasi hasil PPIKN 2025 ini menandai tonggak sejarah baru dalam perencanaan IKN. Ibu Kota Nusantara (IKN) kini berpenduduk 147,43 ribu jiwa atau sebanyak 43.293 rumah tangga, dengan 67,91 persen penduduk berada pada usia produktif. Hasil pendataan ini menjadi basis data dalam merancang kebijakan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah IKN.

19.12.2025

Rilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025



Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim. KBLI 2025 mengakomodir berbagai aktivitas ekonomi baru diantaranya jasa intermediasi platform digital, *Factoryless Goods Producers* (FGP) yang sudah tidak dipandang sekedar perdagangan, aktivitas konten digital dan media kreatif seperti *podcast*, *game* dan *streaming*, aktivitas perdagangan, penangkapan dan penyimpanan karbon, energi terbarukan, serta penambahan klasifikasi baru di sektor jasa keuangan. BPS menyampaikan bahwa dari sisi struktur, jumlah kategori dalam KBLI 2025 bertambah 1 menjadi 22 kategori (A-V), dari 21 kategori pada KBLI 2020 (A-U). Dalam KBLI 2025 terdiri dari 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok. Pemanfaatan KBLI sangat penting dalam berbagai aspek. KBLI 2025 akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran *Statistical Business Register* (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.

22.12.2025

Pencanangan Pembangunan Kampus Politeknik Statistika STIS



Sebagai upaya pengembangan SDM statistik di era digital, BPS melakukan pencanangan pembangunan kampus baru Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) di Gunung Sindur, Bogor, pada 22 Desember 2025, sebagai simbol dimulainya pembangunan kampus unggulan statistik dan kecerdasan buatan, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peletakan batu pertama (*groundbreaking*) oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. Lahan seluas 9,7 hektar tersebut diserahkan oleh BRIN pada Oktober 2025, menjadi bagian dari ekosistem riset dan pusat pengembangan statistik nasional.



Pendahuluan

1



PENDAHULUAN

Halaman ini dibiarkan kosong

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memegang peran strategis sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam menyelenggarakan statistik pada skala nasional maupun regional, melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik, serta melaksanakan kerja sama dan koordinasi statistik antarinstansi, kementerian/lembaga, lembaga internasional, negara asing, dan masyarakat luas dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional. Peran strategis ini semakin diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menempatkan Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan ini menegaskan bahwa statistik merupakan urusan strategis negara yang memerlukan koordinasi pada tingkat tertinggi. Dengan mandat tersebut, statistik menjadi instrumen kunci dalam mendukung kebijakan berbasis bukti dan mewujudkan pembangunan yang lebih presisi, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, BPS dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga publik wajib menyampaikan laporan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari prinsip akuntabilitas, di mana setiap kegiatan dan hasil dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja BPS tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BPS atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai misi dan visi BPS sepanjang tahun 2025. Laporan ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan pendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPS, serta untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan guna memperbaiki kinerja BPS. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memenuhi ketentuan yang tercantum

PENDAHULUAN

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

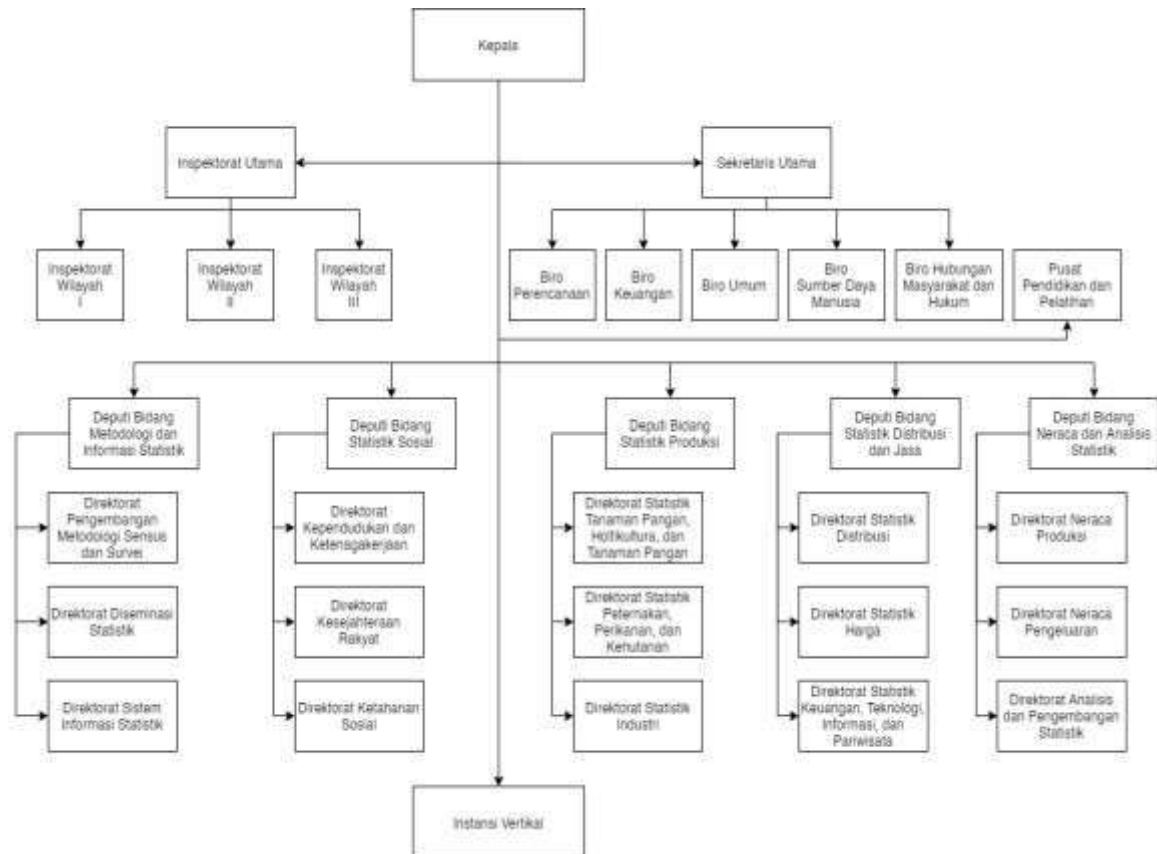
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS

BPS merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik adalah menyelenggarakan statistik dasar. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik mengatur lebih lanjut bahwa tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b. pengoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. penetapan sistem statistik nasional;
- e. pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut Kepala BPS dibantu oleh 7 (tujuh) unit Eselon I yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPS. Adapun secara lebih detail, berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, susunan organisasi BPS terdiri atas: Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Inspektorat Utama,

Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Instansi Vertikal. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS, struktur organisasi BPS adalah seperti pada gambar berikut:

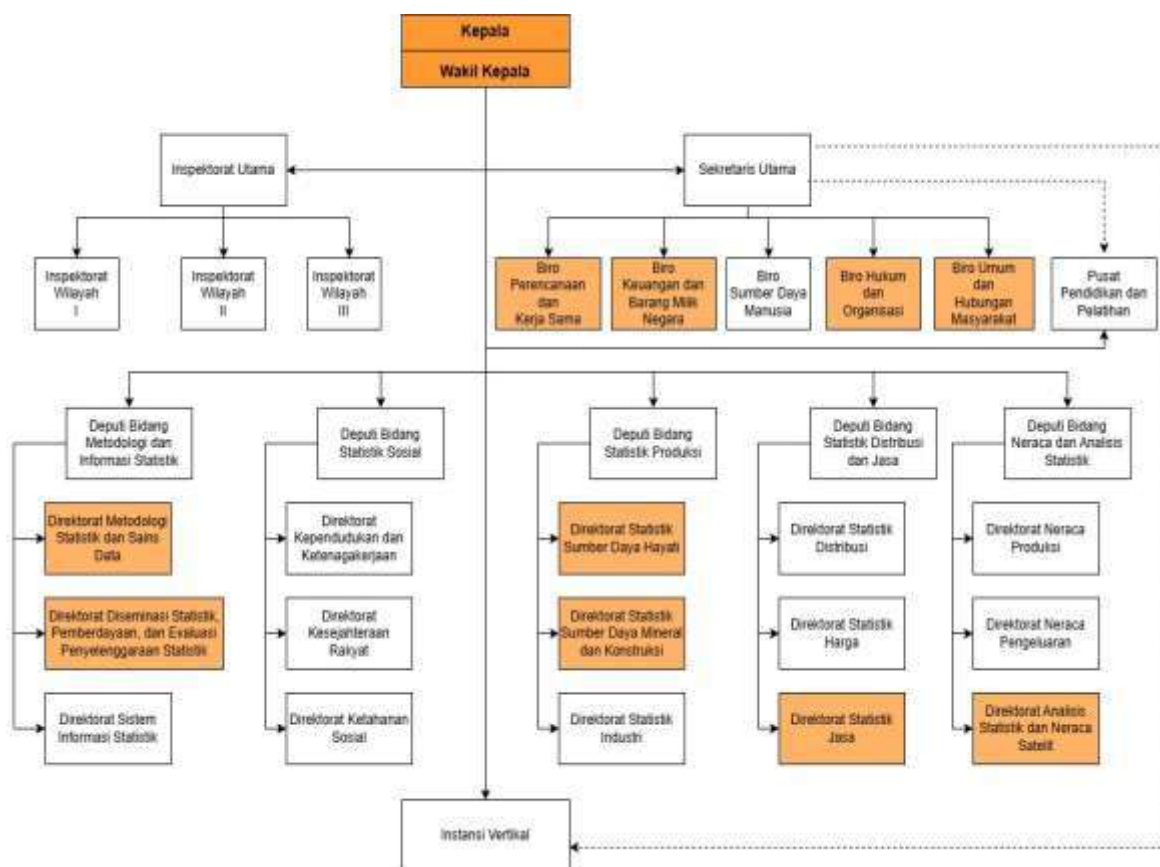


Gambar 1 | Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

Seiring dengan semakin berkembangnya peran dan tanggung jawab BPS dalam ekosistem pembangunan nasional, kebutuhan akan organisasi yang adaptif dan selaras dengan perubahan menjadi sebuah keniscayaan. Dalam konteks tersebut, BPS menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa BPS merupakan lembaga pemerintah di bawah Presiden yang bertugas melaksanakan

PENDAHULUAN

kegiatan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BPS memiliki fungsi utama berupa penyusunan dan perumusan kebijakan statistik, penyelenggaraan statistik nasional dan regional, penetapan serta penyediaan statistik dasar, hingga pembinaan statistik sektoral. Selain itu, BPS juga menjalankan fungsi dukungan administrasi umum yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga. Peraturan ini membawa beberapa penyesuaian struktur di Badan Pusat Statistik seperti adanya penambahan posisi Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, perubahan nama, penambahan, ataupun perluasan fungsi pada beberapa direktorat dan biro. Struktur organisasi BPS juga diperjelas dan diperkuat melalui pembentukan bagian-bagian baru pada beberapa direktorat dan biro. Perubahan pada struktur organisasi BPS dapat dilihat pada gambar berikut:



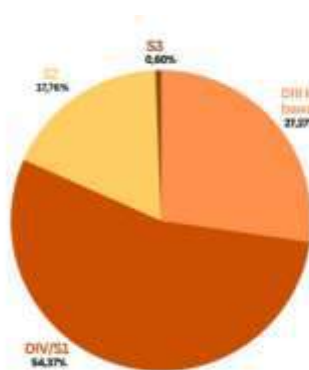
Gambar 2 | Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

1.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPS didukung oleh sumber daya manusia yang berasal dari unit kerja dan satuan kerja di tingkat pusat dan daerah. Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah pegawai BPS di seluruh Indonesia adalah sebanyak 19.890 orang. Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2025 yang berjumlah 17.899 orang, pada akhir tahun 2025 jumlah pegawai BPS mengalami kenaikan sebesar 11,12 persen. Peningkatan yang cukup besar tersebut disebabkan oleh adanya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025.

Jumlah pegawai yang besar perlu didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai agar kinerja organisasi dapat optimal. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pegawai adalah tingkat pendidikan, yang berperan penting dalam mendukung kompetensi, profesionalisme, dan produktivitas kerja. Gambar 3 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai BPS pada tahun 2025 menamatkan pendidikan tertinggi pada jenjang DIV/S1 yaitu sebesar 54,37 persen. Hal ini menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan tinggi yang relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS.



Gambar 3 | Komposisi Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir pada Akhir Tahun 2025

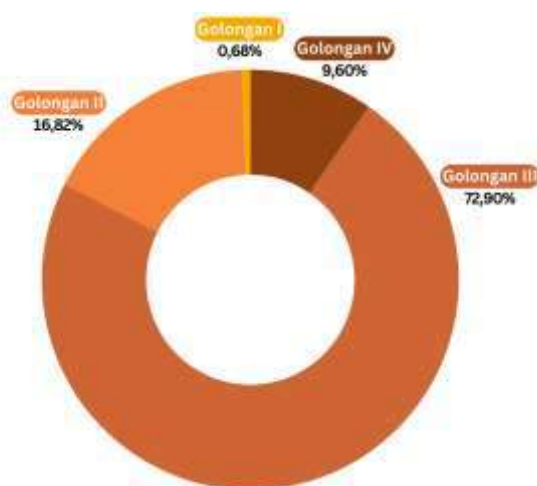


Gambar 4 | Perbandingan Komposisi Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Pada Awal dan Akhir Tahun 2025

PENDAHULUAN

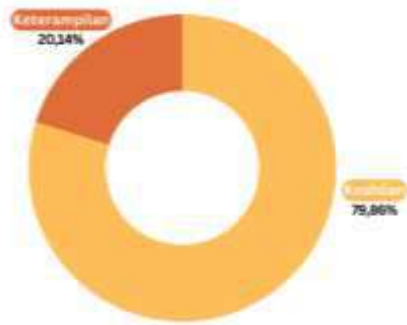
Apabila komposisi pegawai dibandingkan pada awal dan akhir tahun 2025 menurut tingkat pendidikan seperti pada Gambar 4, persentase pegawai dengan pendidikan tertinggi DIII Ke Bawah mengalami peningkatan dari 23,20 persen menjadi 27,27 persen. Peningkatan persentase pegawai dengan pendidikan DIII ke bawah tersebut sejalan dengan adanya pengangkatan tenaga *outsourcing* menjadi PPPK, yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang tersebut.

Sejalan dengan kondisi tersebut, penguatan pengembangan pendidikan sumber daya manusia perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui proses rekrutmen maupun peningkatan kompetensi pegawai. Politeknik Statistika STIS sebagai perguruan tinggi kedinasan di bawah BPS memiliki peran utama dalam penyediaan SDM dengan kualifikasi pendidikan DIV/S1 yang siap mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM BPS juga dilakukan melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS, termasuk program Rintisan Pendidikan Gelar yang memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 dan S3 melalui skema Tugas Belajar maupun Izin Belajar, baik dengan pembiayaan kedinasan maupun mandiri. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.



Gambar 5 | Komposisi Pegawai BPS Menurut Golongan Kepangkatan pada Akhir Tahun 2025

Sejalan dengan tingkat pendidikan pegawai yang didominasi oleh pegawai berpendidikan DIV/S1, berdasarkan golongan kepangkatannya, pegawai BPS didominasi oleh pegawai dengan Golongan III, yakni golongan yang diperuntukkan bagi pegawai dengan tingkat pendidikan minimal S1 atau DIV. Jumlahnya mencapai 72,90 persen dari total pegawai di akhir tahun 2025.

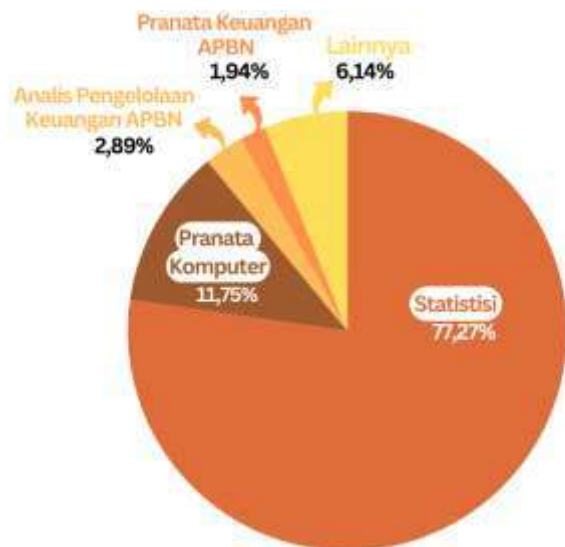


Gambar 6 | Proporsi Pegawai BPS Menurut Jabatan Fungsional Pada Akhir Tahun 2025



Gambar 7 | Proporsi Pegawai BPS Menurut Jenjang Keahlian Pada Jabatan Fungsional Akhir Tahun 2025

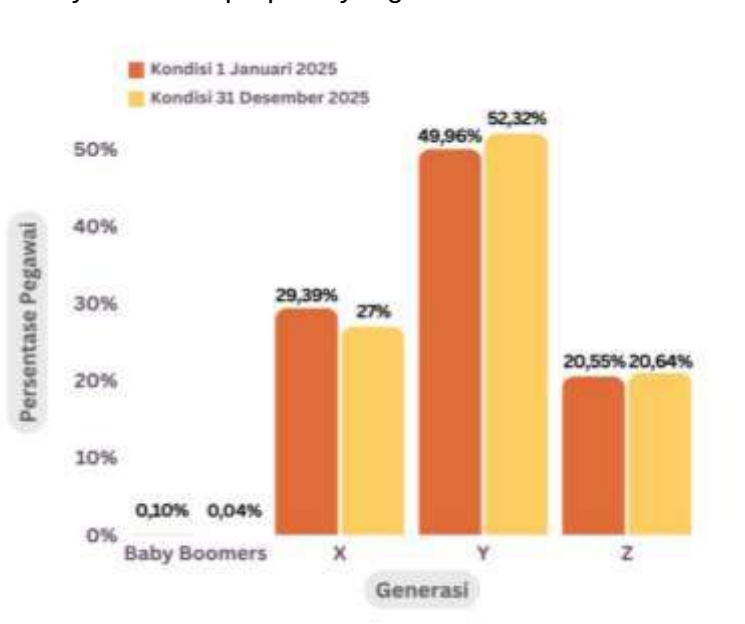
Struktur jabatan fungsional pegawai BPS menunjukkan bahwa sebagian besar SDM berada pada jabatan fungsional keahlian yaitu sebesar 79,86 persen seperti terlihat pada Gambar 6. Jika dilihat berdasarkan jenjang keahlian, proporsi terbesar adalah jenjang keahlian pertama dan muda yang masing-masing mencapai 50,36 persen dan 42,66 persen seperti ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 8 | Proporsi Pegawai BPS Menurut Jenis Jabatan Fungsional Pada Akhir Tahun 2025

PENDAHULUAN

Jika dilihat berdasarkan empat jenis jabatan fungsional terbesar, jabatan statistisi memiliki persentase paling besar yaitu 77,27 persen seperti ditunjukkan pada Gambar 8. Jabatan pranata komputer menempati urutan berikutnya dengan persentase sebesar 11,75 persen, analisis pengelolaan keuangan APBN sebesar 2,89 persen, pranata keuangan APBN sebesar 1,94 persen, dan jabatan fungsional lainnya memiliki proporsi yang relatif lebih kecil.



Gambar 9 | Perbandingan Komposisi Pegawai BPS Menurut Generasi Pada Awal dan Akhir Tahun 2025

Tingginya proporsi pegawai pada jenjang jabatan fungsional tingkat keahlian pertama dan muda selaras dengan komposisi pegawai menurut kelompok generasi yang sebagian besar berasal dari generasi Y. Gambar 9 menunjukkan persentase generasi Y mencapai 52,32 persen pada akhir tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya potensi dalam penguatan kreativitas dan inovasi di lingkungan BPS. Karakteristik generasi Y yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola kerja digital mendukung penerapan cara kerja yang lebih efisien serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis statistik. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong munculnya gagasan baru, penyempurnaan proses kerja, dan peningkatan kualitas layanan statistik, dengan dukungan pembinaan dan pengembangan kompetensi yang terarah.

1.3.2. Dukungan Anggaran

Selain sumber daya manusia, ketersediaan dukungan pendanaan juga menjadi penting bagi suatu organisasi untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Ketiadaan alokasi anggaran yang memadai akan menghambat kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Di sisi lain, anggaran yang tersedia harus dikelola secara profesional dan baik dengan menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi agar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tata kelola anggaran yang efektif menjadi faktor penting untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, besaran anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di BPS mencapai Rp5.818,98 Miliar. Dari total anggaran tersebut, besaran anggaran yang dapat digunakan (pagu tanpa blokir) mencapai Rp5.304,24 Miliar. Sebagian besar digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen (Dukman), yaitu sebesar Rp3.506,21 Miliar atau sebesar Rp3.497,78 Miliar (tanpa blokir). Sementara itu, alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) adalah sebesar Rp2.312,77 Miliar atau sebesar Rp1.806,46 Miliar sebagaimana tertuang pada Tabel 1.

Tabel 1 | Program/Sumber Dana, Anggaran yang Tersedia, Anggaran yang Dapat Digunakan *) (dalam miliar rupiah)

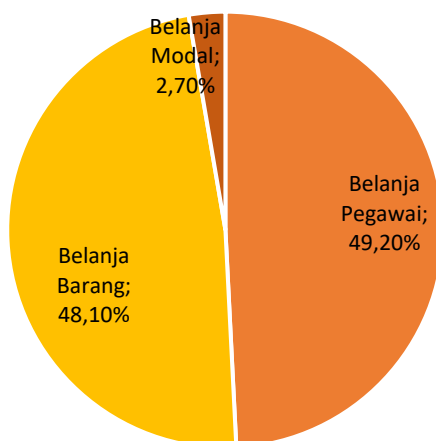
Program/ Sumber Dana	Pagu Awal	Pagu Akhir	Anggaran yang dapat digunakan (Pagu Akhir Tanpa Blokir)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen (Dukman)	3.527.03	3.506,21	3.497,78
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	2.178.84	2.312,77	1.806,46
Total	5.705,87	5.818,98	5.304,24

*) Sumber data: Realisasi OMSPAN per 6 Januari 2026

Selanjutnya, Gambar 10 secara spesifik menjelaskan tentang alokasi anggaran BPS menurut jenis belanja. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa dari anggaran yang tersedia untuk BPS pada tahun 2025, proporsi

PENDAHULUAN

terbesar digunakan untuk belanja pegawai, yaitu sebesar 49,20 persen dari keseluruhan pagu anggaran yang tersedia. Sedangkan, sisanya digunakan untuk membiayai Belanja Barang (48,10 persen) dan Belanja Modal (2,7 persen).



Gambar 10 |
Komposisi Alokasi Anggaran BPS
Menurut Jenis Belanja Tahun
2025

1.4. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis internal kelembagaan BPS, teridentifikasi berbagai potensi eksternal yang dapat dimanfaatkan BPS secara optimal dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan BPS tahun 2025-2029. Potensi kerja sama internasional memberikan ruang bagi BPS untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan melalui pertukaran pengetahuan, pembelajaran praktik terbaik, dan pengembangan jejaring global. Seiring dengan semakin terintegrasinya perekonomian dunia, globalisasi juga menghadirkan potensi percepatan standarisasi internasional dalam metodologi dan indikator statistik, sehingga statistik yang dihasilkan BPS dapat semakin selaras dengan standar global dan memiliki daya banding yang lebih luas. Di sisi lain, perkembangan teknologi menghadirkan potensi besar bagi transformasi penyelenggaraan statistik. Digitalisasi, *internet of things*, serta ketersediaan sumber data baru seperti big data dan data administrasi membuka peluang bagi BPS untuk memperkaya sumber informasi dan meningkatkan efisiensi proses statistik.

Potensi pemanfaatan *Big Data Analytics* dan *Artificial Intelligence* (AI) dapat meningkatkan nilai tambah indikator statistik agar lebih informatif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna, terutama di tengah meningkatnya permintaan indikator statistik

baru akibat dinamika perubahan ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan. Beberapa *National Statistical Offices* (NSO) di dunia telah mengadopsi AI dalam penyelenggaraan statistik resminya. *Statistics Canada*, misalnya, mengembangkan sistem berbasis AI untuk mengidentifikasi kesalahan dalam pengisian kuesioner secara otomatis. Statistik Austria menggunakan *web scraping* dan *machine learning* untuk mengumpulkan data harga dari situs daring guna mendukung penghitungan indeks harga konsumen. Sementara itu, *Office for National Statistics* (ONS) di Inggris memanfaatkan *machine learning* untuk klasifikasi pekerjaan dari data teks bebas yang dikumpulkan dalam survei tenaga kerja. Tren pemanfaatan AI oleh NSO global ini menjadi sinyal penting bagi BPS untuk bertransformasi dan memanfaatkan teknologi secara optimal guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan relevansi statistik resmi di era digital.

Namun demikian, terdapat juga beberapa tantangan baik dari sisi internal BPS ataupun eksternal yang masih perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki secara terarah dan berkelanjutan. Dari sisi internal BPS, proses bisnis statistik masih membutuhkan penguatan melalui integrasi dan modernisasi yang lebih menyeluruh, sementara perencanaan serta manajemen kegiatan pengumpulan data masih belum sepenuhnya efektif. Citra kelembagaan melalui *institutional branding* belum termanfaatkan secara optimal sehingga belum sejalan dengan peran strategis BPS. Tantangan internal lainnya meliputi penerapan manajemen risiko yang belum maksimal, mekanisme dan beban kerja yang berdampak pada kesehatan pegawai, serta nilai dan budaya kerja yang belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kritikal, kualitas layanan statistik yang masih perlu ditingkatkan, serta kebutuhan untuk memperkuat metodologi statistik agar tetap relevan dengan dinamika lingkungan terkini turut menjadi aspek kelemahan yang menuntut pembenahan.

Dari sisi eksternal, perubahan yang cepat pada lingkungan eksternal berpotensi membuat sebagian statistik resmi kehilangan daya guna apabila tidak segera diadaptasi. Tuntutan terhadap indikator statistik yang semakin berkualitas, rinci, dan tepat waktu semakin meningkat, sementara literasi statistik masyarakat yang masih rendah dapat memunculkan misinterpretasi dan menambah beban komunikasi publik BPS. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah adanya tuntutan penyediaan statistik berkualitas yang tidak selalu diikuti dengan perluasan mandat yang memadai kepada BPS, sehingga dapat membatasi efektivitas BPS dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengelolaan data nasional.

PENDAHULUAN

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyajian Laporan Kinerja BPS Tahun 2025 mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan umum tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi di BPS. Selain itu, dijelaskan pula mengenai ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan anggaran serta potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab ini memuat Rencana Strategis BPS tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja BPS tahun 2025, Prioritas Nasional dan Program Prioritas Presiden, konsep dan definisi indikator kinerja, serta rencana kerja dan anggaran tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat capaian kinerja, capaian Rencana Strategis, peran BPS dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas Presiden Tahun 2025 serta Penanganan Isu Strategis Lainnya, prestasi dan inovasi, serta realisasi dan efisiensi anggaran.

Bab IV. Penutup

Bab ini memuat kesimpulan atas pencapaian kinerja dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.



Perencanaan Kinerja

2



Halaman ini dibiarkan kosong

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Tahun 2025-2029

Rencana Strategis BPS Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029. Dalam peraturan tersebut, visi yang ditetapkan oleh BPS adalah:

“Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut menggambarkan komitmen BPS untuk menjaga independensi dalam menghasilkan statistik, memperkuat kredibilitas lembaga, serta memainkan peran aktif dalam mendukung kebijakan nasional yang berbasis data.

Untuk mencapai visi tersebut, BPS menetapkan tiga misi, yaitu :

- 1 Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
- 2 Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
- 3 Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Statistik yang Efektif dan Efisien

Melalui visi dan misi tersebut, BPS berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyedia statistik resmi yang independen, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai perwujudan dari amanat undang-undang statistik dan sekaligus penjabaran Visi dan Misi BPS 2025-2029, ditetapkanlah tiga tujuan strategis yang dirancang secara sinergis untuk saling mendukung dan memastikan keberhasilan seluruh aspek penting operasional Lembaga:

TUJUAN 1	Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan
TUJUAN 2	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien
TUJUAN 3	Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja untuk periode 2025-2029. Ketetapan ini tertuang dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) BPS Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sasaran, indikator, dan target kinerja BPS untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 | Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Renstra BPS 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Target Renstra 2026	Target Renstra 2027	Target Renstra 2028	Target Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (Persen)	76 ^{a)} Persen	79 Persen	82 Persen	84 Persen	86 ^{a)} Persen

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Target Renstra 2026	Target Renstra 2027	Target Renstra 2028	Target Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengambilan Keputusan						
Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu	Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	2,60 ^{*)} Poin	2,83 Poin	3,00 Poin	3,09 Poin	3,17 ^{*)} Poin
Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	85,01 Poin	86,01 Poin	87,01 Poin	88,01 Poin	90,01 Poin

*) Mengacu pada target yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

2.2. Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2025-2029, target lima tahunan yang telah tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. BPS telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3 | Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja BPS Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2025 ^{*)} dan Satuan
(1)	(2)
Tujuan 1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan	
Sasaran 1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	
Indikator Kinerja 1. Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	65 Persen ^{*)}

PERENCANAAN KINERJA

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2025 ^{*)} dan Satuan
(1)	(2)
Tujuan 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien	
Sasaran 2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu	
Indikator Kinerja 2. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,35 Poin ^{*)}
Tujuan 3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik	
Sasaran 3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional	
Indikator Kinerja 3. Indeks Reformasi Birokrasi	85,01 Poin

^{*)} Mengacu pada target yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Dalam pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, dilakukan penyesuaian target kinerja pada indikator Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. TPDS yang sebelumnya ditetapkan sebesar 76 persen disesuaikan menjadi 65 persen. Sedangkan IPS yang semula ditetapkan sebesar 2,60 poin disesuaikan menjadi 2,35 poin yang juga merupakan realisasi nilai IPS tahun 2024. Alasan penyesuaian target TPDS adalah adanya penyempurnaan metadata indikator. Saat penyusunan RPJMN memasuki tahapan perumusan rancangan akhir, TPDS hanya dihitung berdasarkan pemanfaatan data oleh pengguna yang diukur melalui survei. Saat pemutakhiran RKP 2025, dilakukan penyempurnaan sehingga TPDS tidak hanya dihitung berdasarkan pemanfaatan data oleh pengguna tetapi juga memperhitungkan pemanfaatan data statistik dalam dokumen-dokumen pemerintah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi, serta regulasi pemerintah lainnya (peraturan, keputusan, instruksi).

Sedangkan alasan penyesuaian target IPS adalah adanya perubahan struktur pemerintahan yang mengakibatkan perubahan lokus penilaian dan juga wali data.

Selain itu, K/L yang baru terbentuk dalam struktur pemerintahan juga masih memprioritaskan penataan struktur organisasi, kewenangan, dan pengelolaan internal lainnya sehingga penyelenggaraan statistik sektoral belum bisa berjalan secara optimal. Hal ini sekaligus menjadi pertimbangan bagi BPS untuk tidak melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang menghasilkan nilai IPS di tahun 2025. Pertimbangan lainnya adalah perlunya penyesuaian tata kelola dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, Rencana *Grand Design* RB 2025-2045 dan *Roadmap* RB 2025-2029.

Peniadaan EPSS di tahun 2025 ini juga menjadi ruang bagi K/L untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan rekomendasi tahun 2024 yang telah disampaikan BPS ke masing-masing K/L. Hal ini juga tidak bertentangan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), yang menyatakan bahwa EPSS dapat dilaksanakan setiap dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Peniadaan EPSS Tahun 2025 secara resmi disampaikan melalui surat Plt. Sekretaris Utama BPS kepada seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan BPS, K/L, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

2.3. Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Prioritas Nasional Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, BPS mendukung Prioritas Nasional melalui 3 (tiga) keluaran prioritas, yaitu:

1. Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik Resmi yang mendukung Prioritas Nasional 07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan- dan Prioritas Nasional 03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
2. Pembinaan Statistik Sektoral yang mendukung Prioritas Nasional 07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;

PERENCANAAN KINERJA

3. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi yang mendukung Prioritas Nasional 07- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

BPS juga mendukung prioritas presiden sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghaspusan Kemiskinan Ekstrem. Selain itu, BPS juga memberikan dukungan pada beberapa program prioritas presiden seperti :

1. Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui nota kesepahaman antara BPS dan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Maret 2025.
2. Sekolah Rakyat sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Nomor : 1824/1/DL.03/5/2025 tanggal 30 Mei 2025.
3. Program 3 Juta Rumah melalui Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-52/01000/HM.310/2025 tanggal 5 Februari 2025.

Dalam mendukung isu prioritas nasional, BPS menyelenggarakan berbagai kegiatan statistik tematik yang menjadi mandat regulasi seperti penyusunan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK, Survei Kesejahteraan Petani, serta persiapan Sensus Ekonomi 2026. Melalui kegiatan tersebut, BPS menyediakan landasan data untuk pemantauan transisi energi, pembangunan pertanian berkelanjutan, serta pemetaan struktur dan dinamika ekonomi nasional. BPS juga mendukung kebijakan neraca komoditas dan percepatan pembangunan pergaraman nasional dengan menyediakan data komoditas pangan strategis yang diperlukan dalam perencanaan pasokan dan stabilitas pangan.

2.4. Konsep dan Definisi Indikator Kinerja BPS

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dari Sasaran Strategis 1 yaitu **Tingkat Pemanfaatan Data Statistik**. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana data statistik resmi yang dihasilkan atau dipublikasikan BPS dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang relevan dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, atau

evaluasi kebijakan. Indikator ini mencerminkan keberhasilan lembaga dalam menjadikan data statistik resmi yang dihasilkan atau dipublikasikan oleh BPS sebagai dasar bagi perumusan kebijakan publik. Angka pada indikator ini bersumber dari penilaian mandiri terhadap dokumen pemerintah dan survei khusus yang dilaksanakan untuk mengukur pemanfaatan data oleh pengguna data. Sumber data tersebut dikumpulkan setiap tahun dan yang menjadi penanggung jawab atas indikator ini adalah Direktorat Diseminasi Statistik.

Adapun formula yang digunakan untuk pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut:

$$TPDS = (0,8 \times TPDS_{dp}) + (0,2 \times TPDS_u)$$

Keterangan:

TPDS : Tingkat Pemanfaatan Data Statistik.

TPDS_{dp} : Tingkat Pemanfaatan Data Statistik pada dokumen pemerintah Dokumen pemerintah di sini dibatasi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RJPMD Provinsi), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi), serta regulasi pemerintah lainnya (peraturan, keputusan, instruksi) yang memanfaatkan data BPS. Daftar dokumen pemerintah selain RPJPN, RPJMN, Renstra K/L, dan RJPMD Provinsi, dapat mengalami perubahan setiap tahunnya.

TPDS_u : Tingkat Pemanfaatan Data Statistik oleh pengguna data yang diperoleh melalui survei khusus untuk mengukur pemanfaatan data oleh pengguna data.

$$TPDS_{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i \times Q_i}{n} \times 100\%$$

P_i : Pemanfaatan Data BPS pada dokumen pemerintah ke-*i* akan bernilai 0 jika dokumen tersebut tidak menggunakan data BPS dan akan bernilai 1 jika dokumen tersebut menggunakan minimal satu jenis data yang bersumber dari BPS.

PERENCANAAN KINERJA

Q_i : Kualitas pemanfaatan data pada dokumen pemerintah ke- i diukur dari rata-rata relevansi data pada dokumen pemerintah ke- i (R_i) dan kemutakhiran data pada dokumen pemerintah ke- i (U_i).

i : Dokumen pemerintah ke 1, 2, ..., n.

$$Q_i = 0,5R_i + 0,5U_i$$

Keterangan:

R_i : Relevansi data pada dokumen pemerintah ke- i
Relevansi ini akan bernilai 1 jika minimal 50 persen dari jenis data BPS yang digunakan memiliki kesesuaian dengan konteks yang disampaikan dalam narasi dokumen pemerintah. Sebagai contoh, jika suatu dokumen pemerintah menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi dalam konteks pembangunan ekonomi nasional ataupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam konteks pembangunan manusia maka relevansi data akan bernilai 1. Relevansi data akan bernilai 0 jika kriteria di atas tidak terpenuhi.

U_i : Kemutakhiran data pada dokumen pemerintah ke- i
Kemutakhiran ini akan bernilai 1 jika minimal 50 persen dari jenis data BPS yang digunakan merupakan data terkini (*up to date*). Kemutakhiran data akan bernilai 0 jika kriteria di atas tidak terpenuhi.

$$TPDS_u = \frac{\sum_{i=1}^5 \text{Skor responden}}{5} \times 100\%$$

Keterangan:

i : Aspek yang diukur dalam survei khusus mengenai pemanfaatan data oleh pengguna. Aspek ini meliputi (1) distribusi dan aksesibilitas, (2) relevansi, (3) frekuensi penggunaan, (4) citra dan kepercayaan, dan (5) dampak pada kebijakan.

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dari Sasaran Strategis 2 yaitu **Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**. Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Jika pada tahun tertentu tidak dilaksanakan pengukuran IPS, maka angka IPS yang digunakan adalah IPS tahun terakhir. Angka pada indikator ini bersumber dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Sumber data tersebut dikumpulkan setiap tahun dan yang menjadi penanggung jawab atas indikator ini adalah Biro Perencanaan.

Adapun formula yang digunakan untuk pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pembangunan Statistik (IPS)} = \sum_{i=1}^n \text{IPS}_i$$

Keterangan:

i : K/L/Pemda ke 1, 2, ..., n

IPS_i : Nilai IPS K/L/Pemda ke- i

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dari Sasaran Strategis 3 yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi**. Indikator ini adalah gambaran tingkat kemajuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Angka pada indikator ini bersumber dari Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sumber data tersebut dikumpulkan setiap tahun dan yang menjadi penanggung jawab atas indikator ini adalah Biro Perencanaan.

PERENCANAAN KINERJA

2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025 semula BPS memperoleh anggaran sebesar Rp5.705.872.675.000,00. Namun, anggaran tersebut mengalami penyesuaian menjadi Rp5.818.983.499.000,00 setelah adanya proses revisi DIPA. Selama tahun 2025 BPS melakukan revisi DIPA sebanyak 13 kali dengan rincian 8 (delapan) kali Revisi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan 4 (empat) kali Revisi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan 1 (satu) kali revisi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA). Revisi dalam rangka efisiensi anggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 19 Februari 2025. Selain itu, usulan membuka blokir efisiensi yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, tepatnya pada tanggal 23 April 2025 dan 11 Juni 2025. Adapun secara lengkap anggaran BPS sebelum dan sesudah revisi DIPA pada tahun 2025 adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 4 | Perubahan Anggaran BPS Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2025 (dalam ribu rupiah)

Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
(1)	(2)	(3)
Program Penyediaan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	2.178.842.223	2.312.770.658
2896 Pengembangan dan Analisis Statistik	44.002.098	44.007.143
2897 Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	37.584.065	163.840.559
2898 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	45.306.231	20.804.503
2899 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	40.573.121	34.447.181
2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	5.633.295	6.071.071
2901 Pengembangan Sistem Informasi Statistik	16.736.566	300.626.985
2902 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	916.959.495	805.669.528
2903 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	117.101.486	88.836.524
2904 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalan, Energi, dan Konstruksi	73.751.884	52.288.955

Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
(1)	(2)	(3)
2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	335.559.597	220.818.040
2906 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	301.959.107	271.967.056
2907 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	52.628.715	57.792.070
2908 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	62.334.407	76.911.195
2909 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	9.369.180	25.088.983
2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	119.342.976	143.600.865
Program Dukungan Manajemen	3.527.030.452	3.506.212.841
2881 Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	7.690.761	4.250.793
2882 Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	24.476.032	15.128.246
2883 Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	10.995.809	1.253.882
2884 Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	388.575.364	356.331.705
2885 Dukungan Manajemen BPS Lainnya	127.651.245	138.015.864
2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	2.854.462.088	2.889.044.614
2887 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	61.099.152	55.684.320
2888 Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	48.908.449	44.583.682
4203 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	978.172	590.904
4204 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	1.005.263	607.159
4205 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	1.188.117	721.672
Total	5.705.872.675	5.818.983.499



Akuntabilitas Kinerja

3



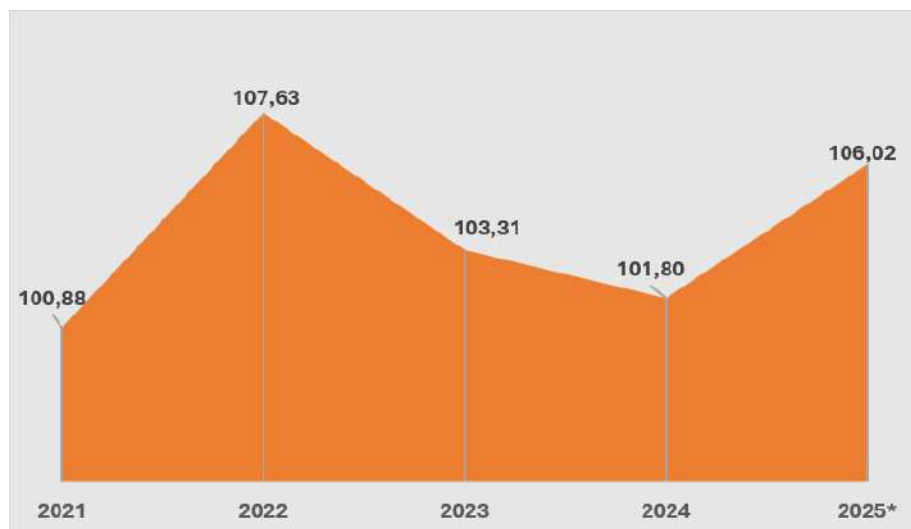
Halaman ini dibiarkan kosong

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja BPS

Kinerja BPS tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2025. Indikator ini tercantum pada Peraturan Kepala BPS Nomor 163 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 dan selaras dengan Rencana Strategis BPS tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029.

Secara rata-rata, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 106,02 yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Dibandingkan tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja ini lebih tinggi yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja organisasi.



*Tahun 2025 menjadi awal periode renstra baru (2025-2029) sehingga indikator kinerja 2025 berbeda dengan indikator kinerja 2021-2024

Gambar 11 | Capaian Kinerja BPS 2021-2025

AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 | Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan								n/a	110,65	
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	Persen	n/a	65,00		n/a	71,92		n/a	110,65	
Sasaran 2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu								n/a	100,00	
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	n/a	2,35	1,70**	2,35**	2,35***		n/a	100,00	
Sasaran 3. Mewujudkan Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik								n/a	107,41	
Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	n/a	85,01	83,48	84,64	91,31		n/a	107,41	

n/a : Data tidak tersedia karena sasaran strategis dan indikator kinerja 2023-2024 berbeda dengan 2025

* Merupakan target Perjanjian Kinerja 2025 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

** Realisasi 2023-2024 tersedia karena BPS menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pembangunan Statistik Sektorial sejak 2023 yang menghasilkan nilai IPS, meskipun indikator ini belum dijadikan indikator kinerja sasaran strategis

*** Menggunakan realisasi tahun 2024 karena tidak tersedia nilai IPS tahun 2025



Tingkat Pemanfaatan Data Statistik

Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana data statistik resmi yang dihasilkan BPS benar-benar digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan. TPDS tidak sekadar menunjukkan ketersediaan data, tetapi mencerminkan efektivitas BPS dalam menghadirkan data yang relevan, mudah diakses, serta mampu memberikan

insight yang dibutuhkan dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, capaian TPDS menjadi indikator penting keberhasilan BPS dalam memperkuat praktik kebijakan berbasis bukti dan menumbuhkan budaya pengambilan keputusan yang berlandaskan data statistik yang berkualitas.

TPDS digunakan sebagai indikator kinerja BPS sejak tahun 2025, sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029. Tahun 2025, nilai TPDS mencapai 71,92 persen. Nilai ini diperoleh dari TPDS pada dokumen pemerintah sebesar 70,09 persen dan TPDS berdasarkan penilaian pengguna data sebesar 79,22 persen. Nilai TPDS pada dokumen pemerintah sebesar 70,09 persen memiliki makna bahwa dari seluruh dokumen pemerintah yang dinilai, sebesar 70,09 persennya telah memanfaatkan data BPS secara berkualitas, ditinjau dari relevansi dan kemitakhiran datanya. Sedangkan nilai TPDS pengguna sebesar 79,22 persen memiliki makna bahwa pengguna menilai rata-rata tingkat kualitas data BPS sebesar 79,22 persen. Kualitas ini ditinjau dari aspek distribusi dan aksesibilitas, relevansi, frekuensi penggunaan, citra dan kepercayaan, serta dampak kepada kebijakan. Adapun cakupan pengguna data dalam penghitungan TPDS pengguna adalah Pelajar/Mahasiswa, Peneliti/Dosen, ASN/TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Swasta, Wiraswasta, dan pengguna lainnya yang menjadi responden Survei Kebutuhan Data Tahun 2025.

Nilai ini lebih besar dibandingkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebesar 65 persen sehingga diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 110,65 persen. Capaian tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan serta kebutuhan para pemangku kepentingan terhadap data statistik resmi BPS sebagai dasar dalam perumusan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan. Dengan kata lain, BPS tidak hanya berhasil memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, tetapi juga berhasil memperkuat peran BPS sebagai rujukan utama data statistik dalam perumusan kebijakan berbasis bukti.

Risiko utama yang dihadapi dalam pencapaian TPDS adalah masih rendahnya tingkat pemanfaatan data statistik oleh pemangku kepentingan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman terhadap pentingnya data statistik sebagai dasar kebijakan. Sebagai bentuk mitigasinya, BPS berupaya meningkatkan literasi pengguna data BPS melalui berbagai kegiatan edukasi dan promosi statistik. Aktivitas edukasi statistik meliputi Pembinaan Pojok Statistik dan Agen Statistik, webinar yang bertujuan memperkenalkan kegiatan, data, dan layanan statistik di BPS kepada masyarakat

umum, *BPS Goes to School* yang bertujuan menumbuhkan budaya cinta statistik di lingkungan sekolah melalui pengenalan dan pemanfaatan data secara sederhana dan edukatif. Selain itu, dilakukan pula aktivitas promosi statistik yang menyajikan ulasan produk statistik resmi atau layanan statistik yang dikemas dengan teknis *storytelling* dan *copywriting* melalui berbagai media digital maupun konvensional. Aktivitas edukasi dan promosi statistik dilakukan secara masif baik oleh Direktorat Diseminasi Statistik maupun seluruh satuan kerja di lingkungan BPS. Upaya mitigasi risiko juga dilakukan melalui inovasi diseminasi data, antara lain penyediaan tabel dinamis, infografis, dashboard interaktif, serta pemanfaatan Indonesia Data Hub (INDAH) sebagai *one stop collaboration platform* untuk meningkatkan literasi data, nilai guna statistik, interoperabilitas data, dan kolaborasi eksplorasi data

Kolaborasi strategis dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga semakin ditingkatkan. Di kancah Kementerian/Lembaga misalnya, BPS senantiasa berkolaborasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, dan Kementerian Sosial dalam pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sedangkan di lingkup pemerintah daerah, BPS memberikan edukasi mengenai pemanfaatan statistik dalam pembangunan daerah kepada para pimpinan daerah, salah satunya dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Magelang.

Risiko lainnya yang kerap muncul adalah keterlambatan dalam penyediaan data atau tidak tersedianya data yang relevan saat dibutuhkan. Risiko tersebut antara lain disebabkan oleh proses pengumpulan dan pengolahan data yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, belum optimalnya pemanfaatan sumber data alternatif seperti *big data* dan data administratif, serta keterbatasan kapasitas fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya dukungan sumber daya manusia, tenaga lapangan, dan infrastruktur pendukung.

Berkaitan dengan digitalisasi, mitigasi yang sudah dilakukan salah satunya berupa penyempurnaan FASIH (*Flexible Authentically Survey in Harmony*). FASIH merupakan aplikasi survei dan sensus digital milik BPS yang berfungsi sebagai alat pengumpulan data modern (CAPI/CAWI) menggunakan ponsel pintar berbasis android atau web, menggantikan kuesioner kertas untuk mempercepat proses pendataan, menghemat biaya, dan menghasilkan data statistik yang lebih cepat tersedia serta akurat. Selain itu, BPS juga mengembangkan IPAS (*Integrated Processing and Analysis*

System). IPAS merupakan sistem yang memfasilitasi pemrosesan dan analisis data yang terintegrasi sehingga hasil analisis bisa diperoleh lebih cepat dan akurat.

Sementara itu, berkaitan dengan penggunaan sumber daya alternatif, BPS telah mengoptimalkan pemanfaatan data administrasi untuk berbagai kegiatan. Salah satunya, penggunaan data administrasi dari Kementerian Perindustrian, Dewan Nasional KEK, BP Batam, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia, Kementerian Investasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum, Otoritas Jasa Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Radio Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia, Kementerian Koperasi UMKM, PT. Indomarco Pristama, Kementerian ATR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Asosiasi Semen Indonesia, dan Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia dalam pemutakhiran IBR (*Integrated Business Register*). Penyusunan IBR bertujuan mengintegrasikan seluruh data direktori sehingga tersedia basis data perusahaan yang mutakhir melalui proses pemeliharaan dan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Penggunaan data administrasi memungkinkan perluasan cakupan populasi secara lebih komprehensif.

Meskipun telah melakukan berbagai mitigasi, BPS masih dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan dalam pencapaian target TPDS. Adanya efisiensi anggaran, khususnya dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) menjadi salah satu kendala yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan survei, pelatihan petugas, serta kegiatan diseminasi data. Adanya Efisiensi anggaran yang cukup besar dalam Program PPIS di tahun 2025 menyebabkan beberapa kegiatan seperti Survei Perilaku Anti Korupsi, Indepth Pendataan Statistik Tanaman Bawang dengan Metode Kerangka Sampling Area (KSA), dan *Business Characteristic Survey* (BCS) tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, BPS juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia melalui optimalisasi penggunaan pegawai BPS sebagai petugas pengumpulan data dan optimalisasi anggaran pada 43 kegiatan pengumpulan data. Penyesuaian skala prioritas kegiatan, pengaturan ulang jadwal pelaksanaan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kunci agar pelaksanaan kegiatan tetap efektif di tengah keterbatasan fiskal.

Di sisi lain, perubahan metodologi, penyesuaian struktur kelembagaan di Kementerian/Lembaga, serta munculnya indikator baru turut menuntut proses sinkronisasi dan koordinasi yang lebih intensif. Tantangan juga muncul dari aspek teknis, seperti kendala pengumpulan data di lapangan akibat kondisi cuaca dan jaringan, keterlambatan pengiriman dan pengolahan data, serta keterbatasan aplikasi pendukung. Selain itu, tingginya beban kerja, keterbatasan waktu dan SDM, serta rendahnya tingkat respons dari sebagian responden turut memengaruhi kualitas data yang dihasilkan.

Untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, BPS telah dan terus melakukan berbagai upaya penguatan strategi secara berkelanjutan. BPS memperkuat koordinasi internal dan eksternal untuk memastikan keselarasan metodologi, jadwal, serta pemenuhan kebutuhan data lintas sektor, sekaligus menjaga kualitas statistik yang dihasilkan. Selain itu, BPS secara aktif terus memperkuat literasi data kepada pengguna melalui sasaran program peningkatan literasi statistik yang diwujudkan dalam kegiatan edukasi dan promosi statistik, sebagai bagian dari penguatan citra kelembagaan BPS.

Pada tahun 2026, BPS akan melanjutkan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan pemanfaatan data statistik berkualitas dan *insight* dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan melalui penguatan produksi statistik, koordinasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas SDM. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan keberlanjutan survei-survei strategis dan penyusunan publikasi tepat waktu, termasuk Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), survei sektoral, serta publikasi hasil SUPAS 2025, disertai penguatan koordinasi dan pembinaan statistik sektoral kepada kementerian dan lembaga, khususnya dalam rangka EPSS 2026 dan pengelolaan 45 IUP. BPS juga mempersiapkan berbagai skenario mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kolaborasi dan integrasi data dengan K/L, memanfaatkan *big data* dan data administrasi lintas sektor, serta menerapkan standar statistik internasional untuk menjaga kualitas dan konsistensi data. Sejalan dengan itu, penguatan kapasitas SDM terus didorong, tidak hanya dalam menghasilkan statistik yang berkualitas, tetapi juga dalam menyusun narasi *insight* yang informatif dan berdampak kebijakan, sehingga data statistik BPS semakin relevan, mudah dimanfaatkan, dan berkontribusi nyata dalam kebijakan berbasis bukti.

Indeks Pembangunan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terpadu. Nilai IPS dihasilkan melalui kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). EPSS sendiri merupakan proses penilaian sistematis oleh BPS untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, kegiatan EPSS dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Sebagai respon atas adanya perubahan struktur pemerintahan yang mengakibatkan perubahan lokus penilaian dan wali data serta penyelenggaraan statistik sektoral yang belum berjalan optimal khususnya pada Kementerian/Lembaga baru, ditambah pula dengan perlunya penyesuaian tata kelola dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Rencana *Grand Design* RB 2025-2045 dan *Roadmap* RB 2025-2029, BPS tidak menyelenggarakan EPSS di tahun 2025. Hal ini berdampak pada tidak tersedianya nilai IPS tahun 2025.

Sesuai dengan Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor : B-237/02000/TS.160/2025 Tanggal : 7 Mei 2025, Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025, digunakan hasil evaluasi terakhir (tahun 2024) dengan nilai IPS sebesar 2,35 poin dalam penghitungan capaian kinerja. Berdasarkan nilai ini, diperoleh capaian tahun 2025 sebesar 100 persen.

Risiko yang dihadapi dalam pencapaian IPS adalah terjadinya duplikasi data dan rendahnya kualitas basis data yang digunakan dalam proses perumusan kebijakan, yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar-instansi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Selain itu, risiko inkompatibilitas data juga masih dihadapi akibat belum sepenuhnya diterapkannya standar statistik yang seragam dalam proses statistik lintas sektor. Kondisi tersebut dapat berdampak pada ketidaktepatan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, serta berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap Sistem Statistik Nasional secara keseluruhan.

Untuk mengurangi potensi kemunculan risiko tersebut, pada tahun 2025 BPS melakukan berbagai upaya mitigasi yang meliputi : 1) penetapan lokus pembinaan statistik sektoral yang bertambah jumlahnya akibat perubahan struktur kabinet dalam pemerintahan; 2) pelayanan konsultasi dan permintaan produk statistik; 3) sosialisasi Indeks Pelayanan Publik; 4) pembinaan statistik sektoral (Pembinaan Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral, Prinsip Satu Data Indonesia, Sistem Statistik Nasional, Proses Bisnis Statistik, serta Kualitas Data dan Kelembagaan), 5) pelayanan permintaan data dari lembaga internasional, serta 6) pelaksanaan kerja sama pertukaran data. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L), meningkatkan pemahaman terhadap standar statistik, serta mendukung perbaikan tata kelola statistik sektoral sebagai fokus utama pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Penetapan dan perancangan lokus pembinaan statistik sektoral merupakan salah satu tahapan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pembinaan. Pada tahun 2024, lokus pembinaan statistik sektoral mengacu pada struktur Kabinet Indonesia Maju dengan cakupan sebanyak 37 Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi target pembinaan statistik sektoral. Tahun 2025, target ini diperluas sebagai upaya memperluas cakupan pembinaan statistik sektoral sekaligus mengakomodir terjadi perubahan struktur pemerintahan menjadi Kabinet Merah Putih yang berdampak pada perubahan struktur Kementerian/Lembaga. BPS melakukan penyesuaian terhadap lokus binaan yang diampu oleh masing-masing tim pembina di tingkat pusat menjadi 91 K/L. Penyesuaian lokus pembinaan K/L tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni 1. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2024; 2. Peran K/L sebagai pengampu indikator pembangunan; 3. Lokus pembinaan pada tahun sebelumnya; 4. Ketersediaan anggaran perjalanan dinas tahun 2025; 5. Pemerataan alokasi lokus berdasarkan segmentasi K/L; 6. Kedekatan substansi antara K/L dengan lingkup tugas direktorat pembina.

Meskipun telah melakukan berbagai upaya mitigasi, BPS masih mengalami kendala dalam kegiatan pendukung penyelenggaraan SSN yang baik dan terpadu antara lain efisiensi anggaran yang berdampak pada keterbatasan dukungan pembiayaan pembinaan statistik sektoral. Untuk mengatasi hal ini, sebagian kegiatan pembinaan dilakukan secara daring, meskipun efektivitasnya tidak seoptimal jika dilakukan secara luring.

Kendala lainnya adalah belum optimalnya kesiapan kelembagaan pada K/L baru atau hasil pemekaran yang masih dalam proses penyesuaian struktur organisasi, serta

meningkatnya kompleksitas layanan konsultasi dan permintaan data. Selain itu, keterbatasan SDM, waktu, dan infrastruktur teknologi informasi turut memengaruhi efektivitas layanan. Solusi yang sudah dilaksanakan adalah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan K/L, penyesuaian materi pembinaan sesuai kondisi kelembagaan, pengalokasian beban kerja secara proporsional, serta percepatan integrasi dan migrasi sistem dengan pemanfaatan otomatisasi dan optimalisasi pemrosesan data guna mendukung perbaikan tata kelola statistik sektoral secara berkelanjutan.

Tahun 2026 BPS akan melakukan berbagai upaya dalam menyempurnakan pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) dengan memprioritaskan pembinaan pada K/L yang dominan mengampu berbagai indikator pembangunan di level nasional. Selain itu, dalam hal tata kelola pelayanan, akan ditetapkan kriteria prioritas layanan berdasarkan urgensi dan dampak. Dengan demikian, diharapkan transformasi data sektoral menjadi lebih berkualitas sejalan dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain penerapan proses bisnis terstandar pada seluruh kegiatan statistik sektoral pada setiap K/L sesuai dengan *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)*. Selain itu, BPS juga senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas tim PSS melalui Kegiatan Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektoral (Esensial). Melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, BPS memastikan pembinaan statistik sektoral tetap relevan dan adaptif menuju statistik yang berkualitas, bermakna, dan berdampak.

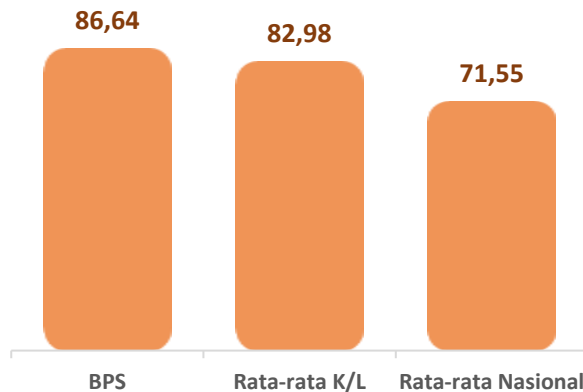


Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) digunakan untuk menjelaskan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah, yang mencakup upaya penataan kelembagaan, perbaikan dan penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta penguatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dari Kementerian PANRB menunjukkan indeks RB BPS pada tahun 2025 sebesar 91,31 poin. Berdasarkan nilai ini, diperoleh capaian kinerja untuk indikator Indeks RB sebesar 107,41. Angka tersebut menunjukkan bahwa BPS telah memenuhi kriteria organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.

AKUNTABILITAS KINERJA

Hingga laporan ini disusun, Kementerian PANRB belum merilis rata-rata nilai nasional maupun rata-rata nilai Kementerian/Lembaga dan Provinsi tahun 2025. Dengan demikian, *benchmarking* nilai indeks RB masih menggunakan realisasi tahun 2024.



Gambar 12 | Perbandingan Indeks RB BPS dengan Rata-rata K/L dan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024, nilai Indeks RB BPS tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kementerian/Lembaga yang berada pada angka 82,98, serta melampaui rata-rata nasional sebesar 71,55. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di BPS telah berjalan lebih progresif dan konsisten dibandingkan sebagian besar instansi pemerintah lainnya. Keunggulan nilai tersebut merefleksikan semakin kuatnya komitmen BPS dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk melalui penguatan sistem merit, percepatan digitalisasi proses bisnis, serta peningkatan kualitas pelayanan statistik kepada pengguna. Posisi BPS yang berada di atas *benchmark* K/L dan nasional sekaligus menjadi indikator bahwa praktik perbaikan yang dilakukan telah memberikan hasil nyata.

Tahun 2025 merupakan titik balik krusial karena menandai berakhirnya RPJPN 2005–2024 dan dimulainya periode baru 2025–2045 (Indonesia Emas). Tahun 2025 sekaligus merupakan periode awal implementasi RPJMN 2025-2029 dan Renstra K/L 2025-2029. Di tahun 2025, BPS mengakselerasi perbaikan tata kelola melalui integrasi agenda Transformasi Statistik dan Reformasi Birokrasi (RB) sebagai satu kerangka perubahan organisasi yang utuh. Dari sisi perencanaan strategis, BPS menyelesaikan

penyusunan Renstra 2025–2029 yang selaras dengan RPJMN 2025–2029 serta memperkuat fondasi pengukuran kinerja melalui penyusunan dan penajaman metadata Indikator Kinerja Utama (IKU). Upaya ini diikuti dengan harmonisasi arsitektur proses bisnis statistik, penyelarasan tugas dan fungsi antarunit, serta penyempurnaan standar operasional prosedur guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan konsistensi layanan. BPS juga memajukan tata kelola data melalui pengembangan kerangka Tata Kelola Data Administrasi, penguatan interoperabilitas sistem, serta pemanfaatan platform digital terintegrasi yang mendukung siklus produksi statistik dari hulu hingga hilir. Sebagai bagian dari modernisasi, BPS menginisiasi pengembangan *AI Powered Statistics*, memperluas pemanfaatan *big data*, dan meningkatkan kapasitas analitik untuk menghasilkan *insight* yang lebih tajam bagi pembuat kebijakan.

Dalam hal implementasi RB, sedikit berbeda dengan tahun 2024 dimana BPS masih fokus pada pemenuhan komponen evaluasi dan penyelesaian rekomendasi dasar, maka pada tahun 2025 yang merupakan periode transisi menuju *Grand Design* RB 2025–2045 dan *Road Map* RB Nasional 2025–2029, BPS berupaya memastikan kesinambungan pelaksanaan RB melalui penataan manajemen perubahan yang lebih terstruktur. Hal ini diwujudkan melalui reviu dan penyesuaian struktur Tim Kerja RB agar selaras dengan kebijakan terbaru, monitoring sistematis atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya, serta penguatan mekanisme koordinasi lintas unit.

Pada RB General, berbagai inisiatif yang di tahun 2024 masih dalam tahap perencanaan mulai direalisasikan pada tahun 2025. BPS mendorong implementasi sistem merit dalam manajemen SDM, percepatan digitalisasi tata laksana berbasis SPBE, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan statistik yang lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna. Berbagai inovasi pelayanan mulai diarahkan tidak hanya untuk memenuhi standar, tetapi juga untuk meningkatkan kemudahan akses, kecepatan layanan, dan transparansi proses.

Pada saat yang sama, RB Tematik tahun 2025 menunjukkan perluasan kontribusi BPS terhadap agenda prioritas pembangunan nasional. Dukungan statistik diberikan secara nyata dalam implementasi berbagai kebijakan strategis pemerintah, antara lain melalui penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dukungan data pada tata kelola pengadaan dan distribusi beras, serta penyediaan indikator untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Peran BPS juga meluas dalam penyediaan data dan analisis untuk Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pendataan lengkap wilayah IKN. Dengan pendekatan ini, reformasi

birokrasi di BPS semakin menegaskan orientasi dampak, di mana pembenahan internal berjalan beriringan dengan kontribusi langsung terhadap penyelesaian isu pembangunan.

Penguatan tata kelola pada tahun 2025 juga tercermin dalam meningkatnya peran BPS di tingkat regional dan global. BPS terlibat aktif dalam proses akses OECD bidang statistik dan data, berpartisipasi dalam forum BRICS, serta mengikuti berbagai pertemuan teknis internasional untuk memastikan keselarasan standar dan praktik statistik nasional dengan praktik global. Keterlibatan ini sekaligus memperkuat kredibilitas BPS sebagai otoritas statistik resmi yang modern, adaptif, dan terpercaya.

Risiko utama dalam pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah belum optimalnya kinerja pegawai akibat lemahnya budaya kerja positif, rendahnya adaptabilitas terhadap transformasi digital, serta keterbatasan sistem manajemen sumber daya manusia, yang berdampak pada produktivitas dan kualitas layanan statistik. Selain itu, lemahnya tata kelola dan pengawasan internal akibat struktur organisasi yang belum sepenuhnya adaptif dan minimnya digitalisasi proses berpotensi menimbulkan inefisiensi, penyimpangan administratif maupun keuangan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas kelembagaan BPS. Risiko lainnya adalah rendahnya kolaborasi dan komunikasi lintas sektor yang dapat menghambat penguatan ekosistem statistik nasional dan pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan berbasis bukti.

Serangkaian transformasi sebagai upaya mitigasi untuk meminimalisir potensi munculnya risiko tersebut telah dijalankan dengan mengedepankan penguatan budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan profesional sebagai fondasi utama organisasi. Budaya bersih diwujudkan melalui komitmen seluruh jajaran BPS untuk menjaga integritas dan objektivitas data tanpa intervensi, sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Prinsip akuntabel diterapkan agar setiap langkah transformasi dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik sesuai dengan standar metodologi yang baku. Sementara itu, profesionalisme ditekankan melalui penguatan SDM yang berbasis pada sistem merit, guna memastikan penempatan dan pengembangan pegawai dilakukan secara objektif sesuai potensi dan kompetensi. Strategi ini bertujuan untuk mencetak insan statistik yang unggul, presisi, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Guna memastikan seluruh proses tersebut berjalan pada koridor yang tepat, BPS secara konsisten memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko sebagai instrumen mitigasi terhadap potensi kegagalan pencapaian tujuan organisasi.

Integrasi Manajemen Risiko ke dalam proses bisnis memastikan bahwa setiap hambatan diidentifikasi sejak dini, sementara SPIP menjadi sistem kendali untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan dan efektivitas operasional.

Dalam implementasinya, upaya perbaikan tata kelola menghadapi kendala yang bersifat sistemik dan dinamis. Perubahan pada aspek regulasi, proses bisnis, sistem, dan budaya kerja membutuhkan waktu adaptasi, sementara kapasitas serta pemahaman SDM terhadap pendekatan baru belum merata. Dinamika keanggotaan tim serta kebutuhan penyusunan SOP baru turut menambah kompleksitas. Dari sisi sumber daya, penyesuaian anggaran sejak awal tahun memengaruhi ritme pelaksanaan kegiatan. Kendala juga muncul akibat belum seluruh K/L Messo melakukan penilaian, serta terbitnya petunjuk teknis nasional yang relatif terlambat sehingga memerlukan penyesuaian cepat terhadap fokus tematik dan rencana aksi. Di samping itu, koordinasi lintas unit, pusat-daerah, dan lintas instansi dengan kepentingan yang beragam menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi implementasi.

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, BPS menempuh pendekatan perubahan yang adaptif dan kolaboratif. Integrasi agenda transformasi ke dalam kegiatan prioritas organisasi menjadi strategi utama agar perubahan tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan. *Peran Change Agent Network* diperkuat untuk membangun pemahaman dan komitmen pegawai, sementara forum koordinasi teknis lintas unit dan lintas level dioptimalkan guna menyamakan persepsi serta memastikan sinergi pelaksanaan. Dalam konteks RB, BPS melakukan akselerasi internalisasi kebijakan segera setelah regulasi nasional ditetapkan, serta menerapkan pendekatan bottom-up dalam penyusunan rencana aksi untuk menangkap inisiatif yang paling berdampak dari unit kerja. Konsolidasi bukti dukung mandiri juga diperkuat untuk menjaga performa penilaian, dengan tetap mengedepankan penguatan pengendalian intern dan mitigasi risiko.

Upaya perbaikan ini akan terus dilanjutkan BPS pada tahun 2026 dengan memfokuskan penguatan tata kelola melalui penyempurnaan kebijakan dan kelembagaan, antara lain melalui reviu Renstra BPS 2025–2029 seiring penerapan SOTK BPS yang baru. BPS juga akan memaksimalkan proses *technical review* akses OECD Bidang Statistik dan Data melalui penguatan koordinasi internal dan eksternal serta partisipasi aktif dalam pertemuan teknis internasional, sekaligus meningkatkan kontribusi dalam forum BRICS melalui *working group* yang relevan. Upaya tersebut didukung oleh penyempurnaan dokumen Tata Kelola Data Administrasi (TKDA), pelanjutan peningkatan kapasitas SDM yang profesional dan pemetaan potensi SDM,

AKUNTABILITAS KINERJA

kepemimpinan perubahan, serta penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor guna memastikan konsistensi implementasi tata kelola statistik yang bersih, akuntabel, serta didukung oleh kematangan SPIP dan manajemen risiko yang handal.

Di tahun 2026, BPS juga merencanakan penyusunan tata kelola DTSEN sebagai standar operasional nasional, mengintegrasikan pembaruan DTSEN dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta memperkuat pembinaan statistik sektoral agar Pemerintah Daerah memiliki mekanisme pemutakhiran yang berkelanjutan. Pada rangkaian kegiatan SE2026, akan dilaksanakan pelatihan Innas dan Inda, pelatihan petugas, pendataan usaha besar melalui CAWI, pendataan lapangan dengan CAPI dan PAPI, pelaksanaan PES, serta uji coba lanjutan guna menjamin kesiapan operasional dan kualitas hasil SE2026.

3.2. Capaian Rencana Strategis 2025

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS yang dijabarkan dalam periode lima tahun. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam siklus perencanaan jangka menengah tersebut. Sehubungan dengan itu, BPS telah menetapkan target sasaran strategis untuk periode 2025–2029. Capaian terhadap target ini akan dievaluasi secara tahunan untuk memantau perkembangan kinerja serta memproyeksikan tingkat keberhasilan pada akhir tahun 2025. Berikut disajikan tabel yang berisi daftar indikator kinerja, beserta target Renstra, realisasi tahun 2025, dan capaian terhadap target Renstra.

Tabel 6 | Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja BPS Terhadap Renstra

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target Renstra 2029	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Renstra 2025 (%)	Capaian Terhadap Renstra 2029 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan					
1.1	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	76 Persen	86 Persen	71,92 Persen	94,63	83,63

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025	Target Renstra 2029	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Renstra 2025 (%)	Capaian Terhadap Renstra 2029 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu					
2.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,60 Poin	3,17 Poin	2,35 Poin**	90,38	74,13
3.	Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional					
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	85,01 Poin	90,01 Poin	91,31 Poin	107,41	101,44

* Mengacu pada target yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

** Menggunakan realisasi tahun 2024 karena tidak tersedia nilai IPS tahun 2025

Dibandingkan target Renstra tahun 2025, capaian dua indikator kinerja pada tahun 2025 masih belum optimal. Secara berturut-turut, besarnya capaian terhadap target Renstra 2025 untuk indikator Tingkat Pemanfaatan Data Statistik, Indeks Pembangunan Statistik (IPS), dan Indeks Reformasi Birokrasi adalah 94,63 persen; 90,38 persen; dan 107,41 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target renstra 2029, capaiannya untuk ketiga indikator berkisar antara 74 hingga 101 persen. Capaian ini tentunya berbeda dengan capaian kinerja yang telah disampaikan dalam subbab 3.1. Perbedaan capaian ini disebabkan adanya perbedaan target Renstra 2025 dan target Perjanjian Kinerja 2025. Target Renstra 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Sedangkan target Perjanjian Kinerja 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dimana dalam peraturan ini telah dilakukan pemutakhiran terhadap target renstra 2025.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penghambat pencapaian target untuk ketiga indikator kinerja sebagai berikut :

- Pemanfaatan data BPS oleh sebagian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih belum optimal. Pada instansi yang telah menggunakan data BPS,

pemanfaatan data belum seluruhnya memenuhi aspek relevansi dan kemutakhiran yang menjadi parameter utama dalam penghitungan indikator.

- Perubahan struktur kabinet dalam pemerintahan yang berimplikasi pada terbentuknya K/L baru berdampak pada penyelenggaraan statistik sektoral K/L tersebut yang masih belum stabil. Identifikasi kegiatan statistik sektoral yang menjadi kewenangannya masih belum memungkinkan. Secara umum, K/L tersebut masih memprioritaskan proses konsolidasi dan penyesuaian struktur organisasi serta tata kelola internal.
- Proses tindak lanjut rekomendasi perbaikan nilai IPS, baik dalam bentuk penyempurnaan proses maupun penguatan kapasitas kelembagaan memerlukan waktu sehingga ada potensi peningkatan nilai setiap tahunnya relatif kecil.
- Perbaikan tata kelola yang meliputi aspek regulasi, proses bisnis, sistem, dan budaya kerja memerlukan waktu serta tahapan implementasi yang berkelanjutan. Perubahan yang bersifat sistemik dan kompleks tersebut membutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh lini organisasi.
- Keterbatasan alokasi anggaran penyelenggaraan yang mempengaruhi proses bisnis statistik maupun tata kelola kelembagaan.

Adapun beberapa faktor yang mampu mendorong pencapaian target Renstra adalah sebagai berikut:

- Adanya regulasi yang menegaskan kewajiban pemanfaatan statistik resmi dalam perumusan kebijakan pemerintah, termasuk dalam kerangka RPJPN 2025–2045, sehingga memperkuat posisi data BPS sebagai rujukan utama pembangunan.
- Penerapan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran, terutama pada masa efisiensi, membuat alokasi sumber daya tetap diarahkan pada kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden.
- Koordinasi dan kolaborasi yang semakin kuat antara BPS dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam membangun ekosistem data tematik mempercepat implementasi Satu Data Indonesia.
- Percepatan digitalisasi proses bisnis dan penguatan sistem pengolahan data yang terintegrasi melalui pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) mendorong peningkatan efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas data.

- Peran aktif BPS dalam siklus perencanaan, evaluasi, dan monitoring kebijakan pembangunan nasional meningkatkan relevansi serta utilisasi data statistik dalam pengambilan keputusan.
- Penguatan sistem pengendalian internal yang semakin baik mendukung tata kelola organisasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

3.3. Peran BPS dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas Presiden Tahun 2025 serta Penanganan Isu Strategis Lainnya

Berdasarkan pelaksanaan berbagai dukungan BPS terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan isu-isu prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan pada subbab 2.3, pada tahun 2025, BPS tidak hanya berfokus pada penyediaan data sebagai input kebijakan, tetapi juga pada pencapaian hasil nyata yang dapat diukur dan dievaluasi yang tercermin melalui ketersediaan indikator pembangunan yang andal, peningkatan kualitas dan integrasi data lintas sektor, serta kontribusi statistik yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan nasional.

RO Prioritas : Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik Resmi

Kegiatan Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik Resmi dilaksanakan untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional terkait tata kelola data serta pengembangan dan pemanfaatan *emerging technology*. Pada periode 2025–2029, penentuan target jumlah dan jenis kegiatan statistik berbasis *Big Data* dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas SDM dan dukungan anggaran. Pada tahun 2025, fokus kegiatan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan *Mobile Positioning Data* (MPD) melalui kerja sama dengan direktorat terkait, disertai pemantauan dan evaluasi rutin untuk memastikan kesesuaian implementasi dengan rencana.

Secara teknis, pemanfaatan MPD digunakan untuk menghasilkan statistik pariwisata (Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Nasional), statistik mobilitas penduduk (komuter), serta identifikasi wilayah metropolitan melalui delineasi *Metropolitan Statistical Area* (MSA). Aktivitas yang dilakukan meliputi pengembangan dan penyempurnaan *script Big Data*, pengolahan data MPD untuk menghasilkan indikator statistik, serta pelaksanaan survei digital MSA sebagai pelengkap guna

AKUNTABILITAS KINERJA

menjamin akurasi hasil estimasi di wilayah metropolitan. Seluruh proses didukung dengan penjaminan kualitas melalui pengecekan *compliance* dan evaluasi berkala.

Tabel 7 | Capaian RO Prioritas Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi Tahun 2025

Rincian Output (RO)	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
QMA 006 Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi	Layanan	14	14	83,91

Output kegiatan ini berupa tersedianya statistik pariwisata, statistik komuter, dan deliniasi wilayah MSA yang dimanfaatkan dalam penyusunan indikator pembangunan. Statistik pariwisata dipublikasikan melalui *website* BPS, antara lain mencakup jumlah kunjungan dan perjalanan wisatawan serta rata-rata lama tinggal, sementara statistik komuter diterbitkan dalam publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja. Hasil integrasi data MPD dan survei digital MSA selanjutnya disajikan dalam publikasi *Metropolitan Statistical Area* untuk mendukung estimasi indikator penyusun RPJMN di 10 wilayah metropolitan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kontinuitas penyediaan data MPD di awal tahun akibat kendala anggaran, ketidakkonsistenan hasil tabulasi algoritma dengan konsep statistik, rendahnya *response rate* survei digital, serta masih ditemukannya anomali dan *missing data*. Untuk mengatasinya, dilakukan penggunaan data sementara dari periode sebelumnya, penyusunan *dummy table* untuk menyelaraskan pemahaman dengan *provider*, peningkatan monitoring dan evaluasi, penguatan sosialisasi survei digital dengan melibatkan satuan kerja daerah, serta penyempurnaan proses cleaning dan algoritma. Ke depan, tindak lanjut difokuskan pada pengadaan pra-DIPA data MPD agar keberlanjutan rilis data lebih terjamin, evaluasi kebutuhan sampel survei digital agar selaras dengan anggaran, peningkatan strategi *provider* untuk menaikkan *response rate*, serta pengembangan *dashboard* pemantauan, sehingga pemanfaatan Big Data untuk statistik resmi semakin adaptif, andal, dan mendukung sasaran prioritas nasional secara optimal.

RO Prioritas : Pembinaan Statistik Sektoral

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan Renstra BPS 2025–2029, BPS melaksanakan pembinaan statistik sektoral sebagai bagian dari penguatan peran dalam Sistem Statistik Nasional. Kegiatan ini merupakan perwujudan misi BPS dalam menguatkan kepemimpinan penyelenggaraan statistik nasional guna memastikan ketersediaan data yang standar, konsisten, dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis data.

Selama tahun 2025, pembinaan statistik sektoral dilaksanakan secara terencana dan terstandar oleh Tim Pembina Statistik Sektoral di tingkat pusat dan daerah. Kegiatan utama mencakup penyusunan rencana kerja pembinaan, penetapan lokus dan PIC K/L binaan, identifikasi kegiatan statistik sektoral prioritas, pendampingan tahapan GSBPM, serta fasilitasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik, metadata, dan standar data statistik. Pelaksanaan pembinaan ini diukur melalui indikator Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Sesuai Standar.

Tabel 8 | Capaian RO Prioritas Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral

Rincian Output (RO)	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
QDB 003 Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral	Lembaga	547	547	55,95

Capaian tahun 2025 untuk RO ini sebesar 100 persen. Dari 547 Lembaga yang ditetapkan sebagai target, seluruhnya dapat terealisasi. Adapun realisasi anggaran pada RO ini mencapai 55,95 persen.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pembinaan, fungsi sekretariat pembinaan dan walidata BPS juga dilaksanakan secara optimal. Output yang dihasilkan meliputi penyusunan dan pemutakhiran instrumen pembinaan, pengembangan SOP, pelaksanaan *kick-off* dan rapat koordinasi, peningkatan kapasitas tim pembina melalui pelatihan dan *Training of Trainer* (ToT), serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja TPSS. Selain itu, BPS menjalankan fungsi walidata melalui

AKUNTABILITAS KINERJA

pengelolaan data prioritas, asesmen Indeks Satu Data Indonesia, dan penyusunan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Pelaksanaan pembinaan statistik sektoral masih menghadapi kendala berupa perbedaan tingkat pemahaman K/L/Pemda, keterbatasan anggaran dan SDM, serta keterbatasan pelaksanaan pembinaan luring. Upaya mitigasi dilakukan melalui pendampingan bertahap sesuai kebutuhan, penguatan koordinasi dengan Sekretariat EPSS dan walidata, optimalisasi metode daring dan luring, serta peningkatan kapasitas internal tim pembina. Tindak lanjut ke depan diarahkan pada peningkatan intensitas pembinaan tatap muka, penguatan sistem dan petunjuk teknis pembinaan, peningkatan kapasitas tim pembina, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral.

RO Prioritas : Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi nasional dan terjaganya komponen inflasi harga bergejolak, BPS melaksanakan kegiatan Statistik Harga secara berkelanjutan melalui perencanaan anggaran, penyiapan metodologi dan instrumen pendataan, penyempurnaan sistem pengolahan data, serta penguatan kapasitas petugas. Pendataan dilakukan setiap bulan melalui Survei Harga Konsumen di 150 kabupaten/kota dengan cakupan periode mingguan hingga bulanan, yang dilanjutkan dengan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi, dan andil inflasi pada tingkat nasional, 38 provinsi, dan 150 kabupaten/kota melalui mekanisme harmonisasi dan rekonsiliasi data, serta didukung pemanfaatan aplikasi *Flexible Authentically Survey in Harmony* (FASIH) dan penguatan diseminasi data inflasi.

Tabel 9 | Capaian RO Prioritas Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Rincian Output (RO)	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
QMA 006 Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi	Layanan	193	193	74,47

Capaian tahun 2025 untuk RO ini sebesar 100 persen. Dari 193 layanan yang ditetapkan sebagai target, seluruhnya dapat terealisasi. Adapun realisasi anggaran pada RO ini mencapai 74,47 persen.

Hingga akhir tahun 2025, kegiatan tersebut menghasilkan output strategis berupa tersedianya publikasi dan laporan IHK, inflasi, dan andil inflasi yang tepat waktu dan berkualitas pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, berfungsinya aplikasi FASIH sebagai sistem utama pengumpulan data harga, tersedianya portal Sistem Kelola Berita Resmi Statistik (KARISSA) sebagai media penyampaian Berita Resmi Statistik (BRS) Inflasi, serta terjaganya keberlanjutan publikasi inflasi pada kanal resmi BPS, yang secara aktif dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan statistik harga menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk pemenuhan data tarif pulsa ponsel, kebutuhan penyesuaian komoditas pasar online seiring perubahan pola konsumsi masyarakat, perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara mendadak, keterbatasan waktu akibat banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama, keterlambatan terbitnya dua publikasi akibat proses pemeriksaan naskah bahasa Inggris, serta permasalahan responden yang tidak *eligible*, sulit dijangkau, atau tidak bersedia memberikan informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan berbagai langkah penyelesaian melalui koordinasi intensif lintas unit dan kementerian, simulasi penghitungan dampak kebijakan strategis, pengetatan manajemen waktu dan SDM, serta penguatan koordinasi dengan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS). Sebagai tindak lanjut pada tahun 2026, direncanakan finalisasi PKS dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, penyesuaian bobot dan komoditas pasar *online*, penguatan pengelolaan waktu dan kedisiplinan *timeline* publikasi, serta penyesuaian metode *sampling* dengan mengombinasikan *probability* dan *purposive sampling*, guna meningkatkan adaptivitas, efisiensi, dan relevansi statistik harga dalam mendukung pengendalian inflasi nasional.

Prioritas Presiden : Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 menjadi landasan pelaksanaan peran strategis Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mewujudkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam pelaksanaannya, BPS bertugas menetapkan sumber data serta pedoman integrasi, menerima dan mengintegrasikan data *by name by address* dari K/L/D, serta mengelola DTSEN yang akurat untuk diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat,

Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Sosial. Pelaksanaan integrasi ini dilaporkan kepada Presiden secara berkala dan disampaikan pula kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bentuk akuntabilitas dan dukungan pengawasan.

Pada tahun 2025, implementasi Inpres 4 tahun 2025 diwujudkan melalui pembentukan DTSEN yang diawali dengan pepadupadanan data Registrasi Sosial Ekonomi Nasional (Regsosek), Penysaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang divalidasi menggunakan data kependudukan Dukcapil Kemendagri serta diperkaya data administrasi Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Kesehatan. Proses tersebut menghasilkan DTSEN versi Pertama yang diserahkan pada Februari 2025, yang kemudian dimutakhirkan melalui pembaruan data administrasi serta kolaborasi verifikasi lapangan (*ground check*) bersama Kementerian Sosial dan kementerian terkait untuk meminimalkan *inclusion* dan *exclusion error*. Proses ini menghasilkan DTSEN versi Kedua dan Ketiga pada Mei dan November 2025 sebagai dasar akurat bagi penyaluran bantuan sosial.

Selain pembentukan, BPS melaksanakan pemeringkatan kesejahteraan melalui pepadanan deterministik dan probabilistik, verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta pemodelan statistik pada tingkat kabupaten/kota hingga nasional. Dalam pengelolaannya, BPS melakukan pembaruan berkelanjutan melalui data administrasi, hasil survei dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam aspek metodologi dan instrumen pendataan. DTSEN kini telah dimanfaatkan secara luas oleh setidaknya 24 K/L dan berbagai Pemerintah Daerah untuk penargetan program sosial dan pembangunan sepanjang tahun 2025.

BPS menghadapi tantangan berupa perlunya dasar hukum turunan untuk perlindungan data pribadi, keterbatasan variabel individu, serta keberagaman kualitas data K/L/Pemda. Sebagai respons, BPS pada tahun 2025 telah menyusun Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pada tahun 2026, BPS merencanakan penyusunan tata kelola DTSEN sebagai standar operasional nasional, mengintegrasikan pembaruan DTSEN dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta memperkuat pembinaan statistik sektoral agar Pemerintah Daerah memiliki mekanisme pemutakhiran yang berkelanjutan.

Prioritas Presiden : Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei *Baseline*. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG. Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Supplier (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG. Survei *Baseline* dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga. Responden Survei *Baseline* adalah rumah tangga dan siswa baik yang sudah atau belum menerima program MBG dan dilakukan secara panel.

Pelaksanaan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei *Baseline* pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025. Rangkaian kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, pengembangan moda pencacahan dan *web* monitoring melalui aplikasi FASIH dan pelatihan petugas), tahap pemutakhiran dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan.

Pencacahan dilakukan dengan moda *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) dan *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI) melalui aplikasi FASIH. Output utama dari pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG adalah untuk mengukur dampak Program MBG terhadap gizi dan kesehatan masyarakat, perekonomian, dan ketenagakerjaan. Output kegiatan ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan dan standar

yang telah ditetapkan, memastikan ketepatan sasaran dan kualitas layanan, serta mengidentifikasi kendala dan praktik di lapangan. Hasil survei ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan program, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas keberlanjutan pelaksanaan Program MBG.

Program MBG adalah kebijakan pemerintah yang baru dilakukan di tahun 2025, sehingga masih ditemukan kesulitan dalam menentukan indikator untuk mengukur dampak program ini. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG antara lain penentuan indikator yang digunakan untuk mengukur dampak program MBG, ketidaksesuaian *frame* awal SPPG yang digunakan dalam pencacahan, rendahnya *response rate supplier*, serta padatnya waktu pelaksanaan karena dilaksanakan dua tahap, serta keterlambatan ketersediaan anggaran PNBPN untuk Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG. Solusi yang dilakukan atas kendala ini adalah melakukan diskusi dan koordinasi dengan berbagai K/L terkait serta para pakar yang lebih mengetahui mengenai proses bisnis penyediaan MBG dan pengukuran dampak makan bergizi. Daftar SPPG yang telah beroperasi, yang diterima dari BGN, dijadikan dasar dalam penentuan sampel, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan di lapangan, ada beberapa ketidaksesuaian diantaranya ditemukan SPPG yang belum beroperasi di lapangan sehingga perlu dilakukan penggantian sampel. Selain itu, untuk meningkatkan *response rate* dari *supplier* BPS melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *supplier* serta monitoring saat periode pencacahan. Serta memaksimalkan semua sumber daya yang tersedia agar pelaksanaan Survei Monev Program MBG berjalan sesuai jadwal.

Prioritas Presiden : Sekolah Rakyat

BPS memberikan dukungan strategis dalam pelaksanaan Program Pemerintah Sekolah Rakyat, khususnya pada tahap perencanaan lokasi dan penetapan sasaran peserta didik. BPS berperan dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik untuk menentukan lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, dengan prioritas pada wilayah yang termasuk dalam 100 daerah dengan jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrem tertinggi. Pada Tahap 1 (1A, 1B, dan 1C), sebagian besar lokasi Sekolah Rakyat berada di daerah prioritas tersebut dengan rincian masing-masing tahap sebesar 50,91 persen, 51,35 persen, dan 39,67 persen, mencerminkan komitmen penggunaan data kemiskinan sebagai dasar kebijakan agar program tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, BPS tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Peserta Didik Sekolah Rakyat dengan tugas utama melakukan pemadanan dan verifikasi data calon peserta didik dengan DTSEN dan memberikan informasi peringkat kesejahteraan keluarganya. BPS mendukung proses verifikasi dengan memadankan data *by name by address* dari DTSEN, memberikan informasi peringkat kesejahteraan keluarga, serta berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, SDM PKH, dan Pemerintah Daerah. BPS juga berperan dalam menangani potensi *exclusion error*, yaitu calon peserta didik di luar desil 1 DTSEN yang layak secara kondisi lapangan agar dapat diusulkan dan disesuaikan kembali dalam basis data kesejahteraan nasional.

Hasil verifikasi menunjukkan peran BPS yang signifikan dalam menjamin akurasi dan kualitas data sasaran program. Hingga 5 Agustus 2025, dari ribuan calon siswa yang diverifikasi pada Tahap 1A, 1B, dan 1C, lebih dari 97% dinyatakan layak sebagai peserta Sekolah Rakyat. Proses verifikasi dilakukan secara berlapis, mencakup pengecekan variabel sosial ekonomi DTSEN, kondisi lapangan, serta kesediaan calon siswa. Dukungan ini memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan berbasis data, transparan, dan efektif dalam menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan sesuai tujuan kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan dukungan data untuk Program Sekolah Rakyat masih menghadapi sejumlah kendala dalam aspek penetapan sasaran dan tata kelola informasi. Ditemukan adanya potensi *exclusion error* yang memerlukan pemutakhiran status desil secara cepat agar dapat memastikan calon siswa telah sesuai dengan kriteria program. Di sisi lain, sebagian keluarga calon siswa yang memenuhi kriteria menunjukkan penolakan terhadap skema pendidikan berasrama karena kekhawatiran terhadap potensi hilangnya kontribusi pendapatan anak di rumah tangga. Tantangan juga muncul dari belum terintegrasinya mekanisme pendataan dalam satu platform terpadu, serta adanya perbedaan hasil pemeringkatan desil antara data DTSEN dengan temuan verifikasi lapangan maupun hasil pengawasan, yang menimbulkan kebutuhan harmonisasi rujukan data.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, BPS mendorong perbaikan kualitas variabel dan kelengkapan informasi pada DTSEN agar proses pemeringkatan semakin akurat, sekaligus mengusulkan agar pengawasan menggunakan versi data yang sama dengan hasil verifikasi lapangan dengan tetap mempertimbangkan kondisi riil. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan unit pengelola data di kementerian sosial, terus dilakukan guna mewujudkan integrasi sistem pendataan. Selain itu, diperlukan pemberian pemahaman kepada keluarga calon siswa

mengenai manfaat program serta dukungan bantuan yang relevan guna memitigasi kekhawatiran kehilangan pendapatan. Sebagai tindak lanjut menuju pelaksanaan tahun 2026, BPS menyiapkan DTSEN versi 1/2026 yang memuat penduduk usia sekolah terutama di wilayah terluar dan terdepan berdasarkan partisipasi sekolah, sebagai dasar pemetaan dan penentuan lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Prioritas Presiden : Program 3 Juta Rumah

BPS memberikan dukungan strategis terhadap Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan data statistik yang komprehensif dan terpilah sebagai dasar penentuan sasaran kebijakan perumahan. BPS telah menyerahkan data jumlah keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan perumahan—meliputi *backlog* kepemilikan rumah dan *backlog* rumah layak huni—berdasarkan desil kesejahteraan untuk 514 Kabupaten/Kota dan 38 Provinsi di seluruh Indonesia. Secara nasional, terdapat sekitar 19,27 juta keluarga yang memenuhi kriteria kelayakan sebagai penerima bantuan rumah layak huni, sehingga data ini menjadi rujukan utama pemerintah dalam merancang skala dan prioritas intervensi Program 3 Juta Rumah.

Selain itu, BPS mendukung intervensi *backlog* perumahan melalui pemanfaatan DTSEN sebagai basis penajaman sasaran program. *Backlog* kepemilikan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi penerima program pembiayaan perumahan yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sementara *backlog* kelayakhunian menjadi dasar penentuan sasaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pemanfaatan DTSEN juga memungkinkan integrasi berbagai skema perumahan sektoral, seperti perumahan bagi guru, tenaga kesehatan, wartawan, buruh, pekerja migran, ASN, serta masyarakat berpenghasilan rendah lainnya, sehingga pelaksanaan Program 3 Juta Rumah lebih tepat sasaran, terkoordinasi, dan berbasis data yang akuntabel.

BPS secara berkala memantau perkembangan *backlog* kepemilikan dan kelayakhunian rumah melalui data Susenas, yang menunjukkan adanya penurunan *backlog* secara nasional dari tahun 2024 ke 2025. Informasi ini berfungsi sebagai alat evaluasi capaian program sekaligus masukan penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memperbaiki efektivitas kebijakan perumahan ke depan. Dengan peran tersebut, BPS tidak hanya mendukung perencanaan, tetapi juga pengendalian dan evaluasi Program 3 Juta Rumah secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah masih menghadapi sejumlah kendala. Perbedaan definisi operasional rumah layak huni antarinstansi menimbulkan potensi ketidaksinkronan antara angka statistik dengan kebutuhan intervensi di lapangan. Pemanfaatan DTSEN juga masih dihadapkan pada risiko *inclusion* dan *exclusion error* akibat dinamika perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, kriteria MBR yang sebelumnya relatif seragam secara nasional belum sepenuhnya mampu menangkap variasi tingkat kesejahteraan antarwilayah. Tantangan lainnya adalah perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami konsep, metodologi, dan keterbatasan data statistik, serta belum optimalnya sinkronisasi pemanfaatan data antar pemangku kepentingan.

Sebagai respons, BPS terus memperkuat penyediaan data yang terstandar disertai metadata yang jelas, mendorong optimalisasi DTSEN untuk penajaman sasaran, serta menyusun kajian berbasis desil kesejahteraan sebagai masukan penyesuaian kriteria MBR yang lebih adaptif. BPS juga melakukan pendampingan teknis dan peningkatan literasi statistik kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar pemanfaatan data lebih tepat. Ke depan, tindak lanjut diarahkan pada penguatan integrasi data statistik dengan sistem informasi program, pengembangan dashboard yang lebih informatif, serta penguatan peran BPS sebagai otoritas data guna memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program 3 Juta Rumah secara transparan dan berbasis bukti.

Penanganan Isu Strategis : Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Padi

Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Padi merupakan kegiatan statistik strategis yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah dan Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. Survei ini bertujuan menyediakan data luas panen padi yang akurat, objektif, dan tepat waktu sebagai dasar utama perhitungan produksi padi nasional dan pengambilan kebijakan pangan strategis. KSA Padi menggunakan pendekatan berbasis area dengan unit observasi berupa segmen dan subsegmen lahan pertanian, sehingga mampu menangkap dinamika pertanaman secara aktual dan mengurangi bias pelaporan.

Pelaksanaan Survei KSA Padi mencakup seluruh lahan pertanian, baik sawah maupun bukan sawah, di 38 provinsi dan 488 kabupaten/kota. Kegiatan pendataan dilakukan setiap bulan melalui metode survei (sampling) dengan moda *Computer-*

Assisted Personal Interviewing (CAPI). Sebanyak 281.817 titik amatan diamati secara langsung di lapangan oleh 7.572 petugas dan pengawas, disertai dokumentasi foto pada setiap titik pengamatan sebagai bentuk pengendalian mutu dan akuntabilitas data. Aktivitas pendukung lainnya meliputi penyiapan metodologi, pelatihan petugas, pengelolaan sistem pengumpulan data, serta pemantauan kualitas hasil pengamatan.

Output utama Survei KSA Padi adalah tersedianya data luas panen padi bulanan yang menjadi komponen utama dalam penghitungan produksi padi nasional. Data tersebut diserahkan secara rutin kepada Perum BULOG dan dimanfaatkan oleh Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, hasil KSA Padi dipublikasikan melalui Berita Resmi Statistik (BRS) Luas Panen dan Produksi Padi dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan neraca pangan, pengendalian inflasi pangan, serta kebijakan stabilisasi pasokan beras.

Dalam pelaksanaannya, Survei KSA Padi menghadapi kendala berupa terjadinya bencana alam menghambat akses ke lokasi, serta keterbatasan kapasitas server dan media penyimpanan. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS melakukan penyesuaian jadwal pendataan di daerah terdampak bencana serta menambah kapasitas server dan penyimpanan data amatan. Sebagai tindak lanjut pada tahun 2026, BPS akan terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan data lapangan, serta menyempurnakan mekanisme pengendalian mutu agar pelaksanaan Survei KSA Padi semakin andal dan berkelanjutan.

Penanganan Isu Strategis : Survei Ubinan Padi

Survei Ubinan Padi merupakan kegiatan statistik lanjutan yang bertujuan menghasilkan data produktivitas padi melalui pengukuran hasil panen secara langsung pada petak contoh terpilih. Survei ini dilaksanakan sebagai bagian integral dari sistem penghitungan produksi padi nasional dan mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2025. Dengan mengukur hasil panen riil di lapangan, Survei Ubinan Padi berperan penting dalam meningkatkan akurasi estimasi produksi padi dan memperkuat basis data kebijakan pengelolaan gabah dan beras nasional.

Pelaksanaan Survei Ubinan Padi mencakup lahan padi sawah dan padi ladang di 38 provinsi dan 480 kabupaten/kota. Pendataan dilakukan setiap empat bulan (subround) melalui metode survei (sampling) pada 78.626 sampel plot ubinan, menggunakan moda CAPI. Kegiatan lapangan dilaksanakan oleh 7.331 petugas BPS

bekerja sama dengan aparat dinas pertanian setempat. Aktivitas utama meliputi pengukuran langsung produktivitas pada plot ubinan terpilih, pengumpulan informasi pendukung melalui wawancara, serta dokumentasi lapangan untuk menjamin ketepatan hasil pengukuran dan konsistensi data.

Output yang dihasilkan dari Survei Ubinan Padi adalah data produktivitas padi yang menjadi input utama dalam penghitungan produksi padi nasional berbasis Kerangka Sampel Area. Data tersebut digabungkan dengan hasil Survei KSA Padi untuk menghasilkan angka produksi padi yang akurat dan diseminasi melalui Berita Resmi Statistik. Selain itu, data produktivitas padi dimanfaatkan oleh Perum BULOG dan kementerian/lembaga terkait sebagai dasar perencanaan pengadaan gabah, penyaluran cadangan beras pemerintah, serta penyusunan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan beras.

Dalam pelaksanaannya, Survei Ubinan Padi menghadapi kendala berupa risiko terjadinya lewat panen akibat informasi jadwal panen yang disampaikan secara mendadak oleh petani, serta pelaksanaan panen serentak menggunakan alat modern seperti *combine harvester* yang menyulitkan petugas melakukan pengukuran ubinan tepat waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penguatan komunikasi dan koordinasi antara petugas lapangan dengan petani atau kelompok tani, serta pemanfaatan aplikasi pengingat jadwal panen di beberapa daerah. Sebagai tindak lanjut pada tahun 2026, BPS merencanakan pembaruan kuesioner Survei Ubinan Padi guna meningkatkan efisiensi pendataan, kualitas pengukuran produktivitas, dan responsivitas survei terhadap dinamika praktik panen di lapangan.

Penanganan Isu Strategis : Survei Kesejahteraan Petani

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini bertujuan menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang menggambarkan kondisi kesejahteraan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) secara komprehensif. SKP mencakup 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota dengan populasi RTUP pada enam subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis sampling dengan jumlah sampel

AKUNTABILITAS KINERJA

98.349 RTUP menggunakan moda *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI) oleh petugas pendataan dan pemeriksaan lapangan. Pendataan lapangan dilaksanakan pada September–Oktober 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan, pembersihan data, penyusunan tabulasi, dan penyiapan publikasi. Nilai Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) direncanakan untuk dirilis pada tahun 2026.

Output utama SKP adalah tersedianya nilai Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) yang dihitung berdasarkan enam dimensi dan dua puluh indikator, meliputi dimensi Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Gizi, Pendidikan, Standar Hidup, Sumber Daya dan Penghidupan, serta Mitigasi Risiko. Selain nilai indeks, SKP juga menghasilkan informasi mengenai proporsi RTUP pada setiap kategori kesejahteraan, rata-rata skor deprivasi dan non-deprivasi, serta identifikasi dimensi dan indikator yang masih memerlukan perhatian. Informasi tersebut memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai capaian dan kesenjangan kesejahteraan petani, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan sektor pertanian berkelanjutan. Berdasarkan manfaat strategis tersebut, pelaksanaan SKP direncanakan untuk dilanjutkan pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, SKP 2025 menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, ditemukannya data yang tidak wajar, kebutuhan perbaikan data pascaperiode pendataan, permasalahan teknis di daerah yang memerlukan solusi cepat, serta kendala geografis dan keamanan di wilayah tertentu, khususnya Papua. Berbagai upaya mitigasi telah dilakukan, meliputi koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait penyesuaian anggaran, pemeriksaan dan klarifikasi data secara intensif dengan BPS daerah, supervisi lapangan, forum diskusi daring secara berkala antara BPS pusat dan daerah, serta penggantian sampel secara selektif dengan tetap menjaga kecukupan estimasi sesuai ketentuan. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan DI TAHUN 2026 adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan uji coba kuesioner CAPI SKP Tahun 2026 guna memastikan kesiapan instrumen, kesesuaian proses bisnis, serta kualitas data yang dihasilkan.

Penanganan Isu Strategis : Sensus Ekonomi

Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun. SE mencakup seluruh rumah tangga

usaha nonpertanian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, meliputi seluruh sektor lapangan usaha kecuali kategori A, P, dan U. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung menggunakan moda CAPI, serta CAWI dan PAPI untuk usaha besar. Hingga akhir 2025, rangkaian kegiatan SE masih berada pada tahap persiapan hingga pelaksanaan geladi bersih.

Sepanjang tahun 2025, berbagai aktivitas persiapan dilakukan untuk menjamin kesiapan dan kualitas pelaksanaan SE2026, meliputi Updating Direktori Perusahaan Ekonomi, pemutakhiran kerangka geospasial dan Wilkerstat, gladi bersih pendataan dan PES, serta kegiatan publisitas. Selain itu, dilaksanakan pula penyusunan rancangan analisis, pengolahan hasil gladi bersih, *probity audit*, dan workshop penguatan internal guna memastikan instrumen dan proses bisnis pendataan siap digunakan pada tahun 2026.

Dalam rangkaian persiapan Sensus Ekonomi (SE) 2026 selama tahun 2025, pelaksanaan kegiatan menghadapi berbagai kendala yang terutama bersumber dari ketidakpastian serta kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut berdampak pada belum dapat dilaksanakannya sejumlah agenda sesuai rencana awal, antara lain geladi bersih pada Triwulan I, pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan wilkerstat secara menyeluruh, serta penyelenggaraan workshop secara *fullboard*. Di sisi lain, adanya kebutuhan penyesuaian terhadap program prioritas pemerintah dan integrasi dengan DTSEN menyebabkan kuesioner pendataan lengkap masih mengalami perubahan, sehingga finalisasi instrumen dari hasil geladi bersih belum dapat dilakukan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS melakukan penyesuaian jadwal kegiatan berdasarkan ketersediaan anggaran, membatasi cakupan pemutakhiran wilkerstat pada kabupaten/kota di luar wilayah PL-KUMKM 2023, serta memindahkan lokasi workshop ke Pusdiklat BPS sebagai langkah efisiensi. Penyempurnaan instrumen tetap dilaksanakan melalui pembahasan intensif lintas bidang, pemutakhiran aplikasi FASIH, serta pelaksanaan uji coba cepat dan uji coba pendataan di beberapa kabupaten/kota. Paradata hasil pengujian dimanfaatkan untuk memperoleh estimasi durasi pendataan dan menghitung kembali kebutuhan petugas. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2026 akan dilaksanakan pelatihan Innas dan Inda, pelatihan petugas, pendataan usaha besar melalui CAWI, pendataan lapangan dengan CAPI dan PAPI, pelaksanaan PES, serta uji coba lanjutan guna menjamin kesiapan operasional dan kualitas hasil SE2026.

Penanganan Isu Strategis : Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah melalui beberapa tahapan penting. Pada tahap perencanaan, telah dilakukan pembahasan metodologi neraca arus energi dan emisi GRK berbasis *System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework*. Selain itu koordinasi dengan Direktorat Statistik Industri sebagai penanggung jawab kegiatan (PJK) terkait di BPS dan Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian konsep serta ketersediaan data. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber kompilasi produk administratif. Pada tahap pengukuran, dilakukan perhitungan neraca arus energi dan emisi GRK menurut lapangan usaha dan komponen konsumsi akhir. Penyusunan indikator turunan dari neraca terkait seperti bauran energi terbarukan dalam konsumsi akhir, intensitas energi, serta emisi dan intensitas emisi GRK. Pada tahap diseminasi hasil dilakukan baik kepada pemangku kepentingan nasional maupun internasional. Kegiatan ini ditutup dengan evaluasi kinerja berupa penyusunan publikasi resmi Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia.

Output yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan tersebut meliputi dataset neraca arus dan neraca emisi GRK Indonesia tahun 2019–2023, indikator inti berupa intensitas energi dan intensitas emisi GRK, serta publikasi resmi BPS berjudul Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia 2019–2023 yang dirilis pada Juni 2025. Selain itu BPS juga mendukung *Global Data Collection* terkait Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia yang dinaungi oleh *United Nation Statistics Division (UNSD)*. Data emisi GRK perkapita juga berkontribusi dalam pengisian kuesioner BRICS. Output Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi juga berkontribusi dalam pemenuhan rekomendasi *Data Gaps Initiative (DGI)* fase 3 untuk rekomendasi 1 dan 2. BPS diundang dalam beberapa pertemuan DGI sebagai pembicara seperti G20 DGI3 Webinar: *Closing Data Gaps to Better Understand Energy Supply and Use* pada 2 Juni 2025 dan G20 DGI-3 *Global Conference* pada tanggal 17 Juni 2025 untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam penyusunan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi di Indonesia.

Dalam prosesnya, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala yaitu kendala terkait koordinasi lintas kedeputian dan kementerian/lembaga. Atas kendala tersebut solusi yang dilakukan adalah dengan membangun koneksi serta melakukan koordinasi

secara rutin baik dengan internal BPS maupun kementerian/lembaga. Selanjutnya terdapat beberapa rencana tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilakukan di 2026, yaitu perbaikan sumber data yang sebelumnya masih bersumber dari dua versi energi balance BPS dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) diharapkan tahun depan sudah menjadi satu sumber saja. Selain itu, kedepannya akan dilakukan 1) peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan K/L pemangku kepentingan neraca arus energi seperti KESDM, BI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian; maupun K/L pemangku kepentingan neraca emisi GRK seperti KLH, Kementerian Kehutanan; serta lembaga internasional pemangku kepentingan *climate change statistics* seperti UNSD, IMF DGI-3, OECD, BRICS; 2) *Mapping Global Warming Potential* versi AR2 ke AR5 melalui diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup; serta 3) Perbaikan metode penghitungan untuk data international bunkering dengan bantuan lembaga internasional seperti IMF, OECD, dan IEA dan melibatkan K/L pemangku kepentingan seperti BI, KESDM, Kemenhut, dan KLH.

Penanganan Isu Strategis : Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres 61/2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Aktivitas ini berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pasokan dan memastikan stabilitas pangan nasional.

Output yang dihasilkan mencakup data komoditas pangan utama seperti gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan, dan bawang putih. Data ini merupakan bahan penting dalam proses perumusan kebijakan, terutama dalam penyusunan neraca komoditas dan percepatan pembangunan sektor pergaraman nasional. Dokumentasi pendukung yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi Perpres Nomor 17 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2025.

1) Statistik Jagung

Dalam rangka menghasilkan data luas panen dan produksi jagung yang lebih akurat dan andal, Badan Pusat Statistik melaksanakan Pendataan Kerangka Sampel

Area Jagung (KSA Jagung) yang diimplementasikan sejak tahun 2019 sebagai tindak lanjut keberhasilan penerapan metode KSA pada komoditas padi/beras. Pada tahun 2025, pelaksanaan dan pengembangan KSA Jagung sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPS, setelah melalui proses alih pengetahuan dan transisi pengelolaan sistem dari BRIN sejak tahun 2023. Kegiatan ini memanfaatkan integrasi citra satelit dan observasi lapangan berbasis aplikasi Android untuk memperoleh data luas panen dan potensi panen jagung yang objektif dan ilmiah. Secara teknis, petugas lapangan melakukan pengamatan pada empat titik di setiap segmen terpilih dengan mencatat fase pertumbuhan tanaman jagung, mulai dari fase vegetatif, reproduktif, hingga panen dan persiapan lahan, serta kategori bukan jagung dan bukan lahan pertanian, sehingga data yang dihasilkan mampu mendukung analisis pola tanam dan perencanaan kebijakan pertanian.

2) Statistik Beras

Dalam rangka menyediakan data luas panen dan produksi padi/beras nasional yang akurat dan tepat waktu, BPS melaksanakan Pendataan Kerangka Sampel Area Padi (KSA Padi) dengan pendekatan metode yang objektif, ilmiah, dan modern berbasis teknologi. Sejak tahun 2020, pelaksanaan KSA Padi sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPS dengan memanfaatkan integrasi citra satelit dan observasi lapangan menggunakan aplikasi Android. Secara teknis, petugas lapangan melakukan pengamatan langsung pada titik-titik segmen terpilih sesuai koordinat, mengamati fase pertumbuhan tanaman padi, serta mengambil foto amatan yang dikirimkan secara daring melalui aplikasi KSA. Setiap segmen diamati pada beberapa titik untuk mencatat kondisi lahan, meliputi fase vegetatif, generatif, panen, persiapan lahan, puso, hingga kategori lain seperti lahan nonpertanian atau tidak dapat diakses. Pelaksanaan kegiatan ini dilengkapi dengan peran pengawas yang memantau progres dan memeriksa kesesuaian antara nilai amatan dan foto lapangan, sehingga mampu meminimalisir subjektivitas dan meningkatkan keandalan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan sektor pertanian.

3) Statistik Daging Lembu

Dalam rangka menyediakan data statistik peternakan khususnya komoditas daging lembu, BPS melaksanakan Pendataan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB). Kegiatan ini bertujuan memperoleh data jumlah ternak yang dipotong setiap bulan serta rata-rata produksi dan harga karkas yang bersumber dari Rumah Potong Hewan (RPH), Tempat Pemotongan Hewan (TPH), dan pemotongan luar RPH/TPH

tercatat. Pendataan mencakup berbagai jenis ternak, yaitu sapi potong lokal dan ex-impor, sapi perah, kerbau, kambing, domba, dan babi, dengan moda CAPI melalui aplikasi FASIH (Simental LPTB) dan dilaksanakan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

4) Statistik Perikanan

BPS melaksanakan kegiatan statistik perikanan melalui Pendataan Laporan Triwulanan PP/TPI dan PIT serta Pendataan Tahunan Perusahaan Budi Daya Ikan (LTB) dan Penangkapan Ikan (LTP) guna menyediakan data statistik perikanan yang akurat dan komprehensif. Kegiatan ini menghasilkan data produksi perikanan dari perusahaan perikanan berbadan hukum serta produksi perikanan laut yang didaratkan dan diperdagangkan melalui pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan tradisional, dan tempat pelelangan ikan. Pendataan dilaksanakan dengan moda *Paper-Assisted Personal Interviewing* (PAPI) dan mencakup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan sektor perikanan.

5) Statistik Bawang Putih

Dalam rangka menyediakan data statistik hortikultura yang akurat khususnya untuk komoditas bawang putih, BPS melaksanakan Pendataan Laporan Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian. Kegiatan SPH mencakup seluruh tahapan pengelolaan data mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyajian, dengan pendataan lengkap pada seluruh kecamatan di Indonesia sesuai kondisi riil di lapangan. Untuk komoditas bawang putih, pendataan dilakukan secara bulanan dalam cakupan SPH Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim, guna menghasilkan data luas panen, produksi, produktivitas, tanaman rusak dan baru, serta harga. Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai pihak dari tingkat kecamatan hingga pusat, dengan cakupan wilayah nasional meliputi 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 7.263 kecamatan, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan hortikultura.

Pelaksanaan berbagai kegiatan statistik pertanian strategis, seperti KSA Padi dan Jagung, statistik peternakan, perikanan, serta hortikultura (bawang putih), menghadapi sejumlah kendala yang relatif serupa lintas komoditas. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran yang berdampak pada kecukupan honor petugas lapangan, tingginya beban kerja dengan cakupan wilayah yang luas, perubahan penanggung jawab kegiatan akibat rotasi/mutasi pegawai, serta tantangan geografis

seperti daerah terpencil, bencana alam, dan keterbatasan jaringan internet. Selain itu, masih dijumpai kendala teknis berupa keterbatasan kapasitas sistem dan server, keterlambatan pelaporan data, ketidakwajaran atau ketidaklengkapan data, serta ketergantungan pada data sekunder dari kementerian/lembaga lain yang memengaruhi ketepatan waktu dan konsistensi penghitungan statistik dan neraca komoditas.

Sebagai upaya mitigasi, BPS melakukan berbagai langkah strategis dan terintegrasi, antara lain melalui penyesuaian jadwal survei di wilayah terdampak bencana, peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, pengembangan sistem berbasis digital dan paperless, serta optimalisasi aplikasi pendataan yang mendukung moda *offline-online*. Koordinasi dan kerja sama lintas kementerian/lembaga terus diperkuat melalui perjanjian kerja sama, khususnya dalam pertukaran dan pemanfaatan data sekunder. Di sisi operasional, BPS secara rutin melaksanakan monitoring, evaluasi, supervisi lapangan, serta *refreshing* dan peningkatan kapasitas petugas. Selain itu, dilakukan penguatan mekanisme validasi dan konfirmasi data, penyederhanaan birokrasi internal, serta pengembangan metode estimasi dan survei pendukung guna meningkatkan kualitas, ketepatan waktu, dan keandalan data statistik.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan statistik berbagai komoditas strategis, BPS terus melakukan penguatan metodologi, kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas data. Pada komoditas padi dan jagung, tindak lanjut diarahkan pada optimalisasi monitoring berbasis web, pemanfaatan citra satelit, *machine learning*, serta pengembangan *remote sensing*, *drone*, dan perluasan penerapan KSA pada komoditas lain. Di subsektor peternakan dan perikanan, tindak lanjut difokuskan pada penguatan kerja sama dan perjanjian pertukaran data dengan kementerian teknis, peningkatan koordinasi dan evaluasi berkala dengan BPS daerah, pembaruan pedoman, serta penguatan validasi data guna mendukung penghitungan neraca komoditas nasional. Sementara itu, pada komoditas hortikultura khususnya bawang putih, tindak lanjut dilakukan melalui implementasi Satu Data Hortikultura, integrasi sistem SPH berbasis CAWI, peningkatan kapasitas petugas, serta evaluasi dan koordinasi rutin lintas instansi. Keseluruhan tindak lanjut tersebut diharapkan mampu memperkuat konsistensi, ketepatan waktu, dan keandalan data statistik sebagai dasar perumusan kebijakan nasional.

3.4. Prestasi BPS

Pada tahun 2025, pemerintah memulai siklus perencanaan kinerja baru untuk periode tahun 2025-2029. Ditengah proses penyusunan rencana kerja tersebut, BPS mampu meraih sejumlah penghargaan, prestasi, serta mendapatkan apresiasi dari sejumlah kementerian dan lembaga. Beberapa penghargaan dan apresiasi tersebut antara lain:

1. Apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) atas Kontribusi BPS dalam Pembangunan Perumahan di Indonesia



Dalam momentum Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) VXII Tahun 2025, BPS mendapatkan penghargaan atas kontribusinya dalam mendorong pembangunan perumahan di Indonesia, khususnya terkait “Program 3 Juta Rumah” dari Kementerian PKP.

2. Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberikan penghargaan kepada BPS sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memperoleh Peringkat VII dengan kategori AA “Sangat Memuaskan” berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2024. Dengan prestasi ini, diharapkan BPS dapat terus menjaga konsistensi pengelolaan kearsipan di lingkungan BPS menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital.



3. Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri 2025



Pada 15 Desember 2025, Kepala BPS RI menghadiri Business Matching Kementerian Perindustrian di Jakarta. Pada kesempatan ini, BPS meraih Juara I Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri 2025 kategori Lembaga Negara/K/L dengan anggaran belanja menengah, atas komitmen mengutamakan produk dalam negeri pada TA 2024. BPS menerima penghargaan ini atas komitmen mengutamakan produk dalam negeri pada TA 2024.

4. Penghargaan Kehumasan *Gold Winner* dan *Bronze Winner* dalam ajang Makaravox UI PR Awards 2025

BPS meraih penghargaan kehumasan dalam ajang Makaravox UI PR Awards 2025 yaitu penghargaan *Gold Winner* Kategori PR Program dan *Bronze Winner* Kategori *Social Media Management*.



5. Top 5 Lembaga Teraktif Mengamplifikasi Narasi Tunggal

BPS mendapatkan penghargaan sebagai Top 5 Lembaga Teraktif Mengamplifikasi Narasi Tunggal pada Media Sosial periode Januari-Maret 2025 dalam acara Bimbingan Teknis Komunikasi Digital bertajuk “Jago Mengelola Media Sosial” pada Selasa, 20 Mei 2025. Penghargaan ini diberikan berdasarkan kontribusi mereka dalam menyampaikan pesan strategis melalui media sosial dan videotron sepanjang Januari hingga Maret 2025.



6. **Terbaik 1 Kategori Website dan Terbaik 2 Kategori Media Audiovisual Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD dalam Anugerah Media Humas 2025**

Pada gelaran Anugerah Media Humas 2025 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, BPS meraih penghargaan di dua kategori. BPS meraih Terbaik 1 Kategori Website Kementerian/Lembaga/BUMN/ BUMD dan Terbaik 2 Kategori Media Audiovisual Kementerian/Lembaga/BUMN/ BUMD. Penghargaan ini merupakan ajang apresiasi bagi kehumasan pemerintah yang diselenggarakan setiap tahun oleh Komdigi.



7. **Apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan atas Sinergi Data**



BPS mendapatkan penghargaan dalam acara acara “Silaturahmi, Satukan Energi Sejahterakan Pekerja” HUT ke-48 BPJS Ketenagakerjaan. Penghargaan ini diberikan BPJS Ketenagakerjaan atas sinergi dan kerja sama BPS selama ini.

8. **Penghargaan Badan Publik Informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**

BPS meraih penghargaan Badan Publik Informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat, sekaligus rangkaian Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025. BPS memperoleh nilai 97,55 sebagai wujud komitmen dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang responsif.



9. Juara II Penjual Lelang Noneksekusi Wajib Terbaik dan Juara III Utilisasi BMN untuk K/L di Atas 100 Satuan Kerja pada Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025



BPS kembali meraih penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025 sebagai Juara II Penjual Lelang Noneksekusi Wajib Terbaik untuk Kementerian/Lembaga di Atas 100 Satuan Kerja dan Juara III Utilisasi BMN untuk Kementerian/Lembaga di Atas 100 Satuan Kerja. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban kepada Plt. Sekretaris Utama BPS, Pudji Ismartini dan Kepala Biro Umum BPS RI, Martin Wibisono yang hadir mewakili BPS. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Kementerian Keuangan atas pengelolaan BMN oleh kementerian/lembaga.

10. Chair of Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Statistics and Database Working Group (SDWG) 2025-2027

Indonesia secara resmi menerima posisi keketuaan *Statistics and Database Working Group (SDWG)* dalam kerangka kerja sama *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)* untuk periode 2025-2027. BIMP-EAGA merupakan sub-kawasan kerja sama yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan sosial-ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan kawasan timur yang relatif tertinggal. Dalam struktur BIMP-EAGA, terdapat beberapa cluster utama yang membawahi sejumlah *Working Group (WG)*. SDWG berada di bawah *Trade and Investment Facilitation and Promotion Cluster*, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi anggota mewakili Indonesia dalam WG ini.



11. Keynote Speaker pada Forum Statistik Internasional di Kazakhstan

Wakil Kepala BPS RI menjadi pembicara utama dalam Forum on Digital Transformation of National Statistical Systems di Kazakhstan pada 6-7 November 2025. Dalam forum yang mempertemukan para pimpinan lembaga statistik dari berbagai negara anggota CIS (*Commonwealth of Independent States*) dan beberapa negara Eropa Timur, BPS RI mendapat kehormatan menjadi salah satu pembicara utama.



12. BPS Resmi Miliki Lembaga Sertifikasi Profesi

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP BPS) setelah menerima lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada Anugerah Hari Statistik Nasional 2025. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa keberadaan LSP BPS menjadi langkah penting dalam peningkatan kualitas SDM statistik.



3.5. Inovasi BPS

Berbagai inovasi juga telah dilakukan oleh BPS dalam rangka mendukung tercapainya kinerja selama tahun 2025 antara lain:

1. Pengembangan Sinergi

SINERGI (Sistem Informasi Kinerja Organisasi) adalah aplikasi berbasis web untuk mendukung penyelenggaraan akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik meliputi perencanaan, pengukuran, monitoring, serta evaluasi kinerja yang mengintegrasikan aplikasi kinerja Pegawai (KipApp), Kinerja Penganggaran (SAKTI), dan evaluasi AKIP oleh APiP Internal, Penilaian perilaku kinerja bulanan dengan 360. Pengembangan SINERGI dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian PANRB dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPS, khususnya terkait kebutuhan integrasi sistem pengukuran kinerja organisasi dan kinerja individu pegawai. Aplikasi Sinergi dapat diakses melalui tautan <https://sinergi.web.bps.go.id>.

2. Sistem Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa Terpadu (SIMANDARU) yang diintegrasikan dengan *Back Office*

Sistem Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa Terpadu (SIMANDARU) yang terintegrasi dengan *Back Office* yaitu inovasi yang dibuat untuk memperkuat tata kelola pengadaan. SIMANDARU menyediakan fitur monitoring pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa per wilayah dan satuan kerja yang dapat diakses secara mudah dengan data yang selalu mutakhir. Inovasi ini bertujuan mendorong peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), khususnya dari aspek pemanfaatan sistem pengadaan, melalui penyediaan informasi yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, SIMANDARU akan dilakukan penyesuaian agar tetap selaras dengan kebijakan dan metode perhitungan ITKP terbaru untuk periode 2026–2029, termasuk apabila indikator pemanfaatan sistem pengadaan telah diperbarui.

3. Webinfra PODES

Webinfra PODES merupakan inovasi yang dikembangkan untuk meringankan beban petugas PODES dalam proses pengumpulan data infrastruktur desa. Melalui pemanfaatan sistem berbasis web, Webinfra PODES memfasilitasi pencatatan dan pemutakhiran data infrastruktur secara lebih efisien, sekaligus memungkinkan

pengumpulan data yang lebih lengkap dan akurat melalui fitur tagging lokasi infrastruktur yang dapat diakses melalui tautan infrastruktur.web.bps.go.id.

4. Penggunaan *Big Data* Untuk Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Penggunaan *Big Data* dalam Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan inovasi BPS untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses statistik. Melalui pemanfaatan big data, pengumpulan data IDI yang sebelumnya dilakukan secara desentralistik dengan membaca koran di seluruh BPS Provinsi selama satu tahun penuh, kini dapat dipusatkan dan diselesaikan oleh BPS Pusat dalam waktu satu hari. Inovasi ini secara signifikan menghemat sumber daya manusia, mempercepat waktu pengolahan data, serta meningkatkan efisiensi anggaran karena tidak lagi memerlukan pembelian koran di seluruh provinsi. Pelaksanaan inovasi ini didukung melalui kerja sama dengan Bappenas dengan memanfaatkan fasilitas *Intelligent Media Analytics* (IMA) yang dikelola oleh Pusdatin Bappenas, sehingga proses pengumpulan data menjadi lebih modern, terintegrasi, dan berbiaya nol rupiah.

5. Pembuatan Sistem Rekonsiliasi PDRB Tahunan dan Triwulanan Kabupaten/Kota (SIPERI Kabupaten/Kota)

Sistem Rekonsiliasi PDRB Tahunan dan Triwulanan Kabupaten/Kota (SIPERI Kabupaten/Kota) merupakan sistem yang dikembangkan untuk mendukung proses rekonsiliasi PDRB Kabupaten/Kota secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Melalui sistem aplikasi ini, proses penyesuaian data PDRB tahunan dan triwulanan dapat dilakukan secara sistematis, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meningkatkan akurasi, keterbandingan, serta efisiensi waktu dalam penyusunan statistik PDRB di tingkat Kabupaten/Kota. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman siperi.web.bps.go.id.

6. Pembuatan *Dashboard* PDB-PDRB dan indikator turunannya serta indikator-indikator hasil NIT

Manfaat utama *dashboard* adalah memvisualisasikan data penting secara *real-time* agar mudah dipantau, dianalisis, dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Pembuatan *Dashboard* Indikator Hasil NIT merupakan inovasi yang dikembangkan untuk mendukung pemantauan dan pemanfaatan hasil NIT secara lebih optimal. *Dashboard* ini menyajikan visualisasi indikator-indikator kunci

secara *real-time* sehingga data penting dapat dipantau dan dianalisis dengan lebih mudah, cepat, dan komprehensif. Kehadiran *dashboard* ini membantu pimpinan dan pengelola program dalam memperoleh *insight* yang tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. *Dashboard* tersebut dapat diakses pada tautan <https://dashboard-neraca-pengeluaran.vercel.app/login>.

7. Portal Perekaman Transaksi Digital Indonesia

Portal Perekaman Transaksi Digital Indonesia merupakan sistem terintegrasi yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) secara efektif dan akuntabel. Bagi pelaku usaha PMSE, portal ini berfungsi sebagai sarana resmi untuk memenuhi kewajiban penyampaian data PMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi Kementerian Perdagangan, portal ini mendukung pemantauan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian data PMSE kepada BPS, sekaligus memfasilitasi pengiriman surat peringatan secara massal, tersistem, dan terdokumentasi. Sementara itu, bagi direktorat dan unit kerja terkait, portal ini memungkinkan pemantauan progres pemeriksaan dan pengolahan data PMSE secara *real-time*, sehingga meningkatkan transparansi, efektivitas koordinasi antarunit, serta kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Portal perekaman transaksi digital Indonesia merupakan sistem terintegrasi yang dapat diakses melalui tautan <https://pmse.bps.go.id/>.

8. Dashboard Perkembangan Transaksi Digital Indonesia

Dashboard Perkembangan Transaksi Digital Indonesia merupakan inovasi yang dikembangkan untuk mendukung pemantauan dan analisis transaksi digital secara komprehensif dan berbasis data. *Dashboard* ini memungkinkan pemantauan nilai dan jumlah transaksi digital secara *real-time* berdasarkan data yang telah dilaporkan oleh pelaku usaha kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, data disajikan secara terdisagregasi hingga tingkat provinsi dan model bisnis, sehingga mendukung analisis yang lebih tajam dan memperkaya wawasan yang dihasilkan. *Dashboard* ini juga menyediakan fleksibilitas dalam pemilihan kondisi data, baik dalam bentuk panel maupun non-panel, sehingga pemanfaatan data menjadi lebih tepat, akurat, dan selaras dengan kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan.

9. *Platform for Analytical System and Trend Intelligence (PASTI)*

Platform for Analytical System and Trend Intelligence (PASTI) merupakan *platform* aplikasi yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, baik internal BPS, sumber eksternal, maupun data fenomena, untuk menghasilkan informasi analitis yang akurat dan komprehensif. Dengan berbasis kecerdasan artifisial, PASTI mendukung analisis data makro dan analisis tren yang diperlukan dalam penyusunan neraca nasional, sehingga memperkuat kualitas analisis, meningkatkan ketepatan waktu, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih andal. *Platform* ini dapat diakses melalui tautan <https://pasti.apps.bps.go.id>.

3.6. **Realisasi dan Efisiensi Anggaran**

Pada awal tahun anggaran 2025, BPS menerima anggaran sebesar Rp5.705,83 Miliar sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-054.01-0/2025 tanggal 2 Desember 2024. Sepanjang tahun 2025, terdapat penyesuaian pagu anggaran dikarenakan adanya penyesuaian kegiatan di BPS. Pagu BPS kondisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.818,98 Miliar. Informasi perubahan pagu anggaran BPS dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 10 | Pagu Anggaran BPS Menurut Bulan TA 2025 (miliar rupiah)

Bulan	Pagu	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Januari	5.705,87	-
Februari	5.705,87	-
Maret	5.712,88	Penambahan Anggaran PNBPN untuk Kegiatan SNLIK
April	5.712,88	-
Mei	5.721,25	Penambahan Anggaran PNBPN untuk Kegiatan MPD
Juni	5.721,25	-
Juli	5.838,72	Penambahan Anggaran PNBPN untuk Kegiatan Survei Evaluasi MBG

AKUNTABILITAS KINERJA

Bulan	Pagu	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Agustus	5.838,72	-
September	5.838,72	-
Oktober	5.838,72	-
November	5.818,98	Pengurangan Anggaran SBSN Satker BPS Kab. Bandung, BPS Kota Banda Aceh dan BPS Kota Tangerang
Desember	5.818,98	-

Dari total pagu sebesar Rp 5.818,98 miliar hanya Rp 5.304,24 miliar yang dapat digunakan karena telah dilakukan efisiensi anggaran Rp 514,74 miliar sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, surat Menteri Keuangan Nomor : S-37/MK.02/2025, Tanggal : 24 Januari 2025, Hal : Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-75/MK.02/2025 Tanggal 13 Februari 2025 Hal : Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dampak dari efisiensi anggaran ini adalah tidak dapat dilaksanakannya beberapa kegiatan seperti Survei Perilaku Anti Korupsi, Indepth Pendataan Statistik Tanaman Bawang dengan Metode Kerangka Sampling Area (KSA), dan *Business Characteristic Survey* (BCS). Selain itu, efisiensi anggaran memaksa BPS melakukan optimalisasi sumber daya pada 43 kegiatan survei dan pengumpulan data lainnya. Bentuk optimalisasi salah satunya dilakukan dengan menyesuaikan spesifikasi petugas pengumpulan data dari mitra statistik menjadi pegawai BPS, meskipun sebetulnya mitra statistik dirancang sebagai petugas pengumpulan data karena beban kerja pegawai yang sudah sangat tinggi. Bentuk optimalisasi lainnya adalah optimalisasi penggunaan anggaran.

Jika dibandingkan dengan pagu yang diterima, total realisasi anggaran BPS sampai dengan akhir periode 2025 sebesar 96,28 persen untuk pagu optimalisasi (tanpa blokir) dan 87,76 persen untuk pagu secara keseluruhan. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 92,37 persen untuk persentase realisasi terhadap pagu total.

Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran BPS berasal dari Program Dukman dengan realisasi sebesar Rp3.352,70 miliar, kontribusinya terhadap total realisasi anggaran BPS sebesar 95,62 persen. Kontribusi lainnya berasal dari Program PPIS dengan realisasi sebesar Rp1.806,46 miliar, kontribusinya mencapai 75,85 persen. Informasi lebih lengkap tentang realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 | Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program TA 2025 (miliar rupiah)

Program	Pagu	Pagu Tanpa Blokir	Realisasi	Realisasi/Pagu (%)	
				Terhadap Pagu Akhir	Terhadap Pagu Tanpa Blokir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
WA Dukman	3.506,21	3.497,78	3.352,70	95,62	95,85
GG PPIS	2.312,77	1.806,46	1.754,32	75,85	97,11
Total	5.818,98	5.304,24	5.107,02	87,76	96,28

Untuk melihat efisiensi penggunaan sumber daya dari sisi anggaran pada level Kegiatan dapat dicermati pada Tabel 12. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2025 menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan yang ada di BPS memiliki capaian kinerja yang melampaui realisasi anggarannya. Hal ini menunjukkan upaya BPS dalam penggunaan anggaran yang efisien namun tetap berorientasi pada pencapaian target. Kegiatan dengan selisih paling jauh antara capaian kinerja dengan realisasi anggarannya adalah kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi. Seluruh output telah dilaksanakan namun rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan tersebut diakibatkan adanya efisiensi anggaran.

Tabel 12| Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BPS Tahun 2025 Menurut Kegiatan

Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2881	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	99,97	72,87
2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	105,23	82,35
2883	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	100,72	90,56
2884	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	110,00	79,14
2885	Dukungan Manajemen BPS Lainnya	100,68	86,20
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	109,94	98,29
2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	103,58	91,37
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	106,67	72,25
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	105,00	84,50
2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	106,10	57,77
2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	110,78	32,54
2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	107,67	17,19
2901	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	100,72	94,30
2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	107,16	59,40
2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	104,37	85,75
2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalan, Energi, dan Konstruksi	109,75	84,78
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	106,95	82,93

Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	108,27	91,61
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	110,00	70,14
2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	108,03	75,42
2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	110,00	82,54
2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	107,14	87,54
4203	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	101,96	99,89
4204	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	101,93	99,04
4205	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	98,61	95,28

Tabel 13| Tabel Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	Pagu Akhir (Miliar Rp)	Pagu yang Dapat Digunakan (Tanpa Blokir Miliar Rp)	Realisasi Anggaran (Miliar Rp)	Realisasi Anggaran (%)		Efisiensi	
					Thdp pagu Akhir	Thdp Pagu Tanpa Blokir	Thdp pagu Akhir	Thdp Pagu Tanpa Blokir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran 1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan								

AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	Pagu Akhir (Miliar Rp)	Pagu yang Dapat Digunakan (Tanpa Blokir Miliar Rp)	Realisasi Anggaran (Miliar Rp)	Realisasi Anggaran (%)		Efisiensi	
					Thdp pagu Akhir	Thdp Pagu Tanpa Blokir	Thdp pagu Akhir	Thdp Pagu Tanpa Blokir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengambilan Keputusan								
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	110,65	1.838,32	1.365,58	1.331,07	72,41	97,47	1,53	1,14
Sasaran 2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu								
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100	474,45	440,88	423,26	89,21	96,00	1,12	1,04
Sasaran 3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional								
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	107,06	3.506,21	3.497,78	3.352,70	95,62	95,85	1,13	1,12
Total	105,90	5.818,98	5.304,24	5.107,02	87,76	96,28	1,23	1,12

Tabel 13 seluruh sasaran yang berhasil memenuhi target yang ditetapkan terhadap target tahun 2025. Realisasi anggaran per sasaran menunjukkan realisasi yang cukup tinggi untuk ketiga sasaran baik untuk pagu yang dapat digunakan (pagu tanpa blokir) dengan nilai berturut-turut sebesar 97,47; 96,00; dan 95,85. Sementara itu untuk realisasi terhadap pagu akhir berkisar antara 72 sampai 95 persen dengan nilai terbesar pada sasaran ketiga sebesar 95,62. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran menunjukkan upaya BPS dalam penggunaan anggaran yang efisien namun tetap berorientasi pada pencapaian target.

Penghitungan efisiensi pada tahun 2025 dilakukan dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\% \text{ Realisasi Anggaran}}$$

Keterangan:

- **Nilai > 1:** Berarti **Sangat Efisien** (Output lebih besar dari Input).
- **Nilai 1:** Berarti **Efisien Standar** (Output sesuai dengan Input).
- **Nilai < 1:** Berarti **Kurang Efisien** (Anggaran terserap banyak, tapi kinerja tidak mencapai target)

Secara rerata efisiensi capaian kinerja jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pagu akhir adalah 1,23. Sementara untuk efisiensi capaian kinerja jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pagu yang dapat digunakan (pagu tanpa blokir) adalah 1,12. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap satuan biaya yang dikeluarkan mampu menghasilkan output kinerja yang lebih tinggi (1,23 kali) dari perencanaan awal. Hal ini mencerminkan optimalisasi sumber daya yang baik dan keberhasilan strategi penghematan tanpa mengorbankan kualitas hasil kerja.

Halaman batas

PENUTUP

Halaman ini dibiarkan kosong

BAB IV **PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha. Capaian kinerja Badan Pusat Statistik tahun 2025 dapat dinyatakan “berhasil”, karena realisasi 2 dari 3 target indikator kinerja sasaran strategis mencapai atau melampaui 100 persen, dengan rincian:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100 persen sebanyak 2 target (Tingkat Pemanfaatan Data Statistik: 110,65 persen; dan Indeks Reformasi Birokrasi: 107,41 persen).
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100 persen sebanyak 1 target (Indeks Pembangunan Statistik: 100 persen).

Selain itu, secara keseluruhan capaian kinerja Badan Pusat Statistik tahun 2025 dapat dipertahankan pada tingkat yang baik, mengingat BPS telah konsisten mencapai kinerja di atas 100 persen pada periode-periode sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait Transformasi Statistik dan Tata Kelola Data (misalnya Peraturan BPS tentang DTSEN), koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang lebih terpadu dan data yang berkualitas untuk kebijakan.

Pelaksanaan kegiatan di atas menyebabkan realisasi anggaran tahun 2025 Badan Pusat Statistik juga menjadi tinggi yaitu sebesar Rp5.107,02 miliar atau 96,28 persen dari total pagu anggaran yang dapat digunakan (Pagu Tanpa Blokir: Rp5.304,24 miliar; Pagu Akhir: Rp5.818,98 miliar).

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya

PENUTUP

koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Di tahun 2026, BPS akan memperkuat peningkatan kinerja organisasi melalui keberlanjutan produksi statistik strategis, ketepatan waktu rilis, serta peningkatan pemanfaatan data dan insight dalam siklus kebijakan. Berbagai survei utama seperti SAKERNAS, SUSENAS, SNLIK, dan survei sektoral tetap dilaksanakan dengan penguatan metodologi, *quality control*, serta integrasi pemanfaatan data administrasi dan big data. Publikasi hasil SUPAS 2025 serta dukungan terhadap EPSS 2026 dan pengelolaan 45 Indikator Utama Pembangunan juga menjadi fokus penting untuk memastikan ketersediaan ukuran pembangunan yang kredibel. Di saat yang sama, BPS menyiapkan mitigasi risiko operasional, memperluas kolaborasi dengan kementerian/lembaga, serta meningkatkan kapasitas SDM agar mampu tidak hanya menghasilkan data berkualitas, tetapi juga menyajikan narasi analitis yang relevan dan berdampak bagi pengambilan keputusan.

Selain itu, penguatan kinerja akan dilakukan melalui penyempurnaan tata kelola statistik sektoral dan kelembagaan. BPS akan meningkatkan efektivitas Pembinaan Statistik Sektoral melalui standarisasi proses bisnis berbasis GSBPM, peningkatan kompetensi pembina melalui program Esensial, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar kualitas statistik K/L dan pemerintah daerah semakin selaras dengan standar nasional. Upaya ini diperkuat melalui reviu Renstra 2025–2029 sejalan dengan implementasi SOTK baru, optimalisasi *technical review* akses OECD bidang statistik dan data, serta peningkatan kontribusi pada forum internasional seperti BRICS. Dengan dukungan penguatan TKDA, pengembangan SDM profesional, kepemimpinan perubahan, serta tata kelola risiko dan SPIP yang matang, BPS menargetkan peningkatan kinerja yang lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PUSAT STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pusat Statistik

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 24 Januari 2025
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305 199903 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PUSAT STATISTIK

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	65,00 Persen
2.	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu	Indeks Pembangunan Statistik	2,35 Poin
3.	Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	85,01 Poin

	Program/Kegiatan	Anggaran
1)	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 2.178.842.223.000
2)	Dukungan Manajemen	Rp. 3.527.030.452.000
	Jumlah	Rp. 5.705.872.675.000

Palembang, 24 Januari 2025
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305 199903 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PUSAT STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Februari 2025
Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305 199903 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PUSAT STATISTIK

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	65,00 Persen
2.	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu	Indeks Pembangunan Statistik	2,35 Poin
3.	Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	85,01 Poin

Program/Kegiatan	Anggaran
1) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 2.178.842.223.000
2) Dukungan Manajemen	Rp. 3.527.030.452.000
Jumlah	Rp. 5.705.872.675.000

Jakarta, 19 Februari 2025
Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305 199903 2 003

Jumlah Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 (Kondisi 31 Desember 2025)

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII Ke Bawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pusat					
Sekretariat Utama	3	119	257	159	538
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	8	128	195	14	345
Deputi Bidang Statistik Sosial	8	100	81	6	195
Deputi Bidang Statistik Produksi	2	71	77	10	160
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	6	86	80	22	194
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	4	92	89	2	187
Inspektorat Utama	1	49	136	5	191
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	7	38	30	29	104
Politeknik Statistika STIS	36	47	24	7	114
Daerah*					
BPS Provinsi Aceh	2	74	424	202	702
BPS Provinsi Sumatera Utara	3	182	562	289	1036
BPS Provinsi Sumatera Barat	1	103	354	163	621
BPS Provinsi Riau	1	57	294	106	458
BPS Provinsi Jambi	0	64	250	83	397
BPS Provinsi Sumatera Selatan	1	115	333	134	583
BPS Provinsi Bengkulu	1	67	222	57	347
BPS Provinsi Lampung	2	93	282	180	557
BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung	0	43	164	74	281
BPS Provinsi Kepulauan Riau	1	28	146	102	277
BPS Provinsi DKI Jakarta	1	80	137	78	296
BPS Provinsi Jawa Barat	2	232	484	341	1059

LAMPIRAN

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII Ke Bawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi Jawa Tengah	5	332	740	507	1584
BPS Provinsi D I Yogyakarta	3	129	135	92	359
BPS Provinsi Jawa Timur	3	293	747	378	1421
BPS Provinsi Banten	1	80	158	123	362
BPS Provinsi Bali	2	64	185	101	352
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	2	57	261	146	466
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	47	367	250	665
BPS Provinsi Kalimantan Barat	1	59	264	161	485
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	2	42	254	112	410
BPS Provinsi Kalimantan Selatan	3	58	251	137	449
BPS Provinsi Kalimantan Timur	2	47	229	88	366
BPS Provinsi Kalimantan Utara	1	12	120	57	190
BPS Provinsi Sulawesi Utara	0	45	242	121	408
BPS Provinsi Sulawesi Tengah	1	52	214	150	417
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	1	107	456	268	832
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	0	61	299	134	494
BPS Provinsi Gorontalo	1	22	150	52	225
BPS Provinsi Sulawesi Barat	0	31	156	62	249
BPS Provinsi Maluku	1	35	197	121	354
BPS Provinsi Maluku Utara	0	16	185	102	303
BPS Provinsi Papua Barat	0	24	222	80	326
BPS Provinsi Papua	0	51	361	119	531
Jumlah	120	3.532	10.814	5.424	19.890

* Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025 (Kondisi 31 Desember 2025)

SATUAN KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pusat					
Sekretariat Utama	61	362	102	13	538
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	51	292	2	0	345
Deputi Bidang Statistik Sosial	49	145	1	0	195
Deputi Bidang Statistik Produksi	40	117	3	0	160
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	42	151	1	0	194
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	45	141	1	0	187
Inspektorat Utama	24	164	3	0	191
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	30	48	25	1	104
Politeknik Statistika STIS	44	66	4	0	114
Daerah*					
BPS Provinsi Aceh	50	515	136	1	702
BPS Provinsi Sumatera Utara	97	777	157	5	1036
BPS Provinsi Sumatera Barat	56	451	112	2	621
BPS Provinsi Riau	35	359	62	2	458
BPS Provinsi Jambi	39	294	63	1	397
BPS Provinsi Sumatera Selatan	51	443	87	2	583
BPS Provinsi Bengkulu	29	270	48	0	347
BPS Provinsi Lampung	53	399	102	3	557
BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung	33	189	55	4	281
BPS Provinsi Kepulauan Riau	17	190	70	0	277
BPS Provinsi DKI Jakarta	45	202	43	6	296
BPS Provinsi Jawa Barat	108	786	156	9	1059

LAMPIRAN

SATUAN KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi Jawa Tengah	178	1204	186	16	1584
BPS Provinsi D I Yogyakarta	48	252	56	3	359
BPS Provinsi Jawa Timur	121	1053	239	8	1421
BPS Provinsi Banten	37	257	62	6	362
BPS Provinsi Bali	38	247	61	6	352
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	30	324	111	1	466
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	32	460	169	4	665
BPS Provinsi Kalimantan Barat	37	326	120	2	485
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	39	280	90	1	410
BPS Provinsi Kalimantan Selatan	42	309	95	3	449
BPS Provinsi Kalimantan Timur	30	274	61	1	366
BPS Provinsi Kalimantan Utara	10	131	49	0	190
BPS Provinsi Sulawesi Utara	26	300	77	5	408
BPS Provinsi Sulawesi Tengah	31	269	115	2	417
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	59	579	189	5	832
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	36	381	75	2	494
BPS Provinsi Gorontalo	9	181	33	2	225
BPS Provinsi Sulawesi Barat	20	187	42	0	249
BPS Provinsi Maluku	20	253	75	6	354
BPS Provinsi Maluku Utara	16	207	76	4	303
BPS Provinsi Papua Barat	17	250	54	5	326
BPS Provinsi Papua	34	415	78	4	531
JUMLAH	1.909	14.500	3.346	135	19.890

* Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya

Jumlah Pejabat Fungsional BPS Tahun 2025 (Kondisi 31 Desember 2025)

No	Jabatan Fungsional	Utama	Madya	Muda	Pertama	Penyelia	Mahir	Terampil	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Analisis Anggaran		10	10					20
2	Analisis Hukum		1		2				3
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN		33	248	141				422
4	Analisis SDM Aparatur		20	96	58				174
5	Apoteker			1					1
6	Arsiparis		12	39	82		12	38	183
7	Asesor SDM Aparatur		3	9					12
8	Asisten Apoteker							1	1
9	Auditor		20	30	20	1		7	78
	Bidan							1	1
10	Dokter		2	1					3
11	Dokter Gigi		2						2
12	Dosen	2	10	48	10				70
13	Penata Laksana Barang					5	24	20	49
14	Penerjemah		1	1					2
15	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa		8	49	64				121
16	Pengembang Teknologi Pembelajaran		1	6					7
17	Penyuluh Hukum			9	1				10
18	Perancang Peraturan		1		1				2

LAMPIRAN

No	Jabatan Fungsional	Utama	Madya	Muda	Pertama	Penyelia	Mahir	Terampil	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perundang-undangan								
19	Perawat		1				2		3
20	Perawat Gigi					1	1		2
21	Perencana		5	10	12				27
22	Pranata Humas		4	15	30				49
23	Pranata Keuangan APBN					52	91	140	283
24	Pranata Komputer		73	558	869	15	66	133	1.714
25	Pranata SDM Aparatur					5	11	28	44
26	Pustakawan			3		2	1	5	11
27	Statistisi	8	591	3.831	4.566	400	828	1.048	11.272
28	Widyaiswara	1	13	5	2				21
JUMLAH		11	811	4.969	5.858	481	1.036	1.421	14.587

Surat Nilai Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3641195, 3642506, 3610291-4,
Fax. (021) 3657046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

Nomor : B-54/02000/PR.620/2026 Jakarta, 15 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Nilai Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) 2025

Yth. :

1. Deputi Bidang Statistik Sosial
2. Deputi Bidang Statistik Produksi
3. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
4. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik

di-

Tempat

Dalam rangka Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV 2025, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 163 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029, terdapat indikator Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) yang digunakan untuk mengukur kinerja lembaga (BPS), Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, serta Deputi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.
2. Biro Perencanaan dan Direktorat Diseminasi telah menyelesaikan penghitungan realisasi indikator TPDS tahun 2025, baik di level lembaga maupun deputi. Hasil penghitungan dapat diunduh **pada tautan <http://s.bps.go.id/TPDS-2025>**. Nilai dalam tautan tersebut digunakan sebagai data realisasi pada Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV 2025 dan Laporan Kinerja Tahun 2025.
3. Hasil TPDS 2025 agar menjadi landasan perbaikan kinerja ke depannya khususnya dalam mencapai sasaran strategi "Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan".
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdr. M. Irfan Sudrajat (Hp.: 0822-2128-2347)**.

-2-

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


Pit. Sekretaris Utama,
Pudji Ismartini

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai laporan;
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai laporan;
3. Inspektur Utama; dan
4. Pit. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

Jenis Dokumen Pemerintah yang Digunakan sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS)

No	Dokumen Pemerintah Sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS)
(1)	(2)
1	Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia
2	Renstra Badan Gizi Nasional
3	Renstra Badan Informasi Geospasial
4	Renstra Badan Karantina Indonesia
5	Renstra Badan Keamanan Laut
6	Renstra Badan Kepegawaian Negara
7	Renstra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
8	Renstra Badan Narkotika Nasional
9	Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana
10	Renstra Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
11	Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
12	Renstra Badan Pangan Nasional
13	Renstra Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
14	Renstra Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
15	Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan
16	Renstra Badan Pengawas Tenaga Nuklir
17	Renstra Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
18	Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
19	Renstra Badan Pusat Statistik
20	Renstra Badan Siber dan Sandi Negara
21	Renstra Badan Standarisasi Nasional
22	Renstra Kejaksaan Agung RI

LAMPIRAN

No	Dokumen Pemerintah Sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS)
(1)	(2)
23	Renstra Kementerian Agama
24	Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
25	Renstra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
26	Renstra Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
27	Renstra Kementerian Hak Asasi Manusia
28	Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
29	Renstra Kementerian Kebudayaan
30	Renstra Kementerian Kehutanan
31	Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
32	Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
33	Renstra Kementerian Kesehatan
34	Renstra Kementerian Ketenagakerjaan
35	Renstra Kementerian Keuangan
36	Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital
37	Renstra Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
38	Renstra Kementerian Koordinator Bidang Pangan
39	Renstra Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
40	Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
41	Renstra Kementerian Koperasi
42	Renstra Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
43	Renstra Kementerian Luar Negeri
44	Renstra Kementerian Pariwisata
45	Renstra Kementerian Pekerjaan Umum
46	Renstra Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Dokumen Pemerintah Sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS)	
No	
(1)	(2)
47	Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga
48	Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
49	Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
50	Renstra Kementerian Perdagangan
51	Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
52	Renstra Kementerian Perhubungan
53	Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
54	Renstra Kementerian Sosial
55	Renstra Kementerian Transmigrasi
56	Renstra Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
57	Renstra Lembaga Administrasi Negara
58	Renstra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
59	Renstra Otorita Ibu Kota Nusantara
60	Renstra Perpustakaan Nasional
61	Renstra Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
62	Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
63	Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
64	Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
65	Renstra Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
66	Renstra Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
67	Renstra Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
68	RKP Aceh
69	RKP Bali
70	RKP Bengkulu

LAMPIRAN

No	Dokumen Pemerintah Sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS)
(1)	(2)
71	RKP Gorontalo
72	RKP Jambi
73	RKP Jawa Tengah
74	RKP Jawa Timur
75	RKP Kalimantan Barat
76	RKP Kalimantan Selatan
77	RKP Kalimantan Tengah
78	RKP Kalimantan Utara
79	RKP NTB
80	RKP NTT
81	RKP Sulawesi Barat
82	RKP Sulawesi Tengah
83	RKP Sulawesi Tenggara
84	RKP Sumatera Barat
85	RPJMD Aceh
86	RPJMD Bali
87	RPJMD Bangka Belitung
88	RPJMD Banten
89	RPJMD Bengkulu
90	RPJMD Gorontalo
91	RPJMD Jambi
92	RPJMD Jawa Tengah
93	RPJMD Jawa Timur
94	RPJMD Kalimantan Barat

Dokumen Pemerintah Sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS)	
No	
(1)	(2)
95	RPJMD Kalimantan Selatan
96	RPJMD Kalimantan Tengah
97	RPJMD Kalimantan Timur
98	RPJMD Kalimantan Utara
99	RPJMD Lampung
100	RPJMD Maluku
101	RPJMD NTB
102	RPJMD NTT
103	RPJMD Riau
104	RPJMD Sulawesi Barat
105	RPJMD Sulawesi Selatan
106	RPJMD Sulawesi Tengah
107	RPJMD Sulawesi Tenggara
108	RPJMD Sumatera Barat
109	RPJMD Sumatera Selatan
110	RPJMD Sumatera Utara
111	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
112	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

LAMPIRAN

Hasil Pengolahan Survei Kebutuhan Data (SKD) 2025 yang Digunakan sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik User (TPDS-u)

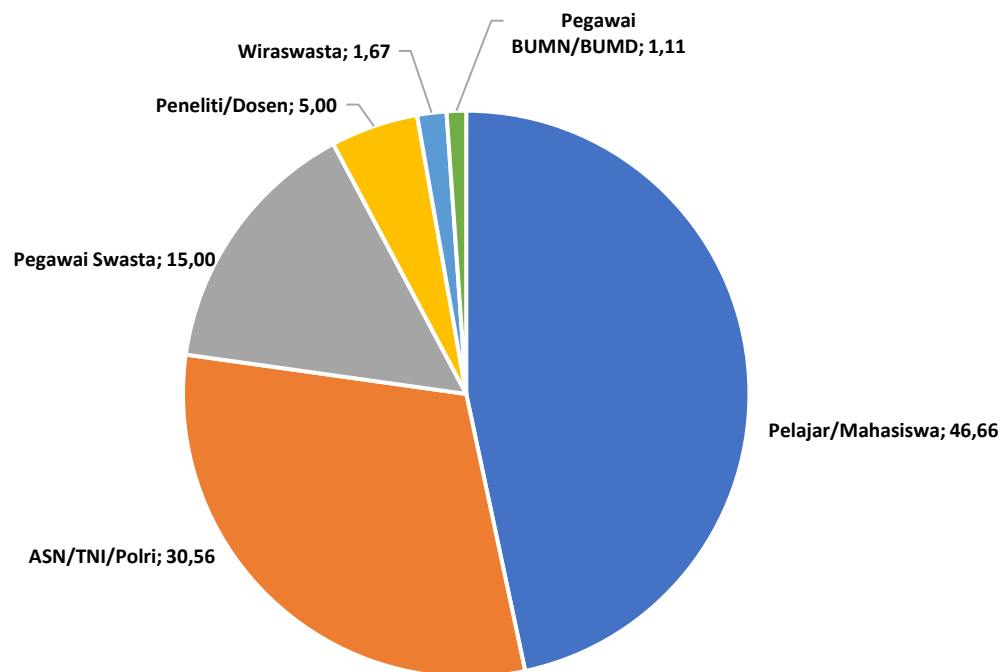
Dimensi	Badan Pusat Statistik	Deputi Bidang Statistik Sosial	Deputi Bidang Statistik Produksi	Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
Distribusi dan Aksesibilitas	99,74	99,74	99,68	99,79	99,81
Relevansi	92,77	93,03	87,87	88,78	95,29
Frekuensi Penggunaan	39,28	39,28	39,28	39,28	39,28
Citra dan Kepercayaan	93,19	93,96	89,33	89,99	95,89
Dampak Pada Kebijakan	71,13	70,76	62,09	64,51	77,17
TPDS-u	79,22	79,36	75,65	76,47	81,49

Penjelasan Terkait Dimensi Pengukuran:

- Dimensi Distribusi dan aksesibilitas dihitung berdasarkan jawaban atas pertanyaan Blok 2 Rincian 8: Tingkat Kepuasan terhadap akses data BPS.
- Dimensi Relevansi dihitung berdasarkan jawaban atas pertanyaan Blok 3 Kolom 6 terkait perolehan data yang dibutuhkan/dikonsultasikan.
- Dimensi Frekuensi dihitung berdasarkan frekuensi suatu instansi menggunakan data BPS.
- Dimensi Citra dan kepercayaan dihitung berdasarkan jawaban atas pertanyaan Blok 3 Kolom 11 terkait Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas Data.
- Dimensi Dampak pada Kebijakan diolah dari dari Blok 1 Rincian 7 (Kategori Instansi) dan Blok 3 kolom 10 terkait penggunaan data untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah.

Responden Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2025

Persentase Responden Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2025



Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral BPS Tahun 2024



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 605 TAHUN 2024
TENTANG**

**HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada 83 (*delapan puluh tiga*) lokus Instansi Pusat dan 534 (*lima ratus tiga puluh empat*) lokus Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 2 -

- KETIGA : Menghimbau kepada pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2024

PL. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 605 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL PADA INSTANSI PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT NILAI
INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS) DAN PREDIKAT EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (EPSS) TAHUN 2024

A. PREDIKAT EPSS DAN NILAI IPS PADA INSTANSI PUSAT

1. Kementerian

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kementerian Agama	2.72	Baik
2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2.47	Cukup
3	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2.69	Baik
4	Kementerian Dalam Negeri	3.28	Baik
5	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.98	Baik
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.08	Cukup
7	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.39	Baik
8	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	2.28	Cukup
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2.73	Baik
10	Kementerian Kesehatan	3.07	Baik
11	Kementerian Ketenagakerjaan	3.18	Baik
12	Kementerian Keuangan	2.39	Cukup
13	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.37	Baik
14	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2.57	Cukup
15	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2.99	Baik
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.45	Cukup
17	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2.39	Cukup
18	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.62	Baik
19	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.68	Baik
20	Kementerian Luar Negeri	2.68	Baik
21	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.42	Baik
22	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.49	Baik
23	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.76	Baik
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2.69	Baik
25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2.31	Cukup

- 4 -

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
26	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2.41	Cukup
27	Kementerian Perdagangan	3.02	Baik
28	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2.23	Cukup
29	Kementerian Perhubungan	2.98	Baik
30	Kementerian Perindustrian	3.05	Baik
31	Kementerian Pertahanan	2.14	Cukup
32	Kementerian Pertanian	3.67	Sangat Baik
33	Kementerian Sekretariat Negara	2.76	Baik
34	Kementerian Sosial	2.63	Baik

2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	2.18	Cukup
2	Badan Informasi Geospasial	2.68	Baik
3	Badan Keamanan Laut	2.52	Cukup
4	Badan Kepegawaian Negara	2.76	Baik
5	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.68	Sangat Baik
6	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	3.29	Baik
7	Badan Narkotika Nasional	2.39	Cukup
8	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.59	Cukup
9	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2.64	Baik
10	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan / Basarnas	2.95	Baik
11	Badan Pangan Nasional	2.83	Baik
12	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.61	Baik
13	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1.85	Cukup
14	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2.60	Baik
15	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	2.43	Cukup
16	Badan Pusat Statistik	4.33	Memuaskan
17	Badan Riset dan Inovasi Nasional	3.14	Baik
18	Badan Siber dan Sandi Negara	2.31	Cukup
19	Badan Standardisasi Nasional	2.48	Cukup
20	Lembaga Administrasi Negara	3.35	Baik
21	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3.38	Baik
22	Lembaga Ketahanan Nasional	2.29	Cukup
23	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	3.38	Baik

3. Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Lainnya

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Intelijen Negara	2.72	Baik
2	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1.96	Cukup
3	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2.04	Cukup
4	Badan Pemeriksa Keuangan	2.98	Baik
5	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2.61	Baik
6	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam / Badan Pengusahaan Batam	2.74	Baik
7	Dewan Ketahanan Nasional	2.69	Baik
8	Dewan Perwakilan Daerah	1.90	Cukup
9	Dewan Perwakilan Rakyat	2.57	Cukup
10	Kejaksaan Republik Indonesia	2.57	Cukup
11	Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.58	Cukup
12	Komisi Aparatur Sipil Negara	1.98	Cukup
13	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1.82	Cukup
14	Komisi Pemberantasan Korupsi	3.05	Baik
15	Komisi Pemilihan Umum	1.96	Cukup
16	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1.96	Cukup
17	Komisi Yudisial	2.10	Cukup
18	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.86	Cukup
19	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1.49	Kurang
20	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1.83	Cukup
21	Mahkamah Agung	2.03	Cukup
22	Mahkamah Konstitusi	2.03	Cukup
23	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1.67	Kurang
24	Ombudsman Republik Indonesia	2.26	Cukup
25	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2.65	Baik
26	Sekretariat Kabinet	2.37	Cukup

B. PREDIKAT EPSS DAN NILAI IPS PADA PEMERINTAH DAERAH**1. Pemerintah Provinsi**

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemerintah Aceh	2.22	Cukup
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1.94	Cukup
3	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	2.87	Baik
4	Pemerintah Provinsi Riau	2.73	Baik
5	Pemerintah Provinsi Jambi	2.68	Baik
6	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	2.72	Baik
7	Pemerintah Provinsi Bengkulu	2.87	Baik
8	Pemerintah Provinsi Lampung	2.62	Baik
9	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.78	Baik
10	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2.61	Baik
11	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3.48	Baik

- 6 -

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3.07	Baik
13	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2.61	Baik
14	Pemerintah Daerah DI Yogyakarta	3.34	Baik
15	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3.08	Baik
16	Pemerintah Provinsi Banten	2.61	Baik
17	Pemerintah Provinsi Bali	3.37	Baik
18	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.77	Baik
19	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.12	Cukup
20	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	2.29	Cukup
21	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2.42	Cukup
22	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2.25	Cukup
23	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2.68	Baik
24	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	2.76	Baik
25	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	2.31	Cukup
26	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	1.77	Kurang
27	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2.62	Baik
28	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2.90	Baik
29	Pemerintah Provinsi Gorontalo	2.08	Cukup
30	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2.19	Cukup
31	Pemerintah Provinsi Maluku	2.30	Cukup
32	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2.07	Cukup
33	Pemerintah Provinsi Papua Barat	1.30	Kurang
34	Pemerintah Provinsi Papua	2.16	Cukup

2. Pemerintah Kota

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemerintah Kota Banda Aceh	2.57	Cukup
2	Pemerintah Kota Sabang	2.22	Cukup
3	Pemerintah Kota Langsa	2.92	Baik
4	Pemerintah Kota Lhokseumawe	1.69	Kurang
5	Pemerintah Kota Subulussalam	2.23	Cukup
6	Pemerintah Kota Sibolga	1.75	Kurang
7	Pemerintah Kota Tanjung Balai	1.74	Kurang
8	Pemerintah Kota Pematang Siantar	1.98	Cukup
9	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	2.19	Cukup
10	Pemerintah Kota Medan	2.94	Baik
11	Pemerintah Kota Binjai	1.65	Kurang
12	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	2.61	Baik
13	Pemerintah Kota Gunungsitoli	2.85	Baik
14	Pemerintah Kota Padang	2.40	Cukup
15	Pemerintah Kota Solok	2.61	Baik
16	Pemerintah Kota Sawah Lunto	2.26	Cukup
17	Pemerintah Kota Padang Panjang	1.94	Cukup
18	Pemerintah Kota Bukittinggi	2.39	Cukup
19	Pemerintah Kota Payakumbuh	2.69	Baik
20	Pemerintah Kota Pariaman	2.04	Cukup
21	Pemerintah Kota Pekanbaru	2.89	Baik
22	Pemerintah Kota Dumai	2.77	Baik

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Pemerintah Kota Jambi	2.64	Baik
24	Pemerintah Kota Sungai Penuh	2.11	Cukup
25	Pemerintah Kota Palembang	2.62	Baik
26	Pemerintah Kota Prabumulih	2.21	Cukup
27	Pemerintah Kota Pagar Alam	2.35	Cukup
28	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	2.66	Baik
29	Pemerintah Kota Bengkulu	2.68	Baik
30	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2.85	Baik
31	Pemerintah Kota Metro	2.67	Baik
32	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	2.89	Baik
33	Pemerintah Kota Batam	2.46	Cukup
34	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	2.83	Baik
35	Pemerintah Kota Bogor	2.70	Baik
36	Pemerintah Kota Sukabumi	2.85	Baik
37	Pemerintah Kota Bandung	3.04	Baik
38	Pemerintah Kota Cirebon	2.98	Baik
39	Pemerintah Kota Bekasi	2.70	Baik
40	Pemerintah Kota Depok	2.89	Baik
41	Pemerintah Kota Cimahi	3.02	Baik
42	Pemerintah Kota Tasikmalaya	3.01	Baik
43	Pemerintah Kota Banjar	2.86	Baik
44	Pemerintah Kota Magelang	3.26	Baik
45	Pemerintah Kota Surakarta	3.05	Baik
46	Pemerintah Kota Salatiga	2.61	Baik
47	Pemerintah Kota Semarang	3.04	Baik
48	Pemerintah Kota Pekalongan	2.62	Baik
49	Pemerintah Kota Tegal	2.83	Baik
50	Pemerintah Kota Yogyakarta	2.85	Baik
51	Pemerintah Kota Kediri	2.54	Cukup
52	Pemerintah Kota Blitar	2.65	Baik
53	Pemerintah Kota Malang	3.12	Baik
54	Pemerintah Kota Probolinggo	2.87	Baik
55	Pemerintah Kota Pasuruan	2.55	Cukup
56	Pemerintah Kota Mojokerto	2.66	Baik
57	Pemerintah Kota Madiun	2.18	Cukup
58	Pemerintah Kota Surabaya	2.73	Baik
59	Pemerintah Kota Batu	2.77	Baik
60	Pemerintah Kota Tangerang	3.07	Baik
61	Pemerintah Kota Cilegon	2.46	Cukup
62	Pemerintah Kota Serang	2.62	Baik
63	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	2.63	Baik
64	Pemerintah Kota Denpasar	2.77	Baik
65	Pemerintah Kota Mataram	2.37	Cukup
66	Pemerintah Kota Bima	2.44	Cukup
67	Pemerintah Kota Kupang	1.85	Cukup
68	Pemerintah Kota Pontianak	2.68	Baik
69	Pemerintah Kota Singkawang	2.21	Cukup
70	Pemerintah Kota Palangka Raya	2.61	Baik
71	Pemerintah Kota Banjarmasin	2.96	Baik
72	Pemerintah Kota Banjar Baru	2.83	Baik

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
73	Pemerintah Kota Balikpapan	2.23	Cukup
74	Pemerintah Kota Samarinda	2.22	Cukup
75	Pemerintah Kota Bontang	2.02	Cukup
76	Pemerintah Kota Tarakan	2.25	Cukup
77	Pemerintah Kota Manado	2.92	Baik
78	Pemerintah Kota Bitung	3.02	Baik
79	Pemerintah Kota Tomohon	2.65	Baik
80	Pemerintah Kota Kotamobagu	2.99	Baik
81	Pemerintah Kota Palu	2.62	Baik
82	Pemerintah Kota Makassar	2.80	Baik
83	Pemerintah Kota Parepare	2.10	Cukup
84	Pemerintah Kota Palopo	1.94	Cukup
85	Pemerintah Kota Kendari	1.90	Cukup
86	Pemerintah Kota Baubau	2.74	Baik
87	Pemerintah Kota Gorontalo	1.69	Kurang
88	Pemerintah Kota Ambon	2.73	Baik
89	Pemerintah Kota Tual	1.00	Kurang
90	Pemerintah Kota Ternate	2.86	Baik
91	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	2.28	Cukup
92	Pemerintah Kota Sorong	1.07	Kurang
93	Pemerintah Kota Jayapura	1.40	Kurang

3. Pemerintah Kabupaten

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemerintah Kabupaten Simeulue	2.64	Baik
2	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	1.86	Cukup
3	Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	2.85	Baik
4	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	1.28	Kurang
5	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	2.65	Baik
6	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	2.97	Baik
7	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	2.62	Baik
8	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	2.80	Baik
9	Pemerintah Kabupaten Pidie	2.81	Baik
10	Pemerintah Kabupaten Bireuen	1.96	Cukup
11	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	2.40	Cukup
12	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	2.89	Baik
13	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	2.75	Baik
14	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	2.70	Baik
15	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	2.57	Cukup
16	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	2.72	Baik
17	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	2.67	Baik
18	Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	1.87	Cukup
19	Pemerintah Kabupaten Nias	1.90	Cukup
20	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	2.50	Cukup
21	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	1.58	Kurang
22	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	1.90	Cukup
23	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2.62	Baik
24	Pemerintah Kabupaten Toba	2.36	Cukup

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
25	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	1.67	Kurang
26	Pemerintah Kabupaten Asahan	2.63	Baik
27	Pemerintah Kabupaten Simalungun	2.32	Cukup
28	Pemerintah Kabupaten Dairi	2.13	Cukup
29	Pemerintah Kabupaten Karo	2.71	Baik
30	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	2.69	Baik
31	Pemerintah Kabupaten Langkat	1.62	Kurang
32	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	1.10	Kurang
33	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.88	Cukup
34	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	1.92	Cukup
35	Pemerintah Kabupaten Samosir	2.14	Cukup
36	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.33	Cukup
37	Pemerintah Kabupaten Batu Bara	2.32	Cukup
38	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	1.67	Kurang
39	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1.60	Kurang
40	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1.61	Kurang
41	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	2.63	Baik
42	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	1.07	Kurang
43	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	1.14	Kurang
44	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.27	Kurang
45	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	2.38	Cukup
46	Pemerintah Kabupaten Solok	2.08	Cukup
47	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	2.62	Baik
48	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	2.32	Cukup
49	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	2.40	Cukup
50	Pemerintah Kabupaten Agam	2.75	Baik
51	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	2.51	Cukup
52	Pemerintah Kabupaten Pasaman	2.64	Baik
53	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	2.49	Cukup
54	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	2.24	Cukup
55	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	2.49	Cukup
56	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	2.74	Baik
57	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	2.71	Baik
58	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	2.32	Cukup
59	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	2.31	Cukup
60	Pemerintah Kabupaten Siak	2.61	Baik
61	Pemerintah Kabupaten Kampar	2.73	Baik
62	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	2.36	Cukup
63	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2.26	Cukup
64	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	2.76	Baik
65	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	2.24	Cukup
66	Pemerintah Kabupaten Kerinci	2.19	Cukup
67	Pemerintah Kabupaten Merangin	2.20	Cukup
68	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	2.31	Cukup
69	Pemerintah Kabupaten Batang Hari	2.21	Cukup
70	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	2.22	Cukup
71	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.20	Cukup
72	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2.23	Cukup
73	Pemerintah Kabupaten Tebo	2.42	Cukup
74	Pemerintah Kabupaten Bungo	2.60	Baik

- 10 -

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
75	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	2.89	Baik
76	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	2.68	Baik
77	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	2.92	Baik
78	Pemerintah Kabupaten Lahat	2.74	Baik
79	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	2.27	Cukup
80	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	2.62	Baik
81	Pemerintah Kabupaten Banyu Asin	2.63	Baik
82	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	2.29	Cukup
83	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.35	Cukup
84	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	2.61	Baik
85	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	2.29	Cukup
86	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	2.68	Baik
87	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	2.30	Cukup
88	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	2.82	Baik
89	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	2.62	Baik
90	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara	2.75	Baik
91	Pemerintah Kabupaten Kaur	1.46	Kurang
92	Pemerintah Kabupaten Seluma	2.72	Baik
93	Pemerintah Kabupaten Mukomuko	1.89	Cukup
94	Pemerintah Kabupaten Lebong	1.80	Cukup
95	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	2.07	Cukup
96	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	2.76	Baik
97	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	2.46	Cukup
98	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	2.46	Cukup
99	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	2.53	Cukup
100	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	2.78	Baik
101	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	2.88	Baik
102	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	2.42	Cukup
103	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	2.62	Baik
104	Pemerintah Kabupaten Tulangbawang	2.07	Cukup
105	Pemerintah Kabupaten Pesawaran	2.92	Baik
106	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	2.53	Cukup
107	Pemerintah Kabupaten Mesuji	2.39	Cukup
108	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	2.72	Baik
109	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	2.38	Cukup
110	Pemerintah Kabupaten Bangka	2.73	Baik
111	Pemerintah Kabupaten Belitung	2.62	Baik
112	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	2.67	Baik
113	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	2.71	Baik
114	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	2.67	Baik
115	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	2.76	Baik
116	Pemerintah Kabupaten Karimun	2.21	Cukup
117	Pemerintah Kabupaten Bintan	2.28	Cukup
118	Pemerintah Kabupaten Natuna	1.87	Cukup
119	Pemerintah Kabupaten Lingga	2.31	Cukup
120	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	1.72	Kurang
121	Pemerintah Kabupaten Bogor	2.81	Baik

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
122	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	2.60	Baik
123	Pemerintah Kabupaten Cianjur	2.71	Baik
124	Pemerintah Kabupaten Bandung	2.84	Baik
125	Pemerintah Kabupaten Garut	2.86	Baik
126	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	2.69	Baik
127	Pemerintah Kabupaten Ciamis	2.92	Baik
128	Pemerintah Kabupaten Kuningan	2.70	Baik
129	Pemerintah Kabupaten Cirebon	2.92	Baik
130	Pemerintah Kabupaten Majalengka	2.75	Baik
131	Pemerintah Kabupaten Sumedang	3.24	Baik
132	Pemerintah Kabupaten Indramayu	2.70	Baik
133	Pemerintah Kabupaten Subang	2.48	Cukup
134	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	2.64	Baik
135	Pemerintah Kabupaten Karawang	2.86	Baik
136	Pemerintah Kabupaten Bekasi	2.77	Baik
137	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	2.66	Baik
138	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	2.61	Baik
139	Pemerintah Kabupaten Cilacap	2.93	Baik
140	Pemerintah Kabupaten Banyumas	2.80	Baik
141	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	2.81	Baik
142	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	2.98	Baik
143	Pemerintah Kabupaten Kebumen	2.69	Baik
144	Pemerintah Kabupaten Purworejo	2.65	Baik
145	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	2.75	Baik
146	Pemerintah Kabupaten Magelang	2.65	Baik
147	Pemerintah Kabupaten Boyolali	2.63	Baik
148	Pemerintah Kabupaten Klaten	2.52	Cukup
149	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	2.86	Baik
150	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	2.75	Baik
151	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	2.90	Baik
152	Pemerintah Kabupaten Sragen	2.45	Cukup
153	Pemerintah Kabupaten Grobogan	2.72	Baik
154	Pemerintah Kabupaten Blora	2.30	Cukup
155	Pemerintah Kabupaten Rembang	2.85	Baik
156	Pemerintah Kabupaten Pati	2.91	Baik
157	Pemerintah Kabupaten Kudus	2.88	Baik
158	Pemerintah Kabupaten Jepara	2.63	Baik
159	Pemerintah Kabupaten Demak	2.65	Baik
160	Pemerintah Kabupaten Semarang	2.67	Baik
161	Pemerintah Kabupaten Temanggung	2.65	Baik
162	Pemerintah Kabupaten Kendal	2.97	Baik
163	Pemerintah Kabupaten Batang	2.78	Baik
164	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	2.61	Baik
165	Pemerintah Kabupaten Pemalang	2.59	Cukup
166	Pemerintah Kabupaten Tegal	2.65	Baik
167	Pemerintah Kabupaten Brebes	2.58	Cukup
168	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	2.44	Cukup
169	Pemerintah Kabupaten Bantul	3.01	Baik
170	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	2.37	Cukup
171	Pemerintah Kabupaten Sleman	2.99	Baik

- 12 -

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
172	Pemerintah Kabupaten Pacitan	2.37	Cukup
173	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	2.40	Cukup
174	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	2.59	Cukup
175	Pemerintah Kabupaten Tuhungagung	2.24	Cukup
176	Pemerintah Kabupaten Blitar	2.90	Baik
177	Pemerintah Kabupaten Kediri	2.62	Baik
178	Pemerintah Kabupaten Malang	2.76	Baik
179	Pemerintah Kabupaten Lumajang	2.18	Cukup
180	Pemerintah Kabupaten Jember	2.02	Cukup
181	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	2.99	Baik
182	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	2.03	Cukup
183	Pemerintah Kabupaten Situbondo	2.85	Baik
184	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	2.31	Cukup
185	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	1.71	Kurang
186	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	2.51	Cukup
187	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	2.61	Baik
188	Pemerintah Kabupaten Jombang	2.26	Cukup
189	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	2.04	Cukup
190	Pemerintah Kabupaten Madiun	2.87	Baik
191	Pemerintah Kabupaten Magetan	2.14	Cukup
192	Pemerintah Kabupaten Ngawi	2.64	Baik
193	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	2.58	Cukup
194	Pemerintah Kabupaten Tuban	2.25	Cukup
195	Pemerintah Kabupaten Lamongan	1.99	Cukup
196	Pemerintah Kabupaten Gresik	2.70	Baik
197	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	2.10	Cukup
198	Pemerintah Kabupaten Sampang	1.37	Kurang
199	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	2.72	Baik
200	Pemerintah Kabupaten Sumenep	2.50	Cukup
201	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	2.53	Cukup
202	Pemerintah Kabupaten Lebak	2.38	Cukup
203	Pemerintah Kabupaten Tangerang	3.43	Baik
204	Pemerintah Kabupaten Serang	2.55	Cukup
205	Pemerintah Kabupaten Jembrana	2.36	Cukup
206	Pemerintah Kabupaten Tabanan	2.78	Baik
207	Pemerintah Kabupaten Badung	2.66	Baik
208	Pemerintah Kabupaten Gianyar	2.63	Baik
209	Pemerintah Kabupaten Klungkung	1.82	Cukup
210	Pemerintah Kabupaten Bangli	2.16	Cukup
211	Pemerintah Kabupaten Karangasem	2.46	Cukup
212	Pemerintah Kabupaten Buleleng	2.62	Baik
213	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	2.72	Baik
214	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	2.80	Baik
215	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	2.79	Baik
216	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	2.58	Cukup
217	Pemerintah Kabupaten Dompu	2.75	Baik
218	Pemerintah Kabupaten Bima	2.68	Baik
219	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	2.70	Baik
220	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	2.47	Cukup
221	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	2.18	Cukup

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
222	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	2.30	Cukup
223	Pemerintah Kabupaten Kupang	1.85	Cukup
224	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	2.06	Cukup
225	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	2.11	Cukup
226	Pemerintah Kabupaten Belu	2.19	Cukup
227	Pemerintah Kabupaten Alor	2.05	Cukup
228	Pemerintah Kabupaten Lembata	2.52	Cukup
229	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	1.37	Kurang
230	Pemerintah Kabupaten Sikka	2.84	Baik
231	Pemerintah Kabupaten Ende	2.61	Baik
232	Pemerintah Kabupaten Ngada	2.70	Baik
233	Pemerintah Kabupaten Manggarai	2.24	Cukup
234	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	1.34	Kurang
235	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	2.43	Cukup
236	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	2.50	Cukup
237	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	1.91	Cukup
238	Pemerintah Kabupaten Nagekeo	2.67	Baik
239	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	2.63	Baik
240	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	1.55	Kurang
241	Pemerintah Kabupaten Malaka	1.00	Kurang
242	Pemerintah Kabupaten Sumbas	2.69	Baik
243	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	1.94	Cukup
244	Pemerintah Kabupaten Landak	2.26	Cukup
245	Pemerintah Kabupaten Mempawah	2.79	Baik
246	Pemerintah Kabupaten Sanggau	2.61	Baik
247	Pemerintah Kabupaten Ketapang	2.55	Cukup
248	Pemerintah Kabupaten Sintang	2.10	Cukup
249	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	2.26	Cukup
250	Pemerintah Kabupaten Sekadau	2.04	Cukup
251	Pemerintah Kabupaten Melawi	1.62	Kurang
252	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	1.65	Kurang
253	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	2.65	Baik
254	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	2.48	Cukup
255	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	2.71	Baik
256	Pemerintah Kabupaten Kapuas	2.39	Cukup
257	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	2.79	Baik
258	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	2.38	Cukup
259	Pemerintah Kabupaten Sukamara	2.85	Baik
260	Pemerintah Kabupaten Lamandau	2.46	Cukup
261	Pemerintah Kabupaten Seruyan	1.86	Cukup
262	Pemerintah Kabupaten Katingan	2.18	Cukup
263	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	2.47	Cukup
264	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	2.16	Cukup
265	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	2.07	Cukup
266	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	2.35	Cukup
267	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	2.25	Cukup
268	Pemerintah Kabupaten Kota Baru	1.78	Kurang
269	Pemerintah Kabupaten Banjar	2.11	Cukup
270	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	2.31	Cukup
271	Pemerintah Kabupaten Tapin	2.63	Baik

- 14 -

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
272	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2.75	Baik
273	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1.99	Cukup
274	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	1.87	Cukup
275	Pemerintah Kabupaten Tabalong	2.95	Baik
276	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	2.20	Cukup
277	Pemerintah Kabupaten Balangan	2.70	Baik
278	Pemerintah Kabupaten Paser	1.69	Kurang
279	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	1.65	Kurang
280	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	2.31	Cukup
281	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	1.63	Kurang
282	Pemerintah Kabupaten Berau	2.16	Cukup
283	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	2.70	Baik
284	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	1.13	Kurang
285	Pemerintah Kabupaten Malinau	1.73	Kurang
286	Pemerintah Kabupaten Bulungan	2.21	Cukup
287	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	2.80	Baik
288	Pemerintah Kabupaten Nunukan	2.33	Cukup
289	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	2.23	Cukup
290	Pemerintah Kabupaten Minahasa	2.68	Baik
291	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	1.37	Kurang
292	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	2.76	Baik
293	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	2.65	Baik
294	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	2.72	Baik
295	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2.50	Cukup
296	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2.84	Baik
297	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	2.40	Cukup
298	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1.65	Kurang
299	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2.68	Baik
300	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	1.67	Kurang
301	Pemerintah Kabupaten Banggai	2.62	Baik
302	Pemerintah Kabupaten Morowali	2.63	Baik
303	Pemerintah Kabupaten Poso	2.30	Cukup
304	Pemerintah Kabupaten Donggala	1.42	Kurang
305	Pemerintah Kabupaten Tolitoli	1.58	Kurang
306	Pemerintah Kabupaten Buol	2.09	Cukup
307	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	2.15	Cukup
308	Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una	1.40	Kurang
309	Pemerintah Kabupaten Sigi	1.44	Kurang
310	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	1.68	Kurang
311	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	1.29	Kurang
312	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	1.83	Cukup
313	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	2.53	Cukup
314	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	2.74	Baik
315	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	1.85	Cukup
316	Pemerintah Kabupaten Takalar	2.11	Cukup
317	Pemerintah Kabupaten Gowa	2.13	Cukup

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
318	Pemerintah Kabupaten Sinjai	2.52	Cukup
319	Pemerintah Kabupaten Maros	2.05	Cukup
320	Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1.87	Cukup
321	Pemerintah Kabupaten Barru	2.61	Baik
322	Pemerintah Kabupaten Bone	2.01	Cukup
323	Pemerintah Kabupaten Soppeng	2.14	Cukup
324	Pemerintah Kabupaten Wajo	2.51	Cukup
325	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	2.24	Cukup
326	Pemerintah Kabupaten Pinrang	2.60	Baik
327	Pemerintah Kabupaten Enrekang	2.48	Cukup
328	Pemerintah Kabupaten Luwu	2.12	Cukup
329	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	2.18	Cukup
330	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	2.58	Cukup
331	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	1.95	Cukup
332	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	2.45	Cukup
333	Pemerintah Kabupaten Buton	2.62	Baik
334	Pemerintah Kabupaten Muna	2.34	Cukup
335	Pemerintah Kabupaten Konawe	1.97	Cukup
336	Pemerintah Kabupaten Kolaka	2.69	Baik
337	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	2.60	Baik
338	Pemerintah Kabupaten Bombana	2.04	Cukup
339	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	2.37	Cukup
340	Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	2.55	Cukup
341	Pemerintah Kabupaten Buton Utara	2.00	Cukup
342	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	2.56	Cukup
343	Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur	2.52	Cukup
344	Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	2.62	Baik
345	Pemerintah Kabupaten Muna Barat	2.23	Cukup
346	Pemerintah Kabupaten Buton Tengah	2.21	Cukup
347	Pemerintah Kabupaten Buton Selatan	1.98	Cukup
348	Pemerintah Kabupaten Boalemo	1.62	Kurang
349	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	2.11	Cukup
350	Pemerintah Kabupaten Pohuwato	1.37	Kurang
351	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	1.48	Kurang
352	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	1.91	Cukup
353	Pemerintah Kabupaten Majene	2.76	Baik
354	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	2.90	Baik
355	Pemerintah Kabupaten Mamasa	1.92	Cukup
356	Pemerintah Kabupaten Mamuju	1.94	Cukup
357	Pemerintah Kabupaten Pasangkayu	2.17	Cukup
358	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	2.52	Cukup
359	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1.55	Kurang
360	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	1.39	Kurang
361	Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	2.22	Cukup
362	Pemerintah Kabupaten Buru	1.68	Kurang
363	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	1.61	Kurang
364	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat	2.51	Cukup
365	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	1.00	Kurang
366	Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya	2.00	Cukup

- 16 -

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
367	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	1.80	Cukup
368	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	1.25	Kurang
369	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	1.65	Kurang
370	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula	1.31	Kurang
371	Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	2.92	Baik
372	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	2.34	Cukup
373	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	1.82	Cukup
374	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	2.37	Cukup
375	Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	1.12	Kurang
376	Pemerintah Kabupaten Fakfak	1.20	Kurang
377	Pemerintah Kabupaten Kaimana	1.78	Kurang
378	Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama	1.15	Kurang
379	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	1.11	Kurang
380	Pemerintah Kabupaten Manokwari	1.08	Kurang
381	Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	1.15	Kurang
382	Pemerintah Kabupaten Sorong	1.31	Kurang
383	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat	1.11	Kurang
384	Pemerintah Kabupaten Tambrauw	1.01	Kurang
385	Pemerintah Kabupaten Maybrat	1.00	Kurang
386	Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan	1.03	Kurang
387	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak	1.00	Kurang
388	Pemerintah Kabupaten Merauke	1.26	Kurang
389	Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	1.07	Kurang
390	Pemerintah Kabupaten Jayapura	1.07	Kurang
391	Pemerintah Kabupaten Nabire	1.07	Kurang
392	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen	1.08	Kurang
393	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	1.10	Kurang
394	Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	1.05	Kurang
395	Pemerintah Kabupaten Mimika	1.00	Kurang
396	Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	1.20	Kurang
397	Pemerintah Kabupaten Mappi	1.03	Kurang
398	Pemerintah Kabupaten Asmat	1.00	Kurang
399	Pemerintah Kabupaten Yahukimo	1.00	Kurang
400	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	1.09	Kurang
401	Pemerintah Kabupaten Tolikara	1.05	Kurang
402	Pemerintah Kabupaten Sarmi	1.12	Kurang
403	Pemerintah Kabupaten Keerom	1.04	Kurang
404	Pemerintah Kabupaten Waropen	1.00	Kurang
405	Pemerintah Kabupaten Supiori	1.07	Kurang
406	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya	1.00	Kurang
407	Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya	1.00	Kurang

PL. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

 AMALIA ADNINGGAR WIDYASANTI



Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 sebagai Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Terkait Urusan Statistik



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax: (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

Nomor : B-234/02000/TS.160/2025 Jakarta, 7 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 sebagai Indikator Kinerja Pemerintah Daerah terkait Urusan Statistik

Yth. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang merupakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) pemerintah daerah pada urusan statistik. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana *Grand Design* RB 2025 – 2045 dan *Roadmap* RB 2025 – 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**.
2. Upaya pembangunan statistik sektoral tahun 2025 difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

-2-

3. Pemerintah Daerah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 805 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.
4. Sehubungan dengan angka 3, bagi Pemerintah Provinsi yang belum menjadi lokus penilaian EPSS pada periode sebelumnya, maka pemenuhan target diisikan dengan nilai rata-rata Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah yang menjadi lokus EPSS tetapi tidak mengikuti penilaian pada periode sebelumnya, maka pemenuhan target diisikan '0'.
5. Berbagai bentuk penilaian yang tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 dan bukan hasil resmi BPS diluar tanggung jawab BPS.
6. Untuk penguatan penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.
7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Dina Rizkiani (WA. 0812-9134-7900) atau Sdri. 'Aisyah Durrotussa'adah (WA. 0813-1945-6643).**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Utama,

Moh Edy Mahmud

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan); dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPS.

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sulomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

Nomor : B-235/02000/TS.160/2025 Jakarta, 7 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
(EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah

Yth. Kepala BPS Provinsi Seluruh Indonesia
di-

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamankan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik sektoral dan pembina data statistik. Dalam rangka mengawal perbaikan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah, BPS telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk mendapatkan *benchmark* mengenai capaian penyelenggaraan statistik sektoral serta perbaikannya pada tahun 2023 dan 2024. BPS terus berkomitmen untuk mendukung upaya penguatan statistik sektoral yang berdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana *Grand Design* RB 2025 – 2045 dan *Roadmap* RB 2025 – 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**.
2. Upaya pembangunan statistik sektoral tahun ini agar difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2029.

-2-

3. Pemerintah Daerah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.
4. Sehubungan dengan angka 3, bagi Pemerintah Provinsi yang belum menjadi lokus penilaian EPSS pada periode sebelumnya, maka pemenuhan target diisikan dengan nilai rata-rata Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah yang menjadi lokus EPSS tetapi tidak mengikuti penilaian pada periode sebelumnya, maka pemenuhan target diisikan '0'.
5. Berbagai bentuk penilaian yang tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 dan bukan hasil resmi BPS diluar tanggung jawab BPS.
6. Kepala BPS Provinsi agar menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan EPSS 2025 kepada Pemerintah Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
7. BPS Pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan capaian kinerja Pemerintah Daerah terkait urusan statistik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Dina Rizkiani (WA. 0812-9134-7900) atau Sdri. 'Aisyah Durrotussa'adah (WA. 0813-1945-6643).**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Utama,

Moh Edy Mahmud

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan); dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral (EPSS) TA 2025 di Instansi Pusat



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

Nomor : B-236/02000/TS.160/2025 Jakarta, 7 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
(EPSS) TA 2025 di Instansi Pusat

Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara
2. Sekretaris Jenderal Kementerian
3. Sekretaris Kementerian
4. Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian
5. Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran POLRI
6. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan RI
7. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI

di-

Tempat

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menjadi salah satu indikator dalam kegiatan prioritas 'Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan'. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana *Grand Design* RB 2025 – 2045 dan *Roadmap* RB 2025 – 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**.

-2-

2. Upaya pembangunan statistik sektoral tahun 2025 dapat difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di masing-masing Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
3. Instansi Pemerintah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.
4. Sehubungan dengan angka 3, bagi Instansi Pemerintah yang baru terbentuk atau mengalami perubahan tugas dan fungsi di periode 2025 – 2029, maka pemenuhan target 2025 diserahkan ke masing-masing instansi pemerintah dan dapat mempertimbangkan hasil EPSS dari instansi sebelumnya dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing Instansi Pemerintah saat ini dalam pemenuhan target. Penilaian EPSS periode selanjutnya akan tetap fokus pada bukti dukung yang disampaikan saat itu, **bukan** pada hasil instansi sebelumnya. Informasi lebih lanjut terkait pengaturan ini akan disampaikan kemudian setelah berkoodinasi dengan Kementerian PANRB dan *stakeholders* lainnya.
5. Berbagai bentuk penilaian yang tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 dan bukan hasil resmi BPS diluar tanggung jawab BPS.
6. Untuk penguatan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah dapat berkoordinasi dengan unit kerja di BPS yang berperan sebagai pembina statistik sektoral masing-masing.
7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Dina Rizkiani (WA. 0812-9134-7900) atau Sdri. 'Aisyah Durrotussa'adah (WA. 0813-1945-6643).**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Utama,
Moh Edy Mahmud

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan); dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPS.

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral (EPSS) TA 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810281-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

Nomor : B-237/02000/TS.160/2025 Jakarta, 7 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
(EPSS) TA 2025

Yth. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
di-

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamankan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik sektoral dan pembina data statistik. Dalam rangka mengawal perbaikan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah, BPS telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk mendapatkan *benchmark* mengenai capaian penyelenggaraan statistik sektoral serta perbaikannya pada tahun 2023 dan 2024. BPS terus berkomitmen untuk mendukung upaya penguatan statistik sektoral yang berdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana *Grand Design* RB 2025 – 2045 dan *Roadmap* RB 2025 – 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**.
2. Upaya pembangunan statistik sektoral tahun 2025 dapat difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di masing-masing Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.

-2-

3. Instansi Pemerintah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.
4. Sehubungan dengan angka 3, bagi Instansi Pemerintah yang baru terbentuk atau mengalami perubahan tugas dan fungsi di periode 2025 – 2029, maka pemenuhan target 2025 diserahkan ke masing-masing instansi pemerintah dan dapat mempertimbangkan hasil EPSS dari instansi sebelumnya dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing Instansi Pemerintah saat ini dalam pemenuhan target. Penilaian EPSS periode selanjutnya akan tetap fokus pada bukti dukung yang disampaikan saat itu, **bukan** pada hasil instansi sebelumnya. Informasi lebih lanjut terkait pengaturan ini akan disampaikan kemudian setelah berkoodinasi dengan Kementerian PANRB dan *stakeholders* lainnya.
5. Berbagai bentuk penilaian yang tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 dan bukan hasil resmi BPS diluar tanggung jawab BPS.
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama agar menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan EPSS 2025 kepada Tim Pembina Statistik Sektoral masing-masing.
7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Dina Rizkiani (WA. 0812-9134-7900) atau Sdri. 'Aisyah Durrotussa'adah (WA. 0813-1945-6643).**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Pt. Sekretaris Utama,

Moh Edy Mahmud

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan); dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

LAMPIRAN

Kementerian/Lembaga Lokus Pembinaan Statistik Sektor 2024-2025

No	Lokus Pembinaan 2024	Lokus Pembinaan 2025
(1)	(2)	(3)
1	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial
2	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
3	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara
4	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
5	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional
7	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
8	Badan Pemeriksa Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan
9	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
10	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
11	Badan SAR Nasional/Badan Nasional Pencarian Pertolongan	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
12	Kementerian Agama	Kementerian Agama
13	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hak Asasi Manusia
16	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
17	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan
18	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan
19	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan

No	Lokus Pembinaan 2024	Lokus Pembinaan 2025
(1)	(2)	(3)
20	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
21	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri
22	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
23	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga
24	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perdagangan
25	Kementerian Perhubungan	Kementerian Perhubungan
26	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian
27	Kementerian Pertanian	Kementerian Pertanian
28	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
29	Perpustakaan Nasional	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
30	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
31	Televisi Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
32	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
33	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Badan Standardisasi Nasional
34	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mahkamah Konstitusi RI
35	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Arsip Nasional Republik Indonesia
36	Komisi Aparatur Sipil Negara	Lembaga Administrasi Negara
37	Komisi Informasi Pusat	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
38		Ombudsman Republik Indonesia
39		Badan Intelijen Negara
40		Badan Pengawas Pemilihan Umum
41		Kementerian Pertahanan

LAMPIRAN

No	Lokus Pembinaan 2024	Lokus Pembinaan 2025
(1)	(2)	(3)
42		Badan Siber dan Sandi Negara
43		Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
44		Kementerian Dalam Negeri
45		Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
46		Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
47		Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
48		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
49		Kementerian Kebudayaan
50		Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
51		Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
52		Kejaksaan Agung Republik Indonesia
53		Kepolisian Negara Republik Indonesia
54		Kementerian Transmigrasi
55		Kementerian Sosial
56		Komisi Pemberantasan Korupsi
57		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
58		Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
59		Kementerian Kehutanan
60		Kementerian Pekerjaan Umum
61		Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Lokus Pembinaan 2024	Lokus Pembinaan 2025
(1)	(2)	(3)
62		Badan Pengusahaan Batam/BP Batam
63		Kementerian Koperasi
64		Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
65		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
66		Badan Narkotika Nasional
67		Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
68		Kementerian Koordinator Bidang Pangan
69		Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
70		Badan Riset dan Inovasi Nasional
71		Kementerian Komunikasi dan Digital
72		Kementerian Pariwisata
73		Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
74		Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
75		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
76		Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
77		Mahkamah Agung
78		Komisi Pemilihan Umum
79		Kementerian Badan Usaha Milik Negara
80		Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

LAMPIRAN

No	Lokus Pembinaan 2024	Lokus Pembinaan 2025
(1)	(2)	(3)
81		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
82		Kementerian Sekretariat Negara
83		Badan Nasional Pengelola Perbatasan
84		Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
85		Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
86		Kementerian Hukum
87		Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
88		Komisi Yudisial Republik Indonesia
89		Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
90		Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
91		Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Lembar Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/617/RB.06/2026 19 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Tahun 2025**

Yth.

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
di
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pusat Statistik. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran "Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif" serta "Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional". Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks RB Badan Pusat Statistik tahun 2025 adalah **91,31** dengan kategori "**A-**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	2024	2025
A	RB General	100*	80,28	86,60
B	RB Tematik	10	4,36	4,71
C	Indeks RB	110	84,64	91,31
			A-	A-

**) Beberapa instansi pemerintah mengalami penyesuaian Bobot disebabkan partisipasi dalam penilaian Meso, data penyesuaian bobot masing masing instansi pemerintah dapat diakses pada Portal RB Nasional*

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260406QJAY
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



LAMPIRAN

Hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id>.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pusat Statistik. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Pusat Statistik.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260406QJAY
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



Angka Sementara Indeks Reformasi Birokrasi Berdasarkan Portal KemenpanRB



SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB

Hasil Evaluasi Badan Pusat Statistik

RB General Awal	84.69
Koefisien	0
RB General	84.69
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	84.69
RB Tematik	6.32
Index RB	91.01
File Berkas	

Surat Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Tahap I b Tahun Akademik
2025/2026



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 Telp. (021) 3103591 <http://www.kemensos.go.id>

Nomor : 1824/1/DL.03/5/2025 30 Mei 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Tahap I b Tahun
Akademik 2025/2026

Yth :
Gubernur/Walikota/Bupati (Daftar Terlampir)

di Tempat

Sesuai dengan Instruksi Presiden RI nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari visi Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan berkualitas yang inklusif dan berbasis asrama (*boarding school*). Sehubungan dengan hal ini, kami membuka pendaftaran peserta didik baru untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahap I b di 37 (tiga puluh tujuh) titik lokasi (terlampir). Adapun tahapan penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial telah menyerahkan data *By Name By Address* yang berasal dari desil 1 (satu) DTSEN kepada daerah melalui Dinas Sosial, SDM PKH dan Lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat.
2. Dinas Sosial bersama dengan SDM PKH, BPS, dan penyelenggara Sekolah Rakyat melakukan verifikasi di lapangan untuk kemudian diusulkan melalui *link* pendaftaran Satgas Penerimaan Peserta Didik Sekolah Rakyat (<https://sdmpkh.kemensos.go.id/sr/>). Adapun data di luar desil 1 (satu) DTSEN namun layak untuk diusulkan menjadi calon siswa (*exclusion error*), dapat diusulkan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan atas data tersebut agar berkoordinasi dengan BPS daerah untuk diusulkan dalam DTSEN sesuai dengan kondisi kesejahteraannya.
3. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial bersama dengan BPS daerah, Dinas Pendidikan dan Lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat agar melakukan proses seleksi terhadap data poin 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan jumlah rombongan belajar dan jenjang pendidikan yang telah ditentukan beserta cadangan sebanyak 10% dari kebutuhan jumlah peserta didik.
4. Hasil poin 3 (tiga) agar dituangkan dalam Surat Keputusan oleh Kepala Daerah tentang Penetapan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat (format terlampir) dan dapat diserahkan kepada Direktorat Jaminan Sosial sebagai Satgas Rekrutmen Siswa paling lambat tanggal 13 Juni 2025.
5. Dinas Sosial dapat menginformasikan kepada calon peserta didik yang telah ditetapkan bahwa mereka memasuki tahap selanjutnya dalam proses penerimaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
BSSN

peserta didik baru Sekolah Rakyat dan dapat dipastikan menjadi peserta didik Sekolah Rakyat. Sedangkan untuk pendaftar yang tidak tertampung di Sekolah Rakyat agar juga dapat diinformasikan sehingga mereka dapat segera mendaftar di sekolah reguler. Dinas Sosial dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi pendaftar yang tidak masuk dalam calon peserta didik Sekolah Rakyat sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen nomor: 765/3/HM.01/5/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal: Permohonan Surat Edaran (terlampir).

6. Selanjutnya, atas data pada poin 5 (Ilma), Pemerintah Daerah Cq. Dinas Sosial bersama dengan SDM PKH, dan/atau Lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat agar melakukan *home visit* dan wawancara kepada calon peserta didik dan keluarga paling lambat tanggal 18 Juni 2025. *Home visit* dan wawancara dilakukan dalam rangka penguatan minat dan komitmen, baik dari anak maupun orang tua/keluarga. Panduan *home visit* dan wawancara serta surat pernyataan komitmen orang tua dan peserta didik terlampir.
7. Calon peserta didik yang sudah dilakukan *home visit* dan wawancara akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat. Surat Keputusan dapat diserahkan kepada Direktorat Jaminan Sosial sebagai Satgas Rekrutmen Siswa paling lambat tanggal 19 Juni 2025.
8. Pengumuman peserta didik Sekolah Rakyat akan diumumkan melalui media informasi yang relevan paling lambat tanggal 20 Juni 2025.
9. Untuk pelaksanaan tes kesehatan terhadap peserta didik akan dilaksanakan mendekati waktu registrasi ulang dan pemanggilan peserta didik ke asrama. Untuk itu, Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Lembaga Penyelenggara Sekolah Rakyat. Adapun mekanisme dan waktu pelaksanaan tes kesehatan akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Robben Rico

Tembusan :

1. Menteri Sosial
2. Kepala Badan Pusat Statistik
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi (Terlampir)
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota (Terlampir)
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (Terlampir)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
BSSN

Lampiran
Nomor : 1824 /1/DL.03/05/2025
Tanggal : 30 Mei 2025

Gubernur / Walikota / Bupati

- 1 Gubernur Banten
- 2 Gubernur Jawa Barat
- 3 Gubernur Maluku
- 4 Gubernur Nusa Tenggara Barat
- 5 Gubernur Riau
- 6 Gubernur Sulawesi Barat
- 7 Gubernur Sulawesi Selatan
- 8 Gubernur Sulawesi Tengah
- 9 Gubernur Sumatera Utara
- 10 Bupati Aceh Selatan
- 11 Bupati Anambas
- 12 Bupati Bandung
- 13 Bupati Banjarnegara
- 14 Bupati Biak Numfor
- 15 Bupati Bojonegoro
- 16 Bupati Empat Lawang
- 17 Bupati Gresik
- 18 Bupati Halmahera Utara
- 19 Bupati Jember
- 20 Bupati Katingan
- 21 Bupati Kaur
- 22 Bupati Lampung Selatan
- 23 Bupati Lebak
- 24 Bupati Pamekasan
- 25 Bupati Polewali Mandar
- 26 Bupati Ponorogo
- 27 Bupati Rokan Hilir
- 28 Bupati Sarmi
- 29 Bupati Sidenreng Rappang
- 30 Bupati Sumedang
- 31 Bupati Takalar
- 32 Bupati Tanjung Jabung Timur
- 33 Bupati Tuban
- 34 Bupati Wajo
- 35 Bupati Wonosobo
- 36 Walikota Pasuruan
- 37 Walikota Samarinda

Kepala Dinas Sosial Provinsi

- 1 Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh
- 2 Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten
- 3 Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
- 4 Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi

- 5 Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
- 6 Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
- 7 Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
- 8 Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
- 9 Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
- 10 Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
- 11 Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- 12 Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku
- 13 Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara
- 14 Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 15 Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua
- 16 Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau
- 17 Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
- 18 Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
- 19 Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
- 20 Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
- 21 Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota

- 1 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan
- 2 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Anambas
- 3 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung
- 4 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara
- 5 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
- 6 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro
- 7 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang
- 8 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik
- 9 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara
- 10 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
- 11 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan
- 12 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kaur
- 13 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
- 14 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak
- 15 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur
- 16 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju
- 17 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan
- 18 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
- 19 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo
- 20 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir
- 21 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarmi
- 22 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang
- 23 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
- 24 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar
- 25 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 26 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tuban
- 27 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wajo
- 28 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo
- 29 Kepala Dinas Sosial Kota Ambon

- 30 Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi
- 31 Kepala Dinas Sosial Kota Makassar
- 32 Kepala Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan
- 33 Kepala Dinas Sosial Kota Palu
- 34 Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan
- 35 Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru
- 36 Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda
- 37 Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku
- 4 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 5 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- 6 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat
- 7 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 8 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
- 9 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 10 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan
- 11 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Anambas
- 12 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
- 13 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara
- 14 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor
- 15 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
- 16 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang
- 17 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
- 18 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara
- 19 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- 20 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
- 21 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur
- 22 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
- 23 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
- 24 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
- 25 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar
- 26 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
- 27 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir
- 28 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi
- 29 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang
- 30 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
- 31 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar
- 32 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 33 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- 34 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo
- 35 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo
- 36 Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
- 37 Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Surat Penyampaian Nilai Batas Pendapatan Desil 8 Hasil Susenas dan Data Agregat Keluarga



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-52/01000/HM.310/2025 Jakarta, 5 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Penyampaian Nilai batas Pendapatan Desil 8 Hasil Susenas dan Data Agregat Keluarga

Yth. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
di-
Jakarta

Menindaklanjuti kesepakatan rapat pada tanggal 5 Februari 2025 di Kementerian PPN/Bappenas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diusulkan berdasarkan nilai batas pendapatan maksimum rumah tangga pada **Desil 8** untuk masing-masing provinsi berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, yang lebih mencerminkan standar hidup masyarakat di masing-masing provinsi (**Lampiran 1**);
2. Data jumlah keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan perumahan (*backlog* kepemilikan rumah dan *backlog* rumah layak huni) menurut desil untuk 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi seluruh Indonesia dapat diunduh di s.bps.go.id/dtsen_perumahan dengan *password*: eiNGkKY6.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:
Yth. Menteri PPN/Kepala Bappenas (sebagai laporan)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI) BSSN.
Untuk lebih detail, silakan kunjungi s.bps.go.id/dtsen_perumahan dengan *password*: eiNGkKY6.

Lampiran I Surat Kepala BPS
 Nomor : B-52/01000/HM.310/2025
 Tanggal : 5 Februari 2025

Batas Pendapatan Rumah tangga per Bulan pada Desil 8 (dalam Rupiah) menurut provinsi berdasarkan hasil Susenas Maret 2024.

No.	Provinsi	Batas Pendapatan Rumah tangga per Bulan pada Desil 8 (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	ACEH	7.711.010
2	SUMATERA UTARA	7.625.308
3	SUMATERA BARAT	8.695.611
4	RIAU	8.701.476
5	JAMBI	7.937.969
6	SUMATERA SELATAN	8.048.746
7	BENGKULU	7.401.942
8	LAMPUNG	6.525.842
9	KEP. BANGKA BELITUNG	9.514.711
10	KEPULAUAN RIAU	11.129.284
11	DKI JAKARTA	13.751.203
12	JAWA BARAT	8.281.109
13	JAWA TENGAH	6.802.502
14	DI YOGYAKARTA	8.345.814
15	JAWA TIMUR	7.178.063
16	BANTEN	10.004.130
17	BALI	11.185.599
18	NUSA TENGGARA BARAT	6.896.888
19	NUSA TENGGARA TIMUR	6.944.111
20	KALIMANTAN BARAT	8.266.566
21	KALIMANTAN TENGAH	8.874.924
22	KALIMANTAN SELATAN	8.089.292
23	KALIMANTAN TIMUR	11.720.488
24	KALIMANTAN UTARA	10.291.842
25	SULAWESI UTARA	8.142.206
26	SULAWESI TENGAH	7.654.778
27	SULAWESI SELATAN	8.678.368
28	SULAWESI TENGGARA	8.324.254
29	GORONTALO	7.904.612



* Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSN)
 * Photo kode QR di samping untuk menampilkan file asli

- 3 -

No.	Provinsi	Batas Pendapatan Rumah tangga per Bulan pada Desil 8 (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)
30	SULAWESI BARAT	7.568.244
31	MALUKU	8.985.807
32	MALUKU UTARA	9.708.799
33	PAPUA BARAT	10.260.757
34	PAPUA BARAT DAYA	12.325.281
35	PAPUA	10.978.549
36	PAPUA SELATAN	10.749.891
37	PAPUA TENGAH	8.621.742
38	PAPUA PEGUNUNGAN	9.904.060
	INDONESIA	7.438.310



Pt. Kepala Badan Pusat Statistik

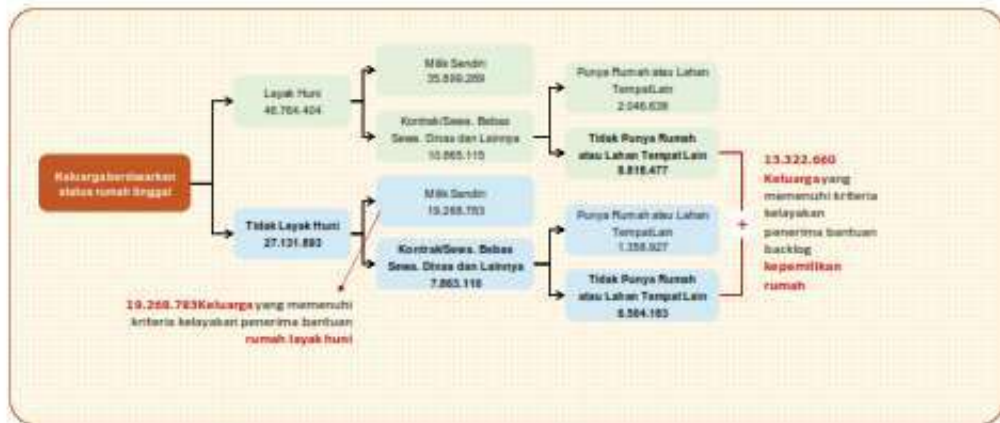
Amalia Adininggar Widyasanti



* Dokumen ini telah dicetak/dibagikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE-E) BSSN
1. Please keep QR code nearby until downloading file end.

Lampiran II Surat Kepala BPS
 Nomor : B-52/01000/HM.310/2025
 Tanggal : 5 Februari 2025

Skema jumlah keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan perumahan.



Keterangan: data agregat dapat diunduh di s.bps.go.id/dtsen_perumahan dengan password: eINGkkY6.



Pt. Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti



Document ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSE) dengan kode QR di samping untuk memastikan file asli.

Daftar Prestasi/Penghargaan BPS Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BPS Kabupaten Bone	Satker Terbaik I Tahun 2024	Januari	KPPN Watampone
2	BPS Kabupaten Sidenreng Rappang	1. SATKER TERBAIK LINGKUP KPPN PAREPARE TA 2024	Januari	KPPN PAREPARE
3	BPS Kabupaten Tuban	Satker Terbaik Capaian Jumlah Transaksi Penggunaan KKP Tahun 2024 pada kategori Satuan Kerja dengan Pagu Besar	Januari	KPPN Tuban
4	BPS Kabupaten Tuban	Satker Terbaik Capaian Jumlah Transaksi Penggunaan CMS Tahun 2024 pada kategori Satker dengan Pagu Besar	Januari	KPPN Tuban
5	BPS Kabupaten Tuban	Peringkat Pertama Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 pada kategori Satker dengan Pagu Besar	Januari	KPPN Tuban
6	BPS Kabupaten Probolinggo	Satker Pencairan APBN 2025 Tercepat	Januari	KPPN Bondowoso
7	BPS Kabupaten Bondowoso	Peringkat 1 Satker dengan Penyampaian LPJ Bendahara Terbaik Tahun 2024	Januari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso
8	BPS Kabupaten Bondowoso	Satker dengan Kinerja IKPA Terbaik Satker di Wilayah Kabupaten Bondowoso (Pagu diatas 5 Milyar) Tahun 2024	Januari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso
9	BPS Kabupaten Probolinggo	Satuan Kerja Pencairan APBN 2025 Tercepat	Januari	KPPN Bondowoso
10	BPS Kabupaten Bondowoso	Peringkat 3 Satker dengan Transaksi Digipay Terbaik Tahun 2024	Januari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso
11	BPS Kabupaten Bondowoso	Satker dengan Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Tahun 2024 (Peringkat 3)	Januari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso
12	BPS Kabupaten Bondowoso	Satker dengan Transaksi Cash Management System Terbaik Tahun 2024	Januari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	BPS Kabupaten Bima	Terbaik kedua penggunaan Cash Management Sysytem (CMS) Tahun 2024	Januari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima (KPPN Bima)
14	BPS Kabupaten Bima	Satuan kerja dengan predikat IKPA SANGAT BAIK Dengan Nilai IKPA di atas 95 Tahun 2024	Januari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima (KPPN Bima)
15	BPS Kabupaten Bima	Terbaik Kedua Penyampaian LPJ dan Rekonsiliasi LK Tahun 2024 Kategori UP ZI S.D. 60 Juta	Januari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima (KPPN Bima)
16	BPS Kabupaten Karanganyar	Penghargaan dari BPS Provinsi Jawa Tengah	Januari	Kepala KPPN Sragen
17	BPS Kabupaten Karanganyar	Implementasi Digitalisasi berdasar transaksi KKP	Januari	Kepala KPPN Sragen
18	BPS Kabupaten Karanganyar	Implementasi Digitalisasi transaksi Digipay	Januari	Kepala KPPN Sragen
19	BPS Kabupaten Karanganyar	Penyampaian LPJ Bendahara	Januari	Kepala KPPN Sragen
20	BPS Kabupaten Karanganyar	Implementasi Digitalisasi transaksi CMS	Januari	Kepala KPPN Sragen
21	BPS Kabupaten Katingan	Peringkat II Satuan Kerja dengan Kinerja Terbaik Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Digital Payment Marketplace Semester II Tahun Anggaran 2025	Januari	Kepala KPPN Sampit
22	BPS Kabupaten Kapuas	Keberhasilannya menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2024 untuk seluruh pegawainya dengan tepat waktu dan menjadi yang Tercepat di KPP Pratama Palangkaraya	Januari	KPP Pratama Palangkaraya
23	BPS Kabupaten Temanggung	Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah dengan Realisasi diatas 100 Periode Smt II 2024	Januari	KPPN Magelang
24	BPS Kabupaten Bener Meriah	Kategori Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Terbaik – Periode Semester II Tahun Anggaran 2024 dengan capaian sempurna (Nilai 100)	Januari	KPPN Takengon
25	BPS Kabupaten Bener Meriah	Peringkat I Kategori Pengguna Digital Payment Terbaik – Periode Semester II Tahun Anggaran 2024	Januari	KPPN Takengon
26	BPS Kabupaten Bener Meriah	Kategori Pengelola Anggaran Terbaik – Periode Semester II Tahun Anggaran 2024 atas nama Ilmiadi, S.Si.	Januari	KPPN Takengon

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	BPS Kabupaten Klungkung	Terbaik II Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 99,77 untuk Pagu di atas 5 Miliar Rupiah Tahun 2024	Januari	KPPN Amlapura
28	BPS Kabupaten Klungkung	Terbaik III Satuan Kerja dengan Transaksi CMS Terbanyak untuk Pagu di bawah 50 Miliar Rupiah Tahun 2024	Januari	KPPN Amlapura
29	BPS Kabupaten Temanggung	Satker Implementasi Digipay Satu dengan Jumlah Transaksi Terbanyak sampai dengan Smt II 2024	Januari	KPPN Magelang
30	BPS Kabupaten Kulon Progo	Penghargaan Terbaik I Kategori Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2024.	Januari	KPPN Wates
31	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Penghargaan Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Sedang Bobot Besar Triwulan I TA 2025 dari DJPb	Januari	Kepala Kanwil DPJB Kalimantan Tengah
32	BPS Kabupaten Barru	Satker Pagu Dipa Sedang dengan Jumlah Transaksi CMS terbanyak Tahun Anggaran 2024	Januari	KPPN Parepare
33	BPS Kabupaten Barru	Satker Pagu Dipa Sedang dengan Nilai Kenaikan IKPA Tertinggi Tahun Anggaran 2024 Terbaik Keempat	Januari	KPPN Parepare
34	BPS Kabupaten Barru	Satker dengan Jumlah Transaksi Digipay Terbanyak 2024	Januari	KPPN Parepare
35	BPS Kabupaten Enrekang	Satker Pagu DIPA Sedang dengan Kenaikan IKPA Tertinggi Tahun Anggaran 2024 Lingkup KPPN Pare-Pare Terbaik Kedua	Januari	KPPN Pare-Pare
36	BPS Kabupaten Bone	Satker dengan Capaian IKPA Terbaik dengan Nilai 100	Januari	KPPN Watampone
37	BPS Kabupaten Bone	Satker Terbaik I Tahun 2024	Januari	KPPN Watampone
38	BPS Kabupaten Sumba Timur	Penghargaan Kinerja Penggunaan Digipay Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2024	Januari	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Waingapu
39	BPS Kota Parepare	Satker Pagu DIPA Sedang dengan Nilai IKPA Tertinggi Tahun Anggaran 2024 Terbaik Kedua	Januari	KPPN Tipe A1 Parepare
40	BPS Kabupaten Purworejo	Penghargaan Satker Pengguna CMS Terbaik Kategori Pagu 5 - 10 Milyar Lingkup KPPN Purworejo Tahun 2024	Januari	KPPN Purworejo
41	BPS Kabupaten Kulon Progo	Penghargaan Kategori Terbaik I Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2024.	Januari	KPPN Wates
42	BPS Kabupaten Kulon Progo	Penghargaan Kategori Terbaik II Pengguna Digipay Satker Lingkup KPPN Wates Semester II Tahun Anggaran 2024.	Januari	KPPN Wates

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	BPS Kabupaten Kulon Progo	Penghargaan Kategori Terbaik II Pengguna Cash Management System (CMS) Satker Lingkup KPPN Wates Semester II Tahun Anggaran 2024.	Januari	KPPN Wates
44	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Peringkat I Kategori Satuan Kerja Besar (Jumlah Satker >15) Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2023	Januari	Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
45	BPS Kabupaten Serdang Bedagai	1. Penghargaan Peringkat II IKPA Tertinggi Pagu Sedang (Rp1 s.d 10 Milyar) Tahun 2024 ingkup KPPN Tebing Tinggi 2. Penghargaan Peringkat III Implementasi Transaksi Digipay Satu Tertinggi Tahun 2024 lingkup KPPN Tebing Tinggi 3. Penghargaan Peringkat I Penyampaian LPJ ke KPPN Tercepat dan Akurat Tahun 2024 lingkup KPPN Tebing Tinggi 4. Penghargaan Capaian Nilai IKPA 100 Semester I Tahun 2025 lingkup KPPN Tebing Tinggi 5. Penghargaan Peringkat III Implementasi Cashless Society Tertinggi Semester I Tahun 2025 lingkup KPPN Tebing Tinggi 6. Penghargaan Peringkat I Pengajuan Gaji Induk Paling Cepat dan Tepat Semester I Tahun 2025 lingkup KPPN Tebing Tinggi	Januari	KPPN Tebing Tinggi
46	BPS Kota Probolinggo	Peringkat 3 Kinerja IKPA Terbaik Satker di Wilayah Kota Probolinggo (Pagu Sampai Dengan 5 Milyar)	Januari	KPPN Bondowoso
47	BPS Kabupaten Kulon Progo	Penghargaan Kategori Satker Terbaik Lingkup KPPN Wates dalam Pengelolaan Anggaran 2024.	Januari	KPPN Wates
48	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	Pencapaian Gerakan Zero Retur SP2D Tahun Anggaran 2024	Januari	KPPN Kendari
49	BPS Kota Blitar	Partisipasi aktif dalam Pembinaan pengelolaan Statistik Sektoral dan Kelurahan Cinta Statistik serta EPSS pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sehingga Nilai IPS Pemkot Blitar meningkat pada tahun 2024	Januari	Pemerintah Kota Blitar
50	BPS Kota Blitar	Partisipasi aktif dalam Pembinaan pengelolaan Statistik Sektoral dan Kelurahan Cinta Statistik serta EPSS pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sehingga Nilai IPS Pemkot Blitar meningkat pada tahun 2024	Januari	Pemerintah Kota Blitar
51	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengelolaan IKPA Pagu Sedang Terbaik 3 Periode Semester II TA 2024 Lingkup KPPN Kendari	Januari	KPPN Kendari
52	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	Peringkat II Satker terbaik Implementasi CMS Semester II Tahun Anggaran 2024	Januari	KPPN Sampit

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	Peringkat 1 Satuan Kerja dengan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2024	Januari	KPPN Sampit
54	BPS Kabupaten Mojokerto	Kualitas Pelaksanaan Pelaporan Keuangan dan Rekonsiliasi Keuangan Negara Terbaik Peringkat I	Januari	DJP KPPN MOJOKERTO
55	BPS Kabupaten Mojokerto	Satker Peraih Peringkat III Kategori Penyampaian SPM Gaji Induk Setiap Bulan Tercepat dan Akurat (Benar)	Januari	Kementerian Keuangan DJP KPPN MOJokerto
56	BPS Kabupaten Bantaeng	Kepatuhan satuan kerja terhadap penyelesaian LPJ bendahara semester II Tahun 2024	Januari	.KPPN
57	BPS Kabupaten Bantaeng	Kepatuhan satuan kerja terhadap penyampaian saldo rekening semester II Tahun 2024	Januari	KPPN Bantaeng
58	BPS Kabupaten Mojokerto	Satker Peraih Peringkat III Kategori Transaksi Kartu Kredit Pemerintah dengan Nilai Transaksi Tertinggi Triwulan IV Tahun 2024	Januari	Kementerian Keuangan DJP KPPN Mojokerto
59	BPS Kabupaten Rembang	Terbaik 3 Pengelolaan Rekening CMS	Januari	KPPN Pati
60	BPS Kabupaten Rembang	Terbaik II Penggunaan KKP	Januari	KPPN Pati
61	BPS Kabupaten Pinrang	2. Satker Pagu DIPA Sedang Dengan Jumlah Transaksi CMS Terbanyak Tahun Anggaran 2024 Terbaik Kelima (816 Transaksi)	Januari	Kepala KPPN Tipe A1 Pare-Pare
62	BPS Kabupaten Pinrang	3. Satker Dengan Jumlah Transaksi Digipay Terbanyak Tahun Anggaran 2024 Terbaik Keempat (17 Transaksi)	Januari	Kepala KPPN Tipe A1 Pare-Pare
63	BPS Kabupaten Kebumen	Piagam Penghargaan Satker dengan Digipaysatu Terbaik 2 Lingkup KPPN Purworejo Tahun Anggaran 2024	Januari	KPPN Purworejo
64	BPS Kabupaten Kebumen	Piagam Penghargaan Satker dengan KKP Terbaik 1 Lingkup KPPN Purworejo Tahun Anggaran 2024	Januari	KPPN Purworejo
65	BPS Kabupaten Kebumen	Piagam Penghargaan Satker Pengguna CMS Terbaik 1 Kategori Pagu diatas 10 Milyar Lingkup KPPN Purworejo Tahun Anggraan 2024	Januari	KPPN Purworejo
66	BPS Kabupaten Kebumen	Piagam Penghargaan Satker dengan Digipaysatu Terbaik 2 Lingkup KPPN Purworejo Tahun Anggaran 2024	Januari	KPPN Purworejo
67	BPS Kabupaten Konawe	Penggunaan CMS Semester 2 TA 2024 Terbaik 3 Lingkup KPPN Kendari	Januari	KPPN Kendari
68	BPS Kota Bima	Penghargaan Predikat IKPA Sangat Baik Dengan Nilai IKPA Diatas 95 Tahun 2024	Januari	KPPN Bima

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69	BPS Kota Bima	Penghargaan Terbaik Pertama Implementasi Program Financial Advisory Tahun 2024	Januari	KPPN Bima
70	BPS Kabupaten Bone Bolango	Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2024 sehingga Menjadi Desa/Kelurahan Terbaik di Provinsi Gorontalo dalam Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2024 dan Terbaik I Percontohan Desa Anti Korupsi Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024	Januari	Pemerintah Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila
71	BPS Kabupaten Karangasem	Terbaik I Satuan Kerja Dengan Transaksi CMS Terbanyak Untuk Pagu di Bawah 50 Miliar Rupiah Tahun 2024	Januari	Kantor KPPN Amlapura
72	BPS Kabupaten Bangli	Terbaik II Satuan Kerja dengan transaksi CMS terbanyak untuk Pagu di bawah 50 Miliar Rupiah	Januari	Kepala KPPN Amlapura
73	BPS Kota Pangkal Pinang	Penghargaan dari Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagai Mitra Dalam Pembangunan Daerah melalui Kolaborasi Pembinaan Statistik Sektorial berdasarkan sertifikat tanggal 20 Januari 2025	Januari	Pemerintah Kota Pangkal Pinang
74	BPS Kabupaten Enrekang	Instansi Vertikal Pertama di Wilayah Kabupaten Enrekang yang Seluruh pegawainya telah Melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024	Januari	KPP Pratama Parepare
75	BPS Kabupaten Lembata	Peringkat III Kategori Satuan Kerja Dengan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik Periode Tahun Anggaran 2024	Januari	Kepala KPPN Larantuka
76	BPS Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Predikat ISTIMEWA dalam pencapaian nilai IKPA Triwulan I 2024	Januari	Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
77	BPS Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Terbaik 3 Satker Teraktif pengguna Aplikasi Digipay	Januari	KPPN Tahuna
78	BPS Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Terbaik I IKPA Tahun 2024	Januari	KPPN Tahuna
79	BPS Kabupaten Gunungkidul	Penghargaan Bupati atas Komitmen dalam Pendampingan Pendataan Sosial Ekonomi Full Populasi di 17 Kapanewon Kab. Gunungkidul	Januari	Bupati Gunungkidul
80	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Peringkat II Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian Transaksi Digipay Terbaik Tahun 2024	Januari	KPPN Kolaka
81	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Peringkat II Satuan Kerja Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Terbaik Tahun 2024	Januari	KPPN Kolaka
82	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Peringkat II Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Tahun 2024 Kategori Pagu Sedang	Januari	KPPN Kolaka

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83	BPS Kabupaten Lumajang	Penyedia Data Terbaik Tahun 2024	Januari	PJ Bupati Lumajang
84	BPS Kabupaten Kaur	Satker Terbaik 2 Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BPS se-Provinsi Bengkulu Tahun 2024	Februari	KPPN Manna
85	BPS Kabupaten Lampung Timur	Pencapaian 100 % Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024	Februari	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro
86	BPS Kota Tangerang	Pembina Statistik Terbaik 2 Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	Februari	Pemerintah Daerah Provinsi Banten
87	BPS Kabupaten Bangkalan	Juara I Kategori Laporan Saldo Rekening Terbaik Semester II Tahun 2024 untuk Satker Lingkup KPPN Pamekasan	Februari	KPPN Pamekasan
88	BPS Kabupaten Sukabumi	Satuan Kerja Terbaik dengan Jumlah Transaksi CMS Terbanyak Lingkup KPPN Sukabumi Periode Semester 2 Tahun 2024 "Kategori Rekening BPG"	Februari	KPPN Sukabumi
89	BPS Kabupaten Sukabumi	Satuan Kerja Terbaik Dengan Jumlah Transaksi Digipay Terbanyak di Lingkup KPPN Sukabumi Periode Semester II Tahun 2024	Februari	KPPN Sukabumi
90	BPS Kabupaten Bangkalan	Juara II Kategori DIGIPAY Kabupaten Bangkalan Terbaik Semester II 2024 untuk Satker Lingkup KPPN Pamekasan	Februari	KPPN Pamekasan
91	BPS Kabupaten Sukamara	Satuan Kerja dengan Implementasi Cash Management System Terbaik III Semester 2 Tahun Anggaran 2024	Februari	KPPN Pangkalan Bun
92	BPS Kabupaten Sidoarjo	Satuan Kerja Terbaik Pertama Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengeluaran Tercepat pada Semester II Tahun 2024	Februari	Kepala KPPN Sidoarjo
93	BPS Kabupaten Grobogan	Terbaik 3 CMS Semester 2 2024	Februari	KPPN Purwodadi
94	BPS Kabupaten Grobogan	Terbaik 2 Implementasi KKP Semester 2 2024	Februari	KPPN Purwodadi
95	BPS Kabupaten Batu Bara	Peringkat Satu Nominal Terbesar Penggunaan CMS Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Periode Semester II TA 2024	Februari	KPPN Tanjung Balai
96	BPS Kabupaten Batu Bara	Peringkat Satu Transaksi Terbanyak Penggunaan CMS Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Periode Semester II TA 2024	Februari	KPPN Tanjung Balai
97	BPS Kabupaten Batu Bara	Peringkat Dua Kuasa Pengguna Anggaran Inspiratif Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Periode Semester II TA 2024	Februari	KPPN Tanjung Balai
98	BPS Kabupaten Batu Bara	Peringkat Dua Transaksi Terbanyak Penggunaan UP melalui KKP Satker Mitra	Februari	KPPN Tanjung Balai

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		KPPN Tanjung Balai Periode Semester II TA 2024		
99	BPS Kabupaten Batu Bara	Peringkat Dua Nominal Terbesar Penggunaan UP Melalui KPP Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Periode Semester II TA 2024	Februari	KPPN Tanjung Balai
100	BPS Kabupaten Batu Bara	Peringkat Tiga Transaksi Terbanyak Penggunaan UP melalui Digipay Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Periode Semester II TA 2024	Februari	KPPN Tanjung Balai
101	BPS Kabupaten Batu Bara	Peringkat Tiga Kinerja Pelaksanaan APBN Terbaik Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Periode Semester II TA 2024	Februari	KPPN Tanjung Balai
102	BPS Kabupaten Purbalingga	Terbaik 1- Laporan Keuangan UAKPA Pagu Sedang	Februari	KPPN Purwokerto
103	BPS Kabupaten Purbalingga	Nilai Sangat Baik Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Februari	KPPN Purwokerto
104	BPS Kabupaten Purbalingga	Terbaik 1 - Kuasa Pengguna Anggaran Pagu Sedang	Februari	KPPN Purwokerto
105	BPS Kabupaten Purbalingga	Terbaik 1- Akurasi Dokumen Pencairan Anggaran	Februari	KPPN Purwokerto
106	BPS Kota Salatiga	Satuan Kerja Terbaik Kategori Capaian Deviasi Halaman III DIPA 2024	Februari	KPPN Semarang II
107	BPS Kabupaten Purbalingga	Terbaik 1- Transaksi Marketplace Pemerintah (Digipay)	Februari	KPPN Purwokerto
108	BPS Kabupaten Purbalingga	Terbaik 2 - Pengelolaan Data Kontrak Diatas Kategori Pagu Belanja Barang dan Modal di Atas Rp2 Miliar s.d. Rp10 Miliar	Februari	KPPN Purwokerto
109	BPS Kabupaten Banjarnegara	Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2024	Februari	KPPN Banjarnegara
110	BPS Kabupaten Banjarnegara	Akurasi Dokumen Pencairan Anggaran Tahun 2024 (Kategori Pagu Besar)	Februari	KPPN Banjarnegara
111	BPS Kabupaten Banjarnegara	Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024	Februari	KPPN Banjarnegara
112	BPS Kabupaten Banjarnegara	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2024	Februari	KPPN Banjarnegara
113	BPS Kabupaten Banjarnegara	Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2024 Wilayah Banjarnegara	Februari	KPPN Banjarnegara
114	BPS Kabupaten Banjarnegara	Transaksi Marketplace Pemerintah (Digipay) Tahun 2024 Wilayah Banjarnegara	Februari	KPPN Banjarnegara
115	BPS Kabupaten Banjarnegara	Bendahara Pengeluaran Tahun 2024	Februari	KPPN Banjarnegara
116	BPS Kabupaten Bangkalan	Juara I Kategori Penyampaian SPM Gaji Induk Terbaik Semester II Tahun 2024 untuk Satker Lingkup KPPN Pamekasan	Februari	KPPN Pamekasan
117	BPS Kabupaten Bangkalan	Juara Tiga Kategori Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Semester II Tahun 2024 untuk Satker Lingkup KPPN Pamekasan	Februari	KPPN Pamekasan
118	BPS Kabupaten Barito Timur	Peringkat Ketiga Pencapaian 100% Pelaporan Tepat Waktu SPT Tahunan Pajak 2024 Melalui efilig	Februari	KPP Pratama Muara Teweh

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
119	BPS Kabupaten Banjarnegara	Kinerja Capaian Output Tahun 2024	Februari	KPPN Banjarnegara
120	BPS Kabupaten Banjarnegara	Laporan Keuangan Tahun 2024	Februari	KPPN Banjarnegara
121	BPS Kota Lubuk Linggau	Peringkat II Satker dengan Kinerja Pembayaran Digital (Kartu Kredit Pemerintah) Terbaik	Februari	KPPN Lubuk Linggau
122	BPS Kabupaten Semarang	Satuan Kerja Terbaik Kategori Capaian Deviasi Halaman III DIPA 2024	Februari	KPPN Semarang II
123	BPS Provinsi Jambi	Piagam Penghargaan sebagai Satker UAPPA-W Sedang dengan Laporan Keuangan Terbaik	Februari	Kanwil DJPb Provinsi Jambi
124	BPS Provinsi Jambi	Piagam Penghargaan Mitra Kolaboratif Terbaik DJPb	Februari	Kanwil DJPb Provinsi Jambi
125	BPS Kabupaten Musi Rawas	PERINGKAT II SATKER DENGAN AKSELERASI REKONSILIASI TINGKAT UAKPA TERBAIK DENGAN BESARAN PAGU ANGGARAN SEDANG PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024	Februari	KEPALA KPPN LUBUK LINGGAU
126	BPS Kabupaten Musi Rawas	PERINGKAT III SATKER DENGAN KETERTIBAN PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA DENGAN BESARAN PAGU ANGGARAN SEDANG PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024	Februari	KEPALA KPPN LUBUK LINGGAU
127	BPS Kota Lubuk Linggau	Peringkat III Satker dengan Akselerasi Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Terbaik dengan Besaran Pagu Anggaran Sedang	Februari	KPPN Lubuk Linggau
128	BPS Kabupaten Karo	PENGHARGAAN BENDAHARA TERBAIK Peringkat I	Februari	KPPN Sidikalang
129	BPS Kabupaten Karo	PENGHARGAAN KPA INSPIRATIF Peringkat III	Februari	KPPN Sidikalang
130	BPS Kabupaten Karo	PENGHARGAAN LAPORAN KEUANGAN Peringkat I	Februari	KPPN Sidikalang
131	BPS Kabupaten Karo	PENGHARGAAN PENGGUNAAN KKP Peringkat II	Februari	KPPN Sidikalang
132	BPS Kab Berau	Peringkat III Kategori Satuan Kerja dengan Zero Retur Semester II Tahun 2024	Februari	Kepala KPPN Tanjungredep
133	BPS Kab Berau	Peringkat III Kategori Satuan Kerja dengan Penyampaian LPJ Tercepat Semester II Tahun 2024	Februari	Kepala KPPN Tanjungredep
134	BPS Kab Berau	Peringkat III Kategori Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan Terbaik Semester II Tahun 2024	Februari	Kepala KPPN Tanjungredep
135	BPS Kab Berau	Peringkat I Kategori Satuan Kerja dengan Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Teraktif Semester II Tahun 2024	Februari	Kepala KPPN Tanjungredep
136	BPS Kab Berau	Peringkat I Kategori Satuan Kerja dengan Transaksi Digipay Teraktif Semester II Tahun 2024	Februari	Kepala KPPN Tanjungredep

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
137	BPS Kab Berau	Peringkat I Kategori Satuan Kerja dengan Transaksi Cash Management System (CMS) Teraktif Semester II Tahun 2024	Februari	Kepala KPPN Tanjungredep
138	BPS Kab Berau	Peringkat I Kategori Satuan Kerja dengan Pengirim Laporan Saldo Rekening Tercepat Semester II Tahun 2024	Februari	Kepala KPPN Tanjungredep
139	BPS Kabupaten Wonogiri	Juara 1, Implementasi Digipay Terbaik Semester II TA 2024 Kategori Pagu Sedang	Februari	KPPN Surakarta
140	BPS Kabupaten Wonogiri	Juara 2, Implementasi KKP Terbaik Semester II TA 2024 Kategori Pagu Sedang	Februari	KPPN Surakarta
141	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Peringkat Kedua (II) Pengelolaan Kinerja APBN dengan Pagu Kecil	Februari	KANTOR PELAYANAN PERBENDAH ARAAN NEGARA SIDIKALANG
142	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Peringkat Kedua (II) Kategori Bendahara Terbaik satker, Periode Semester II Tahun Anggaran 2024	Februari	KANTOR PELAYANAN PERBENDAH ARAAN NEGARA SIDIKALANG
143	BPS Kota Pagar Alam	Pengguna Digipay Terbaik III dengan 27 Jumlah Transaksi Pada Tahun Anggaran 2024	Februari	KPPN Lahat
144	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Peringkat Kedua (II) Penilaian Pengelolaan Kinerja Terbaik Penggunaan Uang Persediaan Melalui sistem Digital Payment, Periode Semester II Tahun Anggaran 2024	Februari	KANTOR PELAYANAN PERBENDAH ARAAN NEGARA SIDIKALANG
145	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Peringkat Pertama (I) Kuasa Pengguna Anggaran Inspiratif Satker, Periode Semester II Tahun Anggarn 2024	Februari	KANTOR PELAYANAN PERBENDAH ARAAN NEGARA SIDIKALANG
146	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Peringkat Ketiga (III) Kategori Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran , Periode Semester II Tahun Anggarn 2024	Februari	KANTOR PELAYANAN PERBENDAH ARAAN NEGARA SIDIKALANG
147	BPS Kabupaten Karawang	Transaksi Cash Management System (CMS) Peringkat Kedua Periode Tahun 2024	Februari	KPPN Karawang
148	BPS Kabupaten Karawang	Transaksi Digipay Peringkat Ketiga Periode Tahun 2024	Februari	KPPN Karawang
149	BPS Kabupaten Bone	Peringkat III Satker dengan Transaksi Digipay Terbanyak Tahun 2024	Februari	KPPN Watampone

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
150	BPS Kabupaten Bone	Terbaik ke II Satker dengan Transaksi KKP Terbanyak Tahun 2024	Februari	KPPN Watampone
151	BPS Kabupaten Bone	Terbaik ke II Satker dengan Transaksi CMS Terbanyak Tahun 2024	Februari	KPPN Watampone
152	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Peringkat I Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik Tahun Anggaran 2024 Kategori DIPA PAGU BESAR	Februari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
153	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Satker Peringkat II dalam Transaksi Belanja pada Aplikasi DIGIPAY SATU Tahun Anggaran 2024 Kategori JUMLAH NOMINAL BELANJA TERBANYAK	Februari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
154	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Satker Peringkat II dalam Transaksi Belanja pada Aplikasi DIGIPAY SATU Tahun Anggaran 2024 Kategori JUMLAH TRANSASKI TERBANYAK	Februari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
155	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Satker Peringkat II Nilai IKPA Tahun Anggaran 2024 Kategori PAGU SEDANG (5 s.d. 20 Miliar)	Februari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
156	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Satker Peringkat III dalam Penyelesaian SHR Terbaik Tahun Anggaran 2024 Kategori DIPA PAGU BESAR	Februari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
157	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Ultimate Award sebagai Satker Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024	Februari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
158	BPS Kota Tangerang Selatan	Satker dengan Capaian IKPA TA 2024 Berpredikat "Sangat Baik"	Februari	KPPN Tangerang
159	BPS Kabupaten Pelalawan	Penghargaan sebagai Narasumber dalam Kegiatan Studi Lapangan dari SMA IT At-Taqwa	Februari	SMA IT At-Taqwa
160	BPS Kota Semarang	SATUAN KERJA TERBAIK KATEGORI CAPAIAN DEVIASI HALAMAN III DIPA 2024	Februari	KPPN SEMARANG II
161	BPS Kabupaten Banyuwangi	Peringkat Pertama Satker dengan Jumlah Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbanyak Tahun 2024	Februari	KPPN Banyuwangi

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
162	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	KINERJA IKPA TERBAIK SATKER LINGKUP KPPN SIBOLGA KATEGORI PAGU SEDANG SEMESTER II TAHUN 2024	Februari	KPPN Sibolga
163	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	KINERJA IMPLEMENTASI MARKETPLACE DIGITAL PAYMENT TERBAIK SATUAN KERJA LINGKUP KPPN SIBOLGA PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024	Februari	KPPN Sibolga
164	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	KINERJA PENERAPAN TRANSAKSI NONTUNAI TERBAIK SATUAN KERJA LINGKUP KPPN SIBOLGA PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024	Februari	KPPN Sibolga
165	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	PENILAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SATUAN KERJA MITRA KPPN SIBOLGA KATEGORI PAGU SEDANG PERIODE TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024	Februari	KPPN Sibolga
166	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	PENILAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SATUAN KERJA MITRA KPPN SIBOLGA KATEGORI PAGU SEDANG PERIODE TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024	Februari	KPPN Sibolga
167	BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	Satuan Kerja Dengan Implementasi Cash Management System Terbaik I Semester II Tahun Anggaran 2024	Februari	KPPN Pangkalan Bun
168	BPS Kabupaten Purwakarta	Jumlah Tansaksi KKP Terbanyak Ketiga Periode Tahun 2024	Februari	KPPN Purwakarta
169	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Peringkat 1 UAPPA-W Kategori Sedang (6 s.d 10 Satker) Prov. Kepri TA 2023	Februari	Kepala Kanwil DJPb Kepri
170	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Terbaik 1 satker tingkat K/L dengan nilai IKPA terbaik TA2024 kategori K/L Sedang (8-14 Satker)	Februari	Kepala Kanwil DJPb Kepri
171	BPS Kabupaten Luwu Timur	Piagam Penghargaan Terbaik II Digipay Marketplace	Februari	KPPN Palopo
172	BPS Kabupaten Luwu Timur	Sertifikat Penghargaan Pembina Statistik Sektoral dalam Desa Cantik	Februari	Sekretaris Daerah Luwu Timur
173	BPS Kabupaten Luwu Timur	Sertifikat Penghargaan Pembina Statistik Sektoral	Februari	Sekretaris Daerah Luwu Timur

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
174	BPS Kota Gorontalo	Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) predikat Sangat Baik Tahun 2024	Februari	Kepala KPPN Gorontalo
175	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dukungan Dan Kerjasamanya Pada Kegiatan Data Analitik : Statistik : Mengolah Data Statistik, Telah Berpartisipasi Dalam Pelestarian Lingkungan Hijau Dengan Mendaur Ulang Limbah Kertas Bekas Di CV. Makmur Jaya Yang Setara Dengan Pelestarian 5 Pohon, Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Provinsi Jambi Tahun 2025 Sebagai Badan Publik Informatif, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Sangat Baik Tahun 2025	Februari	KPPN Kuala Tungkal
176	BPS Kabupaten Cilacap	Satuan Kerja Terbaik "Katagori Jumlah transaksi Menggunakan kartu Kredit Pemerintah Semester II Tahun 2024"	Februari	KPPN Cilacap
177	BPS Kabupaten Cilacap	Satuan Kerja Terbaik "Katagori Nilai Menggunakan Digipay Satu Semester II Tahun Anggaran 2024"	Februari	KPPN Cilacap
178	BPS Kabupaten Cilacap	Kategori LPJ Bendahara Pengeluaran Semester II Anggaran 2024,Satker Pagu Sedang.	Februari	KPPN Cilacap
179	BPS Kabupaten Lahat	IMPLEMENTASI SIMAN Versi 2 Tahun 2025	Februari	KPKNL Lahat
180	BPS Kabupaten Kolaka	Peringkat 1 Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Tahun 2024 Kategori Pagu Sedang	Februari	KPPN Kolaka
181	BPS Kabupaten Kolaka	Peringkat 1 Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian Transaksi Digipay Terbaik Tahun 2024	Februari	KPPN Kolaka
182	BPS Kabupaten Kolaka	Peringkat 1 Satuan Kerja Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Terbaik Tahun 2024	Februari	KPPN Kolaka
183	BPS Kabupaten Nagan Raya	Sebagai Satuan Kerja Laporan Keuangan Terbaik Tahun 2024	Februari	KPPN Meulaboh
184	BPS Kabupaten Brebes	Peringkat Pertama Kategori Satuan Kerja Pengguna Digipay Satu Teraktif Periode TA 2024	Februari	KPPN Tegal
185	BPS Kabupaten Sampang	Juara I Transaksi Digipay Terbaik Semester II 2024	Februari	KPPN Pamekasan
186	BPS Kabupaten Sampang	Juara I Penggunaan KKP Terbaik Semester II 2024	Februari	KPPN Pamekasan
187	BPS Kabupaten Sampang	Juara III Penyampaian SPM Gaji Induk Terbaik Semester II 2024	Februari	KPPN Pamekasan
188	BPS Kabupaten Majene	Satuan Kerja peraih Penyampain SPM Gaji Induk Tercepat Ke I Periode Semester II 2024	Februari	KPPN Majene
189	BPS Kabupaten Majene	Satuan Kerja peraih Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Tercepat ke III Periode Semester II 2024	Februari	KPPN Majene

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
190	BPS Kabupaten Seram Bagian Barat	Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Kinerja Pengelolaan APBN Terbaik Tahun 2024 Kategori Pagu DIPA Sedang (5 s.d 20 Miliar Rupiah)	Februari	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Tipe Ai Masohi
191	BPS Kabupaten Seram Bagian Barat	Peringkat Pertama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Inspiratif Tahun 2024 Kategori Pagu DIPA Sedang (5 s.d 20 Miliar Rupiah)	Februari	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Tipe A1 Masohi
192	BPS Kabupaten Boalemo	Piagam Penghargaan KPP Pratama Gorontalo	Februari	Kepala KPP Pratama Gorontalo
193	BPS Provinsi Bali	Satuan Kerja Tingkat Wilayah Best Performance Implementasi Digipay Satu Tahun 2024 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali	Februari	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
194	BPS Kabupaten Pematang	Peringkat Pertama Kategori Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah dengan Capaian Realisasi Tertinggi Periode TA 2024	Februari	KPPN Tegal
195	BPS Provinsi Bali	Peringkat Ketiga K/L Berkinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik TA 2024 Kategori Pagu Kecil	Februari	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
196	BPS Kabupaten Boalemo	Instansi Vertikal Pertama Pelaporan SPT	Februari	KPP Pratama Gorontalo
197	BPS Kabupaten Buleleng	Juara 8 Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja Dengan Predikat Best Performance Kategori Pagu DIPA Kelolaan Sedang	Februari	KPPN Singaraja
198	BPS Kabupaten Bangli	Peringkat Ketiga Satker Best Performance Implementasi Digipay Satu Tahun 2024 Lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali	Februari	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali
199	BPS Kabupaten Wonosobo	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Februari	KPPN Banjarnegara
200	BPS Kabupaten Wonosobo	Terbaik I Bendahara Pengeluaran	Februari	KPPN Banjarnegara
201	BPS Kabupaten Wonosobo	Terbaik I Digipay	Februari	KPPN Banjarnegara
202	BPS Kabupaten Wonosobo	Terbaik II Akurasi Dokumen Pencairan Anggaran	Februari	KPPN Banjarnegara

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
203	BPS Kabupaten Wonosobo	Terbaik III Implementasi Kredit Wilayah	Februari	KPPN Banjarnegara
204	BPS Kabupaten Wonosobo	Terbaik III Kuasa Pengguna Anggaran	Februari	KPPN Banjarnegara
205	BPS Kabupaten Ngada	Satker Peringkat I dengan Nilai IKPA Sempurna 100 Tahun Anggaran 2024 Kategori PAGU SEDANG (5 s.d. 20 Miliar) Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng	Februari	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
206	BPS Kabupaten Ngada	Satker Peringkat I dalam Penyelesaian SHR Terbaik Tahun Anggaran 2024 Kategori DIPA PAGU BESAR Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng	Februari	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
207	BPS Kabupaten Muna	Peringkat Kedua Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Raha dalam Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester II Tahun Anggaran 2024 kategori Pagu Besar di atas 5 Miliar dengan Nilai IKPA 99,55	Februari	KPPN Raha
208	BPS Kabupaten Muna	Peringkat Kedua Satuan Kerja Teraktif pada Transaksi Cash Managemen System (CMS) Periode Semester II Tahun Anggaran 2024 Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raha dengan jumlah transaksi 4.064	Februari	KPPN Raha
209	BPS Kabupaten Lombok Barat	Satker 10 Besar Terbaik dalam Penggunaan Transaksi Digipay Satu Tahun Anggaran 2024 Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Barat	Februari	Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Barat
210	BPS Kota Tanjung Balai	Peringkat 3 KPPN Tanjung Balai Penggunaan UP Melalui Digipay_Semester II 2024.jpg	Februari	KPPN TANJUNG BALAI
211	BPS Kota Tanjung Balai	Peringkat 2 KPPN Tanjung Balai CMS Terbanyak_Semester II 2024.jpg	Februari	KPPN TANJUNG BALAI
212	BPS Kabupaten Kerinci	Satker Terbaik Peringkat III atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2025 Satker Pagu Sedang Lingkup KPPN Sungai Penuh	Februari	KPPN Sungai Penuh

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
213	BPS Kabupaten Gorontalo	Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Predikat Sangat Baik TA 2024	Februari	KPPN Gorontalo
214	BPS Kabupaten Gorontalo	Penghargaan atas Kolaborasi dalam Penyediaan Data Akurat dan Berkualitas untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Februari	BAPELITBAN GDA Kabupaten Gorontalo
215	BPS Kabupaten Jepara	1. EKSTERNAL – KPPN KUDUS - 18 FEBRUARI 2025 – PERINGKAT II PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA PENGELUARAN TERBAIK TAHUN 2024 2. EKSTERNAL – KPPN KUDUS - 18 FEBRUARI 2025 – PERINGKAT II SATKER PENGGUNAAN DIGIPAY SATU TERBAIK TAHUN 2024 3. EKSTERNAL – KPPN KUDUS - 18 FEBRUARI 2025 – PERINGKAT III SATKER PENGGUNAAN CMS TERBAIK TAHUN 2024	Februari	KPPN Kudus
216	BPS Kabupaten Buton	Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2024 (IKPA dan Digitalisasi Pembayaran) Kategori Pagu Sedang	Februari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bau-Bau
217	BPS Kabupaten Sorong	Mitra Strategis dan Kolaboratif Terbaik dalam Pembinaan dan Penyelenggaraan Statistik Sektorial Berkualitas pada Dinas Perikanan Kabupaten Sorong Tahun 2024	Februari	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong
218	BPS Kabupaten Sorong	KEPATUHAN 100% PELAPORAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2024	Februari	Kepala KPP Prataman Sorong
219	BPS Kabupaten Lombok Utara	5 Besar Terbaik Dalam Penggunaan Transaksi Digipay Satu Tahun Anggaran 2024 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat	Februari	Kepala Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Barat
220	BPS Minahasa Utara	Peringkat Ketiga dalam Kategori Pagu Dibawah 10 Miliar dan Bobot Indikator Sebesar 100_ Periode Tahun Anggaran 2024	Februari	KPPN Bitung
221	BPS Kota Manado	Satuan Kerja dengan nilai IKPA Tahun 2024 Kategori "Sangat Baik"	Februari	KPPN Manado
222	BPS Kabupaten Batang	Harapan 2 Satker dengan Capaian Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Sem II 2024	Februari	KPPN Pekalongan
223	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Tahun 2024 Kategori: Sangat Baik	Februari	KPPN Manado
224	BPS Kabupaten Pringsewu	Satuan Kerja dengan Total Nilai Transaksi Digipay Tertinggi Peringkat 3 Tahun 2024	Maret	KPPN Bandar Lampung

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
225	BPS Kabupaten Pulau Morotai	Penghargaan atas Capaian Implementasi Belanja Digipay Tertinggi 1 Lingkup Provinsi Maluku Utara Periode sampai dengan Bulan Februari 2025	Maret	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
226	BPS Kabupaten Kupang	Kinerja SPM Gaji Induk semester II 2024	Maret	KPPN Kupang
227	BPS Kabupaten Kepulauan Meranti	Terbaik ke-III Jumlah Transaksi Digipay Satu Tertinggi Lingkup Wilayah Kerja KPPN Kota Dumai	Maret	KPPN Kota Dumai
228	BPS Kabupaten Kupang	IKPA Terbaik semester II 2024	Maret	KPPN Kupang
229	BPS Kota Kupang	Apresiasi Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik Periode Bulan Februari 2025	Maret	KPPN KUPANG
230	BPS Kabupaten Bogor	Piagam Penghargaan Kategori Penggunaan CMS dengan transaksi terbanyak 4.478 transaksi	Maret	Kepala KPPN Bogor
231	BPS Kabupaten Bogor	Piagam Penghargaan Kategori Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran TA 2024 terbaik Pagu Besar di atas 10 Milyar	Maret	Kepala KPPN Bogor
232	BPS Kabupaten Simalungun	Peringkat 1 Pengelolaan Capaian Output Terbaik Kategori Satker dengan Jumlah Rincian Output Diatas 15 pada Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar	Maret	KPPN
233	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Peringkat I (Nilai 100) Kategori Nilai IKPA Periode Tahun 2024	Maret	KPPN Baturaja
234	BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan	Apresiasi Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik 1 Periode Maret 2025	Maret	KEPALA KPPN KUPANG
235	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Peringkat Ketiga Penilaian Pengguna Digipay Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2024 Kategori: UP KKP Kecil	Maret	KPPN Palembang
236	BPS Kabupaten Bangka Selatan	Mendukung Portal Satu Data Indonesia Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan	Maret	Kepala Dinas DISKOMINFO Kabupaten Bangka Selatan
237	BPS Provinsi Kalimantan Barat	Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I 2025 Akreditasi Ulang di Peringkat 4 mulai Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 sampai Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026	Maret	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Direktur Penelitian, dan Pengabdian

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
238	BPS Provinsi Maluku	Pelestarian Lingkungan Hijau dengan Mendaur Ulang Limbah Kertas Bekas di CV. MAKMUR JAYA, yang Setara dengan Pelestarian 5 Pohon	Maret	kepada Masyarakat) CV. MAKMUR JAYA
239	BPS Kabupaten Mamuju	Satuan Kerja dengan Implementasi Digipay Satu Terbaik Tahun 2024	Maret	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
240	BPS Kabupaten Mamuju	Peringkat ke tiga Satuan Kerja dengan Implementasi Digipay Satu Terbaik Tahun 2024	Maret	Kepala Kantor Wilayah DJPB provinsi Sulawesi Barat
241	BPS Kabupaten Mamuju	Peringkat Kedua Satuan Kerja dengan Implementasi Cash Management System (CMS) Terbaik Tahun 2024	Maret	Kanwil DJPB provinsi Sulawesi Barat
242	BPS Kabupaten Lebong	Transaksi Teraktif 4 pada Transaksi Non Tunai Digipay Satu Periode Tahun 2024	Maret	KPPN Curup
243	BPS Kabupaten Sleman	Piagam Penghargaan Satuan Kerja Dengan IKPA Berpredikat Sangat Baik Periode Tahun 2024	Maret	KPPN Yogyakarta
244	BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Periode Tahun 2024	Maret	KPPN Yogyakarta
245				
246	BPS Kabupaten Jember	SEBAGAI PERINGKAT 3 Satuan Kerja dengan Capaian Realisasi Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Periode Semester II 2024	Maret	KPPN Jember
247	BPS Kabupaten Ngada	NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SEMPURNA (100) s/d 31 Desember 2024	Maret	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
248	BPS Bolaang Mongondow	Terbaik III Impelementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2024	Maret	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Kota Kotamobagu
249	BPS Kabupaten Sarolangun	BPS Kabupten Sarolangun sebagai narasumber pada kegiatan Data Analitik Triwulan I 2025	Maret	KPPN Bangko
250	BPS Kabupaten Sorong	MITRA STRATEGIS TERBAIK DALAM PROGRAM PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) SEHINGGA KABUPATEN SORONG MENJADI DAERAH DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS) TERTINGGI SE-PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024	Maret	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong
251	BPS Bolaang Mongondow Timur	Terbaik I dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Tahun 2024	Maret	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu
252	BPS Bolaang Mongondow Timur	Terbaik II dengan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Tahun 2024	Maret	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu
253	BPS Kabupaten Ende	Satuan Kerja dengan Predikat Nilai IKPA Sangat Baik Tahun Anggaran 2024	Maret	KPPN Ende
254	BPS Kabupaten Ende	Peringkat I Satuan Kerja Kategori Jumlah Transaksi CMS Terbanyak Tahun Anggaran 2024	Maret	KPPN Ende
255	BPS Kabupaten Ende	Peringkat I Satuan Kerja Kategori Virtual Account Digipay Satu Terbanyak Tahun Anggaran 2024	Maret	KPPN Ende
256	BPS Kabupaten Ende	Peringkat II Satuan Kerja Kategori Jumlah Transaksi Digipay Satu Terbanyak Tahun Anggaran 2024	Maret	KPPN Ende
257	BPS Kabupaten Ende	Peringkat III Satuan Kerja Kategori Persentase Transaksi CMS Terbesar Tahun Anggaran 2024	Maret	KPPN Ende
258	BPS Kota Kotamobagu	Terbaik I Satuan Kerja Handal Tahun 2024	Maret	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu
259	BPS Kota Kotamobagu	Terbaik III Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Negara (IKPA) Pagu di Bawah 10 Miliar	Maret	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
260	BPS Provinsi Papua Barat	Satuan Kerja Peringkat II dengan kategori jumlah ransaksi Digipay terbanyak tahun 2024	Maret	KPPN Manokwari
261	BPS Kabupaten Katingan	Pencapaian Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot Besar Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025	April	Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah
262	BPS Kabupaten Kapuas	Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot Besar Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025	April	Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah
263	BPS Kabupaten Bandung	Peringkat II Pengguna Cash Manajemen System (CMS) Terbaik Triwulan I Tahun 2025	April	KPPN Bandung II
264	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	Penghargaan Pelestarian lingkungan hijau dengan daur ulang limbah kertas bekas di CV. Makmur Jaya yang setara dengan pelestarian 5 pohon	April	CV Makmur Jaya
265	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	Mitra Kerja Terbaik dalam Pembinaan Statistik Sektor di Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	April	Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
266	BPS Kabupaten Pulau Morotai	Penghargaan atas Capaian Implementasi Belanja Digipay Tertinggi 2 Lingkup Provinsi Maluku Utara Periode Triwulan I Tahun 2025	April	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
267	BPS Kabupaten Tapanuli Utara	Peringkat Pertama - Pengguna Cash Management System Triwulan I 2025	April	KPPN Balige
268	BPS Kota Tangerang Selatan	Penghargaan Pembina Statistik Terbaik III 2024 Tingkat Kabupaten Kota se-Provinsi Banten	April	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
269	BPS Kota Subulussalam	Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Kinerja Cash Management Sistem (CMS) Terbaik Periode Semester 2 Tahun Anggaran 2024 Lingkup KPPN Tapaktuan	April	KPPN Tapaktuan
270	BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan	Apresiasi Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik 1 Periode April 2025	April	KEPALA KPPN KUPANG
271	BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Peringkat I Satker dengan Jumlah Transaksi Pendebitan Rekening Virtual Bendahara Pengeluaran melalui CMS Tertinggi Triwulan I 2025	April	KPPN Saumlaki
272	BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Peringkat 3 Satker dengan Kinerja Penggunaan CMS Terbaik Triwulan I 2025	April	KPPN Saumlaki

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
273	BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Periongklat 1 Satker dengan Tingkat Kepatuhan Pelaporan LPJ Bendahara Terbaik Triwulan I 2025	April	KPPN Saumlaki
274	BPS Kabupaten Mamuju Tengah	Satuan Kerja dengan Capaian target Minimal 15 Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu Triwulan IV Tahun 2024	April	KPPN Mamuju
275	BPS Kabupaten Mamuju	TERCAPAINYA TARGET MINIMAL 15 TRANSAKSI PADA APLIKASI DIGIPAY SATU	April	Kepala KPPN Mamuju
276	BPS Kota Kupang	Apresiasi atas kontribusi terhadap penyusunan regulasi tentang penyelenggaraan perijinan dan kemudahan berinvestasi di Kota Kupang	April	Wali Kota Kupang
277	BPS Kota Malang	Penghargaan atas Kontribusi Mewujudkan Malang Satu Data dan Meningkatkan Kualitas Data Sektoral	April	Walikota Malang
278	BPS Kota Malang	Penghargaan Atas Kontribusi Meningkatkan Kapabilitas dan Literasi Statistik Di Tingkat Kelurahan Melalui Kegiatan Pembinaan 100% Kelurahan Cinta Statistik	April	Walikota Malang
279	BPS Kabupaten Lamongan	Penghargaan Sukarela Turut Serta Berpartisipasi Dalam Penyumbangan Darah Untuk Kepentingan Kemanusiaan	April	PMI Kabupaten Lamongan
280	BPS Kabupaten Muara Enim	IKPA Kategori Sangat Baik dengan Nilai IKPA 100 Periode s.d Triwulan I TA 2025	April	KPPN Lahat
281	BPS Kabupaten Aceh Barat Daya	Peringkat PERTAMA_Satuan Kerja Dengan Kinerja Ketepatan Waktu dan Akurasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Terbaik Periode Semester II Tahun 2024	April	KPPN Tapaktuan
282	BPS Kabupaten Aceh Barat Daya	Terbaik PERTAMA_Nilai IKPA Kategori Pagu Sedang Semester II Tahun Anggaran 2024	April	KPPN Tapaktuan
283	BPS Kabupaten Gunung Mas	Piagam Penghargaan atas pencapaian nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot Besar Periode Triwulan I tahun anggaran 2025	April	Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah
284	BPS Kabupaten Lombok Barat	Instansi Vertikal Se-Kabupaten Lombok Barat sebagai Badan Publik: Informatif Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik se-Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024	April	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
285	BPS Kabupaten Gorontalo	Piagam Pelestarian Lingkungan Tahun 2025	April	PT UWAAA Daur Ulang
286	BPS Kabupaten Aceh Barat Daya	Peringkat PERTAMA_Satuan Kerja Dengan Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Periode Semester II Tahun Anggaran 2024	April	KPPN Tapaktuan

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
287	BPS Kota Probolinggo	Penghargaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Aktif Jawa Timur 2025	Mei	Gubernur Jawa Timur
288	BPS Kabupaten Lampung Timur	Penghargaan Peringkat Pertama Satuan Kerja Pengguna Digipay Satu Terbaik pada Semester II Tahun 2024	Mei	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro
289	BPS Kabupaten Tuban	Peringkat II Capaian Ketepatan Waktu Pengajuan Gaji Induk Bulanan Semester I Tahun 2025	Mei	KPPN Tuban
290	BPS Kabupaten Tuban	Peringkat I Capaian Jumlah Transaksi Penggunaan CMS Periode Triwulan I 2024	Mei	KPPN Tuban
291	BPS Kabupaten Tuban	Peringkat I Capaian Jumlah Transaksi Penggunaan KKP Periode Triwulan I 2024	Mei	KPPN Tuban
292	BPS Kabupaten Tuban	Peringkat Kedua Satker Terbaik Kategori Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024	Mei	KPPN Tuban
293	BPS Kabupaten Lebak	Satker Penggunaan CMS TA 2025 Terbaik 2	Mei	KPPN Rangkasbitung
294	BPS Kabupaten Lebak	Satker Dengan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Tercepat dan Akurat TA 2024 Peringkat 3	Mei	KPPN Rangkasbitung
295	BPS Kabupaten Bondowoso	Satker dengan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Aktif Jawa Timur Tahun 2025	Mei	Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Gubernur)
296	BPS Kabupaten Bima	Peringkat 1 Kategori Frekuensi Lelang BMN tertinggi Tahun 2024	Mei	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima (KPKNL Bima)
297	BPS Kabupaten Barito Timur	Pencapaian Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Mei	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah
298	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	Peringkat 1 sebagai Satuan Kerja dengan Capaian Nilai IKPA Tahun 2024 Kategori Satuan Kerja dengan PAGU Sedang (antara 1 s.d. 10 miliar) dengan Nilai Capaian Sebesar 100	Mei	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sekayu
299	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	Peringkat 3 sebagai Satuan Kerja dengan Penggunaan Cash Management System (CMS) Kategori Nilai Transaksi Triwulan IV Tahun 2024 dengan Jumlah Nilai Transaksi Sebesar 513.309.114 Rupiah	Mei	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negeri (KPPN) Sekayu
300	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Penghargaan Nilai Maksimal (100) IKPA Periode Triwulan I TA 2025 dari KPPN	Mei	Kepala KPPN Palangka Raya

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
301	BPS Provinsi Jawa Timur	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Aktif Jawa Timur Tahun 2025	Mei	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
302	BPS Kabupaten Banyuwangi	Peringkat III Sebagai Satuan Kerja Dengan Capaian Nilai IKPA Tahun 2024 Kategori Satuan Kerja Dengan PAGU SEDANG (Antara 1 S.d 10 Miliar) Dengan Nilai Capaian Sebesar 98.66	Mei	KPPN Sekayu
303	BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan	Apresiasi Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik 1 Periode Mei 2025	Mei	KEPALA KPPN KUPANG
304	BPS Kabupaten Murung Raya	Piagam Penghargaan Atas Pencapaian Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot besar Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Mei	KANWIL DJPB PROV. KALIMANTAN TENGAH
305	BPS Kabupaten Maluku Barat Daya	1. Peringkat III dengan kategori satker dengan nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA terbaik triwulan I 2025 satker dengan pagu 2 Miliar s.d 10 Miliar 2. Peringkat III dengan kategori satker dengan nilai IKPA terbaik triwulan II 2025 satker dengan pagu 2 Miliar s.d 10 Miliar 3. Peringkat II dengan kategori satker dengan Tingkat Kepatuhan Pelaporan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Keuangan Terbaik Triwulan II 2025	Mei	KPPN Saumlaki
306	BPS Kabupaten Way Kanan	Satker Peraih Penghargaan Nilai dan Transaksi Tertinggi Pengguna DIGIIPay SATU semester II Tahun 2024	Mei	KPPN Kotabumi
307	BPS Kabupaten Lahat	IKPA kategori sangat baik Tw 1 2025	Mei	KPPN Lahat
308	BPS Kabupaten Lahat	Piagam terbaik pertama pengguna CMS Triwulan 1 2025	Mei	KPPN Lahat
309	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Terbaik III Apresiasi atas Capaian Implementasi Cashless Payment melalui Platform Digipay Satu	Mei	Kepala KPPN Baturaja (Triwidiyono)
310	BPS Kota Kupang	Apresiasi Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik Bulan April 2025	Mei	KPPN Kupang
311	BPS Kabupaten Barito Utara	Penghargaan Pencapaian Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot Besar Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Mei	Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah
312	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	IKPA Sempurna Kategori Pagu Kecil Bobot Besar Triwulan I TA 2025	Mei	Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah
313	BPS Kabupaten Mojokerto	Stakeholder yang berperan aktif dalam pengendalian Inflasi di Kabupaten Mojokerto	Mei	Bupati Mojokerto

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
314	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Piagam Penghargaan BPS Kabupaten Lampung Tengah sebagai Satuan Kerja Terbaik Tahun Anggaran 2024 dengan Capaian IKPA 100	Mei	Kantor Wilayah DJPB Provinsi Lampung
315	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Piagam Penghargaan BPS Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Peringkat Pertama Kategori IKPA Terbaik dengan Pagu DIPA antara Lima Miliar sampai dengan Dua Puluh Lima Miliar Rupiah pada Semester II Tahun 2024 Lingkup Pembayaran KPPN Metro	Mei	KPPN Metro
316	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Piagam Penghargaan BPS Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Peringkat Kedua Kategori Perencanaan Kas Terbaik dengan Pagu DIPA antara Lima Miliar sampai dengan Dua Puluh Lima Miliar Rupiah pada Semester II Tahun 2024 Lingkup Pembayaran KPPN Metro	Mei	KPPN Metro
317	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Piagam Penghargaan BPS Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Peringkat Pertama Kategori Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Terbaik pada Semester II Tahun 2024 Lingkup Pembayaran KPPN Metro	Mei	KPPN Metro
318	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Piagam Penghargaan BPS Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Peringkat Ketiga Kategori Satuan Kerja Pengguna digipay Satu Terbaik pada Semester II Tahun 2024 Lingkup Pembayaran KPPN Metro	Mei	KPPN Metro
319	BPS Kabupaten Boven Digoel	Pengelolaan Keuangan	Mei	KPPN Merauke
320	BPS Kabupaten Merauke	1. Peringkat ke Pertama Sebagai Satuan Kerja Lingkup KPPN Tipe A1 Merauke dengan Predikat LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik 2. Peringkat kedua Sebagai Satuan Kerja Lingkup KPPN Tipe A1 Merauke dengan Predikat Akurasi SPM per Jumlah SPM dengan Jumlah diatas 500 SPM 3. Peringkat Ketiga Sebagai Satuan Kerja Lingkup KPPN Tipe A1 Merauke dengan Predikat Pengelola Gaji Induk Terbaik	Mei	KPPN
321	BPS Kabupaten Boalemo	Lembaga Pembina Des Cinta Statistik (DESA CANTIK)	Mei	Desa Hungayona Boalemo
322	BPS Kota Jambi	Penghargaan Satker Terbaik Tw I TA 2025 Dalam Capaian IKPA dengan Pagu 0M s.d 8M	Mei	KPPN Jambi
323	BPS Kota Bekasi	Pengguna Digipay Terbaik III	Mei	KPPN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
324	BPS Kota Bekasi	Penyampaian Saldo Rekening Pemerintah Terbaik III	Mei	KPPN Bekasi
325	BPS Kota Bekasi	Penyampaian LPJ Pengeluaran Terbaik I	Mei	KPPN Bekasi
326	BPS Kabupaten Lombok Tengah	Terbaik I Laporan Keuangan T.A 2024 Tingkat UAKPA Lingkup KPPN Mataram Kategori Satker Pagu Sedang	Juni	Kepala KPPN Mataram
327	BPS Kabupaten Kaur	Peringkat III Satker dengan Transaksi Digipay Tertinggi	Juni	KPPN Manna
328	BPS Kabupaten Kaur	Peringkat III Satker dengan Realisasi Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Tertinggi	Juni	KPPN Manna
329	BPS Kabupaten Kaur	Peringkat II Satker dengan Kecepatan, Ketepatan, dan Kelengkapan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan	Juni	KPPN Manna
330	BPS Kabupaten Kaur	Peringkat II Satker dengan Kecepatan, Ketepatan, dan Kelengkapan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran	Juni	KPPN Manna
331	BPS Kabupaten Kaur	Peringkat II Satker dengan Nilai IKPA Tertinggi Pagu DIPA Besar	Juni	KPPN Manna
332	BPS Kabupaten Tuban	Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Media Briefing APBN dan Publikasi Data Statistik	Juni	KPPN Tuban
333	BPS Kabupaten Batu Bara	BPS Kabupaten Batu Bara Lolos Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Kementerian PAN RB	Juni	Kementerian PAN RB
334	BPS Kabupaten Pulau Morotai	Penghargaan Terbaik ke-3 sebagai Penggunaan Cash Management System (CMS) Tertinggi di KPPN Tobelo	Juni	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
335	BPS Kabupaten Pulau Morotai	Penghargaan Terbaik ke-3 sebagai Penggunaan Digipay Tertinggi di Lingkup Provinsi Maluku Utara dan KPPN Tobelo	Juni	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
336	BPS Kota Lubuk Linggau	Instansi Pemerinah Panutan Atas Kepatuhan ASN dalam Pelaporan SPT Tahun Pajak 2024 sebesar 100%	Juni	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau
337	BPS Provinsi Riau	Satuan Kerja dengan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Terbaik pada Kegiatan "Treasury Awards Semester II 2024 & Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d Bulan Juni 2025"	Juni	Kepala KPPN Pekanbaru
338	BPS Provinsi Riau	Satuan Kerja dengan Kualitas dan Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Terbaik pada Kegiatan	Juni	KPPN Pekanbaru

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		"Treasury Awards Semester II 2024 & Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d Bulan Juni 2025"		
339	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	1. Juara Umum Penilaian Kinerja Satuan Kinerja dalam Treasury Awards Tahun Anggaran 2024 Tingkat KPPN Manna	Juni	KPPN Manna dan BPS Provinsi Bengkulu
340	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat I Nilai IKPA	Juni	KPPN Manna
341	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat I LPJ Bendahara Penerimaan	Juni	KPPN Manna
342	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat I Nilai IKPA Tahun 2024	Juni	KPPN Manna
343	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat II Pengguna CMS	Juni	KPPN Manna
344	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat II Penggunaan CMS Terbaik Triwulan III Tahun 2025	Juni	KPPN Manna
345	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat II Realisasi Uang Persediaan KKP	Juni	KPPN Manna
346	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat II Transaksi Digipay	Juni	KPPN Manna
347	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat III Penyampaian Gaji Induk	Juni	KPPN Manna
348	BPS Kabupaten Sumba Barat	Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah	Juni	KPPN Tipe A1 Waingapu
349	BPS Kabupaten Sumba Barat	Kinerja Penggunaan Cash Management System (CMS) Terbaik	Juni	KPPN Tipe A1 Waingapu
350	BPS Kabupaten Empat Lawang	IKPA Kategori Sangat Baik	Juni	KPPN Lahat
351	BPS Kabupaten Empat Lawang	Sertifikat Teraktif Kedua Transaksi CMS Terbanyak periode s.d Mei	Juni	KPPN Lahat
352	BPS Kabupaten Empat Lawang	Serifikat Teraktif Keempat penggunaan KKP periode s.d Mei	Juni	KPPN Lahat
353	BPS Kabupaten Empat Lawang	Sertifikat Terbaik Kedua Transaksi Digipay Terbanyak s.d Mei	Juni	KPPN Lahat
354	BPS Kota Pekanbaru	Terbaik Pertama Satuan Kerja dengan Kualitas dan Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik Pada Kegiatan "Treasury Awards Semester II 2024 & Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d Bulan Juni 2025"	Juni	KPPN Pekanbaru
355	BPS Kota Pekanbaru	Terbaik Kedua Satuan Kerja dengan Kualitas dan Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Terbaik Pada Kegiatan "Treasury Awards Semester II 2024 & Evaluasi Pelaksanaan Anggaran s.d Bulan Juni 2025"	Juni	KPPN Pekanbaru
356	BPS Kabupaten Indragiri Hilir	Peringkat III Kategori IKPA Pagu Sedang 5-10 Milyar dengan nilai capaian sebesar 99,76	Juni	KPPN Rengat

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
357	BPS Kabupaten Indragiri Hilir	Peringkat II Kategori Capaian atas Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2024	Juni	KPPN Rengat
358	BPS Provinsi Maluku	Terbaik II Kategori UAPPA-W Sedang (Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tingkat Wilayah Unaudited Tahun 2024 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Maluku)	Juni	Kanwil DJPb Provinsi Maluku
359	BPS Kabupaten Luwu Timur	Sertifikat Penghargaan Desa Cantik dari Pemda	Juni	Desa Baruga, Kabupaten Luwu Timur
360	BPS Kota Banjarmasin	TERBAIK KETIGA BENDAHARA PENGELUARAN SEMESTER II TAHUN 2024 KATEGORI SATKER DENGAN PAGU SEDANG	Juni	KPPN Banjarmasin
361	BPS Kota Banjarmasin	TERBAIK KETIGA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA SEMESTER II TAHUN 2024 KATEGORI SATKER DENGAN PAGU SEDANG	Juni	KPPN Banjarmasin
362	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	Peringkat 1 Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2024	Juni	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
363	BPS Kabupaten Pacitan	Satker Dengan yang Memiliki Pagu s.d. 10 M dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Ke-2 Periode Januari s.d. Mei 2025	Juni	KPPN Pacitan
364	BPS Kabupaten Pacitan	Satuan Kerja yang Memiliki Pagu s.d. 10 M dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Ke-2 Periode Januari s.d. Mei 2025	Juni	KPPN Pacitan
365	BPS Kabupaten Pacitan	Satuan Kerja Pengguna Digipay Satu Terbaik Ke-3 Periode Mei s.d. Juni 2025	Juni	KPPN Pacitan
366	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	Pokok Lelang dan Bea Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara Tahun 2024	Juni	DJKN
367	BPS Kabupaten Indragiri Hulu	Peringkat 2 Kategori Capaian atas Belanja dengan Digipay Tahun 2024	Juni	KPPN Rengat
368	BPS Kabupaten Indragiri Hulu	Peringkat 2 Kategori Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Tahun 2024	Juni	KPPN Rengat
369	BPS Kota Bontang	Kerjasama dan Dukungannya dalam Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Data Statistik dengan tema "Data Berkualitas Sebagai Pondasi Satu Data Indonesia"	Juni	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
370	BPS Kota Bontang	Kerjasama dan Dukungannya dalam Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Data Statistik dengan tema "Data Berkualitas Sebagai Pondasi Satu Data Indonesia"	Juni	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
371	BPS Kabupaten Konawe	Penggunaan CMS Triwulan I TA 2025 Terbaik 1 Lingkup KPPN Kendari	Juni	KPPN Kendari
372	BPS Kabupaten Sarolangun	Penghargaan Kepada BPS Kabupaten Sarolangun sebagi Satuan Kerja peringkat III Kategori Pengguna CMS terbanyak Triwulan IV 2024.	Juni	KPPN Bangko
373	BPS Kabupaten Lombok Barat	Terbaik III Laporan Keuangan T.A. 2024 Tingkat UAKPA Lingkup KPPN Mataram Kategori Satuan Kerja Pagu Sedang (5 s.d. 20 Miliar Rupiah)	Juni	Kementerian Keuangan Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Barat
374	BPS Kabupaten Sorong	Mitra Strategis Berkinerja Kolaboratif Terbaik dalam Program Pembinaan Statistik Sektoral Kelurahan/Kampung sehingga mengantarkan Kelurahan Malasom Distrik Aimas menjadi Kelurahan Cinta Statistik Terbaik Se-Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024	Juni	Bupati Sorong
375	BPS Kabupaten Kolaka Utara	Peringkat II Satuan Kerja Pengguna Cash Management System (CMS) Terbaik Semester I Tahun 2025	Juni	KPPN Kolaka
376	BPS Kabupaten Kolaka Utara	Peringkat III Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA Terbaik Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu Sedang	Juni	KPPN Kolaka
377	BPS Kabupaten Buton Selatan	Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2025	Juni	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2
378	BPS Kota Kendari	Satker dengan Penggunaan Cash Management System (CMS) Terbaik 2 Periode Triwulan I TA 2025	Juni	KPPN Kendari
379	BPS Kota Kendari	Satker dengan Implementasi Digipay (Digital Payment) Terbaik 3 Periode Triwulan I TA 2025 Lingkup KPPN Kendari	Juni	KPPN Kendari
380	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik II Akurasi Rencana Penarikan Dana Semester II Tahun 2025 Kategori Satker dengan Pagu Besar	Juni	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin
381	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik II Akurasi Rencana Penarikan Dana Semester II Tahun 2025 Kategori Satker dengan Pagu Besar	Juni	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Tipe A1 Banjarmasin
382	BPS Kabupaten Lamongan	Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN BOJONEGORO
383	BPS Kabupaten Jeneponto	Satker dengan transaksi CMS terbanyak semester I Tahun 2025 Lingkup Wilayah kerja KPPN Bantaeng	Juli	KPPN Bantaeng
384	BPS Kota Batu	Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Optimal Periode Semester I 2025 (Nilai 100)	Juli	KPPN Malang
385	BPS Kota Kediri	Satker Dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025 Dengan Predikat Terbaik	Juli	KPPN Kediri
386	BPS Kabupaten Lumajang	Satuan Kerja dengan Kinerja Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Periode Semester 1 Tahun 2025 Kategori Satker Pagu Sedang (5-20 Milyar)	Juli	KPPN Jember
387	BPS Kabupaten Lumajang	Satuan Kerja dengan kinerja penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendahara Terbaik Periode Semester 1 Tahun 2025 Kategori Pagu Sedang (5-20 Milyar)	Juli	KPPN Jember
388	BPS Kabupaten Tulungagung	Satuan Kerja Pengguna Transaksi Cash Management System Terbaik Peringkat I Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Blitar
389	BPS Kabupaten Tulungagung	Satuan Kerja IKPA Terbaik Dengan Nilai 100 Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Blitar
390	BPS Kota Lhokseumawe	PERINGKAT KEDUA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KATEGORI SATUAN KERJA PAGU SEDANG DENGAN NILAI 100 PERIODE SEMESTER 1 TAHUN 2025	Juli	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
391	BPS Kota Lhokseumawe	SEBAGI SATUAN KERJA PERAIH IKPA SEMPURNA DENGAN NILAI 100 PERIODE SEMESTER 1 TAHUN 2025	Juli	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
392	BPS Kabupaten Bondowoso	Satker dengan Transaksi Cash Management System Terbaik Semester 1 Tahun 2025 (Peringkat 2)	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso
393	BPS Kabupaten Bondowoso	Satker dengan Transaksi Digipay Terbaik Semester 1 Tahun 2025 (Peringkat 3)	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(KPPN) Bondowoso
394	BPS Kabupaten Bondowoso	Satker dengan Nikai IKPA Sempurna (100) Semester 1 Tahun 2025	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso
395	BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Peringkat Ketiga Satker dengan Nilai IKPA Terbaik Kategori Pagu Sedang Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Rantau Prapat
396	BPS Kabupaten Pangandaran	Satker Terbaik Ketiga Pengguna Digipay Satu	Juli	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 TASIKMALAYA
397	BPS Kabupaten Pidie Jaya	Satker Capaian IKPA Terbaik Semester I Tahun 2025 dengan nilai 100	Juli	KPPN Banda Aceh
398	BPS Kota Blitar	SEBAGAI SATUAN KERJA IKPA TERBAIK DENGAN NILAI 100 SEMESTER I TAHUN 2025	Juli	KPPN Blitar
399	BPS Kabupaten Kapuas	Atas Pencapaian Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot Besar Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Juli	Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah
400	BPS Kota Banda Aceh	Satker Capaian IKPA Sempurna (100) Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Banda Aceh
401	BPS Kabupaten Bangkalan	Peringkat I Penilaian Satuan Kerja Dengan Kinerja Transaksi Digipay Terbaik Semester I Tahun 2025 Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pamekasan	Juli	KPPN Pamekasan
402	BPS Kabupaten Barito Timur	Pencapaian Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Juli	Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah
403	BPS Kabupaten Mappi	Satuan Kerja Lingkup KPPN Tipe A1 Merauke dengan Predikat Pengelola Gaji Induk Terbaik Peringkat Pertama	Juli	KPPN Merauke
404	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	Capaian 100% Pelaporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi ASN Tercepat Tahun Pajak 2024	Juli	KPP Pratama Rengat
405	BPS Kabupaten Klungkung	Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100 Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Amlapura
406	BPS Kabupaten Klungkung	Satuan Kerja dengan Penggunaan CMS 100% Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Amlapura
407	BPS Kabupaten Pulau Morotai	Penghargaan atas Capaian Implementasi Belanja Digipay Tertinggi 3 Lingkup	Juli	Kantor Wilayah

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Provinsi Maluku Utara sampai dengan Periode Triwulan II Tahun 2025		Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
408	BPS Kabupaten Soppeng	Peringkat I Satker Terbaik Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu Sedang	Juli	Kepala Kantor KPPN Watampone
409	BPS Kabupaten Tebo	Peringkat I untuk Kategori Satuan Kerja dengan Transaksi DIGIPAY SATU Tertinggi periode Semester I tahun 2025 lingkup KPPN Muara Tebo	Juli	Kepala KPPN Muara Bungo
410	BPS Kabupaten Tebo	Peringkat I untuk Kategori Satuan Kerja dengan Transaksi KKP Tertinggi periode Semester I Tahun 2025 lingkup KPPN Muara Bungo	Juli	Kepala KPPN Muara Bungo
411	BPS Kabupaten Tebo	Peringkat III untuk kategori Satuan Kerja dengan Transaksi CMS Tertinggi periode Semester I tahun 2025 lingkup KPPN Muara Bungo	Juli	Kepala KPPN Muara Bungo
412	BPS Kabupaten Tebo	Peringkat III untuk kategori Nilai IKPA terbaik Pagu 3 sampai dengan 8 miliar periode Semester I Tahun 2025 lingkup KPPN Muara Bungo	Juli	Kepala KPPN Muara Bungo
413	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terbaik Satu Penyusun Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2024 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung kategori UAPPA-W dengan jumlah UAPKA 5 sampai dengan 8 unit	Juli	Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung
414	BPS Kab Berau	Peringkat III Kategori Satuan Kerja dengan Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Teraktif Semester I Tahun 2025	Juli	Kepala KPPN Tanjungredep
415	BPS Kab Berau	Peringkat I Kategori Satuan Kerja dengan Transaksi Cash Management System (CMS) Teraktif Semester I Tahun 2025	Juli	Kepala KPPN Tanjungredep
416	BPS Kab Berau	Peringkat I Kategori Satuan Kerja dengan Pengirim Laporan Saldo Rekening Tercepat Semester I Tahun 2025	Juli	Kepala KPPN Tanjungredep
417	BPS Kab Berau	Peringkat I Kategori Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan Terbaik Semester I Tahun 2025	Juli	Kepala KPPN Tanjungredep
418	BPS Kab Berau	Peringkat I Kategori Satuan Kerja dengan Transaksi Digipay Teraktif Semester I Tahun 2025	Juli	Kepala KPPN Tanjungredep
419	BPS Kabupaten Mamasa	Wajib Pajak Instansi Pemerintah dengan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan TERBAIK di Wilayah Kerja KPP Pratama Majene Tahun Pajak 2024 (Pelaporan SPT Tahunan 100%)	Juli	KPP Pratama Majene

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
420	BPS Kabupaten Sumbawa	<ol style="list-style-type: none"> Satuan kerja terbaik ketiga atas penggunaan digitalisasi pembayaran periode Semester 1 Satuan kerja terbaik kedua atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan periode Semester 1 Peringkat II kategori stakeholder BMN responsif tahun 2024 Satuan kerja terbaik ketiga atas Pengolahan uang persediaan, LPJ, Implementasi digitalisasi pembayaran Penghargaan satuan Kerja dengan Inovasi Terbaik II Triwulan 2 2025 Penghargaan Atas Kontribusi dalam mnedukung kebijakan ekonomi dan pembangunan Tahun 2024 Penghargaan juara III Lomba Kebersihan Lingkungan Kantor kategori instansi vertikal Penghargaan sebagai mitra strategis dalam penyediaan data berkualitas untuk pemerintahan yang efektif 	Juli	<ol style="list-style-type: none"> KPPN Sumbawa Besar KPPN Sumbawa Besar KPKNL Bima KPPN Sumbawa Besar BPS Provinsi NTB Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa
421	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Penghargaan atas partisipasi dalam pelestarian lingkungan	Juli	CV MAKMUR JAYA
422	BPS Kabupaten Tapanuli Utara	Peringkat Ketiga - Pengguna Cash Management System Triwulan II 2025	Juli	KPPN Balige
423	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terbaik Satu Penyusun Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2024 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung kategori UAPPA-W dengan jumlah UAPKA 5 sampai dengan 8 unit	Juli	Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung
424	BPS Kabupaten Padang Lawas	Peringkat Pertama Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Padang Sidempuan
425	BPS Kabupaten Padang Lawas	Nilai IKPA Sempurna (100) Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Padang Sidempuan
426	BPS Kabupaten Nias Utara	<ol style="list-style-type: none"> Penghargaan Peringkat 1 Bendahara Teladan Semester 1 Tahun 2025 Penghargaan Peringkat 1 Penggunaan Digipay Semester 1 Tahun 2025 Penghargaan Kuasa Pengguna Anggaran Inspiratif Semester 1 Tahun 2025 Penghargaan Peringkat 2 Pengelolaan Kinerja APBN Kategori Pagu Sedang 	Juli	<ol style="list-style-type: none"> Penghargaan 1-8 KPPN Gunungsitoli Penghargaan 9 Kanwil

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Semester 1 Tahun 2025 5. Penghargaan Peringkat 2 Penggunaan CMS Semester 1 Tahun 2025 6. Penghargaan Peringkat 2 Laporan Keuangan Tahun 2024 7. Penghargaan Peringkat 3 Penggunaan KKP Semester 1 Tahun 2025 8. Penghargaan Peringkat 3 Penggunaan Digipay Semester 2 Tahun 2024 9. Penghargaan Peringkat 2 Transaksi Digipay Semester 1 Tahun 2025		
427	BPS Kabupaten Jeneponto	Satker dengan transaksi CMS Terbanyak Semester I Tahun 2025 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Bantaeng	Juli	KPPN Bantaeng
428	BPS Kabupaten Blora	Sebagai Satker Lingkup KPPN Purwodadi Dengan Capaian Transaksi Digipay Terbaik Ke-2 Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Purwodadi
429	BPS Kabupaten Labuhanbatu	Peringkat Pertama Satker Pengguna Digipay dengan Jumlah Transaksi Terbanyak Periode Semester I Tahun 2025	Juli	Kepala KPPN Rantauprapat
430	BPS Kabupaten Bungo	Peringkat I Untuk Kategori Nilai IKPA Terbaik Pagu 3 Sampai Dengan 8 Miliar Periode Semester I Tahun 2025 Lingkup KPPN Muara Bungo	Juli	KPPN Muara Bungo
431	BPS Kabupaten Labuhanbatu	Peringkat Kedua Satker Pengguna KKP dengan Jumlah Transaksi Terbesar Periode Semester II Tahun 2024	Juli	Kepala KPPN Rantauprapat
432	BPS Kabupaten Bungo	Peringkat V Untuk Kategori Satuan Kerja Dengan Transaksi Digipay Satu Tertinggi Periode Semester I Tahun 2025 Lingkup KPPN Muara Bungo	Juli	KPPN Muara Bungo
433	BPS Kabupaten Bungo	Peringkat II Untuk Kategori Satuan Kerja Dengan Transaksi CMS Tertinggi Periode Semester I Tahun 2025 Lingkup KPPN Muara Bungo	Juli	KPPN Muara Bungo
434	BPS Kabupaten Labuhanbatu	Peringkat Ketiga Satker Pengguna Digipay dengan Nominal Transaksi Terbanyak Periode Semester I Tahun 2025	Juli	Kepala KPPN Rantauprapat
435	BPS Kabupaten Labuhanbatu	Peringkat Ketiga Satker Pengguna Digipay dengan Jumlah Transaksi Terbanyak Periode Semester II Tahun 2024	Juli	Kepala KPPN Rantauprapat
436	BPS Kabupaten Cirebon	Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik (nilai akhir IKPA 100 dengan Kategori "Sangat Baik") pada periode semester I Tahun 2025	Juli	KPPN
437	BPS Kabupaten Labuhanbatu	Peringkat Ketiga Satker Pengguna Digipay dengan Nominal Transaksi Terbanyak Periode Semester II Tahun 2024	Juli	Kepala KPPN Rantauprapat
438	BPS Kabupaten Labuhanbatu	Peringkat Ketiga Satker Pengguna KKP dengan Nominal Terbesar Periode Semester II Tahun 2024	Juli	Kepala KPPN Rantauprapat

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
439	BPS Provinsi Lampung	Penghargaan sebagai Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Terbaik Pertama Tahun 2024 (Kategori UAPPA-W Sedang)	Juli	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung
440	BPS Kabupaten Manggarai Barat	Satker dengan Nilai IKPA Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025 Kategori Pagu Sedang Lingkup KPPN Tipe A2 Ruteng; Peringkat I Satker dengan Transaksi KKP Terbesar TA 2025 Kategori UP KKP sd 50Juta Lingkup KPPN Tipe A2 Ruteng; Peringkat III Satker dengan Transaksi CMS Terbanyak Semester I TA 2025 Lingkup KPPN Tipe A2 Ruteng;	Juli	KPPN Ruteng
441	BPS Kabupaten Karawang	Cash Management System (CMS) terbanyak dengan jumlah 1247 Transaksi Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Karawang
442	BPS Kabupaten Karawang	Penyelesaian Laporan Keuangan Terbaik Dengan Nilai 99,17 Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Karawang
443	BPS Kabupaten Pekalongan	Peringkat 1 satuan kerja dengan Capaian IKPA Kategori Pagu Besar Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Juli	KPPN Pekalongan
444	BPS Kota Parepare	Satker dengan Jumlah/ Frekuensi Transaksi melalui CMS Terbanyak dengan Jumlah Pagu DIPA Sedang Periode Semester I TA 2025	Juli	KPPN Tipe A1 Parepare
445	BPS Kota Parepare	Satker dengan Jumlah Nominal Transaksi KKP Melebihi Target Periode Semester I TA 2025 (>5% UP KKP Disetahunkan) Terbaik Keempat	Juli	KPPN Tipe A1 Parepare
446	BPS Kota Parepare	Satker dengan Nilai IKPA Tertinggi dengan Jumlah Pagu DIPA Sedang Periode Semester I TA 2025 - Terbaik Kedepalan	Juli	KPPN Tipe A1 Parepare
447	BPS Kota Sungai Penuh	Terbaik II atas Transaksi Cash Management System Terbanyak Triwulan I Tahun 2025 Lingkup KPPN Sungai Penuh	Juli	KPPN Sungai Penuh
448	BPS Kota Sungai Penuh	Terbaik II atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2025 Satker Pagu Sedang lingkup KPPN Sungai Penuh	Juli	KPPN Sungai Penuh
449	BPS Kota Metro	Satker Terbaik berdasarkan Hasil Penilaian IKPA Semester I Tahun 2025 di lingkup pembayaran KPPN Metro	Juli	KPPN Kota Metro
450	BPS Kota Padangsidempuan	1. Digipay Terbaik Periode Semester I Tahun 2025; 2. CMS terbaik Periode Semester I Tahun 2025; 3. Nilai IKPA Sempurna 100;	Juli	Kepala KPPN Kota Padang Sidempuan
451	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Peringkat II Satker dengan Transaksi DIGIPAY Terbesar Semester I Tahun Anggaran 2025	Juli	Kantor Pelayanan Perbendahara

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				an Negara Tipe A2 Ruteng
452	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Peringkat I Satker dengan Transaksi DIGIPAY Terbanyak Semsester I Tahun Anggaran 2025	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
453	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Peringkat I Satker dengan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
454	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Satker dengan Nilai IKPA Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025 Kategori PAGU KECIL	Juli	Kantor Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
455	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pengguna Terbaik Aplikasi Back Office Selindo (BOS) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Juli	BPS Provinsi Sumatera Selatan
456	BPS Kota Pasuruan	Piagam Penghargaan_Peringkat 1 sebagai Satker Berkinerja Terbaik I Pengguna Digipay Satu Terbaik Periode Semester I TA 2025	Juli	KPPN Malang
457	BPS Kota Pasuruan	Piagam Penghargaan_Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Optimal Periode Semester I 2025 (Nilai 100)	Juli	KPPN Malang
458	BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan	Apresiasi Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik 1 Periode Juli 2025	Juli	KEPALA KPPN KUPANG
459	BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Peringkat 1 Satker dengan Tingkat Kepatuhan Pelaporan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Keuangan Terbaik Triwulan II 2025	Juli	KPPN Saumlaki
460	BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Peringkat 2 Satker dengan Implementasi Digipay Satu Terbaik Triwulan II 2025	Juli	KPPN Saumlaki
461	BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Satker Teladan dalam Implementasi penggunaan KKP Triwulan II 2025	Juli	KPPN Saumlakii
462	BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Peringkat 1 Satker dengan Jumlah Transaksi Pendebitan Rekening Virtual Bendahara Pengeluaran melalui CMS Tertinggi Triwulan II 2025	Juli	KPPN Saumlaki

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
463	BPS Kabupaten Banyuwangi	Peringkat Pertama Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang Triwulan II Tahun 2025	Juli	KPPN Banyuwangi
464	BPS Kabupaten Pulang Pisau	Pencapaian Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot Besar Periode Semester 1 TA 2025	Juli	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAH ARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
465	BPS Kota Probolinggo	Peringkat 1 Satker Dengan Kinerja IKPA Terbaik di Wilayah Kota Probolinggo (Pagu di Atas 5 Milyar)	Juli	KPPN Bondowoso
466	BPS Kab.Gresik	Juara 1 Satuan Kerja Dengan kinerja Terbaik Dalam Implementasi Digipay Semester 1 Tahun 2025	Juli	KPPN Surabaya I
467	BPS Kab Gresik	Juara Umum Satuan Kerja Pengelola APBN Terbaik Periode Semester 1 Tahun 2025	Juli	KPPN SURABAYA I
468	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	Peringkat I – Nilai IKPA Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Manokwari
469	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Korwil Terbaik dalam Pembinaan kepada Satkernya Terkait Penatausahaan BMN Yang Tertib Tahun 2024	Juli	Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
470	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Sebagai Satuan Kerja dengan Kualitas Laporan Keuangan UAPPA-W Terbaik Periode 2024 Audited	Juli	Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
471	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Peringkat Pertama Kategori Pagu Sedang Penyelesaian LPJ Bendahara Tingkat Satuan Kerja Mitra KPPN Palembang Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Palembang
472	BPS Kabupaten Bandung	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Triwulan II Tahun 2025	Juli	Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II - Kementerian Keuangan
473	BPS Kabupaten Bandung	Peringkat III Pengguna Cash Manajemen System (CMS) Triwulan II Tahun 2025	Juli	Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II -

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Kementerian Keuangan
474	BPS Kota Sungai Penuh	Peringkat I Transaksi Digital Payment Terbanyak Triwulan II 2025 Lingkup KPPN Sungai Penuh	Juli	KPPN Sungai Penuh
475	BPS Kota Sungai Penuh	Terbaik II Transaksi KKP Terbanyak Triwulan I 2025 Lingkup KPPN Sungai Penuh	Juli	KPPN Sungai Penuh
476	BPS Kota Sungai Penuh	Terbaik III Transaksi KKP Terbanyak Triwulan II Tahun 2025 Lingkup KPPN Sungai Penuh	Juli	KPPN Sungai Penuh
477	BPS Provinsi Kalimantan Barat	Peringkat Kedua Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	Juli	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
478	BPS Kabupaten Kulon Progo	Penghargaan Kategori Satker Terbaik Pengguna Cash Management System (CMS) Satker Lingkup KPPN Wates Semester I Tahun 2025.	Juli	KPPN Wates
479	BPS Kabupaten Kulon Progo	Penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berpredikat Sangat Baik Lingkup KPPN Wates Semester I Tahun Anggaran 2025.	Juli	KPPN Wates
480	BPS Kabupaten Kulon Progo	Satuan Kerja Terbaik I Pengguna Digipay Kategori Jumlah Transaksi Terbanyak Satker Lingkup KPPN Wates Semester I Tahun 2025.	Juli	KPPN Wates
481	BPS Kota Gorontalo	Peraih Nilai IKPA Sempurna Semester 1 2025	Juli	Kepala DJPB Provinsi Gorontalo
482	BPS Kota Cirebon	Piagam Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Terbaik Per. Smt 1 2025	Juli	KPPN CIREBON
483	BPS Kota Blitar	IKPA terbaik Semester I 2025	Juli	KPPN Blitar
484	BPS Kab.Gresik	Juara 3 Satuan Kerja Dengan Kinerja Terbaik Dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu DIPA Lebih Dari 10 Sampai Dengan 50 Miliar Rupiah Periode Semester I Tahun 2025	Juli	kppn
485	BPS Kabupaten Seram Bagian Timur	Peringkat 1 Satker dengan Kinerja Pengelolaan APBN Terbaik Kategori Pagu DIPA Sedang Semester I TA 2025	Juli	KPPN Masohi
486	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	Satker dengan Pengelolaan IKPA Pagu Sedang Terbaik Periode Semester I TA 2025	Juli	KPPN Kendari
487	BPS Kabupaten Pidie	Capaian IKPA Terbaik Semester I Tahun 2025	Juli	KKPN Banda Aceh

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
488	BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	Peringkat 1_Satker Pengguna KKP dengan Jumlah Transaksi Terbanyak Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Rantau Prapat
489	BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	Peringkat 1_Satker Pengguna KKP dengan Jumlah Transaksi Terbanyak Periode Semester II Tahun 2024	Juli	KPPN Rantau Prapat
490	BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	Peringkat 2_Satker Pengguna KKP dengan Nominal Terbesar Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Rantau Prapat
491	BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	Peringkat 2_Satker Pengguna KKP dengan Nominal Terbesar Periode Semester II Tahun 2024	Juli	KPPN Rantau Prapat
492	BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	Peringkat 2_Satker Pengirim LPJ Bendahara Pengeluaran Tercepat dan Akurat Semester I 2025	Juli	KPPN Rantau Prapat
493	BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	Peringkat 3_Satker Pengguna Digipay dengan Jumlah Transaksi Terbanyak Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Rantau Prapat
494	BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	Peringkat 3_Satker Pengirim LPJ Bendahara Pengeluaran Tercepat Dan Akurat Semester II 2024	Juli	KPPN Rantau Prapat
495	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobo Besar Periode Semester I TA 2025	Juli	Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah
496	BPS Kabupaten Lamandau	Satuan Kerja dengan Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot Besar Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Juli	Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
497	BPS Kabupaten Nias Selatan	- peringkat 3 satuan kerja mitra kantor pelayanan perbendaharaan negara Gunungsitoli dengan kinerja terbaik penggunaan uang persediaan melalui cash management system periode semester I tahun anggaran 2025 - peringkat 3 satuan kerja mitra kantor pelayanan perbendaharaan negara Gunungsitoli dengan nilai pengelolaan kinerja APBN terbaik kategori pagu sedang periode semester I tahun anggaran 2025	Juli	KPPN Gunungsitoli
498	BPS Kabupaten Ciamis	Peringkat Kedua Satker Terbaik Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Kategori Pagu DIPA UP di atas 6 Miliar	Juli	Kepala KPPN Tasikmalaya
499	BPS Kabupaten Ciamis	Peringkat Pertama Satker Terbaik Penatausahaan Rekon dan Penyampaian Gaji Induk Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 Kategori DIPA Pagu Besar	Juli	Kepala KPPN Tasikmalaya

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
500	BPS Provinsi Jawa Timur	Peringkat II Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu Menengah Antara 50 Miliar hingga 250 Miliar	Juli	KPPN Surabaya I
501	BPS Provinsi Jawa Timur	Peringkat III Satuan Kerja dengan Kinerja Terbaik dalam Penyelesaian Laporan Saldo Rekening Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Surabaya I
502	BPS Provinsi Jawa Timur	Sebagai Peringkat I Satuan Kerja Teraktif dalam Implementasi KKP Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Surabaya I
503	BPS Kabupaten Mojokerto	Penilaian Satuan Kerja dengan Kinerja Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Semester I Tahun 2025 Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto	Juli	Kementerian Keuangan DJP
504	BPS Kabupaten Blitar	Satuan Kerja Pengguna Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Peringkat Ketiga Semester 1	Juli	KPPN Blitar
505	BPS Kabupaten Blitar	SEBAGAI SATUAN KERJA PENGGUNA TRANSAKSI DIGIPAYSATU TERBAIK PERINGKAT KEDUA SEMESTER I TAHUN 2025	Juli	KPPN Blitar
506	BPS Kabupaten Nganjuk	Penghargaan IKPA Semester 1 Terbaik	Juli	KPPN Kediri
507	BPS Kota Malang	Penghargaan Mitra Terbaik Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang Bidang Magang Mahasiswa MBKM 2025	Juli	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang
508	BPS Provinsi Kalimantan Timur	Penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai 100 atas IKPA Periode Semester 1 Tahun 2025	Juli	KPPN Samarinda
509	BPS Kota Malang	Peringkat I Sebagai Satker Berkinerja Terbaik Kategori Satker dengan Pagu <10 Milyar Periode Semester I TA 2025	Juli	Kepala KPPN Malang
510	BPS Kota Malang	Penghargaan Satuan Kerja Dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Optimal Periode Semester I 2025(Nilai 100)	Juli	Kepala KPPN Malang
511	BPS Kota Samarinda	Satuan Kerja dengan Nilai 100 atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester I Tahun 2025 dari KPPN Samarinda	Juli	KPPN Samarinda
512	BPS Kota Madya	Satuan Kerja dengan IKPA dan Dukungan Digitalisasi Terbaik Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Samarinda

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
513	BPS Kota Malang	Penghargaan Sebagai Mitra Terbaik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Kategori Bidang Pengabdian Masyarakat	Juli	Dekan Fakultas MIPA
514	BPS Kabupaten Trenggalek	SATKER DENGAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN PREDIKAT TERBAIK (IKPA)	Juli	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 KEDIRI (KPPN KEDIRI)
515	BPS Kabupaten Rembang	Sebagai Satker Terbaik Penilaian Jumlah Transaksi Digipay Terbanyak	Juli	KPPN Pati
516	BPS Kabupaten Rembang	Terbaik 1 Penilaian kategori Penggunaan Cash Management System (CSM)	Juli	KPPN Pati
517	BPS Kabupaten Sampang	Peringkat I Transaksi Digipay Terbaik Semester I 2025	Juli	KPPN Pamekasan
518	BPS Kabupaten Sampang	Peringkat II Pelaporan Laporan Keuangan Semester I 2025	Juli	KPPN Pamekasan
519	BPS Kabupaten Sampang	Peringkat II Pengelolaan Rekening Semester I 2025	Juli	KPPN Pamekasan
520	BPS Kabupaten Sampang	Peringkat III Transaksi KKP Terbaik Semester I 2025	Juli	KPPN Pamekasan
521	BPS Kabupaten Bangkalan	Transaksi Digipay Terbaik 1 Sem 1 2025	Juli	KPPN Pamekasan
522	BPS Kabupaten Bangkalan	Pengelolaan Rekening KL Terbaik 1 Sem 1 2025	Juli	KPPN Pamekasan
523	BPS Kabupaten Bangkalan	Trasaksi KKP Terbaik 2 Sem 1 2025	Juli	KPPN Pamekasan
524	BPS Kabupaten Muara Enim	IKPA Kategori Sangat Baik dengan Nilai IKPA 100 Periode s.d Triwulan II TA 2025	Juli	KPPN Lahat
525	BPS Kabupaten Kediri	SATKER DENGAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN PREDIKAT TERBAIK	Juli	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
526	BPS Kabupaten Klaten	Piagam Peringkat 2_Satker dengan CMS Terbanyak Semester 1 Tahun 2025 - 22 Juli	Juli	KPPN Klaten
527	BPS Kabupaten Ngada	Satker dengan Nilai IKPA Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025 Kategori PAGU SEDANG	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
528	BPS Kabupaten Ngada	Peringkat I Satker dengan Transaksi CMS Terbanyak Semester I Tahun Anggaran 2025	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				an Negara Tipe A2 Ruteng
529	BPS Kabupaten Konawe Selatan	Satker dengan penggunaan Cash Management System (CMS) Terbaik 3 Periode Semester I TA 2025 Lingkup KPPN Kendari	Juli	KPPN Kendari
530	BPS Kabupaten Sumenep	Penghargaan Satuan Kerja dengan kinerja Transaksi Digipay Terbaik Semester I 2025 KPPN Pamekasan	Juli	KPPN Pamekasan
531	BPS Kabupaten Ngada	Peringkat I Transaksi Digipay Terbesar Semester I Tahun 2025	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
532	BPS Kabupaten Ngada	Peringkat II Transaksi KKP Terbesar Semester I Tahun 2025	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
533	BPS Kabupaten Ngada	Peringkat III Transaksi Digipay Terbanyak Semester I Tahun 2025	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng
534	BPS Kota Sabang	PROAKSI Award 2025 Satker Capaian IKPA Terbaik Semester I Tahun 2025	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh
535	BPS Kota Bontang	Satuan Kerja dengan IKPA dan Dukungan Digitalisasi Terbaik Periode Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Samarinda
536	BPS Kabupaten Boalemo	Juara 1 Digipay	Juli	KPPN Marisa
537	BPS Kabupaten Boalemo	Peringkat 1 Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah	Juli	KPPN Marisa
538	BPS Kabupaten Boalemo	Peringkat 3 Nilai IKPA	Juli	KPPN Marisa
539	BPS Kabupaten Bone Bolango	Peraih Nilai IKPA Sempurna Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 untuk Satker Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	Juli	DJPb
540	BPS Kabupaten Boalemo	Juara 1 Implementasi Digipay Satu	Juli	Kanwil DJPb Gorontalo
541	BPS Kabupaten Bombana	Penghargaan Sebagai Satker dengan Pengelolaan IKPA Pagu Kecil Terbaik	Juli	Kepala KPPN Kendari, Kepala Kanwil

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Periode Semester I TA 2025 Lingkup KPPN Kendari		DJPB Sulawesi Tenggara
542	BPS Kabupaten Seruyan	ATAS PENCAPAIAN NILAI SEMPURNA IKPA KATAGORI PAGU KECIL BOBOT BESAR PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025	Juli	KANWIL DEREKTORAT JENDRAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
543	BPS Provinsi Bali	Peringkat ketiga atas Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2024 Kategori Pagu Sedang	Juli	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
544	BPS Kabupaten Pati	Satker Terbaik 1 IKPA Kategori Satker Besar Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Pati
545	BPS Kabupaten Pati	Satker Terbaik 2 Kategori Penggunaan Cash Managemet System (CMS) Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Pati
546	BPS Kabupaten Bangli	Terbaik 2 Satker dengan jumlah Transaksi Digipay Satu Terbanyak Periode Semester I Tahun 2025	Juli	Kepala KPPN Amlapura
547	BPS Kabupaten Bangli	Satker dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100 Periode Semester I Tahun 2024	Juli	Kepala KPPN Amlapura
548	BPS Kabupaten Konawe	Pengelolaan IKPA Pagu Kecil Terbaik Semester I TA 2025 Lingkup KPPN Kendari	Juli	KPPN Kendari
549	BPS Kabupaten Konawe	Penggunaan CMS Semester I TA 2025 Terbaik 2 Lingkup KPPN Kendari	Juli	KPPN Kendari
550	BPS Kabupaten Bengkayang	Satuan Kerja dengan Persentase Transaksi Penggunaan Cash Management System Terbanyak Pertama Periode Triwulan II Tahun 2025	Juli	KPPN Singkawang
551	BPS Bolaang Mongondow	Terbaik II Satuan Kerja Handal Triwulan II Tahun 2025	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Kotamobagu
552	BPS Bolaang Mongondow	Terbaik II Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Triwulan I Tahun 2025	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Kotamobagu
553	BPS Bolaang Mongondow	Terbaik I Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Triwulan II Tahun 2025	Juli	Kantor Pelayanan

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Perbendaharaan Negara Kota Kotamobagu KPPN Raha
554	BPS Kabupaten Muna	Peringkat Pertama Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Raha dalam Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 kategori Pagu Besar di atas 5 Miliar dengan Nilai IKPA 100	Juli	KPPN Raha
555	BPS Kabupaten Muna	Peringkat Pertama Satuan Kerja Teraktif pada Transaksi Cash Managemen System (CMS) Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raha dengan jumlah transaksi 1187	Juli	KPPN Raha
556	BPS Kabupaten Kerinci	Satker Terbaik Peringkat II atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2025 Satker Pagu Besar Lingkup KPPN Sungai Penuh	Juli	KPPN Sungai Penuh
557	BPS Kabupaten Gorontalo	Penghargaan Terbaik II Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Triwulan II 2025	Juli	DJPB Gorontalo
558	BPS Kabupaten Gorontalo	Penghargaan Peraih Nilai IKPA Sempurna Periode Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu Anggaran Sedang	Juli	DJPB Gorontalo
559	BPS Minahasa Utara	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Kategori SEMPURNA	Juli	KPPN Bitung
560	BPS Minahasa Utara	Satuan Kerja Peringkat III Kategori Jumlah Nominal Transaksi KKP Triwulan II Tahun 2025	Juli	KPPN Bitung
561	BPS Bolaang Mongondow Utara	Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Triwulan I Tahun 2025 "Terbaik I"	Juli	Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulawesi Utara, Kanwil KPPN Kotamobagu
562	BPS Bolaang Mongondow Utara	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Negara (IKPA) Pagu di bawah 10 Miliar Triwulan I 2025 "Terbaik"	Juli	Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulawesi Utara, Kanwil KPPN Kotamobagu
563	BPS Bolaang Mongondow Utara	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Negara (IKPA) Untuk Pagu di bawah Rp10 Miliar Triwulan II Tahun 2025 "Terbaik I"	Juli	Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulawesi Utara, Kanwil

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				KPPN Kotamobagu
564	BPS Bolaang Mongondow Utara	Satuan Kerja Handal Triwulan II Tahun 2025 "Terbaik I"	Juli	Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulawesi Utara, Kanwil KPPN Kotamobagu
565	BPS Kota Cirebon	Piagam Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Terbaik Per. Smt 1 2025	Juli	KPPN Cirebon
566	BPS Bolaang Mongondow Timur	Terbaik I dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Triwulan I Tahun 2025	Juli	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu
567	BPS Bolaang Mongondow Timur	Terbaik I dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Triwulan II Tahun 2025	Juli	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu
568	BPS Bolaang Mongondow Timur	Terbaik I dengan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Triwulan II	Juli	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu
569	BPS Bolaang Mongondow Timur	Terbaik III dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Triwulan II Tahun 2025	Juli	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu
570	BPS Kabupaten Gianyar	Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Sangat Baik Periode Semester I Tahun 2025 dengan Nilai Capaian 100	Juli	KPPN DENPASAR
571	BPS Kota Bitung	PERINGKAT KEDUA SATKER KATEGORI JUMLAH NOMINLA TRANSAKSI KKP	Juli	KPPN BITUNG
572	BPS Kota Bitung	PERINGKAT I SATKER DENGAN KATEGORI TOTAL TRANSAKSI DIGIPAY TERBANYAK TRIWULAN II 2025	Juli	KPPN BITUNG
573	BPS Kota Tomohon	Satuan Kerja yang aktif dalam implementasi DIGIPAY SATU Semester I Tahun 2025	Juli	KPPN Manado
574	BPS Kota Kotamobagu	Terbaik I Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Negara (IKPA) Untuk Pagu Di Bawah Rp10 Miliar	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Tipe A2 Kotamobagu
575	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Nilai Tertinggi LK UAPPAW Periode Tahun 2024 (Unaudited)	Juli	DJPb Provinsi Kalimantan Utara
576	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Nilai Tertinggi LK UAPPAW Periode Tahun 2024 (Audited)	Juli	DJPb Provinsi Kalimantan Utara
577	BPS Kabupaten Bojonegoro	SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN CAPAIAN IKPA BERPREDIKAT SANGAT BAIK SEMESTER I TAHUN 2025	Juli	KPPN Bojonegoro
578	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Peringkat II Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Semester 1 Tahun 2025 Kategori Pagu Sedang	Juli	KPPN Kolaka
579	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Peringkat II Satuan Kerja Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran Terbaik Semester 1 Tahun 2025	Juli	KPPN Kolaka
580	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Peringkat III Satuan Kerja Penggunaan Cash Management System (CMS) Terbaik Semester 1 Tahun 2025	Juli	KPPN Kolaka
581	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Peringkat II Satuan Kerja Penggunaan Digital Payment (Digipay) Satu Terbaik Semester 1 Tahun 2025	Juli	KPPN Kolaka
582	BPS Provinsi Aceh	Peringkat III Koordinator Wilayah dengan Capaian Hasil Lelang Terbesar Kategori Satuan Kerja K/L Lingkup Kanwil DJKN Aceh Semester I Tahun 2025	Juli	Kanwil DJKN Aceh
583	BPS Provinsi Aceh	Peringkat III Korwil dengan Capaian Hasil Lelang Terbesar Kategori Satuan Kerja KL Lingkup Kanwil DJKN Aceh Semester I Tahun 2025	Juli	DJKN Aceh
584	BPS Provinsi Aceh	Peringkat II Koordinator Wilayah dengan Capaian Frekuensi Lelang Terbanyak Kategori Satuan Kerja KL Lingkup Kanwil DJKN Aceh Semester I Tahun 2025	Juli	DJKN Aceh
585	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik II Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025 Kategori K/L dengan 4 - 15 Satker	Juli	Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
586	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik III Implementasi Digital Treasury (Digipay Satu, KKP, dan CMS) Periode Semester I Tahun 2025	Juli	Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
587	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik III Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2024 Kategori UAPPA-W dengan lebih dari 10 Satker	Juli	Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
588	BPS Kota Serang	Pembina Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Serang	Agustus	Sekda Pemerintah Kota Serang
589	BPS Kabupaten Kepulauan Sula	Penghargaan Satker Pengolahan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang	Agustus	KPPN Ternate
590	BPS Kabupaten Tuban	Jumlah transaksi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) BPS KAB. TUBAN (019344) Peringkat I	Agustus	KPPN Tuban
591	BPS Kabupaten Tuban	Satuan kerja terbaik berdasarkan jumlah transaksi menggunakan Digipay BPS KAB. TUBAN (019344) Peringkat I	Agustus	KPPN Tuban
592	BPS Kabupaten Tuban	satuan kerja terbaik berdasarkan jumlah transaksi menggunakan Cash Management System (CMS) BPS KAB. TUBAN (019344) Peringkat I	Agustus	KPPN Tuban
593	BPS Kabupaten Tuban	satuan kerja terbaik dalam penyusunan, penyampaian, dan akurasi data laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran berdasarkan ketepatan waktu dan akurasi data yang disampaikan ke KPPN BPS KAB. TUBAN (019344) Peringkat III	Agustus	KPPN Tuban
594	BPS Kabupaten Tuban	satuan kerja terbaik dalam penyampaian dan akurasi data keuangan Berdasarkan kecepatan waktu terbit surat hasil rekonsiliasi (SHR) pada aplikasi Monsakti BPS KAB. TUBAN (019344) Peringkat III	Agustus	KPPN Tuban
595	BPS Kota Lhokseumawe	TERBAIK KETIGA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN YANG EFEKTIF	Agustus	KPKNL LHOKSEUMA WE
596	BPS Kabupaten Sukabumi	Satuan Kerja Terbaik Dengan Nilai IKPA Sempurna (100) Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	KPPN Sukabumi
597	BPS Kabupaten Sukabumi	Peringkat Pertama Satuan Kerja Terbaik Dengan Jumlah Transaksi CMS Terbanyak Lingkup KPPN Sukabumi Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Sukabumi
598	BPS Kabupaten Sukabumi	Peringkat III Satuan Kerja Terbaik Kategori Transaksi Digipay Terbanyak Lingkup KPPN Sukabumi Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Sukabumi
599	BPS Provinsi Banten	SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	Agustus	PT. CHESNA (Lembaga Sertifikasi ISO)
600	BPS Kab Batu Bara	Peringkat Tiga Transaksi Terbanyak Uang Persediaan Dengan Implementasi KKP Pada Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Semester I 2025	Agustus	KPPN Tanjung Balai
601	BPS Kabupaten Batu Bara	Peringkat Tiga Nominal Terbesar Penggunaan Cash Management System Pada Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Semester I 2025	Agustus	KPPN Tanjung Balai

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
602	BPS Kabupaten Belitung	Terbaik Ketiga Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbanyak Lingkup DJPB Provinsi Bangka Belitung Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	DJPb Provinsi Bangka Belitung
603	BPS Kabupaten Batu Bara	Peringkat Tiga Kinerja Pelaksanaan APBN Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Dengan Pagu Kelolaan Sedang Periode Semester I TA 2025	Agustus	KPPN Tanjung Balai
604	BPS Kabupaten Batu Bara	Peringkat Dua Transaksi Terbanyak Penggunaan Cash Management System Pada Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Semester I 2025	Agustus	KPPN Tanjung Balai
605	BPS Kabupaten Sidoarjo	Juara 1 Satker Dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik (IKPA) Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu 4-8 Miliar	Agustus	Kepala KPPN Sidoarjo
606	BPS Kabupaten Sidoarjo	Juara 1 Satker Dengan Dengan Penyampaian LPJ Tercepat dan Akurat Periode Semester I Tahun 2025 Kategori Penyampaian LPJ Tercepat dan Akurat	Agustus	KPPN Sidoarjo
607	BPS Kabupaten Purbalingga	Nilai Sangat Baik dan Sempurna-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	KPPN Purwokerto
608	BPS Kabupaten Purbalingga	Terbaik 1- Kuasa Pengguna Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	KPPN Purwokerto
609	BPS Kabupaten Purbalingga	Terbaik 1- Laporan Keuangan UAKPA Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	KPPN Purwokerto
610	BPS Kabupaten Purbalingga	Terbaik 2 - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	KPPN Purwokerto
611	BPS Kabupaten Purbalingga	Terbaik 1 - Transaksi Marketplace Pemerintah (Digipay) Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	KPPN Purwokerto
612	BPS Kabupaten Purbalingga	Terbaik III - Akurasi Perencanaan Kas Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	KPPN Purwokerto
613	BPS Kabupaten Tapin	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Semester I Tahun 2025 Kategori Satuan Kerja dengan Pagu > Rp5 M	Agustus	KPPN Barabai
614	BPS Kabupaten Karanganyar	Implementasi Digitalisasi berdasar transaksi melalui Digipay	Agustus	Kepala KPPN Sragen
615	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	1. Satuan Kerja Terbaik Dengan IKPA Sempurna Kategori Pagu Sedang (Rp1 M ≤ pagu < 10 M) Semester 1 Tahun 2025 2. Satuan Kerja Terbaik kategori Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Semester 1 Tahun 2025	Agustus	KPPN Tanjung
616	BPS Kabupaten Karanganyar	Implementasi Digitalisasi berdasarkan KKP	Agustus	Kepala KPPN Sragen
617	BPS Kabupaten Karanganyar	Implementasi Digitalisasi berdasarkan transaksi CMS	Agustus	Kepala KPPN Sragen

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
618	BPS Kabupaten Ponorogo	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA dengan Nilai 100 Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Madiun
619	BPS Kabupaten Katingan	Satker Peringkat II dengan Kinerja Terbaik Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Digital Payment Marketplace Semester I Tahun 2025	Agustus	Kepala KPPN Sampit
620	BPS Kabupaten Katingan	Satker Peringkat III dengan Kinerja Terbaik Implementasi Cash Management System (CMS) Semester I Tahun 2025	Agustus	Kepala KPPN Sampit
621	BPS Kota Pematangsiantar	Satuan Kerja dengan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik di lingkungan Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar kategori jumlah pagu DIPA kelolaan Sedang dengan nilai 100 periode Semester I tahun 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar
622	BPS Kota Pematangsiantar	Peringkat I Pengelolaan Data Capaian Output Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar Kategori Jumlah Rincian Output (RO) Diatas 15 Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	KPPN Pematang Siantar
623	BPS Kota Salatiga	Satuan Kerja Terbaik dalam Capaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA (Capaian 100)	Agustus	KPPN Semarang II
624	BPS Kabupaten Bener Meriah	Juara Umum - Satker Terbaik Pengelolaan APBN Lingkup KPPN Takengon Periode Semeseter I Tahun 2025	Agustus	KPPN Takengon
625	BPS Kabupaten Bener Meriah	Terbaik I - IKPA Dengan Pagu Sedang 1 s.d 5 Milliar Semester I TA 2025	Agustus	KPPN Takengon
626	BPS Kabupaten Bener Meriah	Terbaik I - KKP Transaksi KKP Terbaik Semester I TA 2025	Agustus	KPPN Takengon
627	BPS Kabupaten Bener Meriah	Terbaik II - Transaksi Digipay Terbanyak Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Takengon
628	BPS Kabupaten Bener Meriah	Terbaik III - Transaksi CMS Terbanyak Semester I TA 2025	Agustus	KPPN Takengon
629	BPS Kabupaten Bener Meriah	satuan kerja dengan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggara Terbaik dengan nilai Sempurna (100) periode Triwulan I Tahun 2025	Agustus	KPPN Takengon
630	BPS Provinsi Jambi	Piagam Penghargaan Satker dengan Jumlah Transaksi CMS Terbesar	Agustus	KPPN Jambi
631	BPS Provinsi Jambi	Satker dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu 8M-50M	Agustus	KPPN Jambi
632	BPS Kabupaten Temanggung	Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna (100) untuk Pagu DIPA Rp10 s.d. 100 Miliar Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Magelang
633	BPS Kabupaten Temanggung	Satuan Kerja Terbaik Kedua Penggunaan Digipay Satu dengan Jumlah Transaksi Tertinggi s.d Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Magelang

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
634	BPS Kabupaten Temanggung	Satuan Kerja dengan Nilai Kinerja Pencairan Dana Terbaik kategori Pagu DIPA Rp10 s.d 100 Miliar Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Magelang
635	BPS Kabupaten Musi Rawas	SATKER DENGAN NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SEMPURNA PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025	Agustus	KEPALA KPPN LUBUK LINGGAU
636	BPS Kota Lubuk Linggau	Peringkat I Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Dengan Besaran Pagu Anggaran Sedang	Agustus	KPPN Lubuk Linggau
637	BPS Kota Lubuk Linggau	Peringkat I Satker dengan Indikator Kinerja Pembayaran Digital KKP Terbaik	Agustus	KPPN Lubuk Linggau
638	BPS Kabupaten Musi Rawas	PERINGKAT II NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATKER DENGAN BESARAN PAGU ANGGARAN SEDANG PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025	Agustus	KEPALA KPPN LUBUK LINGGAU
639	BPS Kabupaten Musi Rawas	PERINGKAT II SATKER DENGAN INDIKATOR KINERJA PEMBAYARAN DIGITAL KKP TERBAIK PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025	Agustus	KEPALA KPPN LUBUK LINGGAU
640	BPS Kota Lubuk Linggau	Satker dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna	Agustus	KPPN Lubuk Linggau
641	BPS Kabupaten Kendal	Capaian Transaksi Digipay Satu	Agustus	KPPN Semarang II
642	BPS Kabupaten Wonogiri	Juara 1, Satker dengan Implementasi Digipay Terbaik Semester 1 TA 2025 Kategori Pagu Sedang	Agustus	KPPN Surakarta
643	BPS Provinsi Riau	Terbaik II Kategori Produktivitas Lelang Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024	Agustus	KPKNL Pekanbaru
644	BPS Provinsi Riau	Certificate of Registration ISO 9001:2025 Quality Management Systems(QMS)	Agustus	CBQA Global
645	BPS Kabupaten Wonogiri	Juara 1, Satker dengan Implementasi CMS Terbaik Semester I TA 2025 Kategori Pagu Sedang	Agustus	KPPN Surakarta
646	BPS Kabupaten Wonogiri	Juara 2, Satker Dengan Kecepatan Pemenuhan Kualitas Data Terbit SHR Semester 1 TA 2025 Kategori Pagu Sedang	Agustus	KPPN Surakarta
647	BPS Provinsi Ntt	IKPA Terbaik Semester 1 Tahun 2025 Kategori Pagu Sedang	Agustus	DJPB Provinsi NTT
648	BPS Provinsi Ntt	Peringkat III Penyampaian LPJ Semester 1 Tahun 2025.	Agustus	DJPB Provinsi NTT
649	BPS Kabupaten Magetan	Apresiasi Terbaik Peringkat ke-2 Terhadap Satuan Kerja Dengan Transaksi CMS Terbanyak Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Madiun
650	BPS Kabupaten Magetan	10 Satuan Kerja dengan transaksi Cash Management System (CMS) terbesar	Agustus	KPPN Madiun

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
651	BPS Kabupaten Mukomuko	Peringkat Ketiga IKPA Terbaik Kategori Satker Pagu dengan diatas 3 Milyar Rupiah Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Mukomuko
652	BPS Kabupaten Kupang	Penghargaan Sebagai Satker dengan Capaian Transaksi Digipay Satu Teraktif I Kategori Wilayah KabKupang Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Kupang
653	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Peringkat Pertama (i) Penilaian Pengelolaan Kinerja Terbaik Pengelolaan Uang Di Bendahara Pengeluaran Melalui Cash Management System, Periode Semester I Anggaran 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang
654	BPS Kabupaten Kupang	Penghargaan Sebagai Satker Kategori Pagu Sedang dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	Kppn Kupang
655	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Peringkat Pertama (I) Kategori Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/ Satuan Kerja, Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang
656	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Peringkat Pertama (I) Kategori Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang
657	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Peringkat Pertama (I) Penilaian Pengelolaan Kinerja APBN Dengan Pagu Kececil (1 Milyar s.d Kurang dari 5 Milyar), Periode Semester 1 Tahun Anggran 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang
658	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Peringkat Ketiga (III) Satuan Kerja Kinerja Terbaik, Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang
659	BPS Kabupaten Karo	BENDAHARA TERBAIK Peringkat I	Agustus	KPPN Sidikalang
660	BPS Kabupaten Karo	LPJ BENDAHARA PENGELUARAN Peringkat II	Agustus	KPPN Sidikalang
661	BPS Kabupaten Karo	PENGELOLA UP MELALUI CMS Peringkat II	Agustus	KPPN Sidikalang
662	BPS Kabupaten Karo	PENGELOLA UP MELALUI IMPLEMENTASI KKP Peringkat II	Agustus	KPPN Sidikalang
663	BPS Kabupaten Karo	PENGELOLAAN IKPA Peringkat I	Agustus	KPPN Sidikalang
664	BPS Kabupaten Karo	SATKER TERBAIK_JUARA UMUM Peringkat I	Agustus	KPPN Sidikalang
665	BPS Kabupaten Asahan	Peringkat Dua KPA Inspiratif Satker Mitra KPPN TgBalai Semester I	Agustus	KPPN Tanjung Balai
666	BPS Kabupaten Asahan	Peringkat Dua Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan pada Satker Mitra KPPN Tg Balai Semester I	Agustus	KPPN Tanjung Balai

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
667	BPS Kabupaten Asahan	Peringkat satu Kinerja Pelaksanaan APBN Satker Mitra KPPN TgBalai Pagu Pengelolaan Sedang Semester I	Agustus	KPPN Tanjung Balai
668	BPS Kabupaten Asahan	Peringkat Tiga Transaksi Terbanyak Penggunaan CMS pada Satker Mitra JKPPN Tg Balai Semester I	Agustus	KPPN Tanjung Balai
669	BPS Kabupaten Sumba Timur	Piagam Penghargaan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) S.D Periode Semester 1 TA 2025	Agustus	DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAH ARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
670	BPS Kabupaten Sumba Timur	Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KEPALA KPPN TIPE A1 WAINGAPU
671	BPS Kabupaten Sumba Timur	Kinerja Penggunaan Digipay Terbaik Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KEPALA KPPN TIPE A1 WAINGAPU
672	BPS Provinsi Banten	SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	Agustus	PT. CHESNA (Lembaga Sertifikasi ISO)
673	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) s.d. Periode Semester I TA 2025	Agustus	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
674	BPS Kabupaten Magelang	Satker Terbaik 2 Pengguna KKP dengan Realisasi Tertinggi Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Magelang
675	BPS Kabupaten Magelang	Satker dengan IKPA 100 untuk DIPA 10 sd 100 Miliar Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Magelang
676	BPS Kabupaten Magelang	Kontribusi sebagai Tim Quality Gate pada Kegiatan Verifikasi Data Kemiskinan Tahun 2025	Agustus	Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
677	BPS Kota Subulussalam	Peringkat Ketiga Satuan Kerja Dengan Frekuensi Transaksi Sebanyak 414 Transaksi CMS Lingkup KPPN Tapaktuan	Agustus	KPPN Tapaktuan
678	BPS Kota Subulussalam	Peringkat I dengan Nilai 100 Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester I Tahun 2025 Kategori Satuan Kerja Pagu Sedang (2,5-10 Miliar) Lingkup KPPN Tapaktuan	Agustus	KPPN Tapaktuan

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
679	BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan	Apresiasi Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik 1 Periode Agustus 2025	Agustus	KEPALA KPPN KUPANG
680	BPS Kabupaten Gunungkidul	Terbaik II Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Kategori Pagu DIPA diatas Rp10 Miliar	Agustus	KPPN Wonosari
681	BPS Kabupaten Gunungkidul	Terbaik III Satker Berkinerja Terbaik Implementasi KKP Tahun 2024	Agustus	KPPN Wonosari
682	BPS Kota Semarang	Satuan Kerja Terbaik Kategori Capaian Deviasi Halaman III DIPA (Capaian 100)	Agustus	KPPN Semarang II
683	BPS Kota Semarang	Satuan Kerja Terbaik dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Capaian 100)	Agustus	KPPN Semarang II
684	BPS Kota Semarang	Satuan Kerja Terbaik dalam Capaian Transaksi Digipay Satu	Agustus	KPPN Semarang II
685	BPS Kabupaten Sikka	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 (Sangat Baik) Semester I Tahun 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ende
686	BPS Kabupaten Sikka	Terbaik II Jumlah Transaksi KKP Semester I Tahun 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 ende
687	BPS Kabupaten Sikka	Terbaik I Nilai Transaksi Digipay Semester I Tahun 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ende
688	BPS Kabupaten Sikka	Terbaik I Jumlah Transaksi Digipay Semester I Tahun 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ende
689	BPS Kabupaten Sikka	Terbaik I Jumlah Transaksi CMS Semester I Tahun 2025 (Pagu Sedang)	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ende
690	BPS Kabupaten Sikka	Terbaik I Nilai Transaksi CMS Semester I Tahun 2025 (Pagu Sedang)	Agustus	Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ende
691	BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	Satuan Kerja Dengan Implementasi Cash Management System Terbaik I Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	KPPN Pangkalan Bun
692	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	KINERJA IMPLEMENTASI MARKETPLACE DIGITAL PAYMENT TERBAIK	Agustus	KPPN Sibolga

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		SATUAN KERJA LINGKUP KPPN SIBOLGA PERIODE TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025		
693	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	KINERJA PENERAPAN TRANSAKSI NONTUNAI TERBAIK SATUAN KERJA LINGKUP KPPN SIBOLGA PERIODE TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025	Agustus	KPPN Sibolga
694	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	KINERJA IKPA TERBAIK SATKER LINGKUP KPPN SIBOLGA KATEGORI PAGU SEDANG SEMESTER I TAHUN 2025	Agustus	KPPN Sibolga
695	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	KINERJA IMPLEMENTASI MARKETPLACE DIGITAL PAYMENT TERBAIK SATUAN KERJA LINGKUP KPPN SIBOLGA PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025	Agustus	KPPN Sibolga
696	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	Terbaik I – Jumlah Transaksi dengan Menggunakan Cash Management System (CMS)	Agustus	KPPN Manokwari
697	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	Terbaik II – Nilai IKPA Semester – I Tahun 2025	Agustus	KPPN Manokwari
698	BPS Kabupaten Rokan Hilir	Satker dengan nilai IKPA triwulan II TA 2025 tertinggi (100)	Agustus	Kepala KPPN Dumai
699	BPS Provinsi Jawa Tengah	Unit Terbaik laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2024 Kategori Jumlah Satker 30-49	Agustus	Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah
700	BPS Provinsi Kalimantan Barat	Satker Terbaik Kedua atas Ketepatan Waktu dalam Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Semester I Tahun 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak
701	BPS Provinsi Kalimantan Barat	Satker Terbaik Pertama dalam Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Digipay Semester I Tahun 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak
702	BPS Provinsi Maluku	Kinerja Pelaksana Anggaran Terbaik Kategori Pagu Kecil	Agustus	Kanwil DjPb Provinsi Maluku
703	BPS Provinsi Maluku	Koordinator Wilayah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik	Agustus	Kanwil DjPb Provinsi Maluku

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
704	BPS Kabupaten Nunukan	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Kategori Pagu Sedang Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN NUNUKAN
705	BPS Kabupaten Nunukan	Satuan Kerja dengan Jumlah Transaksi CMS Terbesar Semester I Tahun 2025	Agustus	KKPN NUNUKAN
706	BPS Kabupaten Luwu Timur	Piagam Penghargaan Pelaksanaan Anggaran Nilai 100	Agustus	KPPN Palopo
707	BPS Kabupaten Luwu Timur	Piagam Penghargaan Terbaik I Cash Management System	Agustus	KPPN Palopo
708	BPS Kabupaten Luwu Timur	Piagam Penghargaan Terbaik II Kartu Kredit Pemerintah	Agustus	KPPN Palopo
709	BPS Kabupaten Luwu Timur	Piagam Penghargaan Terbaik III Digipay Satu Semester I	Agustus	KPPN Palopo
710	BPS Kabupaten Cilacap	Peringkat Kedua Satuan Kerja Terbaik Kategori Nilai Transaksi Menggunakan Digipay Satu Semester I Tahun 2025	Agustus	Kementerian Keuangan
711	BPS Kabupaten Cilacap	Peringkat Kedua Satuan Kerja Terbaik Kategori Jumlah Transaksi Menggunakan Digipay Satu Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Cilacap
712	BPS Kabupaten Cilacap	Peringkat Ketiga Satuan Kerja Terbaik Kategori Jumlah Transaksi Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Cilacap
713	BPS Kabupaten Cilacap	Peringkat Kedua Satuan Kerja Terbaik Kategori Penyampaian LK Tingkat UAKPA Tahun 2024 Satker Pagu Sedang	Agustus	KPPN Cilacap
714	BPS Kabupaten Lahat	Nilai IKPA Sangat Baik Semester 1 2025	Agustus	KPPN Lahat
715	BPS Kabupaten Lahat	Terbaik Pertama CMS periode sd Juli 2025 dari KPPN Lahat	Agustus	KPPN Lahat
716	BPS Kabupaten Lahat	Pembina Desa Cantik 2025	Agustus	Bupati Lahat
717	BPS Gianyar	Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Sangat Baik Periode Semester I Tahun 2025 dengan Nilai Capaian 100	Agustus	KPPN Denpasar
718	BPS Kota Kupang	Piagam Penghargaan sebagai bendahara terbaik semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Kupang
719	BPS Kota Kupang	Piagam penghargaan pencapaian Nilai IKPA Terbaik Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Kupang
720	BPS Kota Kupang	Satker dengan Kinerja Penyampaian Gaji Induk Terbaik I periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Kupang
721	BPS Kota Kupang	Satker dengan Capaian Peringkat III Penyampaian LPJ Bendahara Tercepat periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Kupang
722	BPS Kabupaten Gowa	Juara Lomba 17 Agustus Tingkat Forkopimda Kabupaten Gowa	Agustus	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
723	BPS Kota Magelang	Satuan Kinerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna	Agustus	Kepala KPPN Magelang

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(100) untuk Pagu DIPA Rp2 sd 10 Miliar Periode Semester 1 Tahun 2025		
724	BPS Kota Magelang	Satuan Kerja Terbaik Pertama Pengguna Digipay Satu dengan Jumlah Transaksi Tertinggi sd Semester 1 Tahun 2025	Agustus	Kepala KPPN Magelang
725	BPS Kota Magelang	Satuan Kerja Terbaik Pertama Pengguna Kartu Kredit Pemerintah dengan Realisasi Tertinggi Periode Semester 1 Tahun 2025	Agustus	Kepala KPPN Magelang
726	BPS Kabupaten Brebes	Kategori IKPA dengan Nilai 100 Periode Semester I TA 2025	Agustus	KPPN Tegal
727	BPS Kabupaten Brebes	Peringkat Kedua Kategori Satker dengan Nilai IKPA Terbaik untuk Pagu Besar Periode Semester I TA 2025	Agustus	KPPN Tegal
728	BPS Kabupaten Brebes	Peringkat Ketiga Kategori Bendahara Pengeluaran Terbaik Periode Semester I TA 2025	Agustus	KPPN Tegal
729	BPS Kabupaten Brebes	Peringkat Ketiga Kategori Satker dengan Capaian Transaksi KKP Tertinggi Periode Semester I TA 2025	Agustus	KPPN Tegal
730	BPS Kabupaten Brebes	Peringkat Ketiga Kategori Satker Pengguna CMS Teraktif Periode Semester I TA 2025	Agustus	KPPN Tegal
731	BPS Kabupaten Brebes	Peringkat Pertama Kategori Satker dengan Transaksi Digipay Satu Teraktif Periode Semester I TA 2025	Agustus	KPPN Tegal
732	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	Satker Peringkat II dengan Kinerja Terbaik Implementasi Cash Management System (CMS) Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Sampit
733	BPS Kabupaten Sleman	Piagam Penghargaan Peringkat III, Satuan Kerja Terbaik Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Semester I TA 2025	Agustus	KPPN Yogyakarta
734	BPS Kabupaten Sleman	Piagam Penghargaan Satuan Kerja Berpredikat Sangat Baik Dalam Capaian IKPA Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Yogyakarta
735	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	IKPA Sempurna Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	KPPN Sampit
736	BPS Kabupaten Lamandau	Satuan Kerja dengan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Terbaik III Kategori Pagu Besar Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Pangkalan Bun
737	BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Satuan Kerja Berpredikat Sangat Baik dalam Capaian IKPA Nilai Sempurna (100) Periode Semester I Tahun 2025 Lingkup KPPN Yogyakarta	Agustus	KPPN Yogyakarta
738	BPS Kabupaten Garut	1. Sertifikat Peringkat Pertama penilaian LPJ Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 2. Sertifikat Peringkat Pertama Penilaian	Agustus	KPPN Garut

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Rekonsiliasi Tahun 2024 3. Sertifikat Penilaian IKPA 100 Persen Semester I 2025 (Agustus dari KPPN Garut) 4. Sertifikat Peringkat Pertama KKP Kinerja Terbaik Semester I Tahun 2025 (Agustus dari KPPN Garut) 5. Sertifikat Peringkat Ketiga Rekonsiliasi Keuangan Semester I Tahun 2025 (Agustus dari KPPN Garut) 6. Sertifikat Peringkat Pertama KKP Transaksi Terbesar (Agustus dari KPPN Garut) 7. Sertifikat Peringkat Pertama Penilaian Laporan Keuangan Tahun 2024 (Agustus dari KPPN Garut) 8. Sertifikat Peringkat Pertama Penilaian LPJ Semester I Tahun 2025 (Agustus dari KPPN Garut)		
739	BPS Kabupaten Bantul	Satker Berpredikat Sangat Baik dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai Sempurna (100) Periode Semester I Tahun 2025 Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta	Agustus	KPPN Yogyakarta
740	BPS Kabupaten Bantul	Peringkat 1 satker terbaik dalam Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Periode Semester 1 Tahun 2025 Kategori Digipay Satu Lkingkup KPPN Yogyakarta	Agustus	KPPN Yogyakarta
741	BPS Kabupaten Magetan	Apresiasi Terbaik Peringkat Ke 2 Terhadap Satuan Kerja Dengan Transaksi CMS Terbanyak Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	Kepala KPPN Madiun
742	BPS Kota Gunungsitoli	1. Peringkat 3 Satuan Kerja dengan Jumlah Transaksi Digipay Terbanyak Semester I Tahun 2025; 2. Peringkat 3 Satuan Kerja dengan Jumlah Transaksi Digipay Terbanyak Tahun 2024; 3. Peringkat 2 Satuan Kerja Mitra KPPN Gunungsitoli dengan Kinerja Terbaik Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	1. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara; 2. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara; 3. Kepala KPPN Kota Gunungsitoli
743	BPS Kota Malang	Penghargaan Sebagai Institusi Terbuka, Informatif dalam Pelayanan Data dan Literasi Statistik	Agustus	Kepala LPP RRI Malang
744	BPS Kota Malang	Penghargaan Sebagai Narasumber Terkooperatif dalam Penyampaian Data Statistik Tahun 2025	Agustus	Kepala LPP RRI Malang

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
745	BPS Kota Malang	Penghargaan Stakeholder yang Berperan Serta Aktif Dalam Pengendalian Inflasi Daerah Kota Malang	Agustus	Walikota Malang
746	BPS Kota Malang	Penghargaan Sebagai Mitra Strategis dalam Dukungan Data Penguatan Peran KPPN Malang Sebagai Financial Advisor Malang Raya Tahun 2025	Agustus	Kepala KPPN Malang
747	BPS Kota Malang	Penghargaan Atas Dukungan dalam Penyediaan Data Asesmen Perekonomian Melalui Inovasi Aplikasi MboiStatS+	Agustus	Kepala Perwakilan BI Malang
748	BPS Kota Malang	Penghargaan Mitra Terbaik Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Semester Genap Tahun 2024/2025 Kategori Mitra MBKM	Agustus	Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas FEB Universitas Brawijaya
749	BPS Kota Surabaya	Penghargaan Atas Dukungan, Komitmen dan Kerjasama dalam Strategi Penguatan Data Ekonomi Kota Surabaya	Agustus	Walikota Surabaya
750	BPS Kota Surabaya	Penghargaan Atas Kerjasama dan Kemitraan dalam Mendukung Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kota Surabaya	Agustus	Walikota Surabaya
751	BPS Kabupaten Muara Enim	Terbaik Pertama Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Teraktif Periode s.d Juli TA 2025 dengan Jumlah 38 Transaksi	Agustus	KPPN Lahat
752	BPS Kabupaten Banyumas	Laporan Keuangan UAKPA Semester I Tahun Anggaran 2025 - Terbaik II	Agustus	KPPN Purwokerto
753	BPS Kabupaten Banyumas	IKPA Semester I Tahun Anggaran 2025 - Sangat Baik	Agustus	KPPN Purwokerto
754	BPS Kabupaten Banyumas	Bendahara Pengeluaran Semester I Tahun Anggaran 2025 - Terbaik I	Agustus	KPPN Purwokerto
755	BPS Kabupaten Ponorogo	Peringkat Ke 1 Satuan Kerja Dengan Transaksi CMS Terbanyak Periode Semester I Tahun 2025	Agustus	KPPN Madiun
756	BPS Kabupaten Ngada	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) s.d Periode Semester I TA 2025	Agustus	Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur
757	BPS Kabupaten Ngada	Terbaik 3 Satker Pengguna CMS dengan Transaksi Tertinggi Semester I 2025	Agustus	Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur
758	BPS Kota Baubau	Eksternal - Satker Terbaik ke 3 Pelaksanaan Anggaran Triwulan II 2025	Agustus	KPPN Baubau
759	BPS Kabupaten Pemalang	IKPA dengan Nilai 100 Periode Semester I TA 2025	Agustus	KPPN Tegal
760	BPS Kabupaten Jember	Piagam Penghargaan Peringkat 2 Satker dgn Kinerja Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Periode Semester 1 2025 kategori Satker pagu Sedang (5-20 Milyar)	Agustus	KPPN Jember

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
761	BPS Kabupaten Jember	Piagam Penghargaan Peringkat 3 Satker dengan Nilai IKPA Terbaik Semester 1 2025 Kategori Pagu sangat besar (>15,5 M)	Agustus	KPPN Jember
762	BPS Kabupaten Kendal	Capaian Transaksi Digipay Satu	Agustus	KPPN Semarang II
763	BPS Kabupaten Kendal	Satuan Kerja Terbaik dalam Capaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA	Agustus	KPPN Semarang II
764	BPS Kabupaten Buleleng	Peringkat IV Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja Dengan Predikat Best Performance Kategori Pagu DIPA Kelolaan Sedang Semester 1 Tahun 2025	Agustus	KPPN Singaraja
765	BPS Kepulauan Sangihe	Terbaik I (Nilai 100) IKPA Semester I 2025 Kategori Satker dengan Pagu Sedang	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahuna
766	BPS Kepulauan Sangihe	Terbaik III LPJ Bendahara Pengeluaran Semester I 2025	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahuna
767	BPS Kabupaten Sukoharjo	Juara 3 Satker dengan Implementasi Digipay Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	KPPN Surakarta
768	BPS Kabupaten Sukoharjo	Juara 2 Satker dengan Implementasi CMS Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025	Agustus	KPPN Surakarta
769	BPS Kota Tanjung Balai	PERINGKAT 2 TRANSAKSI TERBANYAK PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN MELALUI SISTEM DIGITAL PAYMENT - MARKETPLACE_KPPN TANJUNG BALAI Semester 1 2025	Agustus	KPPN TANJUNG BALAI
770	BPS Kota Tanjung Balai	PERINGKAT 3 BENDAHARA TELADAN_KPPN TANJUNG BALAI Semester 1 2025	Agustus	KPPN TANJUNG BALAI
771	BPS Kota Tanjung Balai	PERINGKAT 1 KUALITAS PENYUSUNAN LPJ BENDAHARA PENGELUARAN_KPPN TANJUNG BALAI Semester 1 2025	Agustus	KPPN TANJUNG BALAI
772	BPS Kota Tanjung Balai	PERINGKAT 1 KINERJA PELAKSANAAN APBN SATKER DENGAN PAGU KELOLAAN KECIL_KPPN TANJUNG BALAI Semester 1 2025.jpg	Agustus	KPPN TANJUNG BALAI
773	BPS Kabupaten Buton	Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2025 (IKPA dan Digitalisasi Pembayaran) Kategori Pagu Sedang	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bau-Bau
774	BPS Kabupaten Muna	Juara Harapan III pada Lomba Jalan Santai Beregu antar OPD, Instansi Vertikal se Kabupaten Muna Tahun 2025 dalam	Agustus	Bupati Muna

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		rangka memperingati hari ulang tahun ke-66 Kabupaten Muna dan Hari Ulang tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia		
775	BPS Kabupaten Buton	Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2025 (IKPA dan Digitalisasi Pembayaran) Kategori Pagu Sedang	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bau-Bau
776	BPS Kabupaten Sorong	Mitra Strategis Terbaik dalam Program Pengendalian Inflasi sehingga mengantarkan Kabupaten Sorong menjadi daerah dengan Inflasi Terendah Se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Tahun 2024	Agustus	Bupati Sorong
777	BPS Kabupaten Sorong	Mitra Strategis Pembangunan Terinovatif atas Inisiasi Program TUGU MERAH (Satu Sinergi Untuk Membangun Daerah) dalam rangka Optimalisasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Statistik Sektorial Berkualitas Menuju Satu Data Kabupaten Sorong TAHUN 2025	Agustus	Bupati Sorong
778	BPS Kabupaten Tabanan	Tercapainya Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Sangat Baik Periode Semester I Tahun 2025 dengan Nilai Capaian 100	Agustus	KPPN Denpasar
779	BPS Provinsi Kalimantan Timur	SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	Agustus	MUTU INTERNASIONAL
780	BPS Kabupaten Sumbawa Barat	Terbaik I Digitalisasi Pembayaran Kategori Pagu Besar Semester I	Agustus	KPPN Sumbawa Besar
781	BPS Kabupaten Sumbawa Barat	Terbaik III Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kategori Pagu Besar Semester I	Agustus	KPPN Sumbawa Besar
782	BPS Kabupaten Gunungkidul	Terbaik III Satker Berkinerja Terbaik Implementasi Cash Management System Tahun 2024	Agustus	KPPN Wonosari
783	BPS Kabupaten Gunungkidul	Terbaik III Satker Berkinerja Terbaik dalam Implementasi Digipay Tahun 2024	Agustus	KPPN Wonosari
784	BPS Kabupaten Paser	Terbaik ke 3 sebagai Badan Publik INFORMATIF	September	Komis Informasi Provinsi Kalimantan Timur
785	BPS Kabupaten Barru	Satker dengan Jumlah Transaksi Digipay Terbanyak Semester I 2025 (Terbaik V), Satker dengan Jumlah Transaksi CMS Terbanyak Semester I 2025 (Terbaik III), dan Satker dengan Nilai IKPA Tertinggi (Kategori Pagu Sedang) Semester I 2025 (Terbaik II)	September	KPPN Parepare

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
786	BPS Kabupaten Cianjur	Peringkat I Satker Penyelesaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik Semester I Tahun 2025	September	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi
787	BPS Kabupaten Penajam Paser Utara	Keterbukaan Informasi Publik terbaik 1 sebagai badan Publik INFORMATIF	September	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
788	BPS Kabupaten Penajam Paser Utara	Keterbukaan Informasi Publik terbaik 1 sebagai Badan Publik INFORMATIF tahun 2025	September	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan timur
789	BPS Kabupaten Belitung	Kinerja Terbaik Penggunaan Digitalisasi Pembayaran Triwulan III Tahun 2025	September	KPPN Tanjung Pandan
790	BPS Kabupaten Grobogan	Unit Kerja Dengan Kinerja Sangat Baik dalam C	September	Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov Jawa Tengah
791	BPS Kabupaten Belitung	Satker Capaian IKPA Terbaik Triwulan III Tahun 2025	September	KPPN Tanjung Pandan
792	BPS Kabupaten Kepulauan Aru	Peringkat 1 Satker Kategori Implementasi Digipay Semester II Terbaik TA 2024	September	KPPN Tual
793	BPS Kabupaten Kepulauan Aru	Peringkat 2 Satker Kategori Implementasi CMS Semester II Terbaik TA 2024	September	KPPN Tual
794	BPS Kabupaten Kepulauan Aru	Peringkat 3 Satker Dengan Penilaian IKPA Semester I Terbaik TA 2025	September	KPPN Tual
795	BPS Kabupaten Kepulauan Aru	Peringkat 2 Bendahara Teladan Periode Semester II TA 2024 Tingkat Kuasa BUN KPPN TUAL	September	KPPN Tual
796	BPS Kabupaten Purbalingga	Nilai Terbaik IKPA Semester 1 Tahun Anggaran 2025	September	Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah
797	BPS Kabupaten Kudus	Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik IKPA 100 Smstr 1 Tahun 2025	September	DJPB Prov Jawa Tengah
798	BPS Kabupaten Kapuas	Kategori Satuan Kerja dengan pagu Besar (>=5 M dan Bobit > 80%) Nilai IKPA SEMPURNA (100)	September	KPPN Palangkaraya
799	BPS Kabupaten Aceh Barat	1. Penghargaan Sebagai Satuan Kerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna Semester 1 Tahun 2025. 2. Penghargaan Sebagai Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan Terbaik I Semester 1 Tahun 2025.	September	KPPN Meulaboh

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
800	BPS Kabupaten Berau	Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	September	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
801	BPS Kabupaten Bangkalan	Peringkat I Penilaian Satuan Kerja Dengan Kinerja Pengelolaan Rekening K/L Terbaik Semester I tahun 2025 Linkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pamekasan	September	KPPN Pamekasan
802	BPS Kabupaten Bangkalan	Peringkat II Penilaian Satuan Kerja Dengan Kinerja Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Kategori Jumlah Transaksi Terbanyak Semester I Tahun 2025	September	KPPN Pamekasan
803	BPS Kota Salatiga	Unit Kerja Sangat Baik dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025	September	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah
804	BPS Kabupaten Banjarnegara	Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025	September	DJPb Provinsi Jawa Tengah
805	BPS Kabupaten Semarang	Unit dengan Kinerja Sangat Baik dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025	September	DJPb Provinsi Jawa Tengah
806	BPS Kabupaten Pulau Morotai	Penghargaan atas Capaian Implementasi Belanja Digipay Tertinggi 2 Lingkup Provinsi Maluku Utara Khusus Periode Bulan Agustus Triwulan III Tahun 2025	September	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
807	BPS Kabupaten Temanggung	Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran Terbaik dengan nilai IKPA 100	September	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
808	BPS Provinsi Sumatera Utara	1. Peringkat I Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kategori Besar 2. Peringkat I Nilai IKPA Tertinggi Semester I Tahun 2025 Tingkat UAPPA-W Dengan pagu Sedang 3. Peringkat I Nilai IKPA Tertinggi Tahun 2024 Tingkat UAPPA-W Dengan Pagu Sedang	September	DJPb Sumatera Utara
809	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terbaik Tiga Pengelolaan Barang Milik Negara kategori Pemindahtanganan	September	KPKNL Pangkalpinang
810	BPS Kabupaten Tulang Bawang	Penghargaan atas peran aktif dalam implementasi digitalisasi platfoam pembayaran pemerintah pengguna aplikasi digipay dan	September	KPPN Kotabumi

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
811	BPS Kabupaten Tulang Bawang	Penghargaan atas peran aktif dalam implementasi digitalisasi platform pembayaran pemerintah pengguna KKP	September	KPPN Kotabumi
812	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015	September	Kepala LSSM BSPJI
813	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	TERBAIK PERTAMA IKPA PAGU SEDANG (PAGU DIPA 1 MILIAR S.D. 8 MILIAR) SEMESTER 1 TAHUN 2025	September	KPPN Rengat
814	BPS Kabupaten Kupang	Sertifikat partisipasi dalam Kegiatan Unwira Career Expo Periode II Tahun 2025	September	Rektor Unwira
815	BPS Kabupaten Barru	Satker dengan Jumlah/frekuensi Transaksi Digipay Terbanyak Periode Semester I TA 2025	September	KPPN Parepare
816	BPS Kabupaten Barru	Satker dengan Jumlah/Frekuensi Transaksi Melalui CMS Terbanyak dengan jumlah pagu DIPA sedang Periode Semester I TA 2025	September	KPPN Parepare
817	BPS Kabupaten Barru	Satker dengan nilai IKPA Tertinggi dengan Jumlah Pagu DIPA Sedang Periode Semester I 2025 Terbaik Kedua	September	KPPN Parepare
818	BPS Kabupaten Lampung Utara	peran aktif dalam Implementasi Digitalisasi Platform Pembayaran Pemerintah Pengguna Aplikasi Digipay	September	KPPN Kotabumi
819	BPS Kabupaten Lampung Utara	Instansi dengan Pelayanan Statistik Terbaik	September	Diskominfotik Kabupaten Lampung Utara
820	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2025	September	BPS Provinsi Sumatera Selatan
821	BPS Kabupaten Sragen	Sebagai Unit dengan kinerja sangat baik dalam capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran semester I Tahun 2025	September	Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Tengah
822	BPS Kabupaten Sragen	Atas penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tingkat satuan kerja mitra KPPN Sragen semester I Tahun 2025	September	KPPN Sragen
823	BPS Kabupaten Pelalawan	Penghargaan Sebagai Pemateri Kepadatan Penduduk Kabupaten Pelalawan berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	September	SMAN Bernas Binsus Provinsi Riau
824	BPS Kota Semarang	Kinerja Terbaik dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025	September	DJPB Provinsi Jawa Tengah
825	BPS Kabupaten Indragiri Hilir	Terbaik 2 Belanja dengan Cash Management System (CMS) Semester I Tahun 2025	September	KPPN Rengat
826	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	Peringkat VIII – Jumlah Transaksi Digipay Semester I	September	KPPN Manokwari

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
827	BPS Kota Jambi	Satker dengan Jumlah Transaksi KKP Terbesar (99 Transaksi)	September	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
828	BPS Provinsi Bengkulu	Penghargaan atas Dedikasi dan peran aktif sebagai Pembina Data Statistik Sektoral dari Pemerintah Provinsi Bengkulu	September	Pemerintah Provinsi Bengkulu
829	BPS Kabupaten Way Kanan	Peran aktif dalam Implementasi Digitalisasi Platform Pembayaran Pemerintah Pengguna Aplikasi Digipay Semester 1 Tahun 2025	September	KPPN Kotabumi
830	BPS Kabupaten Way Kanan	Peran aktif dalam Implementasi Digitalisasi Platform Pembayaran Pemerintah Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Semester 1 Tahun 2025	September	KPPN Kotabumi
831	BPS Kabupaten Lebong	Terbaik 2 Nilai IKPA Pagu Sedang (Rp5M s.d Rp20M) Periode Semester 1 Tahun 2025	September	KPPN Curup
832	BPS Kabupaten Lebong	Terbaik 1 Digitalisasi Pengelolaan Keuangan CMS Periode Semester 1 Tahun 2025	September	KPPN Curup
833	BPS Kabupaten Rejang Lebong	Terbaik 2 Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Kategori CMS Periode Semester 1 Tahun 2025	September	KPPN Curup
834	BPS Kabupaten Kudus	Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik IKPA 100 Smstr 1 Tahun 2025	September	DJPB Provinsi Jawa Tengah
835	BPS Kabupaten Nagan Raya	Satuan Kerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna Semester I 2025	September	KPPN Meulaboh
836	BPS Kota Tasikmalaya	- Satker Terbaik Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 Kategori Pagu DIPA 0 s.d. 12 Milliar	September	KPPN TASIKMALAYA
837	BPS Kabupaten Brebes	Unit dengan Kinerja Terbaik dalam Capaian IKPA Semester I Tahun 2025	September	DJPB Provinsi Jawa Tengah
838	BPS Kabupaten Magelang	Kinerja Terbaik dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025	September	Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
839	BPS Kota Tegal	1. Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Semester I predikat Sangat Baik 2. Satker Dengan Katagori Terbaik 3 dalam penyampaina Gaji Induk Semester I	September	Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
840	BPS Provinsi Kalimantan Timur	Terbaik I Kategori Vertikal Provinsi Se-Kalimantan Timur sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2025	September	Komisi Informasi Provinsi

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Kalimantan Timur
841	BPS Kota Samarinda	Terbaik I Kategori Vertikal Kabupaten/kota Se-Kalimantan Timur Sebagai Badan Publik INFORMATIF dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	September	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
842	BPS Kabupaten Kebumen	Piagam Penghargaan sebagai Unit dengan Kinerja terbaik dalam Capaian IKPA Semester I Tahun 2025	September	DJPB Provinsi Jawa Tengah
843	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	Sertifikasi ISO 9001:2015 BPS Sulawesi Selatan	September	The British Standards Institution (BSI) Indonesia
844	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Terbaik Lingkup Wilayah Kerja KPPN Makassar II Periode Semester I Tahun 2025	September	KPPN Makassar II
845	BPS Kabupaten Kutai Barat	Badan Publik Informatif Kategori Vertikal Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur	September	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
846	BPS Kabupaten Indragiri Hulu	Peringkat 1 Kategori Capaian IKPA Pagu Sedang Semester 1 Tahun 2025	September	KPPN Rengat
847	BPS Kabupaten Indragiri Hulu	Peringkat 2 Kategori Capaian atas Belanja dengan Digipay Semester 1 Tahun 2025	September	KPPN Rengat
848	BPS Kabupaten Indragiri Hulu	Peringkat 1 Kategori Capaian atas Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Semester 1 Tahun 2025	September	KPPN Rengat
849	BPS Kota Balikpapan	Terbaik I Keterbukaan Informasi	September	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
850	BPS Kota Balikpapan	Terbaik I Keterbukaan Informasi	September	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
851	BPS Kota Balikpapan	Terbaik I Keterbukaan Informasi	September	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
852	BPS Kota Balikpapan	Terbaik I Keterbukaan Informasi	September	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
853	BPS Kota Bontang	Terbaik I Kategori Vertikal Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Sebagai Badan Publik "INFORMATIF"	September	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
854	BPS Kota Bontang	Satuan Kerja yang melaksanakan Implementasi KMK 375 Tahun 2024 Tentang Nilai Taksiran Kendaraan Bermotor Terbaik se-Kota Bontang	September	KPKNL Bontang
855	BPS Kabupaten Landak	Peringkat II Nilai IKPA Kategori Pagu Sedang Periode Semester I Tahun 2025	September	KPPN Sanggau
856	BPS Kabupaten Pemalang	Unit dengan Kinerja Terbaik dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025	September	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah
857	BPS Kabupaten Kendal	Unit dengan Kinerja Sangat Baik dalam Capaian IKPA Semester I Tahun 2025	September	DJPb Provinsi Jawa Tengah
858	BPS Kota Semarang	Kinerja Terbaik dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025	September	DJPB Provinsi Jawa Tengah
859	BPS Kota Dumai	Terbaik 2 Operator Barang Milik Negara Terbaik	September	KPKNL Dumai
860	BPS Kota Dumai	Tertinggi 3 Pokok Lelang Wajib Noneksekusi Tertinggi	September	KPKNL Dumai
861	BPS Kota Dumai	Tertinggi 1 PNBPN Pengelolaan Barang Milik Negara Tertinggi	September	KPKNL Dumai
862	BPS Provinsi Jawa Barat	BPS Provinsi Jawa Barat telah menetapkan dan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu untuk ruang lingkup Pelayanan Statistik Terpadu	September	Sertifikasi PT. CHESNA
863	BPS Kota Pekalongan	Unit Dengan Kinerja Sangat Baik dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025 Kategori Sangat Baik	September	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
864	BPS Kabupaten Jepara	1. EKSTERNAL - KPPN KUDUS - 30 SEPTEMBER 2025 - SATKER TERBAIK PENGGUNA CASH MANAGEMENT SYSTEM TAHUN 2025	September	KPPN Kudus
865	BPS Kabupaten Konawe Utara	Pencapaian Gerakan Zero Retur SP2D Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	September	KPPN Kendari
866	BPS Kabupaten Enrekang	Satker dengan Nilai IKPA Tertinggi dengan Jumlah Pagu DIPA Kecil Periode Semester I TA 2025 Terbaik Pertama	September	KPPN Pare-Pare
867	BPS Kabupaten Enrekang	Satker dengan Jumlah/Frekuensi Transaksi melalui CMS Terbanyak dengan Jumlah Pagu DIPA Kecil Periode Semester I TA 2025 Terbaik Pertama	September	KPPN Pare-Pare

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
868	BPS Kabupaten Kolaka Utara	Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Sangat Baik Periode Semester I Tahun 2025 Dengan Nilai Capaian 100	September	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
869	BPS Provinsi Kalimantan Utara	ISO 9001:2015 PST BPS Provinsi Kalimantan Utara	September	Mutuagung Lestari
870	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Capaian IKPA 100 Periode Semester I Tahun 2025	September	KPPN Tanjung Selor
871	BPS Kabupaten Batang	Unit Kerja dengan Kinerja Sangat Baik dalam capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I 2025	September	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
872	BPS Kota Kendari	Satker dengan Nilai IKPA 100 Semester 1 2025 Lingkup DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara	September	Dirjen Perbandaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
873	BPS Provinsi Papua Barat	SNI ISO 9001:2015 Quality Management System	September	PT. TSI SERTIFIKASI INTERNASIONAL
874	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Sangat Baik Periode Semester 1 Tahun 2025 dengan Nilai Capaian 100	September	Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
875	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015	September	Kepala LSSM BSPJI Banjarbaru
876	BPS Kota Balikpapan	Peringkat terbaik 1 untuk ketegori satuan vertikal yang informatif	Oktober	Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur
877	BPS Kabupaten Kaur	Peringkat I Pengguna CMS Terbaik Periode s.d Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Manna
878	BPS Kabupaten Kaur	Peringkat III Pengguna KKP Terbaik Jumlah Transaksi Periode s.d Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Manna
879	BPS Kota Ternate	CMS Terbaik	Oktober	KPPN
880	BPS Kabupaten Bangka Tengah	Nilai IKPA 100 Periode Semester I Tahun 2025	Oktober	KPPN Pangkalpinang
881	BPS Kabupaten Lamongan	Satuan kerja dengan capaian IKPA berpredikat sangat baik Triwulan III tahun 2025	Oktober	KPPN BOJONEGORO
882	BPS Kabupaten Tuban	Peringkat I Satuan Kerja Terbaik dalam Penyusunan , Penyampaian dan Akurasi Data Laporan Pertanggungjawaban	Oktober	KPPN Tuban

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Bendahara Pengeluaran Lingkup KPPN Tuban		
883	BPS Kabupaten Tuban	Peringkat III Ketepatan waktu Pengajuan Gaji Induk Bulanan Semester II Tahun 2025	Oktober	KPPN Tuban
884	BPS Kota Sorong	PERINGKAT PERTAMA NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA KATEGORI PAGU SEDANG RP3 MILIAR PERIODE TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN NILAI IKPA 99,99	Oktober	KPPN SORONG
885	BPS Kabupaten Bandung Barat	Pengguna Cash Management System (CMS) Terbaik Peringkat II	Oktober	KPPN Bandung II
886	BPS Kabupaten Pidie Jaya	Satker Capaian IKPA Terbaik Triwulan III Tahun 2025 dengan nilai 100	Oktober	KPPN Banda Aceh
887	BPS Kabupaten Nabire	1. Penghargaan Terbaik ke-3 Kategori Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) 2. Penghargaan Terbaik ke-1 Kategori Penilaian Satuan Kerja yang memiliki Pejabat Perbendaharaan Telah Tersertifikat PNT, SNT, BPG (1005) serta Memiliki Jabatan Fungsional PK/APK APBN	Oktober	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Nabire
888	BPS Kabupaten Kapuas	Atas Pencapaian Nilai Sempurna IKPA Kategori Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Oktober	Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah
889	BPS Kabupaten Kapuas	Atas Pencapaian Nilai Sempurna IKPA Kategori Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Oktober	Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah
890	BPS Kota Banda Aceh	Satker Capaian IKPA Sempurna (100) Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPP Banda Aceh
891	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Periode Semester I Tahun 2025 kategori Pagu DIPA di atas 10 Miliar Rupiah	Oktober	KPPN Pangkalpinang
892	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terbaik Tiga Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Periode Semester I tahun 2025	Oktober	KPPN Pangkalpinang
893	BPS Kabupaten Tebo	Peringkat V untuk kategori Nilai IKPA Terbaik pagu 3 s.d. 8 Miliar periode Triwulan III tahun 2025 lingkup KPPN Muara Bungo	Oktober	Kepala KPPN Muara Bungo
894	BPS Kabupaten Tebo	Peringkat I untuk kategori Digitalisasi Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) periode Triwulan III Tahun 2025 lingkup KPPN Muara Bungo	Oktober	Kepala KPPN Muara Bungo
895	BPS Kabupaten Tebo	Peringkat II untuk kategori Digitalisasi Pembayaran - Digipay Satu periode Triwulan III Tahun 2025 lingkup KPPN Muara Bungo	Oktober	KPPN Muara Bungo

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
896	BPS Kabupaten Tebo	Peringkat V untuk kategori Digitalisasi Pembayaran-Cash Management System (CMS) periode Triwulan III tahun 2025 lingkup KPPN Muara Bungo	Oktober	KPPN Muara Bungo
897	BPS Kabupaten Jayawijaya	Peringkat Pertama Akselerasi Digitalisasi Pembayaran Terbaik Kategori Penggunaan Digipay Terbanyak	Oktober	Kepala KPPN Wamena
898	BPS Kabupaten Tapanuli Utara	Peringkat Ketiga - Pengguna Digipay Satu Triwulan III 2025, 21 Oktober 2025	Oktober	KPPN Balige
899	BPS Kabupaten Tapanuli Utara	Peringkat Pertama - Pengguna Cash Management System Triwulan III 2025	Oktober	KPPN Balige
900	BPS Kabupaten Humbang Hasundutan	Satker Terbaik Pengguna Cash Management System (CMS) periode TW III 2025	Oktober	KPPN Balige
901	BPS Kabupaten Kepulauan Meranti	Satker dengan Nilai IKPA Triwulan III TA 2025 Tertinggi (100) di Lingkungan KPPN Dumai	Oktober	KPPN Kota Dumai
902	BPS Kabupaten Bungo	Peringkat IV Untuk Kategori Nilai IKPA Terbaik Pagu 3 s.d. 8 Miliar Periode Triwulan III Tahun 2025 Lingkup KPPN Muara Bungo	Oktober	KPPN Muaro Bungo
903	BPS Kabupaten Kepulauan Meranti	Penghargaan Satker dengan Nilai IKPA Triwulan III TA 2025 Tertinggi (100) di Lingkungan KPPN Dumai	Oktober	KPPN Kota Dumai
904	BPS Kabupaten Bungo	Peringkat I Untuk kategori Digitalisasi Pembayaran-Cash Management System (CMS) Periode Triwulan III Tahun 2025 Lingkup KPPN Muara Bungo	Oktober	KPPN Muaro Bungo
905	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Nilai 100 (Predikat "Sangat Baik") Periode Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Baturaja
906	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Peringkat 2 Kinerja Pengelolaan Keuangan (IKPA & Digitalisasi) Kategori Satker Sedang dengan Nilai 99,16 Periode Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Baturaja
907	BPS Kota Metro	Satker Terbaik berdasarkan Hasil Penilaian IKPA Triwulan III Tahun 2025 di lingkup pembayaran KPPN Metro	Oktober	KPPN Metro
908	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Peringkat I Kinerja Pengelolaan Keuangan (IKPA & Digitalisasi) Kategori Satker Sedang Periode Triwulan III Tahun 2025	Oktober	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Baturaja
909	BPS Kabupaten Maros	Instansi Pembina Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2025	Oktober	Desa Bonto Matene Kecamatan Mandai Pemerintah Kabupaten Maros

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
910	BPS Kabupaten Bangka	Peringkat Ketiga Satker Terbaik dalam Optimalisasi Penggunaan Cash Management System (CMS) Semester I Tahun 2025	Oktober	KPPN Pangkalpinang
911	BPS Kabupaten Bangka Selatan	Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Periode Semester I Tahun 2025	Oktober	Kepala KPPN Pangkalpinang
912	BPS Kabupaten Bangka Selatan	Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Periode Semester I Tahun 2025	Oktober	KPPN Pangkalpinang
913	BPS Kabupaten Belitung Timur	Satker Capaian IKPA terbaik Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Tanjungpandan
914	BPS Kabupaten Belitung Timur	Satker Kinerja Terbaik Penggunaan Cash Management System (CMS) Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Tanjungpandan
915	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Mitra Strategis Terbaik dalam Penyediaan Data Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan	Oktober	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
916	BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Peringkat 1 Satker dengan jumlah transaksi pendebitan rekening virtual bendahara pengeluaran melalui CMS tertinggi Triwulan III 2025	Oktober	KPPN Saumlaki
917	BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Peringkat II satker dengan implementasi digipay satu terbaik Triwulan III 2025	Oktober	KPPN Saumlaki
918	BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Satker teladan dalam implementasi KKP Triwulan III 2025	Oktober	KPPN Saumlaki
919	BPS Kabupaten Banyuwangi	Peringkat Ketiga Jumlah Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbanyak Periode Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Banyuwangi
920	BPS Kabupaten Banyuwangi	Peringkat Pertama Nilai Transaksi Cash Management System (CMS) Terbesar Periode Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Banyuwangi
921	BPS Kabupaten Banyuwangi	Peringkat 2 Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Banyuwangi
922	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Tercapainya Target Minimal 15 Transaksi Pada Aplikasi Digipay Satu	Oktober	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
923	BPS Kabupaten Rokan Hilir	Satker dengan nilai IKPA triwulan III TA 2025 tertinggi (100)	Oktober	Kepala KPPN Dumai
924	BPS Kabupaten Bandung	Peringkat I Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Triwulan III Tahun 2025	Oktober	Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(KPPN) Bandung II - Kementerian Keuangan
925	BPS Kabupaten Bandung	Peringkat III Pengguna Cash Manajemen System (CMS) Terbaik Triwulan III Tahun 2025	Oktober	Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II - Kementerian Keuangan
926	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Peringkat II Kinerja Pengelolaan Keuangan (IKPA & Digitalisasi) Kategori Satker Besar dengan Nilai 94,82 Periode Triwulan III Tahun 2025	Oktober	Kepala KPPN Baturaja
927	BPS Kabupaten Lahat	IKPA sangat baik Tw.3 2025	Oktober	KPPN Lahat
928	BPS Kabupaten Mamuju	Peringkat pertama dengan nilai kinerja terbaik dalam penggunaan cash management system sampai dengan triwulan III Tahun 2025	Oktober	Kepala KPPN Mamuju
929	BPS Kabupaten Mamuju	Peringkat ketiga dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terbaik kategori pagu sedang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Mamuju
930	BPS Kabupaten Mamuju	sebagai satuan kerja yang berhasil atas tercapainya target minimal 15 transaksi pada aplikasi digipay satu periode triwulan III Tahun 2025	Oktober	Kepala KPPN Mamuju
931	BPS Kota Kupang	Apresiasi Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) Tercepat Periode September 2025	Oktober	KPPN Kupang
932	BPS Kabupaten Puncak Jaya	Peringkat Kedua Kategori Laporan Keuangan Terbaik	Oktober	KPPN Wamena
933	BPS Kabupaten Barito Utara	Penghargaan Atas Pencapaian Nilai Sempurna IKPA Kategori Pagu Kecil Bobot Besar Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Oktober	Kepala Kanwil DJPb Prov Kalteng
934	BPS Kabupaten Pidie	Capaian IKPA TW III	Oktober	KPPN Banda Aceh
935	BPS Kabupaten Ngawi	Kontribusi sebagai narasumber dalam kuliah tamu	Oktober	Institut Agama Islam Ngawi
936	BPS Kabupaten Ngawi	Apresiasi Implementasi Digitalisasi Pembayaran APBN Triwulan III Tahun 2025 Satker Lingkup KPPN Madiun Kategori : 1. Transaksi KKP terbanyak (peringkat 10) 2. Transaksi KKP terbesar (peringkat 9) 3. Transaksi CMS terbanyak (peringkat 2) 4. Transaksi CMS terbesar (peringkat 3)	Oktober	KPPN Madiun

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
937	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	Nilai IKPA Sempurna Kategori Pagu Kecil Bobot Besar Periode Triwulan III	Oktober	Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah
938	BPS Kabupaten Muara Enim	IKPA Kategori Sangat Baik dengan Nilai IKPA 100 Periode s.d Triwulan III TA 2025	Oktober	KPPN Lahat
939	BPS Kabupaten Ponorogo	10 Satuan Kerja dengan transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbesar Triwulan III tahun 2025	Oktober	KPPN Madiun
940	BPS Kabupaten Ponorogo	10 Satuan Kerja dengan transaksi Cash Management System (CMS) terbanyak Triwulan III tahun 2025	Oktober	KPPN Madiun
941	BPS Kabupaten Ponorogo	10 Satuan kerja dengan transaksi Cash Management System (CMS) terbesar Triwulan III tahun 2025	Oktober	KPPN Madiun
942	BPS Kabupaten Mamuju Tengah	Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Mamuju
943	BPS Kabupaten Mamuju Tengah	Satuan Kerja dengan Capaian target Minimal 15 Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Mamuju
944	BPS Kabupaten Mamuju Tengah	Peringkat Tiga Satuan Kerja dalam Penggunaan Cash management System (CMS) dengan nilai transaksi terbaik	Oktober	KPPN Mamuju
945	BPS Pasangkayu	PERINGKAT PERTAMA DENGAN NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TERBAIK KATEGORI PAGU SEDANG	Oktober	KPPN Mamuju
946	BPS Kabupaten Tolikara	Satker peringkat ketiga Nilai indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Tahun 2025 Kategori Satker sedang	Oktober	KPPN Wamena
947	BPS Kabupaten Lombok Timur	Satuan Kerja dengan Pengelolaan Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Terbaik Periode Semester I Tahun 2025	Oktober	KPPN Selong
948	BPS Kabupaten Lombok Timur	SATUAN KERJA DENGAN NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SEMPURNA (100) PERIODE SEMESTER I 2025	Oktober	KPPN SELONG
949	BPS Kabupaten Raja Ampat	Peringkat Kedua Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kategori Pagu Sedang Rp3 Miliar s.d. Rp15 Miliar Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dengan Nilai IKPA 99,18	Oktober	KPPN Sorong
950	BPS Kabupaten Konawe	Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III Tahun 2025 Dengan Nilai Capaian 100 (Kategori Sangat Baik)	Oktober	DJPB Sulawesi Tenggara

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
951	BPS Kabupaten Bengkayang	Satuan Kerja dengan Nominal Transaksi CMS Terbanyak Pertama Periode Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Singkawang
952	BPS Kota Pangkal Pinang	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Semester 1 tahun 2025 kategori pagu 2,5 s.d 10 Miliar Rupiah	Oktober	KPPN Pangkal Pinang
953	BPS Bolaang Mongondow	Terbaik I Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Triwulan III Tahun 2025	Oktober	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Kotamobagu
954	BPS Bolaang Mongondow	Terbaik III Satuan Kerja Handal Triwulan III Tahun 2025	Oktober	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Kotamobagu
955	BPS Kota Jambi	Penghargaan Satker Terbaik Tw III TA 2025_Jumlah Transaksi KKP Terbesar	Oktober	KPPN Jambi
956	BPS Kabupaten Kerinci	Satker Terbaik Peringkat II atas Transaksi Cash Management System Terbanyak Triwulan III Tahun 2025 Lingkup KPPN Sungai Penuh	Oktober	KPPN Sungai Penuh
957	BPS Kabupaten Kerinci	Satker Terbaik Peringkat III atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2025 Satker Pagu Besar Lingkup KPPN Sungai Penuh	Oktober	KPPN Sungai Penuh
958	BPS Kota Bandung	Pengguna Cash Management System (CSM) Terbaik Triwulan III Tahun 2025	Oktober	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II
959	BPS Kabupaten Malinau	Peringkat Ketiga Satker Pengguna DIGIPAY Teraktif Periode Semester I Tahun 2025	Oktober	KPPN Tanjung Selor
960	BPS Kabupaten Lombok Utara	Terbaik 3 Transaksi Digipay Lingkup KPPN Mataram	Oktober	Kepala KPPN Mataram
961	BPS Kabupaten Bengkalis	SATKER DENGAN NILAI IKPA TRIWULAN III TERTINGGI (100)	Oktober	KPPN DUMAI
962	BPS Kabupaten Kolaka Utara	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Triwulan III Tahun 2025 Dengan Nilai Capaian 100 (Kategori Sangat Baik)	Oktober	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
963	BPS Kabupaten Lembata	Atas Capaian Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Kategori Pagu Rp1 Milyar s.d Rp5 Milyar Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Oktober	Kepala KPPN Larantuka

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
964	BPS Kabupaen Lembata	Peringkat III Kategori Satuan Kerja Pengguna Digipay Satu Terbaik Periode Semester I Tahun 2025	Oktober	Kepala KPPN Larantuka
965	BPS Kabupaten Lembata	Atas Capaiannya Sebagai Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA Terbaik Kategori Pagu > Rp5 M Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Oktober	Kepala KPPN Larantuka
966	BPS Kabupaten Lembata	Peringkat III Kategori Satuan Kerja Pengguna Digipay Satu Terbaik Periode Triwulan III Tahun 2025	Oktober	Kepala KPPN Larantuka
967	BPS Bolaang Mongondow Utara	Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I Tahun 2025 "Terbaik III"	Oktober	Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulawesi Utara, Kanwil KPPN Kotamobagu
968	BPS Bolaang Mongondow Utara	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Negara (IKPA) Untuk Pagu Di Bawah Rp10 Miliar Triwulan III Tahun 2025 "Terbaik I (100)"	Oktober	Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulawesi Utara, Kanwil KPPN Kotamobagu
969	BPS Bolaang Mongondow Utara	Satuan Kerja Handal Triwulan III Tahun 2025 "Terbaik II"	Oktober	Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulawesi Utara, Kanwil KPPN Kotamobagu
970	BPS Bolaang Mongondow Timur	Terbaik I dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Triwulan III Tahun 2025	Oktober	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu
971	BPS Kabupaten Yahukimo	1. Capaian IKPA Terbaik (Kategori Pagu Sedang) Tahun 2025 - Terbaik I 2. Realisasi Menggunakan CMS Terbesar Triwulan III - Terbaik I 3. Penghargaan Dari Bupati Yahukimo Atas Kontribusi dalam Pembinaan Statistik Sektor dan Pembangunan SDI	Oktober	KPPN Wamena dan Bupati Yahukimo
972	BPS Kota Kotamobagu	Terbaik I Triwulan III Tahun 2025 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Negara (IKPA) Untuk Pagu di Bawah Rp10 Miliar	Oktober	Kantor Pelayanan Prbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu
973	BPS Kota Kotamobagu	Terbaik I Triwulan III Tahun 2025 Satuan Kerja Handal	Oktober	Kantor Pelayanan

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu
974	BPS Kota Kotamobagu	Terbaik III Triwulan III 2025 Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)	Oktober	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu
975	BPS Kabupaten Manokwari	Piagam Penghargaan Peringkat II Jumlah Transaksi Digipay Triwulan III Tahun 2025	Oktober	KPPN Manokwari
976	BPS Kabupaten Bulungan	Peringkat Pertama Satker Pengguna Cash Management System (CMS) Teraktif Periode Semester I Tahun Anggaran 2025	Oktober	KPPN Tanjung Selor
977	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Terbaik 2 Kategori Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik 2 Periode Semester I Tahun 2025	Oktober	KPPN Tanjung Selor
978	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Terbaik 2 Kategori Satker Pengguna DIGIPAY Teraktif Periode Semester I TA 2025	Oktober	KPPN Tanjung Selor
979	BPS Kabupaten Bojonegoro	Satuan Kerja dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pemindahtanganan BMN Tertinggi Pertama pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Tahun 2024	Oktober	KPKNL Madiun
980	BPS Kabupaten Kolaka	Nilai IKPA 100 Periode Triwulan III 2025	Oktober	KPPN Kolaka
981	BPS Kabupaten Lombok Timur	Satuan Kerja Dengan Indikator Nilai Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Predikat Sempurna (100) Periode Semester I 2025	Oktober	KPPN Selong
982	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Triwulan III Tahun 2025 dengan Nilai Capaian 100 (Kategori Sangat Baik)	Oktober	Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
983	BPS Kabupaten Lampung Timur	Pencapaian 100 % Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Peringkat Pertama Satuan Kerja Pengguna Digipay Satu Terbaik pada Semester II Tahun 2024 Terbaik Kedua Penyusunan PDRB dan Survei Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Tahun 2025	November	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro BPS Provinsi Lampung
984	BPS Kota Ternate	Penghargaan Digipay	November	KPPN
985	BPS Kabupaten Tuban	Mitra Strategis dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan media briefing APBN 2025 dan Publikasi data statistik	November	KPPN tuban

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
986	BPS Kota Madiun	- Capaian IKPA Nilai 100 Periode Semester I Tahun 2025 – KPPN Madiun - Kepatuhan 100% pegawai yang telah melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 – KPP Pratama Madiun - Pioneer Cashless Satuan Kerja Pemerintah Pertama yang Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) – BSI	November	BPS RI, BPS Jawa Timur, KPP Pratama Madiun, KPPN Madiun, BSI
987	BPS Provinsi Banten	Peringkat 2 Badan Publik "Informatif" (dari Komisi Informasi Provinsi Banten)	November	Komisi Informasi Provinsi Banten
988	BPS Provinsi Banten	Badan Publik Desk PPID Terbaik (dari Komisi Informasi Provinsi Banten)	November	Komisi Informasi Provinsi Banten
989	BPS Kabupaten Sidoarjo	Top 10 Kategori III: Inovasi Ekonomi Sosial Budaya Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI) Tahun 2025	November	Bupati Sidoarjo
990	BPS Kabupaten Sidoarjo	Juara II Kategori II: Inovasi Teknologi Informasi Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI) Tahun 2025	November	Bupati Sidoarjo
991	BPS Kabupaten Buton Utara	Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2025 (IKPA dan Digitalisasi Pembayaran) Kategori Pagu Sedang	November	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bau-Bau
992	BPS Kabupaten Buton Utara	Peringkat II Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2025 (IKPA dan Digitalisasi Pembayaran) Kategori Pagu Sedang	November	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bau-Bau
993	BPS Kabupaten Mamasa	PERINGKAT PERTAMA KATEGORI SATKER DENGAN TRANSAKSI CMS TERBANYAK (PAGU SEDANG)	November	KPPN MAJENE
994	BPS Kabupaten Mamasa	PERINGKAT PERTAMA KATEGORI SATKER DENGAN TRANSAKSI DIGIPAY TERBANYAK	November	KPPN MAJENE
995	BPS Kabupaten Musi Rawas	INSTANSI VERTIKAL DENGAN KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN ASN TERBAIK	November	Plt. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK LINGGAU
996	BPS Kabupaten Mamasa	Badan Publik dengan Kualifikasi INFORMATIF Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori	November	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Badan Publik Vertikal Tingkat Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat		
997	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Badan Publik Instansi Vertikal	November	Ketua Komisi Informasi Kalimantan Tengah
998	BPS Kota Sibolga	1. Peringkat ke-3 :Kinerja Penggunaan Uang Persediaan dengan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Satker Lingkup KPPN Sibolga Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025 2. Peringkat ke-2 : Kinerja Penerapan Transaksi Non Tunai terbaik satuan kerja lingkup KPPN Sibolga Periode Semester I Tahun 2025	November	. 1. KPPN Sibolga 2. KPPN Sibolga
999	BPS Kabupaten Blera	Unit Dengan Kinerja Sangat Baik Dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025	November	Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Tengah
1000	BPS Provinsi Banten	Peringkat 2 Badan Publik "Informatif" (dari Komisi Informasi Provinsi Banten)	November	Komisi Informasi Provinsi Banten
1001	BPS Provinsi Banten	Badan Publik Desk PPID Terbaik (dari Komisi Informasi Provinsi Banten)	November	Komisi Informasi Provinsi Banten
1002	BPS Kabupaten Polewali Mandar	Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Badan Publik Vertikal Tingkat Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat	November	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat
1003	BPS Kabupaten Polewali Mandar	Peringkat Kedua Kategori Satker dengan Transaksi CMS Terbanyak (Pagu Sedang)	November	KPPN Majene
1004	BPS Kabupaten Serang	BPS Kabupaten Serang sebagai Mitra Pengumpul Data Perikanan 2025	November	Dinas Perikanan Kabupaten Serang
1005	BPS Kabupaten Serang	BPS Kabupaten Serang Atas Kontribusinya sebagai Pembina Statistik Sektoral	November	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
1006	BPS Kabupaten Serang	BPS Kabupaten Serang Atas Partisipasinya Pembina Statistik Sektoral Tahun 2025	November	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Kabupaten Serang
1007	BPS Kota Pasuruan	Peringkat I Satker Berkinerja Terbaik Kategori Pagu<10 M Periode Triwulan III 2025	November	KPPN Malang
1008	BPS Kota Tanjungpinang	Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	November	Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
1009				
1010	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Pendukung Asesmen Inflasi Terbaik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	November	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
1011	BPS Kabupaten Pelalawan	Penghargaan Sebagai Narasumber dalam Workshop "Menganalisis dan Mengolah Data Hasil Penelitian"	November	SMP Plus Taruna Andalan
1012	BPS Kabupaten Seluma	PERINGKAT III PENGGUNA DIGIPAY TERBAIK TRIWULAN III TAHUN 2025	November	KPPN Manna
1013	BPS Kabupaten Seluma	PERINGKAT III PENGGUNA DIGIPAY TERBAIK TRIWULAN III TAHUN 2025	November	KPPN Manna
1014	BPS Kabupaten Seluma	PERINGKAT III PENGGUNA CMS TERBAIK TRIWULAN III TAHUN 2025	November	KPPN Manna
1015	BPS Kota Bogor	Penghargaan Atas Kontribusi Dalam Pembinaan Satu Data Kota Bogor	November	Pemerintah Kota Bogor
1016	BPS Kabupaten Gunungkidul	Penghargaan sebagai Pembina Data Sektorial Daerah Forum Satu Data di Kab. Gunungkidul	November	Bupati Gunungkidul
1017	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	7. Peringkat I – Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Triwulan II Tahun 2025	November	KPPN Manokwari
1018	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Badan Publik Vertikal Tingkat Provinsi Sulawesi Barat	November	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat
1019	BPS Provinsi Jawa Tengah	Mitra Strategis Pendukung Asesmen Ekonomi Terbaik 2025	November	Bank Indonesia
1020	BPS Provinsi Bengkulu	Penghargaan Apresiasi atas peran aktif dan kontribusi Nyata dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data di Provinsi Bengkulu	November	Bapperida Provinsi Bengkulu
1021	BPS Kabupaten Mamuju	Sebagai badan publik dengan kualifikasi Informatif dalam pelaksanaan Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024 kategori Badan publik vertikal tingkat kabupaten se provinsi sulawesi barat	November	Ketua Informasi Provinsi Sulawesi Barat

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1022	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Sebagai Ucapan Terimakasih atas kerjasama dan Dukungan dalam Pelaksanaan Magang Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nurul Huda Tahun 2025	November	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nurul Huda (Dr, Thoha Firdaus, M.Pd.Si)
1023	BPS Provinsi Papua	1. Terbaik III Kategori Pemohon Lelang Noneksekusi BMN Terbaik (Eksternal) 2. 10 besar satker dengan Capaian Implementasi CMS terbanyak Periode Januari s.d April 2025 (Eksternal) 3. Terbaik I Laporan Keuangan Wilayah Semester I Tahun 2025 Kategori UAPPA-W Besar (>15 Satker) (Eksternal)	November	5. KPKNL Jayapura 6. KPPN Jayapura 7. Kanwil DJPB Provinsi Papua
1024	BPS Kabupaten Sleman	Piagam Penghargaan Tim Penilai IPKS Tahun 2025	November	Bupati Sleman
1025	BPS Kabupaten Bantul	Badan Publik Informatif kategori Instansi Vertikal di DIY dengan nilai 95,8	November	Komisi Informasi Daerah Pemda D.I. Yogyakarta
1026	BPS Provinsi Jawa Timur	Sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 92,56	November	Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
1027	BPS Kabupaten Bantul	Apresiasi PPID/PLID Berprestasi	November	Komisi Informasi Daerah (KID) Pemda DIY
1028	BPS Kabupaten Bantul	Badan Publik Skor tertinggi Kelompok Instansi Vertikal di DIY	November	Komisi Informasi Daerah (KID) Pemda DIY
1029	BPS Kota Malang	Penghargaan Peringkat III Kategori Satker Pengguna Digipay Satu Terbaik Periode Triwulan III TA 2025	November	Kepala KPPN Malang
1030	BPS Kabupaten Majene	Satuan kerja dengan Transaksi Digipay Terbanyak Peringkat Ke III Periode Semester I Tahun 2025	November	KPPN Majene
1031	BPS Kabupaten Majene	Satuan kerja dengan Transaksi KKP Terbanyak Peringkat Ke III Periode Semester I Tahun 2025	November	KPPN Majene
1032	BPS Kabupaten Majene	Satuan Kerja Tercepat dalam Pelaporan Data Capaian Output (Pagu Sedang) Peringkat ke III Periode Semester I Tahun 2025	November	KPPN Majene
1033	BPS Kabupaten Majene	Badan Publik dengan Kualifikasi "Informatif" dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Badan Publik	November	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Vertikal Tingkat Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat		
1034	BPS Kota Baubau	Eksternal - Satker Terbaik ke 1 Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2025	November	KPPN Baubau
1035	BPS Kabupaten Bone Bolango	Juara 3 Satker Pengelola Digitalisasi Pengelolaan Keuangan APBN Terbaik Triwulan III 2025 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	November	DJPb
1036	BPS Kabupaten Boalemo	Juara 1 Digipay Triwulan III	November	Kanwil DJPb Gorontalo
1037	BPS Kabupaten Demak	Sertifikat Penghargaan atas partisipasinya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Digitalisasi Pembayaran melalui Digipay	November	KPPN Kudus
1038	BPS Kabupaten Gorontalo	Penghargaan Terbaik II Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Triwulan II 2025	November	DJPB Gorontalo
1039	BPS Kabupaten Buton	Peringkat 3 Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2025 (IKPA dan Digitalisasi Pembayaran) Kategori Pagu Sedang	November	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bau-Bau
1040	BPS Kota Cirebon	Penghargaan Dataset Terbanyak dari Pemkot	November	Pemerintah Kota Cirebon
1041	BPS Kabupaten Gunungkidul	Penghargaan sebagai Walidata Pendukung Forum Satu Data di Kab. Gunungkidul	November	Bupati Gunungkidul
1042	BPS Kota Bitung	PERINGKAT II TRANSAKSI DIGIPAY TERBANYAK TW III 2025.PDF	November	KPPN BITUNG
1043	BPS Kabupaten Mamuju Tengah	Badan Publik dengan Kualifikasi INFORMATIF Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Badan Publik Vertikal Tingkat Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat	November	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat
1044	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Mitra Kolaboratif Pembinaan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	November	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara
1045	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Instansi Vertikal Pendukung Asesmen Ekonomi dan Keuangan Daerah Terbaik Provinsi Sulawesi Utara 2025	November	Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
1046	BPS Kota Batam	Badan Publik Informatif Kategori Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota	November	Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1047	BPS Kabupaten Mimika	Penerima Penghargaan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Terbaik 2025 Triwulan III Penggunaan CMS Virtual Frekuensi Transaksi Terbanyak Peringkat Kedua	Desember	Kanwil DJPB Papua
1048	BPS Kabupaten Tuban	Mitra Pelaporan SPT Tahunan Pegawai Terbaik Tahun Pajak 2024	Desember	Kantor Pajak Pratama Tuban
1049	BPS Kabupaten Banjarnegara	Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2025	Desember	KPPN Banjarnegara
1050	BPS Kabupaten Banjarnegara	Satker dengan Transaksi Digipay Tertinggi Tahun 2025	Desember	KPPN Banjarnegara
1051	BPS Kabupaten Tuban	Sebagai media partner Pemerintah Kabupaten Tuban	Desember	KPP Pratama Tuban
1052	BPS Provinsi Lampung	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 Kategori Instansi Vertikal sebagai Badan Publik Informatif	Desember	Komisi Informasi Provinsi Lampung
1053	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat 1 Pengguna KKP Terbaik Triw III Tahun 2025	Desember	KPPN Manna
1054	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat 2 Penggunaan Digipay Terbaik Triwulan III Tahun 2025	Desember	KPPN Manna
1055	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Terbaik III Kegiatan Statistik Pertanian Tahun 2025 BPS se-Provinsi Sumatera Selatan	Desember	BPS Provinsi Sumatera Selatan
1056	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Terbaik I High Performance Sakernas November	Desember	BPS Provinsi Sumatera Selatan
1057	BPS Kabupaten Natuna	Terbaik 2 Badan Publik Informatif	Desember	Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
1058	BPS Kabupaten Bintan	Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepri Tingkat instansi Vertikal 2025	Desember	Komisi Informasi Kepulauan Riau
1059	BPS Kabupaten Purbalingga	Penghargaan Badan Publik Menuju Informatif	Desember	Komisi Informasi Jawa Tengah
1060	BPS Kabupaten Batang Hari	Badan Publik Informatif Kualifikasi Nilai (90-100)	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jambi
1061	BPS Kabupaten Batang Hari	Satker dengan Jumlah Transaksi KKP Terbesar (81 Transaksi) Triwulan III	Desember	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
1062	BPS Kabupaten Batang Hari	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025 dengan Nilai	Desember	Kementerian Keuangan Direktorat

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		100 Kategori Pagu Kurang dari 8M Triwulan III		Jenderal Perbendaharaan
1063	BPS Kota Palembang	Narasumber dalam Kegiatan Latihan Kepemimpinan Siswa Angkatan XXIV Se-Kota Palembang	Desember	PB IKA LKS Kota Palembang
1064	BPS Kota Palembang	Narasumber dalam Kegiatan Latihan Kepemimpinan Siswa Angkatan XXIV Se-Kota Palembang	Desember	PB IKA LKS Kota Palembang
1065	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Atas Partisipasi Dalam Pelestarian Lingkungan Dengan Mendaur Ulang Limbah Kertas Yang Setara Dengan Penyelamatan 120 Pohon	Desember	PT. UWAAA Daur Ulang
1066	BPS Kota Jambi	Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2025	Desember	Komisi Informasi Provinsi
1067	BPS Kabupaten Bungo	Badan Publik Informatif Kualifikasi Nilai (90-100)	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jambi
1068				
1069	BPS Provinsi Jawa Tengah	Kategori Informatif dalam menyampaikan, menyediakan, menguasai informasi publik berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
1070	BPS Kota Sungai Penuh	Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori INFORMATIF	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jambi
1071	BPS Provinsi Kalimantan Barat	Terbaik I Lembaga Pemerintah dalam Pengutamaan Bahasa Negara yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Desember	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat
1072	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Penghargaan Anuegrah Keterbukaan Informasi Publik 2025	Desember	Ketua Komisi Informasi Provinsi
1073	BPS Kabupaten Tebo	Anugerah sebagai Badan Publik Informatif dalam Implementasi UU Nomor 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Desember	Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi
1074	BPS Provinsi Jambi	Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif	Desember	Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jambi
1075	BPS Provinsi Jambi	Satker dengan Jumlah Transaksi CMS Terbesar Kategori Pagu >6M	Desember	KPPN Jambi
1076	BPS Provinsi Jambi	Satker dengan Jumlah Transaksi KKP Terbesar	Desember	KPPN Jambi
1077	BPS Kabupaten Lahat	IKPA Sangat Baik sd November 2025	Desember	KPPN Lahat
1078	BPS Kota Blitar	Penghargaan Kolaborasi dan Kontribusi Aktif dalam Penyelenggaraan Pojok Statistik AKN Putra Sang Fajar Kota Blitar	Desember	AKN Putra Sang Fajar Blitar

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		guna mendukung peningkatan literasi dan pemanfaatan data statistik		
1079	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Badan Publik Informatif	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jambi
1080	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Sulawesi Tenggara 2025 sebagai Badan Publik Informatif	Desember	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara
1081	BPS Kabupaten Kudus	Badan Publik Predikat Informatif	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
1082	BPS Kabupaten Brebes	Penghargaan Menuju Informatif BPS Kabupaten Brebes	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
1083	BPS Kabupaten Magelang	Menuju Informatif dalam Menyampaikan, Menyediaan, Menguasai Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
1084	BPS Kabupaten Tuban	Peringkat Kedua Capaian Kerja Terbaik Berdasarkan Jumlah Transaksi Menggunakan Digipay Satu Periode Triwulan III 2025 Pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Tuban	Desember	KPPN Tuban
1085	BPS Kabupaten Tuban	Peringkat pertama satuan kerja terbaik berdasarkan jumlah transaksi menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) Triwulan III 2025 lingkup KPPN Tuban	Desember	KPPN Tuban
1086	BPS Kabupaten Tuban	Peringkat ketiga capaian indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III 2025 pada kategori satuan kerja dengan pagu besar lingkup KPPN Tuban	Desember	KPPN Tuban
1087	BPS Provinsi Sumatera Utara	<p>1. Penghargaan Peringkat I Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kategori Besar dari Kakanwil DJPb Sumatera Utara.</p> <p>2. Penghargaan pada Ulos Treasury Award yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara Peringkat I Nilai IKPA Tertinggi Semester I Tahun 2025 Tingkat UAPPA-W Dengan pagu Sedang</p> <p>3. Penghargaan pada Ulos Treasury</p>	Desember	Kanwil DJPB

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Award yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara Peringkat I Nilai IKPA Tertinggi Tahun 2024 Tingkat UAPPA-W Dengan Pagu Sedang		
1088	BPS Provinsi Ntb	Peringkat II Satuan Kerja dengan Transaksi CMS Tertinggi TA 2024	Desember	KPPN Mataram
1089	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif	Desember	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
1090	BPS Kabupaten Lampung Timur	Satuan Kerja Terbaik berdasarkan Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 lingkup pembayaran KPPN Metro	Desember	KPPN Metro
1091	BPS Kabupaten Muara Enim	IKPA Kategori Sangat Baik dengan Nilai IKPA 100 Periode s.d November TA 2025	Desember	KPPN Lahat
1092	BPS Kota Depok	WBK dari TPN	Desember	Kemenpan RB
1093	BPS Kabupaten Muaro Jambi	Keterbukaan informasi publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2025 Kategori Instansi Vertikal Kabupaten/Kota sebagai Badan Publik Informatif dalam Implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jambi
1094	BPS Kabupaten Dairi	Nama -Nama Prestasi/ Penghargaan tahun 2025 bisa dilihat pada link berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gN8NiOfHDQ-g3DDqj6Y-2NJkESG_sbG7px-2YTA9Apw/edit?gid=0#gid=0	Desember	Ekternal (KPPN) dan Internal (BPS RI dan BPS Prov Sumatera Utara)
1095	BPS Kota Medan	Penghargaan Semester I Tahun 2025 Peringkat I Kinerja Pelaksanaan APBN Satker Mitra KPPN Medan 2 dengan Pagu Kelolaan Kategori Besar	Desember	KPPN Medan II
1096	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Badan Publik dengan Kualifikasi INFORMATIF dari Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal di Sumatera Selatan	Desember	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan
1097	BPS Kota Surakarta	1. KPPN_07082025_Juara 2 Satker dengan Kecepatan Penyelesaian LPJ Bendahara Yang Berkualitas Semester I Tahun Anggaran 2025 Kategori Pagu Sedang_019152_BPS SURAKARTA 2. KPPN_07082025_Juara 3 Satker dengan Implementasi Digipay Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025 Kategori UP Kecil_019152_BPS SURAKARTA 3. KPPN_07082025_Juara 3 Satker	Desember	KPPN

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dengan Pengelolaan Gaji Induk Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2025 Kategori Pagu Kecil_019152_BPS SURAKARTA 4. KPPN_25022025_Juara 2 Satker dengan implementasi Digipay Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2024 Kategori Pagu Kecil 5. KPPN_25022025_Juara 2 satker dengan pengelolaan Gaji Induk Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2024 Kategori Pagu Kecil 6. KPPN_Juara 2 Satker dengan implementasi Digipay Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2024 Kategori Pagu Kecil 7. KPPN_Juara 2 satker dengan pengelolaan Gaji Induk Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2024 Kategori Pagu Kecil		
1098	BPS Provinsi Bengkulu	Badan Publik dengan predikat Informatif	Desember	Komisi Informasi Provinsi Bengkulu
1099	BPS Provinsi Maluku Utara	Terbaik II - Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun Anggaran 2025	Desember	Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara
1100	BPS Kabupaten Langkat	PERINGKAT 1 KINERJA PELAKSANAAN APBN SATKER MITRA KPPN MEDAN II DENGAN PAGU KELOLAAN KATEGORI SEDANG	Desember	KEPALA KPPN MEDAN II
1101	BPS Kabupaten Langkat	PERINGKAT 1 KINERJA PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN SECARA DIGITAL SATKER MITRA KPPN MEDAN II	Desember	Kepala KPPN Medan II
1102	BPS Kabupaten Konawe	Satuan Kerja Terbaik Dalam Pembinaan Statistik Berkualitas Desa/Kelurahan Di Kabupaten Konawe Pada Tahun 2025	Desember	Pemerintah Daerah Konawe
1103	BPS Kabupaten Konawe	Satuan Kerja Terbaik Dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas Untuk Mendukung Perencanaan, Monitoring, Dan Evaluasi Pembangunan Di Kabupaten Konawe Pada Tahun 2025	Desember	Pemerintah Daerah Konawe
1104	BPS Kota Medan	1. PENGELOLAAN KINERJA APBN TERBAIK 1 DENGAN KELOLAAN KATEGORI PAGU BESAR SEMESETER 1 TAHUN 2025	Desember	KPPN MEDAN II
1105	BPS Kabupaten Lombok Barat	Instansi Vertikal se-Kabupaten Lombok Barat sebagai Badan Publik: Kolaboratif atas Peran Aktif dalam Membangun Kerja Sama, Kemitraan, dan Sinergi Lintas Pihak dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Kabupaten Lombok Barat	Desember	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1106	BPS Kabupaten Ciamis	Penghargaan atas partisipasi Pembina dalam Pelatihan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mengenai Pembuatan dan Pengisian Metadata Statistik pada Indonesia Data Hub (INDAH)	Desember	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis
1107	BPS Kabupaten Ciamis	Peringkat Ketiga Pengguna Cash Management System (CMS) TA 2025 Kategori Pagu DIPA UP di Atas 4 Miliar	Desember	Kepala KPPN Tasikmalaya
1108	BPS Kabupaten Sarolangun	BPS Kabupaten Sarolangun sebagai Badan Publik " Informatif"	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jambi
1109	BPS Kota Pekalongan	Menuju Informatif dalam Menyampaikan, Menyediakan, Menguasai Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
1110	BPS Kota Pekalongan	Satuan Kerja Kontributor Terbaik Tahun 2025 Kota Pekalongan pada LPPL Batik TV Pekalongan	Desember	Batik TV Pekalongan
1111	BPS Kota Pekalongan	Satuan Kerja Kontributor Terbaik Tahun 2025 LPPL Radio Kota Batik Pekalongan	Desember	Radio Kota Batik Pekalongan
1112	BPS Kabupaten Konawe Utara	Instansi dengan Inovasi Terbaik Dalam Pelayanan Publik Dalam Penyediaan Data Melalui Inovasi Portal Satu Data Kabupaten Konawe Utara dengan nama PETIKSAWITKU (PETA TEMATIK SATU DATA DAN WILAYAH TERPADU KABUPATEN KONAWE UTARA)	Desember	BAPPERIDA Kabupaten Konawe Utara
1113	BPS Kabupaten Kerinci	Badan Publik Informatif Kualifikasi (Nilai 90-100) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jambi
1114	BPS Minahasa	Peringkat II Hasil Evaluasi Kinerja BMN	Desember	KPKNL Manado
1115	BPS Kabupaten Sarolangun	BPS Kabupaten Sarolangun sebagai Harapan I lomba Stand Pameran pada Kegiatan Sarolangun Festival	Desember	PEMDA Sarolangun
1116	BPS Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Terbaik I IKPA Semester I Tahun 2025	Desember	KPPN Tahuna
1117	BPS Kabupaten Bombana	Penghargaan dengan Capaian IKPA Predikat Sempurna periode 2025	Desember	Kepala Kantor Wilayah DJPB Sulawesi Tenggara
1118	BPS Kabupaten Kolaka Utara	Capaian IKPA Predikat Sempurna (100) Periode 2025	Desember	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

LAMPIRAN

No	Nama Satker BPS	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1119	BPS Kabupaten Batang	Juara 1 Informatif	Desember	Sulawesi Tenggara Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
1120	BPS Kota Kendari	Satker Dengan Capaian IKPA Sempurna (100) Tahun 2025	Desember	Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
1121	BPS Kabupaten Konawe	Penghargaan Capaian IKPA Predikat Sempurna	Desember	DJPB Kanwil Sulawesi Tenggara
1122	BPS Kota Kendari	Sebagai Satker dengan Pengajuan Gaji Induk Tercepat dan Tidak Pernah Terlambat pada Aplikasi SAKTI - Terbaik 9 Periode TA 2025 Lingkup KPPN Kendari	Desember	KPPN Kendari
1123	BPS Kabupaten Kolaka	Capaian IKPA predikat Sempurna (100) Tahun 2025	Desember	DJPb Kanwil Sulawesi Tenggara
1124	BPS Kabupaten Kolaka	Satker Predikat SAKTI Terbaik III se-Sulawesi Tenggara 2025	Desember	DJPb Kanwil Sulawesi Tenggara
1125	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Capaian IKPA Predikat Sempurna (100) Periode 2025	Desember	Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Daftar Inovasi BPS Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025

No	Nama Satker	Inovasi
(1)	(2)	(3)
1	BPS Kabupaten Paser	DUTA PASER
2	BPS Kabupaten Bangka Tengah	Monitoring Bangka Tengah Dalam Angka (Monika)
3	BPS Kabupaten Bangka Tengah	Mintik (Admin Statistik)
4	BPS Kota Serang	Pendaftaran Magang via web
5	BPS Kabupaten Pringsewu	PRIMSA (Portal Informasi dan Sistem Manajemen Akses)
6	BPS Kabupaten Pringsewu	Monstera (Monitoring & Sharing Pembinaan Statistik Sektoral)
7	BPS Kabupaten Lumajang	Warta SMeru
8	BPS Kabupaten Lebak	Buku Tamu Digital
9	BPS Kabupaten Lebak	Statistics Meets Students
10	BPS Kabupaten Mimika	Libertis; chat bot ai mimika pintar; doremi; pandu visual kehumasan
11	BPS Kabupaten Probolinggo	Aplikasi Android Statistik Probolinggo
12	BPS KABUPATEN BEKASI	MOKAHOT (Monitoring Keluaran Honor Mitra)
13	BPS Kabupaten Bangkalan	ASM (Anjungan Statistik Mandiri)
14	BPS Kabupaten Aceh Singkil	Diseminasi Naratif Data Pada Publikasi Aceh Singkil Dalam Angka 2025 Dengan Skroloka (Scrollytelling Lokal)
15	BPS Kabupaten Aceh Singkil	Diseminasi Naratif Data Pada Publikasi Aceh Singkil Dalam Angka 2025 Dengan Skroloka (Scrollytelling Lokal)
16	BPS Kabupaten Cianjur	Sapa Data Cianjur
17	Kabupaten Melawi	Sistem Informasi Harga Kebutuhan Pokok Melawi (SIGMA)
18	BPS Kabupaten Penajam Paser Utara	Halo BPS PPU-Layanan Chat WhatsApp berbasis hybrid Chatbot AI
19	BPS Provinsi Banten	Simfoni (Sistem Informasi Formasi Jabatan Terkini)
20	BPS Provinsi Banten	Website Konreg Jabalnusra
21	BPS Provinsi Banten	Ekstik
22	BPS Kabupaten Belitung	SEDULANG (Sistem Pengaduan BPS Kabupaten Belitung)
23	BPS Kabupaten Belitung	SIMARKO (Sistem Manajemen Risiko)
24	BPS Kabupaten Belitung	D'MAMI (Dashboard Manajemen Lapangan dan Manajemen Mitra)
25	BPS Kabupaten Sidoarjo	PETIS Darjo (Peta Tematik Sidoarjo)
26	BPS Kabupaten Belitung	PINTAR (Pendampingan, Interaktif, Literasi)
27	BPS Kabupaten Belitung	KELEKAK DATA (Kanal Elektronik Kompilasi Layanan Terpadu Statistik)
28	BPS Kabupaten Buru	Layanan PST Yaser
29	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	1. SIMPATIK (Sistem Informasi Administrasi Pelatihan Statistik)

LAMPIRAN

No	Nama Satker	Inovasi
(1)	(2)	(3)
		2. BOOKISTRA (Booklet Data Indikator Strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara)
30	BPS Kabupaten Kapuas	PADI KETAN
31	BPS Kabupaten Kapuas	ASINAN
32	BPS Kota Banda Aceh	Jeumpa (Jendela Utama Informasi Pengelola Anggaran)
33	BPS Bengkulu Tengah	PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA LAYANAN PUBLIK
34	BPS Bengkulu Tengah	DISPLAY LAYAR KITO BPS BENGKULU TENGAH
35	BPS Kota Parepare	Phinisi Antik
36	BPS Kota Yogyakarta	Indek Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) 2025
37	BPS Provinsi Banten	Simfoni (Sistem Informasi Formasi Jabatan Terkini)
38	BPS Provinsi Banten	Website Konreg Jabalnusra
39	BPS Kota Yogyakarta	Living-Lab Statistik
40	BPS Kota Yogyakarta	Tahu Walik (Tanya dan hubungi WA Layanan Informasi Statistik)
41	BPS Kabupaten Muaro Jambi	Dashboard Data dan Indikator Statistik Strategi BPS Kabupaten Muaro Jambi (DISMOJA)
42	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Matistik (Chat Bot Whatsapp Manggarai Timur Statistik)
43	BPS KABUPATEN PANIAI	KO PASTI BISA
44	BPS KABUPATEN PANIAI	PUGO DAGI: Pusat Infografik Informatif Data Strategis
45	BPS Kabupaten Luwu	INDO UGI
46	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	PPID Interaktif Tanggap Aspirasi dan Respon BPS Kabupaten OKU Selatan (Pintar-OKUS)
47	BPS Kabupaten Magelang	Magelang Dalam Peta (MDP)
48	BPS Kabupaten Sumba Barat	SIPADA – Dashboard Visualisasi Interaktif Publikasi Daerah Dalam Angka BPS Kabupaten Sumba Barat
49	BPS Kabupaten Bangka	SHERDIK (Spreadsheet Cerdas Statistik)
50	BPS Kota Pekanbaru	Senin Berbagi Inspirasi (SERBA GISI)
51	BPS Kabupaten Wonogiri	SITEKAD (Sinergi Indikator Teknis Statistik Sosial dan Administasi)
52	BPS Kota Pekanbaru	Pembinaan Terintegrasi untuk Statistik Sektoral yang Unggul dan Profesional (Sektor-UP)
53	BPS Kota Pekanbaru	Sistem Layanan Tamu BPS Kota Pekanbaru (SALAM1471)
54	BPS Kota Pekanbaru	Bersama Angka, Rangkai Informasi Statistik Terkini & Akurat (Barista)
55	BPS Kota Tanjungpinang	SISAKTI
56	BPS Kabupaten Bangka Selatan	BASIS
57	BPS Kabupaten Seluma	Rujak Petis (Ruang Kerja Kolaborasi Publikasi Nerwilis Terintegrasi)
58	BPS Kota Subulussalam	SIDAK Penuntungan (Sistem Data Kependudukan Desa Penuntungan)
59	BPS Kabupaten Gunungkidul	GUD DATA (Gunungkidul Desa Dalam Data)

No	Nama Satker	Inovasi
(1)	(2)	(3)
60	BPS Kabupaten Pelalawan	SIGMA (Statistik untuk Generasi Muda Aktif)
61	BPS Kota Palembang	One- Fo
62	BPS Kota Palembang	PAL-INSTA
63	BPS Kota Palembang	Sempurna (Seleksi Monthly Pegawai Unggul dan Berintegritas)
64	BPS Kota Semarang	KUPAT SEMAR (Konsultasi Pengetahuan Angka Statistik Kota Semarang)
65	BPS KOTA SEMARANG	INFORMASI DI LAYAR BPS KOTA SEMARANG (SILAMAR)
66	BPS Kota Palembang	Rapih Kantorku
67	BPS Kabupaten Seluma	RUJAK PETIS (Ruang Kerja Kolaborasi Publikasi Nerwilis Terintegrasi)
68	BPS Kota Palembang	Muter Pagi (Mood Booster Pagi-pagi)
69	BPS Kabupaten Sragen	MONITORING PROJECT WILKERSTAT
70	BPS Kota Bogor	Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Apem)
71	BPS Kota Bogor	Data Unggul Ringkas Informatif Dalam Genggaman (Durian)
72	BPS Kota Semarang	Program Kemitraan Perguruan Tinggi
73	BPS Kabupaten Murung Raya	Pesona Mura
74	BPS Kabupaten Indragiri Hilir	Layanan Digital BPS Indragiri Hilir
75	BPS Provinsi Maluku Utara	Panduan Aplikasi Bukti Potong Converter
76	BPS Kota Lubuk Linggau	BPS1674 Goes to School
77	BPS Kabupaten Bandung	"HAI WARSA (Halo Insan Cemerlang di Warung Statistik)"
78	BPS Kabupaten Bandung	"KONOHHA (KONten On tiap Hari)"
79	BPS PROVINSI MALUKU	TarkiraSE
80	BPS Provinsi Maluku Utara	KGB - 82
81	BPS PROVINSI BENGKULU	DATA CAP
82	BPS Provinsi Bengkulu	PETIK BUAHATI
83	BPS Provinsi Kepulauan Riau	KEPRI (Key Economic and Performance Indicators for Riau Islands);
84	BPS Provinsi Kepulauan Riau	CERAH (Cuaca Elok Rutin Antar Hari)
85	BPS Kota Tangerang Selatan	ALAMANDA (Asisten Layanan Mandiri Tentang Data)
86	BPS Provinsi Maluku Utara	PANDUAN APLIKASI BUKTI POTONG CONVERTER
87	BPS Provinsi Jambi	Prisma (Platform Indikator Statistik Wilayah Jambi)
88	BPS Kabupaten Lahat	SISTEM INFORMASI PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL (SIPIRAL)
89	BPS Provinsi Maluku Utara	Buku Tamu
90	BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	SAPA TANI
91	BPS Kota Batu	Dolan Batu

LAMPIRAN

No	Nama Satker	Inovasi
(1)	(2)	(3)
92	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SiSabak
93	BPS Kabupaten Serang	"titik."
94	BPS Kabupaten Kulon Progo	BestiKu: Berbagi Data dan Konsultasi Statistik Terintegrasi BPS Kulon Progo
95	BPS Kabupaten Serang	Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Kinerja Pemerintah Desa
96	BPS Kabupaten Serang	Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Kinerja Pemerintah Desa
97	BPS Kabupaten Kudus	Kolase Smart
98	BPS Kabupaten Nagan Raya	Sistem Pengintegrasian Informasi dan Indikator Strategis (SI PINTAR)
99	BPS Kab gresik	Dashboard Luas Panen dan Produksi Padi serta Luas Fase Amatan hasil pendataan KSA Padi
100	BPS Provinsi Maluku Utara	Panduan Aplikasi Bujkti Potong Converter
101	BPS Kabupaten Sleman	Kopi Hangat
102	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	SADAP KOTIM
103	BPS Kabupaten Ngawi	Pojok Statistik Virtual
104	BPS Kabupaten Sleman	Lombok Rawit
105	BPS Kabupaten Ciamis	Sistem Antrian dan Manajemen Buku Tamu (SAMBUT)
106	BPS Provinsi Jawa timur	HaloPST
107	BPS Provinsi Jawa Timur	Trengginas (Evaluasi Terintegrasi Gambaran Indikator Susenas)
108	BPS Provinsi Jawa Timur	Halo Susenas
109	BPS Provinsi Jawa Timur	Kadiri
110	BPS Kabupaten Kolaka Utara	Dashboard KALOSARA (Kolaborasi bersama Organisasi Perangkat Daerah menuju Satu Data Kolaka Utara), Dashboard SITRALIS (Sistem Informasi Kepegawaian, Administrasi dan Link Kegiatan Statistik), Dashboard SITARA (Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS Kab. Kolaka Utara), Dashboard SIPEKA (Sistem Integrasi Pelayanan BPS Kolaka Utara), dsb.
111	BPS Provinsi Jawa Timur	Singasari
112	BPS Provinsi Jawa Timur	KenArok
113	BPS Provinsi Jawa Timur	Kendedes
114	BPS Kabupaten Mojokerto	SDPlus (Satu Data Perekonomian Lapangan Usaha)
115	BPS Provinsi Jawa Timur	Prasasti
116	BPS Provinsi Jawa Timur	Jenggala
117	BPS Provinsi Jawa Timur	Penataran
118	BPS Provinsi Jawa Timur	Antariksa
119	BPS Kota Gunungsitoli	1. Moguna; 2. Banuama; 3. Siguna

No	Nama Satker	Inovasi
(1)	(2)	(3)
120	BPS Kota Malang	PESSONA (Platform Pembinaan Statistik Terdepan)
121	BPS Kabupaten Blitar	SIBISA (Sistem pemBinaan StAtistik sektoral)
122	BPS Kabupaten Lebong	DATALOKAL (DATALOKA LEBONG)
123	BPS Provinsi Sumatera Utara	ALUSI; BOT EDA; PASKALIBAH PRO; PARIBAN; PARHOBAS; AMOR; WEGO; CO-AS; QETABO; JUMP-DAY; MO LAA; HARMONIS; SIDAMANIK; PARHATA; PATEN; P1P2; SIBAKUA; ONMADA
124	BPS Kabupaten Probolinggo	HUB-PRO (Harmonisasi Untuk Bangun Probolinggo)
125	BPS KABUPATEN BADUNG	- SiDoi - Sistem Dokumentasi dan Informasi - SISKAs - Sistem Informasi Statistik dan Konsultasi Data - Berseri - Berbagi Seputar Ilmu dan Statistik - Kuis RB - Employee of the Month - Bercerita (Bersama Badung Cermati Data) - Badung Sejahtera - Sehat Jasmani Hati Gembira
126	BPS Kabupaten Pacitan	Pacista (Pacitan Cinta Statistik)
127	BPS Kabupaten Lebong	SEDETIK (SENIN DESA CANTIK)
128	BPS Kabupaten Bangkalan	POIN PST (Portal Integrasi Pelayanan Statistik Terpadu)
129	BPS Kabupaten Bangkalan	KOPI ANTIK (Kolaborasi Pembinaan Agen Statistik) berbasis Google Sites
130	BPS Kabupaten Bangkalan	POIN PST (Portal Integrasi Pelayanan Statistik Terpadu)
131	BPS Kabupaten Bangkalan	EksplorAsik (Eksplorasi Statistik)
132	BPS Kabupaten Muara Enim	SIMANIS (Sistem Informasi Monitoring Administrasi dan Teknis)
133	BPS Kabupaten Muara Enim	INSTATIK (Infografis dan Artikel Statistik)
134	BPS Kabupaten Muara Enim	ADA HONOR (Asisten Digital Notifikasi Honor dan Perjadiin)
135	BPS Kabupaten Ponorogo	Desa Hebat
136	BPS Kabupaten Lombok Tengah	Chatbot Pelayanan Data BPS Kabupaten Lombok Tengah ("HaloSemeton")
137	BPS Kabupaten Ngada	PESTA REBA NGADA (Penguatan Kolaborasi Melalui Pembinaan Statistik Sektoral Terintegrasi Untuk Penyediaan Data Berkualitas dan Berkelanjutan di Kabupaten Ngada)
138	BPS Kabupaten Karanganyar	Eksplorasi Data Statistik dengan Artificial Intelligence (XLASTIS)
139	BPS Kota Depok	Podcast "Ngopi" Ngobrol Perkara Inflasi
140	BPS Kabupaten Karanganyar	CENTralisasi Ruang Interaktif Literasi Statistik (CERIA)
141	BPS Kota Depok	ZoomPa SiCantik (Layanan Zoom untuk pengguna data yang ingin berkonsultasi)
142	BPS Kabupaten Karanganyar	Monitoring Wilkerstat BPS Karanganyar dengan Google Looker Studio
143	BPS Kabupaten Kutai Barat	Drive BPS Kubar
144	BPS KABUPATEN PASURUAN	SENADA

LAMPIRAN

No	Nama Satker	Inovasi
(1)	(2)	(3)
145	BPS Kota Cilegon	SISTARLING (SInergi STATistik SektoRal keliLING)
146	BPS Kabupaten Sumenep	Integrasi Layanan BPS Kabupaten Sumenep
147	BPS Kabupaten Brebes	CILOKES (Cek Lokasi SLS)
148	BPS Kabupaten Brebes	GAPAI DIA (Gayeng Mencapai Indikator Kinerja)
149	BPS Kabupaten Dairi	Nama-nama Inovasi BPS Dairi bisa dilihat pada link berikut : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V7IXAPuN N0LBIYb0R8phd4C_iOTcgIZ6/edit?gid=1443697610#gid=1443697610
150	BPS Kota Pontianak	1. KLEPON - Katalog Peta Online Kota Pontianak 2. NDIE - Nampilin Detail Wilkerstat Express 3. SEPAKAT - Sistem Elektronik Pengelolaan Rapat 4. KAPUAS OPTIMAL - Kolaborasi Penguatan dan Edukasi Statistik Sektoral bagi OPD Instansi maupun Lembaga
151	BPS Kota Balikpapan	Website Insta, visualisasi data indikator statistik Kota Balikpapan
152	BPS Kota Cilegon	Cerdas (Cilegon Easy Response Data Service)
153	BPS Kota Baubau	Aplikasi Publikasi BPS Kota Baubau (PUBBA)
154	BPS Kabupaten Jayapura	Buku Tamu Digital dan Aplikasi nSBML Mitra BPS Kabupaten Jayapura
155	BPS KABUPATEN TEBO	WEDANG - Website Data Pendukung BPS Kabupaten Tebo
156	BPS KABUPATEN TEBO	LENSA SOSIAL
157	BPS KABUPATEN TEBO	SINERGI - Spirit Integritas Pegawai di Pagi Hari
158	BPS Kota Banjarbaru	PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL TERINTEGRASI (PASTI) dan SATU PUSAT DATA KELURAHAN (SAPUTARAN) BANJARBARU
159	BPS Kabupaten Lombok Timur	COMPASS (COFFEE MORNING PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL)
160	BPS Kabupaten Boalemo	PASTEL (Penilaian Apresiasi dan Seleksi Talenta)
161	BPS Kabupaten Karangasem	Dinamika
162	BPS Kabupaten Boalemo	BAKSO (Basis Akses Layanan Statistik Boalemo)
163	BPS Kabupaten Boalemo	S-CAMPUR (Sistem Cetak Digital dan Media Publikasi Informasi)
164	BPS Provinsi Maluku Utara	BUKU TAMU BPS PROVINSI MALUKU UTARA
165	BPS Provinsi Bengkulu	POTATO (Portal Statistik Sosial)
166	BPS PROVINSI BENGKULU	NEXUS (New Experience for Examining User Skills Susenas)
167	BPS Kabupaten Kendal	KenSae (Kendal Satu Data dari Desa)
168	BPS Kab. Padang Lawas Utara	Buku Tamu AI
169	BPS Kab. Padang Lawas Utara	SeeMitra
170	BPS Kab. Padang Lawas Utara	ScrapePodes

No	Nama Satker	Inovasi
(1)	(2)	(3)
171	BPS Kabupaten Pati	LISA (Layanan Informasi Statistik untuk Anda)
172	BPS Kabupaten Pati	SE No' Pati (Seputar Layanan dan Informasi Kegiatan SE di Kabupaten Pati)
173	BPS KABUPATEN BULELENG	BIMA SAKTI (Pembinaan Maraton Masyarakat Statistik)
174	BPS KABUPATEN BANGLI	Website PST Online BPS Kabupaten Bangli
175	BPS KABUPATEN BULELENG	Kata BPS
176	BPS Kabupaten Raja Ampat	WhatsApp Bot BPS Raja Ampat
177	BPS Kabupaten Langkat	Sistem Informasi Digital Tamu Statistik (Si Datuk)
178	BPS Kabupaten Majene	Mandarita (Monitoring dan Analisis Data Indikator Statistik Pertanian)
179	BPS Kabupaten Majene	Dashboard Data Harga
180	BPS Kabupaten Majene	Sistem Analisis Isu Daerah (SAID)
181	BPS Kabupaten Ngada	Aplikasi Chatbot WA Pelayanan PST BPS Ngada
182	BPS Kabupaten Wonosobo	SADDEWO - Satu Data Desa Wonosobo
183	BPS Kabupaten Ngada	Aplikasi Mylink BPS Ngada (Link Tree)
184	BPS Provinsi Jawa Timur	Kahuripan (Ketahui Penerima Bantuan)
185	BPS Kota Pangkal Pinang	Komunitas Statistik
186	BPS Kabupaten Demak	DINAMIT — Digitalisasi/Demak Administrasi Mitra Terpadu
187	BPS Kabupaten Demak	MANGGA MUDA (MANAJEMEN MAGANG TERINTREGASI DAN MUDAH)
188	BPS Kepulauan Sangihe	Digitalisasi Pemutakhiran Data Desa Cantik
189	BPS Kepulauan Talaud	SISTEM ADMINISTASI DAN SINKRONISASI INFORMASI BPS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
190	BPS Kepulauan Talaud	SISTEM MONITORING PENCAIRAN KEGIATAN SURVEI DAN PENJADWALAN PENGAWASAN PEGAWAI
191	BPS Kabupaten Karangasem	PILAR (Pembinaan Statlстик Sektoral Kabupaten Karangasem)
192	BPS Kabupaten Sabu Raijua	Pasti Sarai
193	BPS Kabupaten Jepara	Sistem Antrian Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
194	BPS Kabupaten Jepara	RATU SHIMA - Jepara Bermutu Sejahtera Melalui Data
195	BPS Kabupaten Jepara	Layanan SATSET - Layanan Statistik Cepat Tanggap
196	BPS Kabupaten Jepara	SEMEDI – Sistem Evaluasi Mandiri Data Statistik
197	BPS Kabupaten Konawe Utara	SiPINTAR (Sistem Imputasi dan Konversi Konawe Utara)
198	BPS Kabupaten Tabanan	CAMELIA (Catatan Pemeriksaan data Inflasi dan Fenomena)
199	BPS Kabupaten Madiun	PESAT EKONOMI
200	BPS Provinsi Kepulauan Riau	1.ES KIAMBOY (Easy Shortlink for Key Integration, Accessible, Manageable, and Built for Optimal Security);

LAMPIRAN

No	Nama Satker	Inovasi
(1)	(2)	(3)
		2. FAKTA (Fenomena Aktual Terkini); 3. GURINDAM
201	BPS Kota Pekalongan	BISTIK KALDU (Portal Pembinaan Statistik Sektoral Terpadu)
202	BPS Kabupaten Kolaka Utara	Aplikasi KALOSARA (Kolaborasi bersama Organisasi Perangkat Daerah menuju Satu Data Kolaka Utara)
203	BPS Provinsi Kepulauan Riau	1. GEULIS (Google Maps Enterprise Scraper for Prelist); 2. KASEP (Key Automated Scraper for Economic Profiling); 3. SEHATI; 4. KECE (Kepri Catat Ekonomi); 5. MENCARI (Manajemen CAWI/CAPI BPS Provinsi Kepulauan Riau); 6. TANJAK (Teknologi Awasi SAKERNAS Jaga Akurasi dan Kualitas).
204	BPS Kabupaten Tabanan	PETASAN (Pelaporan Wilkerstat se-Kabupaten Tabanan)
205	BPS Kabupaten Kolaka Utara	Website SIPEKA atau Sistem Integrasi Pelayanan BPS Kolaka Utara
206	BPS Minahasa	Podcast Ngopi
207	BPS Kabupaten Lembata	Sistem Informasi Geografis dan Interaktif Desa (SIGADIS)
208	BPS Kabupaten Gorontalo	Huyula (Hub Updating and Syncing Daftar Usaha Berkala)
209	BPS Kota Denpasar	KOMANK Chatbot
210	BPS Provinsi Kalimantan Timur	SiPPEtir
211	BPS Kota Denpasar	U2S
212	BPS Kabupaten Buton Selatan	Digitalisasi Sistem Antrian PST
213	BPS Kota Denpasar	Scraping & Peta Alokasi Petugas Wilkerstat SE2026
214	BPS Kabupaten Buton Selatan	Digitalisasi Layanan Antrian PST
215	BPS Bolaang Mongondow Utara	Sistem Monitoring Pengelolaan Dokumen Administrasi BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (SIMETRI)
216	BPS Bolaang Mongondow Utara	Dashboard Indikator Strategis Daerah (SIDARA)
217	BPS Kota Denpasar	Form Pendataan Usaha Desa Sanur Kaja
218	BPS Bolaang Mongondow Utara	SIDIA
219	BPS Kota Denpasar	Aplikasi Administrasi Petugas Wilkerstat SE2026
220	BPS Provinsi Kalimantan Timur	SIMONRB (Sistem Informasi Monitoring Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi)
221	BPS Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Sistem Informasi Reformasi Birokrasi (REBO) berbasis Website
222	BPS Kota Denpasar	Form Uji Petik Wilkerstat SE2026
223	BPS Kabupaten Tegal	1. Wasgitel 2. Kupat Glabet 3. Bala SE2026

No	Nama Satker	Inovasi
(1)	(2)	(3)
		4. KonteSE2026 5. Garis SE2026
224	BPS Kota Denpasar	Form Alat Bantu Rekap SLS (Dokumen Wilkerstat RS)
225	BPS Kota Denpasar	Landing Page Download BAST Wilkerstat SE2026
226	BPS Kota Manado	SALMON (Sistem Layanan Statistik Online Manado)
227	BPS Provinsi Kalimantan Timur	Dashboard Pra Rekonda IKK
228	BPS Kabupaten Tegal	Kamar Data
229	BPS Kabupaten Gunungkidul	ANGKRINGAN (Antrian Nyaman, Gampang, Rapi, Informatif, dan Gak Nunggu Lama
230	BPS Kabupaten Yahukimo	LiRIK Yahukimo (Laman Informasi Desa & Distrik Kabupaten Yahukimo)
231	BPS Kabupaten Tegal	Cek In
232	BPS Kabupaten Gunungkidul	Pandu (Petugas Administrasi dan Pelayanan terpadu)
233	BPS Kabupaten Gianyar	Layanan WA PST
234	BPS Kabupaten Bulungan	SEMAKIN (Sistem Evaluasi dan Monitoring Kinerja)
235	BPS Kabupaten Gianyar	Kolaborasi BPS dan Pemda dalam Pemutakhiran DTSEN
236	BPS Kota Kendari	SIKENARI-Sistem Kelola
237	BPS Kabupaten Barito Kuala	Layanan Tanya Data Barito Kuala (Tanyala) yang diimplementasikan menggunakan NodeJS dan Implementasi AI
238	BPS Kota Kendari	SATU-LAYANAN (Sistem Asistensi Pemantauan Pemenuhan Indeks Pelayanan Publik)
239	BPS Kota Kendari	WANITA CANTIK (WhatsApp Asistensi Interaktif dan Chat Layanan Statistik)
240	BPS Kota Kendari	SIMANTRA (Sistem Manajemen Antrian Pengunjung Layanan)
241	BPS Kabupaten Wajo	SUTERA
242	BPS Kota Kendari	Matriks Revisi Anggaran dan Rencana Penarikan Dana (MIRANDA)
243	BPS Kabupaten Tegal	DeltaStat
244	BPS Kabupaten Tegal	Mapel (Platform pembelajaran mandiri untuk petugas dan mengelola materi pelatihan agar lebih mudah interaktif)
245	BPS Kota Kendari	INTEGRITAS-KDI (Inisiatif Edukasi Grafifikasi dan Penguatan Integritas BPS Kendari)
246	BPS Provinsi Papua Barat	TARINGMU (TONG SHARING ILMU)
247	BPS Kabupaten Tanggamus	SiDuta
248	BPS Kabupaten Kolaka	Indeks Kualitas
249	BPS Kabupaten Kolaka Timur	VIVA LA VIDA
250	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Sigap Antar Bola
251	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Halo Stat
252	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Sandaran Hati

LAMPIRAN

Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja BPS TA 2025

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Sasaran Strategis	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	1.838.315.695.000	1.331.066.759.669	72,41			110,65	
ISS	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (%)				65,00	71,92	110,65	
Program	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.838.315.695.000	1.331.066.759.669	72,41				
Sasaran Program	Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Sosial yang Berkualitas	549.525.746.000	472.750.951.502	86,03			116,50	
IKP	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sosial				81,31	94,73	116,50	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	220.458.280.000	183.114.727.051	83,06	2.218,00	2.218,00		
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	220.458.280.000	183.114.727.051	83,06			100,00	
IKK	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas				100,00	100,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Sakernas	114.180.108.000	89.911.803.688	78,75	2.207,00	2.207,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan	7.371.119.000	2.619.653.244	35,54	11,00	11,00	100,00	

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
RO	Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus	98.907.053.000	90.583.270.119	91,58	560,00	560,00	100,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	271.649.508.000	249.130.851.427	91,71				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	271.649.508.000	249.130.851.427	91,71			100,00	
IKK	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas				100,00	100,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	1.903.664.000	581.902.111	30,57	528,00	522,00	98,86	
RO	Publikasi/Laporan Susenas	269.745.844.000	248.548.949.316	92,14	3.321,00	3.321,00	100,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	57.417.958.000	40.505.373.024	70,54				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	57.417.958.000	40.505.373.024	70,54			100,00	
IKK	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas				100,00	100,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	10.705.004.000	3.113.022.438	29,08	1.409,00	1.409,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Pendataan Podes	46.712.954.000	37.392.350.586	80,05	553,00	553,00	100,00	
Sasaran Program	Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Produksi yang Berkualitas	219.970.627.000	190.670.649.655	86,68			106,69	
IKP	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Produksi				83,95	89,57	106,69	

LAMPIRAN

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	143.285.693.000	125.680.896.290	87,71				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	143.285.693.000	125.680.896.290	87,71			100,00	
IKK	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas				100,00	100,00	100,00	
RO	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan	128.655.004.000	118.430.471.306	92,05	1.089,00	1.089,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan	14.630.689.000	7.250.424.984	49,56	1.302,00	1.302,00	100,00	
Kegiatan	Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan	24.729.223.000	20.703.781.900	83,72				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya ketersediaan Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas	24.729.223.000	20.703.781.900	83,72			100,00	
IKK	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas				100,00	100,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan Yang Terbit Tepat Waktu	24.729.223.000	20.703.781.900	83,72	1.147,00	1.147,00	100,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	51.955.711.000	44.285.971.465	85,24				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Industri yang Berkualitas	51.955.711.000	44.285.971.465	85,24			100,00	

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
IKK	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas				100,00	100,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian, Energi, Dan Konstruksi	51.955.711.000	44.285.971.465	85,24	3.443,00	3.443,00	100,00	
Sasaran Program	Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas	970.517.847.000	612.705.462.997	63,13			96,80	
IKP	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa				95,00	91,96	96,80	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	805.369.728.000	478.557.892.603	59,42				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	805.369.728.000	478.557.892.603	59,42			100,00	
IKK	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas				100,00	100,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	12.844.701.000	6.270.726.737	48,82	2.193,00	2.193,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi	686.563.491.000	472.287.165.866	68,79	1.715,00	1.715,00	100,00	
RO	Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	105.961.536.000	-	-	6,00	0,00	0,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	88.536.724.000	76.148.232.443	86,01				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	88.536.724.000	76.148.232.443	86,01			100,00	
IKK	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas				100,00	100,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Statistik Harga	57.518.580.000	53.048.313.593	92,23	2.565,00	2.565,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi	31.018.144.000	23.099.918.850	74,47	193,00	193,00	100,00	PN 07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat

LAMPIRAN

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
								Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	76.611.395.000	57.999.337.951	75,71				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	76.611.395.000	57.999.337.951	75,71			100,00	
IKK	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas				100,00	100,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata	64.735.244.000	49.693.722.806	76,76	2.171,00	2.171,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce	11.876.151.000	8.305.615.145	69,94	553,00	545,00	98,55	
Sasaran Program	Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	98.301.475.000	54.939.695.515	55,89			120,00	
IKP	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Lintas Sektor				78,60	96,30	120,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	34.149.389.000	11.194.294.864	32,78				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	34.149.389.000	11.194.294.864	32,78			100,00	
IKK	Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas				100,00	100,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Neraca Produksi	33.645.234.000	11.170.277.126	33,20	3.103,00	3.103,00	100,00	
RO	Publikasi/ Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	504.155.000	24.017.738	4,76	1,00	1,00	100,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	20.444.743.000	11.979.419.690	58,59				

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	20.444.743.000	11.979.419.690	58,59			100,00	
IKK	Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas				100,00	100,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran	20.444.743.000	11.979.419.690	58,59	3.738,00	3.738,00	100,00	
Kegiatan	Pengembangan dan Analisis Statistik	6.764.099.000	768.558.190	11,36				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	6.764.099.000	768.558.190	11,36			100,00	
IKK	Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas				100,00	100,00	100,00	
RO	Publikasi/Laporan Analisis Dan Pengembangan Statistik	5.663.951.000	750.260.291	13,25	562,00	562,00	100,00	
RO	Publikasi/ Laporan Indeks Pembangunan Manusia	1.100.148.000	18.297.899	1,66	1,00	1,00	100,00	
Kegiatan	Pengembangan dan Analisis Statistik	36.943.244.000	30.997.422.771	83,91				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pemanfaatan Big Data yang Relevan dalam Proses Bisnis Statistik	36.943.244.000	30.997.422.771	83,91			100,00	
IKK	Persentase Kegiatan Statistik yang Memanfaatkan Big Data untuk Statistik Resmi				42,86	42,86	100,00	
RO	Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi	36.943.244.000	30.997.422.771	83,91	14,00	14,00	100,00	PN 07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan PN 03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan

LAMPIRAN

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
							Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
Sasaran Strategis	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu	474.454.963.000	423.256.232.351	89,21			100,00
ISS	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)				2,35	2,35	100,00
Program	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.051.420.000	57.368.902	5,46			
Sasaran Program	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas	1.051.420.000	57.368.902	5,46			100,00
IKP	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				18,13	18,13	100,00
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	359.760.000	1.360.000	0,38			
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	359.760.000	1.360.000	0,38			113,89
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan				80,62	91,82	113,89
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Kependudukan dan Ketenagakerjaan	359.760.000	1.360.000	0,38	6,00	6,00	100,00
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	317.548.000	24.618.902	7,75			

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	317.548.000	24.618.902	7,75			116,55	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat				76,33	88,96	116,55	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Kesejahteraan Rakyat	317.548.000	24.618.902	7,75	7,00	7,00	100,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	374.112.000	31.390.000	8,39				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	374.112.000	31.390.000	8,39			120,00	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial				64,39	85,72	120,00	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Ketahanan Sosial	374.112.000	31.390.000	8,39	6,00	6,00	100,00	
Program	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.008.176.000	74.261.790	7,37				
Sasaran Program	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi yang Berkualitas	1.008.176.000	74.261.790	7,37			100,00	
IKP	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Produksi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				16,32	16,32	100,00	

LAMPIRAN

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	315.172.000	26.825.590	8,51				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	315.172.000	26.825.590	8,51			114,28	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				75,00	85,71	114,28	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	315.172.000	26.825.590	8,51	7,00	7,00	100,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	359.760.000	4.590.000	1,28				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	359.760.000	4.590.000	1,28			120,00	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan				75,80	92,33	120,00	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	359.760.000	4.590.000	1,28	6,00	6,00	100,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	333.244.000	42.846.200	12,86				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Industri	333.244.000	42.846.200	12,86			119,50	

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Industri				75,19	89,85	119,50	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Industri	333.244.000	42.846.200	12,86	6,00	6,00	100,00	
Program	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	899.400.000	68.430.000	7,61				
Sasaran Program	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas	899.400.000	68.430.000	7,61			100,00	
IKP	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				25,27	25,27	100,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	299.800.000	25.450.000	8,49				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Distribusi	299.800.000	25.450.000	8,49			114,32	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Distribusi				78,21	89,41	114,32	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Distribusi	299.800.000	25.450.000	8,49	6,00	6,00	100,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	299.800.000	32.870.000	10,96				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Harga	299.800.000	32.870.000	10,96			108,73	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Harga				82,45	89,65	108,73	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Harga	299.800.000	32.870.000	10,96	6,00	6,00	100,00	

LAMPIRAN

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	299.800.000	10.110.000	3,37				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	299.800.000	10.110.000	3,37			116,06	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata				74,41	86,36	116,06	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	299.800.000	10.110.000	3,37	6,00	6,00	100,00	
Program	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	957.352.000	81.359.180	8,50				
Sasaran Program	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas	957.352.000	81.359.180	8,50			100,00	
IKP	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				19,84	19,84	100,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	297.792.000	14.830.800	4,98				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Produksi	297.792.000	14.830.800	4,98			120,00	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Produksi				70,51	85,71	120,00	

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Neraca Produksi	297.792.000	14.830.800	4,98	5,00	5,00	100,00	
Kegiatan	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	359.760.000	39.323.180	10,93				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Neraca Pengeluaran	359.760.000	39.323.180	10,93			112,20	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Neraca Pengeluaran				75,85	85,10	112,20	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Neraca Pengeluaran	359.760.000	39.323.180	10,93	6,00	6,00	100,00	
Kegiatan	Pengembangan dan Analisis Statistik	299.800.000	27.205.200	9,07				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	299.800.000	27.205.200	9,07			120,00	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik				64,47	81,51	120,00	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Analisis dan Pengembangan Statistik	299.800.000	27.205.200	9,07	6,00	6,00	100,00	
Program	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	14.102.354.000	7.890.379.460	55,95				
Sasaran Program	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang Berkualitas	14.102.354.000	7.890.379.460	55,95			100,00	
IKP	Kementerian/Lembaga/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				43,60	43,60	100,00	

LAMPIRAN

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Kegiatan	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	14.102.354.000	7.890.379.460	55,95				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	14.102.354.000	7.890.379.460	55,95			103,80	
IKK	Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Sesuai Standar				95,70	99,34	103,80	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral	14.102.354.000	7.890.379.460	55,95	547,00	547,00	100,00	PN 07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
Kegiatan	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	-	-	-				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	-	-	-			109,44	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei				74,17	81,17	109,44	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Kegiatan	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	-	-	-				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Sistem Informasi Statistik	-	-	-			102,09	
IKK	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Sistem Informasi Statistik				59,26	60,50	102,09	

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
RO	Pembinaan Statistik Sektoral Sistem Informasi Statistik	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Program	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.050.738.000	195.034.125	18,56				
Sasaran Program	Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik	1.050.738.000	195.034.125	18,56			105,00	
IKP	Tingkat Literasi Pengguna Data BPS				61,00	64,05	105,00	
Kegiatan	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	1.050.738.000	195.034.125	18,56				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima	1.050.738.000	195.034.125	18,56			105,77	
IKK	Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik				60,00	63,46	105,77	
RO	Layanan Edukasi Dan Promosi Statistik	1.050.738.000	195.034.125	18,56	39,00	39,00	100,00	
Program	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	455.385.523.000	414.889.398.894	91,11				
Sasaran Program	Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	455.385.523.000	414.889.398.894	91,11			102,59	
IKP	Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik				92,00	94,38	102,59	
Kegiatan	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	148.687.467.000	130.363.776.714	87,68				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	148.687.467.000	130.363.776.714	87,68			105,43	
IKK	Indeks Pelayanan Publik-Penilaian Mandiri				4,60	4,85	105,43	
RO	Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik	148.687.467.000	130.363.776.714	87,68	1.694,00	1.694,00	100,00	

LAMPIRAN

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Kegiatan	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	6.071.071.000	1.043.319.070	17,19				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Standardisasi Metodologi Kegiatan Statistik	6.071.071.000	1.043.319.070	17,19			105,90	
IKK	Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan				100,00	105,90	105,90	
RO	Dokumen/Laporan Pengembangan Metodologi Kegiatan Statistik	6.071.071.000	1.043.319.070	17,19	1.122,00	1.122,00	100,00	
Kegiatan	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	1.894.574.000	229.113.346	12,09				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Sistem Infrastruktur Statistik Nasional	1.894.574.000	229.113.346	12,09			100,00	
IKK	Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)				100,00	100,00	100,00	
RO	Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)	1.894.574.000	229.113.346	12,09	1,00	1,00	100,00	
Kegiatan	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	298.732.411.000	283.253.189.764	94,82				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Prima	298.732.411.000	283.253.189.764	94,82			100,05	
IKK	Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi				80,00	80,04	100,05	
RO	Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	298.732.411.000	283.253.189.764	94,82	711,00	707,00		
Sasaran Strategis	Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional	3.506.212.841.000	3.352.698.695.593	95,62			107,41	
ISS	Indeks Reformasi Birokrasi	3.506.212.841.000	3.352.698.695.593	95,62	85,01	91,31	107,41	
Program	Program Dukungan Manajemen	17.799.398.000	14.163.504.825	79,57				

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Sasaran Program	Terwujudnya Kelembagaan yang Responsif, Adaptif, dan Kolaboratif melalui Transformasi Lembaga	17.799.398.000	14.163.504.825	79,57			100,00	
IKP	Skor Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan				67,86	67,86	100,00	
Kegiatan	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	2.671.152.000	1.705.152.419	63,84				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Berdampak	2.671.152.000	1.705.152.419	63,84			100,00	
IKK	Persentase Dokumen/Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Statistik yang Tepat Waktu				100,00	100,00	100,00	
RO	Layanan Reformasi Kinerja	2.671.152.000	1.705.152.419	63,84	1,00	1,00	100,00	
Kegiatan	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	12.222.074.000	9.970.834.532	81,58				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Organisasi yang Efektif dan Efisien	12.222.074.000	9.970.834.532	81,58			100,00	
IKK	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi				4,00	4,00	100,00	
RO	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	12.222.074.000	9.970.834.532	81,58	1,00	1,00	100,00	
Kegiatan	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	2.233.698.000	1.849.796.358	82,81				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Hubungan Kelembagaan di Level Nasional dan Internasional	2.233.698.000	1.849.796.358	82,81			0,00	
IKK	Predikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik				Informatif	Informatif	0,00	
RO	Layanan Sosialisasi	451.698.000	414.665.185	91,80	18,00	18,00	100,00	

LAMPIRAN

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
RO	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.573.258.000	1.298.447.055	82,53	9,00	9,00	100,00	
RO	Layanan Protokoler	208.742.000	136.684.118	65,48	1,00	1,00	100,00	
Kegiatan	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	672.474.000	637.721.516	94,83				
Sasaran Kegiatan	Penguatan Produk Hukum dan Regulasi serta Implementasinya	672.474.000	637.721.516	94,83			0,00	
IKK	Indeks Reformasi Hukum				98,10	99,00	0,00	
IKK	Indeks Kualitas Kebijakan				72,00	87,40	0,00	
RO	Layanan Hukum	350.969.000	330.854.874	94,27	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Bantuan Hukum	321.505.000	306.866.642	95,45	35,00	35,00	100,00	
Program	Program Dukungan Manajemen	3.464.141.008.000	3.316.988.253.598	95,75				
Sasaran Program	Terwujudnya "Belanja Berkualitas" melalui Penguatan Manajemen Risiko	3.464.141.008.000	3.316.988.253.598	95,75			99,44	
IKP	Nilai SAKIP BPS				79,01	78,57	99,44	
IKP	Kategori Nilai Kinerja Anggaran (NKA)				Sangat Baik	Sangat Baik	100,00	
IKP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPS				WTP	WTP	100,00	
Kegiatan	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	1.579.641.000	1.392.438.589	88,15				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Penganggaran Didukung oleh Penguatan Manajemen Risiko	1.579.641.000	1.392.438.589	88,15			100,00	
IKK	Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) BPS				Sangat Baik	Sangat Baik	100,00	
IKK	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				3,70	3,70	99,92	

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
IKK	Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada NKA				Sangat Baik	Sangat Baik	100,00	
RO	Layanan Penyusunan LAKIN Satker Eselon I	145.246.000	129.983.595	89,49	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.369.905.000	1.201.361.342	87,70	12,00	12,00	100,00	
RO	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	64.490.000	61.093.652	94,73	1,00	1,00	100,00	
Kegiatan	Dukungan Manajemen BPS Lainnya	138.015.864.000	118.967.332.181	86,20				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan BMN	138.015.864.000	118.967.332.181	86,20			100,55	
IKK	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)				3,66	3,68	100,55	
IKK	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)				89,60	90,07	100,52	
IKK	Tingkat Digitalisasi Arsip				95,00	96,61	101,69	
IKK	Tingkat Kepuasan Layanan Biro Umum				88,00	87,95	99,94	
RO	Layanan BMN	137.300.000	105.026.639	76,49	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Umum	1.941.410.000	1.742.221.562	89,74	3,00	3,00	100,00	
RO	Layanan Perkantoran	132.357.444.000	114.570.627.277	86,56	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Sarana Internal	2.842.613.000	2.057.427.358	72,38	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Prasarana Internal	737.097.000	492.029.345	66,75	1,00	1,00	100,00	
Kegiatan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	2.889.044.614.000	2.837.676.090.745	98,22				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota yang Efektif dan Efisien	2.889.044.614.000	2.837.676.090.745	98,22				
IKK	Nilai SAKIP oleh Inspektorat				73,25	73,30	100,07	
IKK	Indeks Implementasi BerAKHLAK				66,10	73,51	111,21	
RO	Layanan BMN	817.349.000	729.048.875	89,20	480,00	480,00	100,00	

LAMPIRAN

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
RO	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.118.414.000	1.081.199.123	96,67	34,00	34,00	100,00	
RO	Layanan Umum	3.292.568.000	3.008.633.121	91,38	509,00	509,00	100,00	
RO	Layanan Perkantoran	2.800.486.184.000	2.752.876.779.246	98,30	901,00	901,00	100,00	
RO	Layanan Sarana Internal	67.075.850.000	64.509.573.285	96,17	1.106,00	1.106,00	100,00	
RO	Layanan Prasarana Internal	9.115.340.000	8.692.939.882	95,37	18,00	18,00	100,00	
RO	Layanan Manajemen SDM	214.513.000	201.307.330	93,84	14.477,00	14.477,00	100,00	
RO	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	440.707.000	423.157.502	96,02	34,00	34,00	100,00	
RO	Layanan Manajemen Keuangan	5.267.903.000	5.024.902.491	95,39	1.519,00	1.519,00	100,00	
RO	Layanan Reformasi Kinerja	1.215.786.000	1.128.549.890	92,82	34,00	34,00	100,00	
Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	356.331.705.000	282.013.778.690	79,14				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	356.331.705.000	282.013.778.690	79,14			103,48	
IKK	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)				94,50	97,79	103,48	
IKK	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah				100,00	100,00	100,00	
RO	Layanan Perkantoran	351.298.096.000	277.275.416.793	78,93	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Manajemen Keuangan	5.033.609.000	4.738.361.897	94,13	34,00	34,00	100,00	
Kegiatan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	47.935.594.000	47.114.821.435	98,29				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Manajemen pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS yang Efektif dan Efisien	47.935.594.000	47.114.821.435	98,29			100,07	
IKK	Nilai SAKIP oleh Inspektorat				75,95	76,00	100,07	
IKK	Indeks Implementasi BerAKHLAK				61,90	71,90	116,16	

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
RO	Layanan BMN	10.320.000	10.320.000	100,00	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Umum	392.800.000	376.896.365	95,95	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Perkantoran	22.039.535.000	21.812.396.290	98,97	2,00	2,00	100,00	
RO	Layanan Sarana Internal	2.020.562.000	2.019.234.886	99,93	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Manajemen SDM	23.358.367.000	22.803.391.674	97,62	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	110.410.000	88.982.220	80,59	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Manajemen Keuangan	3.600.000	3.600.000	100,00	1,00	1,00	100,00	
Kegiatan	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	31.233.590.000	29.823.791.958	95,49				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan Tinggi Vokasi Secara Efektif dan Efisien	31.233.590.000	29.823.791.958	95,49			98,53	
IKK	Nilai SAKIP oleh Inspektorat				75,00	73,90	98,53	
IKK	Indeks Implementasi BerAKHLAK				62,00	58,60	94,52	
RO	Layanan BMN	2.560.000	2.160.000	84,38	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Umum	50.940.000	45.402.240	89,13	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Perkantoran	30.181.951.000	28.811.194.257	95,46	2,00	2,00	100,00	
RO	Layanan Sarana Internal	887.655.000	885.037.039	99,71	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Manajemen SDM	78.700.000	59.924.512	76,14	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.184.000	15.823.310	60,43	1,00	1,00	100,00	
RO	Layanan Manajemen Keuangan	5.600.000	4.250.600	75,90	1,00	1,00	100,00	
Program	Program Dukungan Manajemen	22.352.700.000	19.667.695.014	87,99				
Sasaran Program	Terwujudnya Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM yang Berkarakter	22.352.700.000	19.667.695.014	87,99			103,87	
IKP	Tingkat Kesejahteraan Pegawai BPS				70,00	72,71	103,87	

LAMPIRAN

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	1.253.882.000	1.135.498.335	90,56				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Aparatur yang BerAKHLAK	1.253.882.000	1.135.498.335	90,56			100,72	
IKK	Skor Komposit Pengelolaan SDM				82,00	82,59	100,72	
RO	Layanan Manajemen SDM	1.253.882.000	1.135.498.335	90,56	4,00	4,00	100,00	
Kegiatan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	7.748.726.000	7.619.527.980	98,33				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan, dan Inovasi Pembelajaran	7.748.726.000	7.619.527.980	98,33			192,43	
IKK	Persentase Pegawai BPS yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi				47,56	91,52	192,43	
IKK	Tingkat Kualitas Pendidikan dan Pelatihan				72,54	82,91	114,30	
IKK	Tingkat Kepuasan Peserta Diklat				85,00	92,86	109,25	
RO	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	7.218.154.000	7.091.058.681	98,24	419,00	419,00	100,00	
RO	Diklat Teknis Substansi	207.492.000	206.669.000	99,60	105,00	105,00	100,00	
RO	Diklat Fungsional	188.950.000	188.292.876	99,65	160,00	160,00	100,00	
RO	Standardisasi dan Sertifikasi	134.130.000	133.507.423	99,54	105,00	105,00	100,00	
Kegiatan	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	13.350.092.000	10.912.668.699	81,74				
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Perguruan Tinggi Vokasi Berkualitas dan Unggul di Bidang Statistik Resmi Negara	13.350.092.000	10.912.668.699	81,74			119,61	
IKK	Persentase Dosen yang Keluaran Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakatnya Mendapat Rekognisi				51,00	61,00	119,61	

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Nasional/Internasional atau Digunakan oleh Masyarakat/Pemerintah							
IKK	Indeks Kepuasan Pengguna Lulusan Politeknik Statistika STIS			4,50	4,51	100,22	
IKK	Persentase Mahasiswa yang Mendapatkan Penghargaan dalam Kompetisi Akademik dan/atau Nonakademik Minimal Tingkat Nasional			1,00	1,05	105,00	
RO	Layanan Pendidikan Kedinasan	8.040.867.000	6.405.223.258	79,66	2,00	2,00	100,00
RO	Program DIII	1.086.734.000	680.819.800	62,65	288,00	288,00	100,00
RO	Program DIV	4.222.491.000	3.826.625.641	90,62	1.378,00	1.378,00	100,00
Program	Program Dukungan Manajemen	1.919.735.000	1.879.242.156	97,89			
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang Baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas	1.919.735.000	1.879.242.156	97,89			100,87
IKP	Nilai Pengawasan Internal			72,18	72,81	100,87	
Kegiatan	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	590.904.000	590.259.935	99,89			
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	590.904.000	590.259.935	99,89			101,96
IKK	Nilai Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga			74,91	76,38	101,96	
RO	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I	590.904.000	590.259.935	99,89	32,00	32,00	100,00
Kegiatan	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	607.159.000	601.341.809	99,04			

LAMPIRAN

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja			Keterkaitan terhadap Prioritas Nasional
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	607.159.000	601.341.809	99,04			101,93	
IKK	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara				71,58	72,96	101,93	
RO	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II	607.159.000	601.341.809	99,04	34,00	34,00	100,00	
Kegiatan	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	721.672.000	687.640.412	95,28				
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	721.672.000	687.640.412	95,28			98,60	
IKK	Nilai Pengawasan Bidang Khusus				70,07	69,09	98,60	
RO	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III	721.672.000	687.640.412	95,28	38,00	38,00	100,00	
Total		5.818.983.499.000	5.107.021.687.613	87,76				



BerAKHLAK
Berprestasi Melayani Akuntabel Kompeten
Hambatan Lupa AKAPK Kolaborasi

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id